KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813 6001 3838
WEBSITE: http://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/1/15/DJKA/2026

Jakarta, 30 April 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026

Yth. Menteri Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa diperlukan monitoring capaian kinerja secara berkala/triwulan terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, masing-masing unit kerja memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk pelaporan kinerja berkala secara berjenjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dilaporkan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan rata-rata capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 96,423% mencakup 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,457	99,348
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	94,750	95,862	101,174
		IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,529	99,754

IKP4 Persentase...

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	22,827	24,112	105,629
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,625	99,625
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,018	15,345	73,009
Rata-rata Capaian Kinerja						**96,423**

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebesar Rp298.466.126.565,00 atau 6,21% dari pagu efektif sebesar Rp4.807.784.667.000,00 dan akan dilakukan upaya percepatan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp241.775.985.162,00 atau 18,07% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Selanjutnya dalam rangka pelaporan kinerja dan upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 dilengkapi ringkasan eksekutif. Mohon perkenan arahan lanjut Bapak Menteri.

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan monitoring kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. ***Rata-rata capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebesar 96,423%*** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,457	99,348
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	94,750	95,862	101,174
		IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,529	99,754
		IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	22,827	24,112	105,629
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,625	99,625
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,018	15,345	73,009
Rata-rata Capaian Kinerja						**96,423**

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebesar Rp298.466.126.565,00 atau 6,21% dari pagu efektif sebesar Rp4.807.784.667.000,00. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama Tahun 2025 yaitu sebesar 2,86%. Terkait PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp241.775.985.162,- atau 18,07% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional. Realisasi PNBP tersebut masih di bawah rata-rata perolehan PNBP tingkat Kementerian Perhubungan yakni sebesar 29,61%.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya serta memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DJKA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



TRIWULAN I

2026

ditjenperkeretaapian djka.kemenhub.go.id @perkeretaapian

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan pembangunan perkeretaapian sesuai amanah RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan. Capaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan kinerja dalam rangka pertangungjawaban serta penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan pemantauan kinerja dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta disusun rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja serta upaya pencapaian kinerja periode Triwulan I Tahun 2026. Laporan monitoring kinerja ini selanjutnya dapat digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, April 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan monitoring kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. ***Rata-rata capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebesar 96,423%*** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,457	99,348
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	94,750	95,862	101,174
		IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,529	99,754
		IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	22,827	24,112	105,629
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,625	99,625
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,018	15,345	73,009
Rata-rata Capaian Kinerja						**96,423**

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebesar Rp298.466.126.565,00 atau 6,21% dari pagu efektif sebesar Rp4.807.784.667.000,00. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama Tahun 2025 yaitu sebesar 2,86%. Terkait PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp241.775.985.162,- atau 18,07% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional. Realisasi PNBP tersebut masih di bawah rata-rata perolehan PNBP tingkat Kementerian Perhubungan yakni sebesar 29,61%.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya serta memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA 1-6
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1-7
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN 1-11

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **2-1**
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2-4
2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-4
2.2.2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-16
2.2.3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-45
2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2-55
2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029 2-74
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA 2-83
2.5 REALISASI ANGGARAN 2-92
2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA 2-92
2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA 2-96
2.6 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 2-97
2.6.1 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA 2-97
2.6.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN 2-99

BAB 3 PENUTUP 3-1

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 3-1

3.2 KESIMPULAN 3-14

3.3 REKOMENDASI 3-15

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026	1-7
Tabel 1-2	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026	1-10
Tabel 1-3	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	1-11
Tabel 1-4	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	1-12
Tabel 2-1	Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2-2
Tabel 2-2	Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/KSN/Kawasan Strategis Lainnya/ Simpul Transportasi yang Terhubungan Jaringan Perkeretapaian Tahun 2026	2-5
Tabel 2-3	Target dan Realisasi Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Tahun 2026	2-8
Tabel 2- 4	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026	2-9
Tabel 2- 5	Nilai Rasio Konektivitas Transportasi	2-10
Tabel 2- 6	Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2026	2-14
Tabel 2-7	Kategori Kinerja Nilai IKM	2-17
Tabel 2- 8	Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d. Maret Tahun 2026	2-17
Tabel 2-9	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026	2-18
Tabel 2-10	Perbandingan Nilai IKM	2-19
Tabel 2-11	Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan I 2026	2-22
Tabel 2- 12	Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan I 2026	2-23
Tabel 2-13	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2026	2-24
Tabel 2-14	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026	2-25
Tabel 2- 15	Perbandingan On Time Performance Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara	2-26
Tabel 2-16	Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja On Time Performance (OTP) Periode Triwulan I 2026	2-31
Tabel 2- 17	Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja On Time Performance Periode Triwulan I 2026	2-31
Tabel 2-18	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026	2-37
Tabel 2-19	Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api	2-38

Tabel 2-20 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api 2-38
Tabel 2-21 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api periode Triwulan I 2026 2-44
Tabel 2- 22 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2026 2-46
Tabel 2- 23 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2026 2-46
Tabel 2- 24 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026 2-47
Tabel 2- 25 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian 2-48
Tabel 2- 26 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 2-53
Tabel 2- 27 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 2-53
Tabel 2-28 Uraian Target Indikator Kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2026 2-56
Tabel 2- 29 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 2-59
Tabel 2- 30 Pemantauan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I 2026 2-62
Tabel 2-31 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026 2-63
Tabel 2-32 Realisasi NKA Per-Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan I 2026 2-64
Tabel 2-33 Perolehan PNBP Per-Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan I 2026 2-64
Tabel 2-34 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026 2-71
Tabel 2- 35 Target Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 terkait Transportasi Perkeretaapian 2-75
Tabel 2- 36 Klasifikasi Track Quality Index (TQI) 2-81
Tabel 2-37 Proyek Strategis Nasional Status On Progress 2-86
Tabel 2- 38 Proyek Strategis Nasional Status Persiapan 2-87
Tabel 2- 39 Target Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2026 2-89
Tabel 2- 40 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2026 2-93
Tabel 2-41 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2026 2-93
Tabel 2-42 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025 2-95
Tabel 2-43 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 2-96
Tabel 2-44 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 2-100

Tabel 2-45 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Capaian Rincian Output Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 2-101
Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya 3-1
Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 3-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 1-5
Gambar 1- 2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja 1-6
Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026 2-9
Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026 2-19
Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026 2-26
Gambar 2-4 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026 2-37
Gambar 2-5 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2026 2-48
Gambar 2-6 Uraian Target Triwulan Indikator Kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2026 2-56
Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026 2-63
Gambar 2- 8 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Prioritas Nasional 3 2-75
Gambar 2- 9 Capaian RPJMN terkait Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan I 2026 2-76
Gambar 2- 10 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di Kota Metropolitan Berbasis Rel Periode Triwulan I 2026 2-78
Gambar 2- 11 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan I 2026 2-78
Gambar 2- 12 Capaian Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi Periode Triwulan I 2026 2-80
Gambar 2-13 Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik Periode Triwulan I Tahun 2026 2-81
Gambar 2- 14 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan I Tahun 2026 2-82
Gambar 2- 15 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Periode Triwulan I Tahun 2026 2-83
Gambar 2- 16 Proyek Strategis Nasional Bidang Perkeretaapian 2-84
Gambar 2-17 Peresmian Stasiun Jatake 2-91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Aksi

Lampiran 2. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Lampiran 3. Realisasi dan Analisa Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja Program

Lampiran 6. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Dokumen Pendukung Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka implementasi SAKIP tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan beberapa tahapan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah laporan monitoring kinerja setiap triwulan untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perjanjian kinerja. Laporan monitoring kinerja ini sangat diperlukan sebagai wadah untuk memastikan pencapaian target kinerja pada akhir periode serta selanjutnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan/tindakan yang diperlukan guna peningkatan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian kinerja secara periodik dari setiap indikator kinerja program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja memuat informasi dan evaluasi pencapaian kinerja dengan dilengkapi identifikasi kendala/permasalahan serta upaya–upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran program dalam kerangka pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan dengan maksud:

1. Menyediakan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja yang juga mencakup gambaran kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pendukung;
2. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja;
3. Menyusun rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada perencanaan/perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

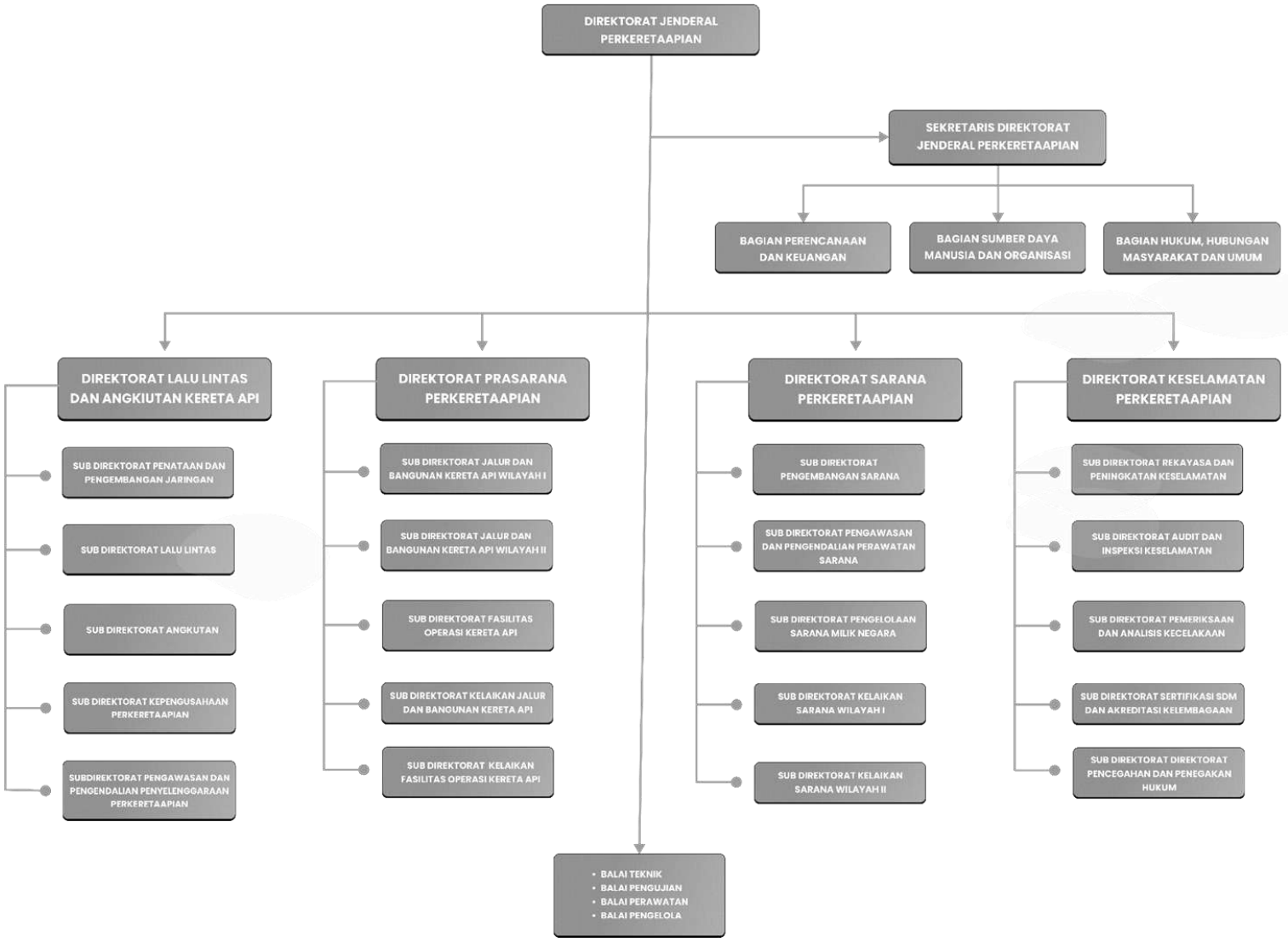
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II);
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Eselon II);
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Eselon II);
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian (Eselon II);
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II);
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III, dengan rincian :
    a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
    e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);

i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Untuk organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

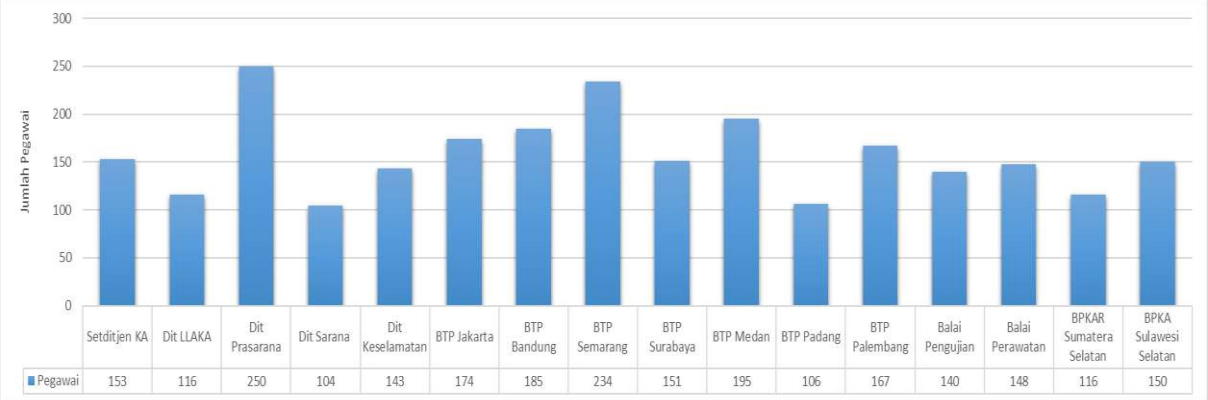
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 berjumlah 2.532 dengan rincian 766 pegawai penugasan di Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.766 pegawai penugasan tersebar di 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1- 2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui pelaksanaan Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian sasaran program, indikator kinerja program dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 termasuk uraian dukungan alokasi anggaran Tahun 2026.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Analisa indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diukur melalui keterhubungan infrastruktur perkeretaapian terhadap lokasi strategis dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur berupa jumlah perjalanan kereta api terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta yang berlaku	Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian. $\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$ ***Keterangan:*** Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas dan Fungsi termasuk *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS *Case Survey Management System* yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan, selaras Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>Salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang</td><td>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang pada periode tersebut
$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\textit{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\textit{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan RIPNAS 2030, mengacu kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan/ peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
<tr><td>Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api</td><td>Jumlah angkutan KA penumpang dan barang merupakan ukuran kemanfaatan prasarana dan sarana dimana dengan peningkatan angkutan KA dapat memberikan manfaat ekonomi, finansial, sosial, dan lainnya termasuk mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan serta pengurangan emisi.</td><td>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.
$\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$
Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai RPJMN/Rencana Strategis.</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan perkeretaapian berkorelasi dengan jumlah angkutan KA, dimana selaras dengan RIPNAS dan Renstra 2025-2029</td><td>Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
		$\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian. $\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$			
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian mengacu pada jumlah kejadian kecelakaan dengan perbandingan jumlah keberangkatan kereta api	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \text{ X } 1.000\right] \text{ X } 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian. $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBP bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Komponen selaras dengan indikator kinerja Kementerian Perhubungan/ Sekretariat Jenderal guna mengukur keberhasilan program Dukungan Manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
SP2 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	%	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750
	IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%
	IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	%	40,000	22,827	27,747	32,667	40,000
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	21,020	21,610	36,870	100,000

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dokumen DIPA Tahun 2026 sebesar Rp5.481.958.278.000,-, namun terdapat kebijakan efisiensi/blokir sehingga diperoleh alokasi anggaran efektif sebesar Rp4.163.784.421.000,- dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Blokir/Efisiensi (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif (Rp)
1	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**4.679.552.964.000**	**1.162.279.595.000**	**3.517.273.369.000**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	433.076.452.000	55.138.643.000	377.937.809.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1.343.052.057.000	763.661.974.000	579.390.083.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.869.738.007.000	343.236.586.000	2.526.501.421.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	33.686.448.000	242.392.000	33.444.056.000
2	**Program Dukungan Manajemen**	**802.405.314.000**	**155.894.262.000**	**646.511.052.000**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	34.277.460.000	7.982.843.000	26.294.617.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	723.911.575.000	141.027.619.000	582.883.956.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	26.204.287.000	2.296.200.000	23.908.087.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.197.555.000	-	12.197.555.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	5.814.437.000	4.587.600.000	1.226.837.000
Jumlah		**5.481.958.278.000**	**1.318.173.857.000**	**4.163.784.421.000**

Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2026	Alokasi Anggaran (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	377.937.809.000
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750	579.390.083.000
	IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000	
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	2.526.501.421.000
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	646.511.052.000
Jumlah				**4.163.784.421.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2026 dan Triwulan I dengan realisasi kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2026;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk perbandingan/*benchmarking* kinerja;
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja;
4. Realisasi anggaran periode Triwulan I Tahun 2026 serta analisa efisiensi sumber daya;
5. Dukungan terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan capaian lainnya (apabila ada.

Tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Program</th><th>Pengukuran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian</td><td>Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.

$$\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$$

Keterangan:
Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian</td><td>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata nilai IKM Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKA Ringan Sumatera Selatan, Balai Pengujian diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan dan nilai IKM BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan.

$$IKM_{DJKA} = (IKM_{Dit\ LLAKA} + IKM_{Dit\ Prasarana} + IKM_{Dit\ Sarana} + IKM_{Dit\ Keselamatan} + IKM_{Balai\ Pengujian} + IKM_{Balai\ Perawatan} + IKM_{BPKA\ Sulawesi\ Selatan} + IKM_{BPKAR\ Sumatera\ Selatan})/8$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25.
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</td></tr>
</table>

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
3	IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	Rata-rata jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. ***Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian*** = $\frac{\text{Rata-rata Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}}$ X 100%
4	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS. **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA** = **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang** + **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang** Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang*** = $\frac{\textbf{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textbf{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}}$ **X 50%** Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang*** = $\frac{\textbf{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textbf{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}}$ **X 50%**
5	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan ***Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian*** = $\left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan X 1.000}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}}\right]$ X 100%
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian. $TKTKP_{KA} = (AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBP_{DJKA} + NKASN_{DJKA})/4$ ***Keterangan:*** AKIPDJKA = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKADJKA = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA PNBPDJKA = Tingkat pencapaian Realisasi PNBP DJKA NKASNDJKA = Tingkat pencapaian Nilai Kualitas ASN

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan tugas dan pokok untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026.

2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi yang terhubung jaringan perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi untuk terhubung dengan jaringan perkeretaapian berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030, dikalikan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.

Lokasi PKN/PKW/kawasan strategis lainnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selanjutnya untuk lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, sedangkan untuk lokasi simpul transportasi mencakup lokasi Bandara, Pelabuhan dan Terminal (Tipe A).

Lokasi-lokasi tersebut disandingkan dengan jaringan perkeretaapian terhubung (*eksisting*) maupun yang akan terhubung sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk

Perkeretaapian Nasional yang diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029. Rincian target PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan perkeretaapian pada Tahun 2026 sebanyak 69 lokasi terdiri dari 52 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 6 lokasi simpul Bandara, 10 lokasi simpul Pelabuhan dan 1 lokasi simpul Terminal (Tipe A). Jumlah tersebut dibandingkan dengan target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 16 lokasi simpul Bandara, 29 lokasi simpul Pelabuhan dan 1 lokasi simpul Terminal (Tipe A).

Adapun realisasi pada Tahun 2026 untuk lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan perkeretaapian terdapat perubahan berupa pengurangan dibandingkan *baseline* periode sebelumnya dengan adanya bencana alam di Sumatera pada akhir Tahun 2025 yang menyebabkan infrastruktur perkeretaapian khususnya di wilayah Aceh terputus/rusak/tidak beroperasi. Rincian realisasi lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/KSN/Kawasan Strategis Lainnya/Simpul Transportasi yang Terhubungan Jaringan Perkeretapaian Tahun 2026

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2026	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)/ Kawasan Strategis Lainnya			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2026	
		Target PK	Realisasi
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2026	
		Target PK	Realisasi
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu/Lhokseumawe	√	- (terdampak bencana alam)
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
Simpul Transportasi Terminal Tipe A			
1	Terminal Kampung Rambutan	√	√
TOTAL		**69**	**68**

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa jumlah PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi sebanyak 68 lokasi (51 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (104 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A).

Sedangkan untuk faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian yang merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) diperoleh realisasi sebanyak 266.881 perjalanan kereta api dari 264.757 program perjalanan kereta api pada Triwulan I Tahun 2026. Adapun rincian realisasi perjalanan kereta api baik penumpang dan barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada GAPEKA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2-3 Target dan Realisasi Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Tahun 2026

Bulan	Target	Program	Kum. Program	Frekuensi				Capaian	
				Ka. Pnp	Ka. Brg	Total	Kum. Total	Bulanan	Kumulatif
Januari	95,73%	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	1,008	1,008
Februari	95,73%	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	0,998	1,004
Maret	**95,73%**	**90.740**	**264.757**	**85.946**	**6.303**	**92.249**	**266.881**	**1,017**	**1,008**
Total		**264.757**		**249.521**	**17.360**	**266.881**			

Catatan: Data pada program GAPEKA menyesuaikan dengan penambahan frekuensi Perjalanan KA pada pelayanan LRT Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A) / Kawasan Strategis Nasional/ Kawasan Strategis Lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d. Tahun berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A) / Kawasan Strategis Nasional/ Kawasan Strategis Lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$$

Keterangan: Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{68 \text{ Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{150 \text{ PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}} \times \frac{266.881 \; realisasi \; perjalanan \; KA}{264.757 \; program \; perjalanan \; KA}$$

Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	=	0,453	X	1,008	=	0,457		

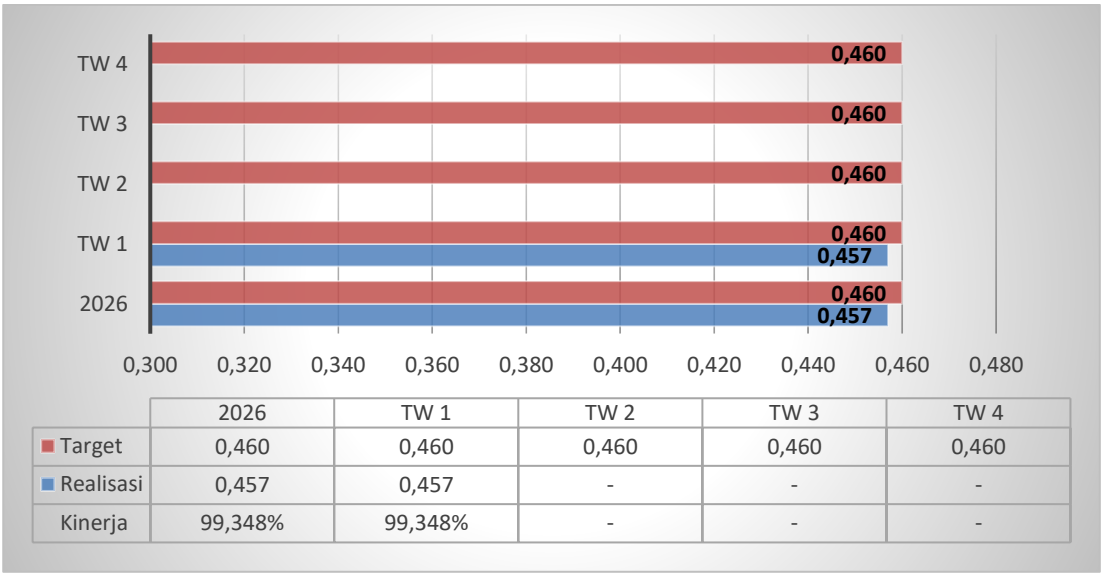
Data dukung capaian kinerja pada Lampiran VI

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas transportasi perkeretaapian periode Triwulan I 2026 sebesar 0,457, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,348% dari target yang ditetapkan pada Triwulan I 2026 dan Tahun 2026 sebesar 0,460. Pada Triwulan I 2026, realisasi kinerja tidak dapat memenuhi target dikarenakan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Aceh masih terputus/rusak/tidak beroperasi yang terdampak bencana alam Sumatera yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 4 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,457	-	-	-	99,348	-	-	-	99,348



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*bencmark*) dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkeretaapian dengan rasio konektivitas tingkat Kementerian Perhubungan (nasional). Nilai rasio konektivitas nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio konektivitas transportasi Tahun 2026 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2- 5 Nilai Rasio Konektivitas Transportasi

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (seluruh moda)	0,720
2	Perkeretaapian	0,457

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bawah rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada tingkat nasional sehingga perlu ditingkatkan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 68 titik (5,83%) dari jumlah 1.166 titik yang terhubung secara nasional (220 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 647 Pelabuhan serta 299 Bandar Udara).

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I 2026, konektivitas infrastruktur perkeretaapian di lokasi PKN/PKW Lhokseumawe (Kuta Blang – Muara Satu) masih terputus/tidak beroperasi akibat bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Kondisi prasarana dalam kondisi rusak sedang/berat berupa gogosan, longsoran dan jembatan KA rubuh/rusak, sehingga layanan KA perintis Cut Meutia berhenti beroperasi.

Untuk penanganan dampak bencana tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian kondisi prasarana perkeretaapian berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat, bencana hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, termasuk *joint inspection* prasarana perkeretaapian lintas Kuta Blang – Muara Satu di Provinsi Aceh. Dari hasil inventarisasi dan penilaian serta *joint inspection* tersebut, direkomendasikan perbaikan geometrik lengkung serta perkuatan abutmen jembatan KA Krueng Mane antara Krueng Mane – Geurugok. Dengan kondisi tersebut, perbaikan prasarana perkeretaapian membutuhkan kajian teknis terlebih dahulu yang diusulkan pelaksanaannya di Tahun 2026 dan perbaikan prasarana dapat dilaksanakan pada Tahun 2027 (setelah kajian teknis selesai dilaksanakan).

Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengajukan revisi anggaran untuk pemenuhan anggaran kajian teknis penanganan bencana berupa buka blokir kepada Kementerian Keuangan, namun usulan tersebut tidak disetujui sehingga sampai dengan Triwulan I 2026 belum teralokasikan anggarannya. Selain itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah mengusulkan kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) berupa kajian teknis untuk mendukung rehabilitasi/rekonstruksi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 tanggal 26 Maret 2026.

Secara umum pada Tahun 2026 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/ perpanjangan prasarana perkeretaapian baru menghubungkan PKN/PKW/ kawasan strategis nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026 mayoritas berupa kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting. Di sisi lain, pembangunan prasarana perkeretaapian baru oleh badan usaha/swasta masih minim dan beberapa masih dalam proses penjajakan investasi serta persiapan dokumen perencanaan teknis.

Adapun beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres pada Tahun 2026 antara lain:

a. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang berupa rencana pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Aek Nabara yang ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2026, saat ini telah dibuatkan *cover letter* dan telah ditandatangani oleh Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian namun masih menunggu legalitas lebih lanjut. Saat ini juga sedang dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian jalur, stasiun, jembatan dan fasilitas operasi pada segmen tersebut yang ditargetkan selesai pada bulan Mei 2026. Adapun untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah dibebaskan, tersisa 52 bidang) dimana terkendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi untuk kelanjutan pengadaan tanah. Pada Tahun 2026 direncanakan lanjutan pengadaan lahan menggunakan anggaran LMAN namun tidak tersedia anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP);
b. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *North-South* mencakup Fase 2A dengan progres 56,89% (segmen 1 BHI – Monas 78,70%, Segmen 2 Harmoni – Kota 48,61%) dan Fase 2B yang masih dalam tahap pemenuhan prasyarat untuk pelaksanaan *Basic Engineering Study* termasuk membutuhkan kepastian kebijakan terkait Depo Ancol dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *East-West Phase* I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan lokasi. Untuk pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pembiayaan LMAN. Adapun proses verifikasi DPPT masih berlangsung dan sedang dilakukan proses *re-baseline* untuk mengakomodir perubahan durasi konstruksi hasil *market sounding* dan pembaruan pada proses pengadaan lahan dan proses tender;

d. Kegiatan pembangunan LRT Jakarta segmen Velodrome – Manggarai yang bersumber dari pembiayaan APBD/BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan progres fisik sebesar 91,75% dimana telah dilakukan beberapa item pekerjaan antara lain pekerjaan sipil *viaduct*, pekerjaan *trackworks*, pekerjaan sistem dan beberapa pekerjaan lain di stasiun. Kegiatan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan integrasi moda transportasi massal di simpul kawasan Manggarai;
e. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai – Palanro, yang bersumber dari pembiayaan SBSN (luncuran) dengan progres 96,40%, dimana masih terdapat 1 lingkup kegiatan yaitu pembangunan *overpass* Tonasa yang masih belum dapat dilanjutkan karena membutuhkan penetapan lokasi dari Pemerintah Daerah untuk tahapan lanjut penyiapan lahan dan konstruksi. Pada Tahun 2026 juga direncanakan pembangunan jalan akses stasiun KA lintas Makassar - Parepare Tahap I guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau stasiun KA, dimana saat ini masih dalam tahap pelelangan.
f. Kegiatan pendukung pemenuhan *readiness criteria*/perencanaan teknis berupa kajian/studi yang berfokus pada penguatan tata kelola konektivitas perkeretaapian dimana saat ini masih dalam tahap persiapan kegiatan/pelelangan dan direncanakan pelaksanaannya mulai Triwulan II 2026 dengan rincian sebagai berikut:
    1) Kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030;
    2) Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Sumatera;
    3) Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Kalimantan;
    4) Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Sulawesi.

Berdasarkan hal-hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

a. Koordinasi dan konsolidasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan perkeretaapian sampai tahapan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian, diantaranya hubungan kerja sama dengan pihak internal (Direktorat

LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian, dan lainnya) dan pihak eksternal yaitu Badan Usaha/Operator, Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Keuangan, Bappenas, BP BUMN, lainnya), Pemerintah Daerah, serta pengelola simpul transportasi moda lain;

b. Koordinasi dan konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya;
c. Koordinasi dan konsolidasi dengan Kemenko Infraswil, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan badan usaha/swasta terkait pembiayaan alternatif pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas wilayah.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target rasio konektivitas transportasi perkeretaapian juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 42 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait indikator kinerja rasio konektivitas transportasi perkeretaapian. Dari 42 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 8 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 12,50% dari 8 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi atas rencana penanganan risiko yang telah dilakukan pada Triwulan I 2026 yakni usulan buka blokir untuk pemenuhan *readiness criteria* (kajian teknis) mendukung pembangunan perkeretaapian.

Tabel 2- 6 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
1	Rute Jaringan Perkeretaapian	30	4	8	1	12,500

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
2	Sistem Jaringan Logistik Perkeretaapian	6	0	-	-	-
3	Aksesibilitas Moda Kereta Api	6	0	-	-	-
Jumlah		**42**	**4**	**8**	**1**	**12,500**

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terkait rasio konektivitas transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan:

1) Merumuskan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang difokuskan di luar pulau Jawa dengan berkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2) Melaksanakan reviu *master plan* pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan kajian evaluasi dan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
3) Melakukan koordinasi terkait kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan adanya kebijakan efisiensi/penajaman belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

1) Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran konektivitas dengan identifikasi kegiatan pembiayaan rupiah murni yang dapat ditunda/tidak dilaksanakan di Tahun 2026, diantaranya untuk kajian perencanaan teknis mendukung rehabilitasi/rekonstruksi perkeretaapian pasca bencana alam, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) untuk pengadaan lahan, dan kegiatan pendukung lainnya;

2) Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas, termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan *stakeholder* terkait (MRT Jakarta *North – South*, MRT Jakarta *East – West*, LRT Jakarta, Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, lainnya).

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Mendorong peningkatan kompetensi inspektur perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Trasnspsortasi Perkeretaapian dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien;
b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi;
c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

2.2.2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian, Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) dan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perkeretaapian dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM terhadap pelayanan perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/Balai Pengelola di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk Badan Layanan Umum (BLU).

Nilai IKM terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapiam, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-7 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	76.61 – 88.30	B	Baik
4	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target nilai IKM Tahun 2026 sebesar 93,500. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada periode Triwulan I 2026 diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 95,862 dan rincian per unit kerja dan per bulan sebagai berikut:

Tabel 2- 8 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d. Maret Tahun 2026

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar
Dit LLAKA	86,880	95,810	90,630
Dit Prasarana	100,000	91,940	100,000
Dit Sarana	100,000	100,000	98,130
Dit Keselamatan	97,690	94,590	100,000

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar
BPKARS (mandiri)	91,320	92,080	92,900
BPKARS	98,020	98,520	98,210
Balai Pengujian	96,570	97,310	97,180
Balai Perawatan	92,500	95,630	92,970
BPKASS	96,430	96,290	96,670
Rata-rata	95,490	95,797	96,299
Realisasi/Rata-rata kumulatif	**95,490**	**95,643**	**95,862**

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh perhitungan matematis nilai IKM Triwulan I 2026 sebagai berikut:

Nilai IKM = Rata-rata Nilai IKM bulan Januari – Maret 2026 (Skala 1-4)

= (95,490+95,797+96,299) / 3 = 287,586 / 3

= 95,862

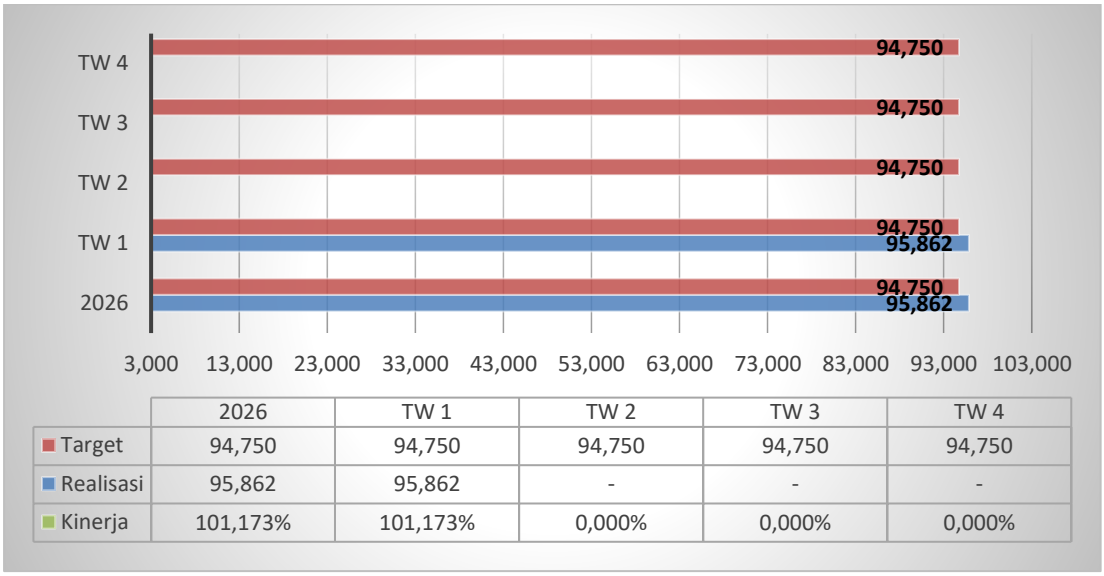
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Triwulan I 2026, diperoleh nilai IKM sebesar 95,862. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 baik target tahunan maupun target triwulan sebesar 94,750, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,173%. Adapun nilai IKM selama Triwulan I 2026 selalu mengalami kenaikan setiap bulan dan perlu dipertahankan pada periode berikutnya. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-9 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	95,862	-	-	-	101,173	-	-	-	101,173



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750
Realisasi	95,862	95,862	-	-	-
Kinerja	101,173%	101,173%	0,000%	0,000%	0,000%

Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan (*benchmark*) dilakukan terhadap capaian kinerja IKM pada tingkat Kementerian Perhubungan (nasional) pada periode Triwulan I 2026 dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-10 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	96,177
2	Ditjen Perkeretaapian	95,862

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan I 2026

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dari rata-rata nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian di tingkat Kementerian Perhubungan.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Triwulan I 2026 dengan perolehan nilai 95,862 yang dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi,

pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Triwulan I 2026, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan menggunakan *google form* untuk unit kerja seperti BPKAR Sumatera Selatan. Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

a. Pada Triwulan I 2026 telah diterbitkan 10 perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan;
b. Pelayanan sertifikasi pada Triwulan I 2026 yang telah dilaksanakan oleh unit kerja meliputi:
    1) Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 13 sertifikat oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari 3 penetapan sertifikat jalur dan bangunan serta 10 sertifikat fasilitas operasi;
    2) Pelayanan sertifikasi sarana perkeretaapian sebanyak 1.247 sertifikat sarana oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 853 sertifikat sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
c. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang kereta api oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya:
    1) Tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan pada beberapa kanal/media (*chat center*, surat elektronik/e-mail, SP4N, media sosial, survei kepuasan);
    2) Pelaksanaan beberapa program sosialisasi, diantaranya pelaksanaan ke beberapa sekolah (*edutrip*), pelaksanaan forum konsultasi publik, dan lainnya.
    3) Penyesuaian harga khusus/diskon tiket pada momen tertentu;
    4) Pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/*rampcheck* guna memastikan pemenuhan standar pelayanan minimum serta kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026;

5) Pemberlakukan sistem pemesanan tiket *online* mulai H-7 sebelum keberangkatan, serta sosialisasi tiket *infant* pada sistem penjualan tiket kereta api (khususnya pada layanan kereta api oleh BPKA Sulawesi Selatan);

d. Kehandalan SDM/pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam memberikan layanan regulator sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan;
e. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada *stakeholder*, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diantaranya:

a. Gangguan/*error* sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kelaikan sarana dan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian;
b. Kendala pada saat pelaksanaan survey IKM diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses *link* survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian, Pemerintah Daerah dan sektor terkait lainnya (sektor industri perkeretaapian) dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian serta melibatkan masyarakat pengguna kereta api terutama pada layanan LRT Sumatera Selatan dan KA Makassar - Parepare.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 143 risiko yang diidentifikasi dari 6 proses bisnis terkait indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian. Dari 143 risiko tersebut, terdapat 6 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 19 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau sebesar 15,79% dari 19 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan pada Triwulan I 2026 sebagai berikut:

a. Pengoptimalan kegiatan *rampcheck* kesiapan sarana dan prasarana perkeretaapian termasuk dengan dukungan SOP yang memadai;
b. Penguatan SOP terkait pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian; dan
c. Melakukan pembinaan pembahasan rancang bangun sarana perkeretaapian dengan teknologi terbaru.

Tabel 2-11 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan I 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
1	Pelayanan Transportasi Sarana Perkeretaapian	53	1	2	1	50,00
2	Pelayanan Transportasi Keselamatan Perkeretaapian	13	0	-	-	-
3	Pelayanan Transportasi Prasarana Perkeretaapian	13	2	9	0	0,00
4	Pengelolaan Sarana Transportasi Perkeretaapian	17	1	2	0	0,00
5	Pelayanan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	42	2	6	2	33,33
6	Pengelolaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian	5	0	-	-	-
Jumlah		**143**	**6**	**19**	**3**	**15,79**

Pada Triwulan I 2026, terdapat 1 keterjadian risiko yang mempengaruhi kinerja yaitu Gangguan Operasional Perjalanan KA (10 kejadian) disebabkan oleh gangguan teknis sarana dan prasarana yang berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang perkeretaapian khususnya

terhadap kelancaran perjalanan kereta api. Keterjadian risiko tersebut selanjutnya memerlukan peningkatan pengawasan terhadap perawatan sarana dan prasarana sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan, serta *update* pengelolaan sistem informasi dan *database* kondisi prasarana dan sarana pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai acuan Direktorat teknis melakukan pengawasan.

Tabel 2- 12 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan I 2026

Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
Gangguan operasional perjalanan kereta api	Gangguan teknis sarana dan prasarana	10 Kejadian	• Kerusakan *engine power* sarana • Gangguan sinyal, LAA putus, rel patah

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diperlukan beberapa upaya antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Peningkatan pengawasan terhadap layanan publik perkeretaapian sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan termasuk pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api sesuai standar pelayanan minimum dengan dukungan prasarana dan sarana yang andal;
2) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan *database* mendukung layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) guna meningkatkan kehandalan dan mencegah terjadinya gangguan pada layanan.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Koordinasi lanjutan usulan pemanfaatan perolehan PNBP untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung peningkatan kualitas layanan regulator perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Mempersiapkan pengembangan organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum (Balai Perawatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder*.

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan reputasi dan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP) TRANSPORTASI KERETA API

On Time Performance (OTP) merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api sebesar 97,770% baik periode Tahun 2026 maupun Triwulan I 2026.

Pada Triwulan I 2026, diperoleh realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang baik kedatangan dan keberangkatan yang tepat waktu sesuai jadwal sebanyak 260.287 KA dan dibandingkan dengan jumlah perjalanan kereta api sebanyak 266.881 KA. Secara rinci realisasi perjalanan kereta api sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-13 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2026

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	92.190	92.190	88.564	88.564	90.010	90.010	89.287	89.287	96,851%	96,851%
Feb	82.442	174.632	79.904	168.468	81.390	171.400	80.647	169.934	97,823%	97,310%
Mar	**92.249**	**266.881**	**89.520**	**257.988**	**91.186**	**262.586**	**90.353**	**260.287**	**97,945%**	**97,529%**

Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu secara kumulatif pada bulan Januari – Maret 2026 sebanyak 260.287 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada periode yang sama sebanyak 266.881 KA, maka diperoleh realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) sebesar 97,529%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{260.287 \text{ KA}}{266.881 \text{ KA}} \times 100\% = 97{,}529\%$$

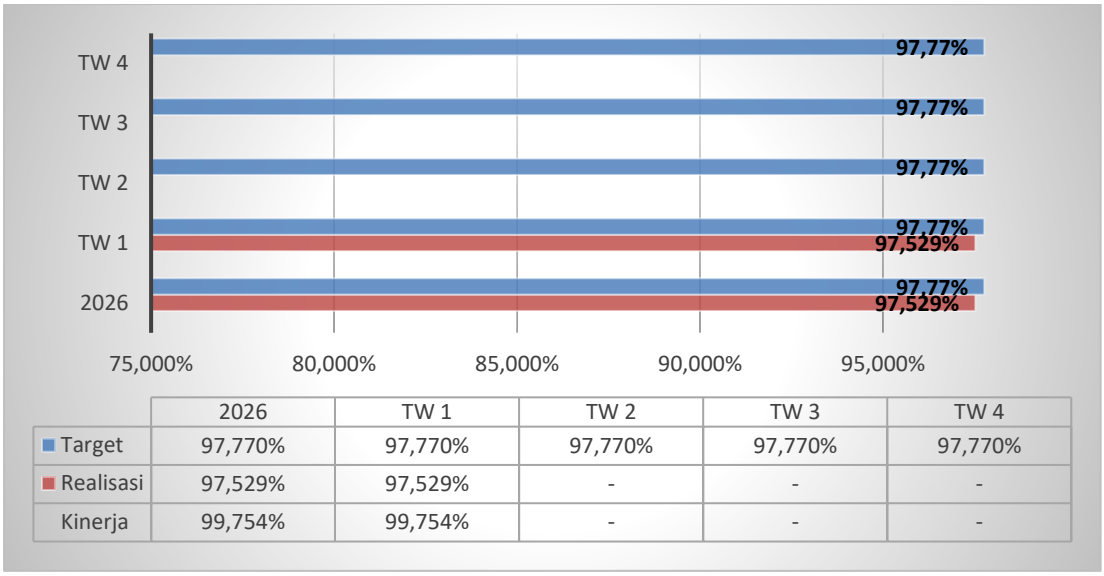
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Triwulan I 2026 sebesar 97,529%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,754% dibandingkan dengan target Triwulan I 2026 dan target Tahun 2026 sebesar 97,770%. Adapun nilai OTP setiap bulan pada Triwulan I 2026 selalu mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target, untuk itu perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,529	-	-	-	99,754	-	-	-	99,754



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%
Realisasi	97,529%	97,529%	-	-	-
Kinerja	99,754%	99,754%	-	-	-

Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP negara lain (Belgia, Britania Raya) berdasarkan beberapa sumber (*website Open Data Infrabel, website Office of Rail and Road Publication*). Data perbandingan *On Time Performance* tersebut diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2- 15 Perbandingan *On Time Performance* Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	*On Time Performance* (%)
1	Belgia	8.298	93,10%
2	Britania Raya	31.236	81,50%
3	Indonesia	6.915	97,53%

Sumber No.1 : Website Open Data Infrabel, periode Triwulan I 2026
Sumber No.2 : Website Office of Rail and Road Publication, periode Triwulan IV 2025

Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia lebih baik apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di Belgia dan Britania Raya yang mencapai kinerja 81-93%. Dengan capaian OTP Indonesia yang cukup tinggi sebesar 97,53% pada Triwulan I 2026 menggambarkan bahwa Indonesia pada posisi yang kompetitif secara global. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas operasional, pengelolaan infrastruktur, dan manajemen layanan yang diterapkan oleh badan usaha/operator perkeretaapian dengan pembinaan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian sebagai regulator. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dengan performa OTP yang tinggi.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tidak tercapainya target kinerja *on time performance* pada periode Triwulan I 2026 diantaranya:

a. Tidak terpenuhinya target *on time performance* kereta api angkutan barang pada jaringan jalur KA Nasional di Jawa (85,70%), Sumatera Bagian Utara (93,64%), dan Sumatera Bagian Selatan (89,29%);
b. Tidak terpenuhinya target *on time performance* KA Angkutan Penumpang pada jaringan jalur KA Nasional di Jawa (97,41%), Sumatera Bagian Selatan (97,22%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (92,29%), dan Sulawesi Selatan (65,00%).

Pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Triwulan I 2026 menghadapi beberapa kendala operasional di beberapa wilayah, termasuk beberapa peristiwa menonjol yang mempengaruhi capaian OTP antara lain:

a. Gangguan keamanan terhadap operasional kereta api di lokasi perlintasan sebidang yang menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan perjalanan, terutama kejadian temperan/tabrakan dengan kendaraan berukuran besar (truk, alat berat) yang menimbulkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memerlukan waktu penanganan yang cukup lama;
b. Faktor cuaca ekstrem termasuk banjir di beberapa wilayah (Sumatera Selatan, Jawa Timur, lainnya) yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional layanan perkeretaapian yang dapat berupa gangguan perjalanan maupun kerusakan prasarana pada wilayah terdampak;
c. Gangguan teknis pada sarana perkeretaapian, seperti permasalahan pada kereta pembangkit yang turut menyebabkan keterlambatan dan penurunan efisiensi jadwal operasi;

d. Kejadian kecelakaan kereta api, dimana pada Triwulan I 2026 terdapat 1 kecelakaan yakni anjlokan dan terguling pada KA 3100 (Barapati) di petak antara Serdang – Payakabung Sumatera Selatan yang menyebabkan gangguan pada jalur utama serta berdampak sistemik terhadap jadwal perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Selatan.

Pada Triwulan I 2026 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja OTP, antara lain:

a. Penetapan perjalanan kereta api di luar Grafik Perjalanan KeretaApi lebih dari 30 hari berturut-turut melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 27 Januari 2026 dan tanggal 23 Februari 2026 guna memastikan pengendalian dan penetapan perjalanan kereta api tetap terkelola secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan operasional baik pada GAPEKA maupun perjalanan di luar GAPEKA;
b. Pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian eksisting yang diprogramkan pada Tahun 2026 dalam upaya meningkatkan kapasitas, kecepatan operasional dan kehandalan prasarana guna mendukung kinerja *on time performance*, mencakup:
    1) Pengembangan Jalur KA Komuter Medan-Binjai (Jalur KA Layang), berupa kegiatan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2022 – 2026, pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan progres fisik saat ini 84% dan target 100% pada akhir Tahun 2026 sesuai lingkup kegiatan MYC;
    2) Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, berupa kegiatan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2023 – 2027, pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan progres fisik saat ini 6% dan target 50% pada akhir Tahun 2026;
    3) Pembangunan Gardu Traksi Delanggu, pembiayaan Rupiah Murni dengan progres saat ini dalam tahap persiapan pelelangan dan usulan skema kegiatan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2026 – 2027.
    4) Terdapat beberapa kegiatan pengembangan/peningkatan jalur KA tidak dapat dilaksanakan/ditunda dikarenakan kebijakan

blokir/penajaman belanja dengan peralihan anggaran ke BA BUN diantaranya:

a) Peningkatan Jalur KA lintas Sukabumi - Cianjur segmen Lampegan – Cianjur;
b) Pembangunan Jalur Ganda KA Wonokromo – Sepanjang;
c) Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Talun – Kertosono;
d) Peningkatan Persinyalan Elektrik KA lintas Tarahan – Martapura Tahap I.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan/realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang berlaku pada jaringan jalur Kereta Api Nasional secara berkala pada periode Triwulan sebagai dasar penyesuaian operasional dan perbaikan pola perjalanan sehingga kesesuaian jadwal perjalanan dapat terjaga dan tingkat keterlambatan dapat diminimalisir. Hal tersebut juga mencakup pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional di kereta api ringan terintegrasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta kereta api kecepatan tinggi Jakarta - Bandung guna memastikan kelancaran operasi dan ketepatan waktu perjalanan;
d. Koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana/Sarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait identifikasi penyebab serta penanganan kejadian keterlambatan perjalanan kereta api, termasuk langkah antisipatif terhadap potensi rintang jalan. Pada Triwulan I 2026, telah dilakukan koordinasi teknis dengan para pemangku kepentingan (PT KAI, PT MRT Jakarta, PT KCI, PT KCIC, lainnya) pada masa angkutan Lebaran Tahun 2026 yang mencakup perencanaan operasi, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan SDM, serta identifikasi daerah rawan beserta langkah pencegahan dan mitigasinya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) melalui berbagai bentuk koordinasi lintas sektor dan sinergi antar-pemangku kepentingan di bidang perkeretaapian. Koordinasi teknis dilaksanakan secara berkelanjutan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Badan Usaha

Penyelenggara Sarana/Prasarana antara lain PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta, PT KCIC, PT Railink, dan operator lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian kinerja operasional kereta api. Bentuk koordinasi tersebut mencakup pembahasan dan evaluasi kinerja operasional pada layanan kereta api yang dilaksanakan pada Triwulan I 2026 dan diperkuat melalui kegiatan evaluasi operasi di lapangan. Koordinasi juga difokuskan pada upaya antisipasi dan penanganan gangguan perjalanan khususnya yang disebabkan oleh kejadian anjlokan, kecelakaan di perlintasan sebidang, gangguan teknis sarana dan prasarana, serta dampak kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam di sejumlah wilayah operasi.

Selain itu, koordinasi lintas bidang turut dilaksanakan dalam pengelolaan dan evaluasi berkala Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) dengan melibatkan masukan dari Badan Usaha/Operator Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, guna memastikan kesesuaian pola operasi dengan kondisi lapangan dan kebutuhan layanan. Pelaksanaan berbagai bentuk koordinasi lintas bidang tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pencapaian target OTP.

Dalam mendukung pencapaian target *On Time Performance* (OTP), juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 20 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait indikator kinerja *On Time Performance* (OTP). Dari 20 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 17 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 23,53% dari 17 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan pada Triwulan I 2026 sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait penataan dan pengamanan perlintasan sebidang kereta api;
b. Koordinasi dengan BMKG terkait mitigasi risiko cuaca ekstrim pada masa angkutan lebaran Tahun 2026;
c. Usulan buka blokir anggaran IMO; dan
d. Reviu SOP Tata kelola penyelenggaraan IMO.

Tabel 2-16 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja *On Time Performance* (OTP) Periode Triwulan I 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
1	Pelayanan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	7	2	11	2	**18,182**
2	Pengelolaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian	13	2	6	2	**33,333**
Jumlah		**20**	**4**	**17**	**4**	**23,529**

Selain itu, pada periode Triwulan I 2026 juga tercatat beberapa keterjadian risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP), meliputi:

Tabel 2- 17 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja *On Time Performance* Periode Triwulan I 2026

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
1	Gangguan operasional perjalanan kereta api	• Gangguan alam/cuaca, kejadian pelemparan, pencurian/ vandalisme, pengrusakan terhadap aset sarana dan prasarana perkeretaapian	2 Kejadian	• Terjadinya hujan deras yang menyebabkan adanya genangan air hingga di atas kop rel • Terjadinya cuaca ekstrem berupa angin kencang dan menyebabkan pohon tumbang dan menimpa di atas rel
2	Gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api	• Ketidakpatuhan masyarakat terhadap rambu atau marka	73 Kejadian	• Tidak adanya palang pintu perlintasan sebidang • Pengguna jalan menerobos palang pintu

Sebagaimana Tabel di atas, berbagai gangguan tersebut menunjukkan bahwa capaian *on time performance* dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, terutama aspek keamanan di perlintasan sebidang serta ketahanan jalur terhadap kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan pengamanan perlintasan sebidang, penguatan mitigasi dan penanganan risiko bencana, serta penguatan sistem manajemen operasi dan kesiapsiagaan darurat guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketepatan waktu perjalanan kereta api pada periode berikutnya.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Penyusunan program prioritas penanganan perlintasan sebidang serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi fasilitas keamanan perlintasan sebidang (pintu perlintasan, *early warning system*, lainnya) termasuk kompetensi SDM penjaga perlintasan;
2) Melakukan inspeksi/pemantauan terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/ lokasi taspat;
3) Lanjutan evaluasi terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) khususnya membahas layanan kereta api yang berkinerja OTP sangat rendah (KA barang di Jawa 85,70% dan Sumatera Bagian Selatan 89,29%, KA Makassar – Parepare 65,00%).

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Lanjutan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian mendukung peningkatan kapasitas dan kecepatan operasional KA (pengembangan jalur KA komuter Medan-Binjai, pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, lainnya) serta mengusulkan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian prioritas yang ditunda/tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2026 (peningkatan jalur KA

Sukabumi – Cianjur, pembangunan jalur ganda KA Wonokromo – Sepanjang, peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi, lainnya).

c. ***Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:***
Peningkatan kompetensi Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dalam pengawasan perjalanan kereta api melalui pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2026 sebesar 40,00% dan untuk periode Triwulan I 2026 sebesar 22,827%.

Untuk jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Triwulan I 2026, diperoleh sebanyak 140.619.347 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial meliputi kereta api jarak jauh eksekutif, bisnis, *priority*, ekonomi *non* PSO dan KA lokal eksekutif (diantaranya KA Wisata Ambarawa, KA Bandara Soekarno Hatta) sebanyak 11.207.558 penumpang;
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (*non* KRL Jabodetabek) sebanyak 18.829.491 penumpang *(data sementara)*;
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 87.979.372 penumpang;
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 1.160.414 penumpang *(data sementara)*;
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 11.567.768 penumpang;
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 358.523 penumpang;
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspress dan KA Srilelawangsa) sebanyak 352.460 penumpang;
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 7.754.946 penumpang;
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 1.408.815 penumpang.

Dengan jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api Tahun 2025 sebanyak 551.737.151 penumpang dan jumlah penumpang pada Triwulan I 2026 sebanyak 140.619.347 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 2026 sebanyak 692.356.498 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api pada periode 2025 – 2029 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yaitu 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Triwulan I 2026 sebesar 24,740% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan penumpang 2025 s. d TW I 2026}}{\text{Target angkutan penumpang 2025} - \text{2029}} \times 50\%$$

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{551.737.151 + 140.619.347}{2.798.554.050} \times 50\%$$

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{692.356.498}{2.798.554.050} \times 50\% = 12{,}370\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Untuk jumlah barang terangkut dengan kereta api pada Triwulan I 2026, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar **14.899.940 ton** dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak **2.034.602** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
   1) BBM sebanyak 462.474 ton;
   2) Semen dan Klinker sebanyak 220.800 ton;
   3) Peti kemas sebanyak 136.200 ton;
   4) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 19.575 ton;
   5) B3 dan Limbah B3 sebanyak 33.582 ton;
   6) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 1.161.971 ton.

b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak **12.865.338** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
   1) BBM sebanyak 207.528 ton;
   2) Semen dan Klinker sebanyak 347.436 ton;
   3) Batu bara sebanyak 12.017.739 ton;
   4) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 147.516 ton;
   5) Peti kemas sebanyak 136.200 ton;
   6) B3 dan Limbah B3 sebanyak 1.036 ton;
   7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 7.883 ton;

Dengan jumlah realisasi angkutan barang kereta api Tahun 2025 sebanyak 69.908.773 ton dan jumlah angkutan barang pada Triwulan I 2026 sebanyak

14.899.940 ton, maka diperoleh jumlah realisasi angkutan barang kumulatif dari Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 2026 sebanyak 84.808.713 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api pada periode 2025 – 2029 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yaitu 361.142.831 ton, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Triwulan I 2026 sebesar 11,742% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan barang 2025 s. d TW I 2026}}{\text{Target angkutan barang 2025} - \text{2029}} \times 50\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{69.908.773 + 14.899.940}{361.142.831} \times 50\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{84.808.713}{361.142.831} \times 50\% = 11{,}742\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Dengan pemenuhan target angkutan kereta api penumpang (12,370%) dan angkutan kereta api barang (11,742%), maka diperoleh ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api secara total sebesar 24,112%*** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api} = \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA}$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api} = 12{,}370\% + 11{,}742\% = 24{,}112\%$$

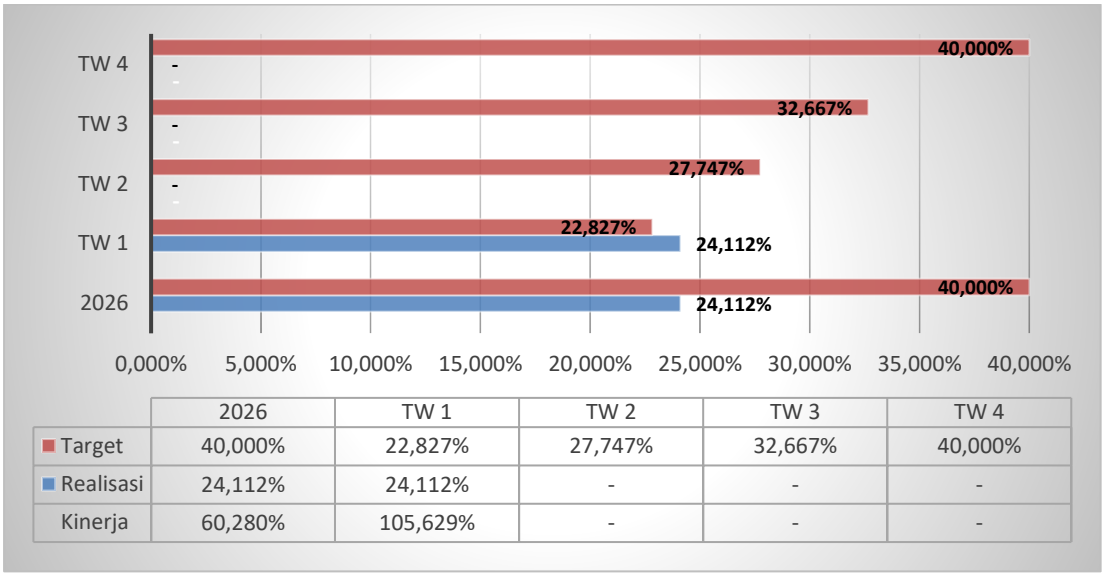
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api sebesar 24,112%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,629% terhadap target Triwulan I 2026 sebesar 22,827% dan capaian kinerja sebesar 60,280% terhadap target Tahun 2026 sebesar 40,000%. Secara umum capaian kinerja

pada Triwulan I 2026 terdapat peningkatan dibandingkan Triwulan I periode tahun sebelumnya. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-18 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000	22,827	27,747	32,667	40,000	24,112	-	-	-	105,629	-	-	-	60,280



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	40,000%	22,827%	27,747%	32,667%	40,000%
Realisasi	24,112%	24,112%	-	-	-
Kinerja	60,280%	105,629%	-	-	-

Gambar 2-4 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) terkait angkutan penumpang kereta api di Indonesia dilakukan dengan sandingan kinerja negara Malaysia, Singapura dan Britania Raya berdasarkan beberapa referensi pada Tahun 2025-2026. Perbandingan jumlah angkutan penumpang kereta api diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-19 Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.236	150.666.667	4.823
2	Malaysia	1.799	26.972.463	14.990
3	Singapura	271	108.660.000	400.516
4	Indonesia*	6.915	46.873.116	6.778

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan Tahun 2025)
Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan Tahun 2025)
Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan Tahun 2025)
**) Rata-rata jumlah angkutan penumpang per bulan pada Triwulan I 2026*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya dan Singapura namun lebih tinggi dari Malaysia. Apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, terlihat bahwa kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih lebih tinggi dari dari Britania Raya namun lebih rendah dari Singapura dan Malaysia. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih rendah berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

Untuk analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) angkutan barang kereta api dibandingkan dengan kinerja negara Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-20 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.236	5.916.667	189
2	Indonesia*	6.915	4.966.647	718

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan Tahun 2025)
**) Rata-rata jumlah angkutan barang per bulan pada Triwulan I 2026*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik yang mencapai rata-rata 718 Ton/Km per bulan dibandingkan Britania Raya yang hanya mencapai rata-rata 189 Ton/Km per bulan. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Angkutan Penumpang

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diantaranya:

a. Penyesuaian program perjalanan KA reguler dan fakultatif PT KAI di Tahun 2026 dan penyesuaian program perjalanan KA Cepat Jakarta – Bandung selama bulan Ramadhan (Februari – Maret 2026);
b. Beberapa libur panjang pada periode Triwulan I 2026 sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan termasuk menggunakan moda kereta api;
c. Dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi dalam penyelenggaraan angkutan kereta api dengan rincian:
    1) Pemberian stimulus dengan realisasi sebesar Rp219.444.211.000,- yang diselenggarakan pada periode Angkutan Nataru 2025/2026 (tanggal 22 Desember 2025 s.d. 10 Januari 2026) dan periode Idul Fitri Tahun 2026 (tanggal 14 s.d. 29 Maret 2026) dengan realisasi penumpang sebanyak 2.995.220 penumpang atau capaian sebesar 107,20% dari kapasitas sebanyak 2.794.136 tempat duduk;
    2) Anggaran subsidi angkutan kereta api pada Tahun 2026 mencakup subsidi perintis sebesar Rp124.215.780.878,- dan subsidi PSO sebesar Rp5.864.206.808.000,-.

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta tarif angkutan penumpang kereta api;
e. Penyelesaian peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres pada Triwulan I 2026 sebesar 100%. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan pendukung lainnya berupa pengembangan/peningkatan stasiun dengan uraian sebagai berikut:
    1) Peningkatan Stasiun Manggarai (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III) , dengan progres 6% dan target penyelesaian di Tahun 2027;
    2) Pembangunan Stasiun Cimindi, Andir, dan Ciroyom antara Padalarang – Bandung, status kegiatan tidak dapat dilaksanakan/ditunda dikarenakan kebijakan blokir/penajaman belanja dengan peralihan anggaran ke BA BUN;
    3) Pembangunan Jalan Akses Stasiun lintas Makassar - Parepare Tahap I, posisi saat ini dalam tahap pelelangan kegiatan (SYC 2027).
f. Pembangunan Stasiun Jatake telah selesai 100% dan telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan bersama Gubernur Banten. Pembangunan Stasiun Jatake yang dilaksanakan dengan skema kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia merupakan penghubung Kawasan Perkotaan Permukiman BSD City dengan harapan dapat berkontribusi menambah penumpang ke Stasiun Rawabuntu sebesar 8.212 orang per hari dan ke Stasiun Cisauk sebesar 40.848 orang per hari.

Selain itu, juga telah dilakukan koordinasi/pembahasan terkait peningkatan pelayanan kereta api guna mendukung kinerja pemenuhan target angkutan kereta api di Triwulan I 2026, diantaranya:

a. Koordinasi penyelenggaran angkutan Nataru Tahun 2025/2026 dan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026;
b. Audiensi dengan Walikota Probolinggo terkait tindak lanjut usulan relasi *commuter line* Supas sampai Stasiun Probolinggo pada 8 Januari 2026, serta pembahasan kesiapan perpanjangan pelayanan *commuter line* Supas ke Probolinggo dan tinjauan lapangan ke Stasiun Probolinggo pada 4 Februari 2026;

c. Audiensi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap terkait Perpanjangan Relasi Kereta Api Pangandaran pada 21 Januari 2026;
d. Pembahasan terkait progres persiapan pengoperasian naik dan turun penumpang serta pemenuhan kelengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Stasiun Rajapolah Kab. Tasikmalaya pada 4 Maret 2026.

Namun demikian, dalam pencapaian kinerja angkutan kereta api pada Triwulan I 2026 masih terdapat beberapa kendala dan hambatan operasional di beberapa wilayah diantaranya faktor cuaca ekstrem dan bencana alam termasuk kejadian banjir di beberapa wilayah (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, wilayah lintas utara dan selatan Jawa) yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional layanan perkeretaapian berupa gangguan perjalanan, kerusakan prasarana serta pembatalan pelayanan kereta api termasuk layanan KA perintis Cut Meutia di Provinsi Aceh yang belum dapat beroperasi kembali. Kendala ketersediaan sarana kereta api yang laik juga menjadi salah satu tantangan untuk memastikan layanan kereta api dapat berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja terkait peningkatan angkutan penumpang kereta api dengan koordinasi badan usaha/operator perkeretaapian melalui kegiatan pengawasan standar pelayanan minimum, pengelolaan tarif termasuk stimulus, penetapan lintas pelayanan, serta pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat. Upaya peningkatan akses stasiun dan integrasi antar moda juga terdapat keterhubungan kinerja dengan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/operator moda lain. Selain itu juga terdapat hubungan kerja dan data dalam penyediaan/penyelenggaraan subsidi perintis serta pengelolaan *Public Service Obigation* yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta badan usaha/operator perkeretaapian.

Angkutan Barang

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja pemenuhan target angkutan barang kereta api diantaranya:

a. Koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia terkait target volume angkutan barang dan evaluasi kinerja angkutan barang secara berkala;
b. Koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya terkait Digitalisasi Logistik Nasional pada 12 Februari 2026, serta koordinasi upaya peningkatan angkutan barang dengan kereta api dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional;
c. Audiensi dengan Bank Indonesia terkait strategi distribusi uang rupiah melalui moda kereta api pada tanggal 13 Februari 2026;
d. Pelaksanaan program Angkutan Motor Gratis (Motis) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026 meliputi tiga lintas, yaitu lintas Utara (Jakarta Gudang – Cepu), lintas Tengah (Jakarta Gudang – Lempuyangan), dan lintas Selatan (Jakarta Gudang – Kiaracondong – Madiun) dengan periode arus mudik pada tanggal 13 s.d. 19 Maret 2026 dan arus balik pada tanggal 24 s.d. 30 Maret 2026;
e. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dengan memberikan informasi angkutan barang dengan moda kereta api untuk meningkatkan pengguna transportasi angkutan barang dengan moda kereta api;
f. Koordinasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan kendaraan lebih dimensi-lebih muatan/ODOL bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;

Namun demikian, dalam pencapaian kinerja angkutan barang kereta api terdapat beberapa kendala/hambatan operasional yaitu dikeluarkannya kebijakan pembatasan angkutan kereta api barang khususnya di wilayah Sumatera Selatan melalui Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 yang diberlakukan pada 1 Januari 2026 tentang pembatasan angkutan batubara melewati jalur nasional yang berpotensi menurunkan permintaan volume barang pada komoditas batubara. Kendala lainnya adalah kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam yang dapat mengganggu operasional perjalanan kereta api termasuk angkutan barang.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan kerja dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan sektor perdagangan/industri/pertanian/ perkebunan/pertambangan yang berperan dalam angkutan logistik dimana angkutan kereta api barang membutuhkan sinergi dengan sektor-sektor tersebut sebagai pembentuk *demand*. Selain itu, koordinasi dengan badan usaha/operator perkeretaapian juga dilakukan termasuk melakukan sosialisasi terhadap perusahaan/pabrik/*outlet* potensial menggunakan angkutan kereta api barang dalam distribusi hasil produksinya. Keterhubungan data dan kinerja dengan sub sektor perhubungan laut dan darat serta Kementerian Keuangan juga terjalin dalam penyelenggaraan multimoda pada simpul transportasi (pelabuhan, terminal barang/*dryport*, layanan bea cukai, lainnya).

Selain itu, dalam mendukung pencapaian kinerja persentase pemenuhan target angkutan kereta api, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap proses bisnis kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/setiap triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 18 risiko yang diidentifikasi dari 1 proses bisnis terkait indikator kinerja pemenuhan target angkutan kereta api. Dari 18 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 5 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 20% dari 5 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan pada periode Triwulan I 2026 yakni dukungan kebijakan perubahan skema perintis menjadi PSO untuk menjamin penyelenggaraan layanan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2-21 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api periode Triwulan I 2026

Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
		Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
Pelayanan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	18	4	5	1	20,000
Jumlah	18	4	5	1	**20,000**

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan:

1) Dukungan kebijakan melalui penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga (Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN) untuk mendukung penyelenggaraan angkutan kereta api subsidi perintis dan *Public Service Obligation* (PSO) Tahun 2026;
2) Penambahan lintas pelayanan kereta api penumpang pada beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa menyesuaikan potensi bangkitan penumpang, termasuk dukungan penyediaan sarana kereta api oleh badan usaha untuk meningkatkan kapasitas angkut terutama pada layanan kereta api perkotaan/KRL Jabodetabek;
3) Evaluasi program perjalanan kereta api (reguler dan fakultatif) pada GAPEKA khususnya angkutan barang yang tidak beroperasi di beberapa wilayah guna menyesuaikan *demand* angkutan barang.

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

Lanjutan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan stasiun dan akses stasiun (Makassar – Parepare, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penggunaan moda kereta api.

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Percepatan pengembangan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagai Badan Layanan Umum agar dapat lebih berorientasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pencapaian persentase pemenuhan target angkutan kereta api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Reduksi kemacetan jalan raya dan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatnya penggunaan kereta api yang mengindikasikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang berbanding lurus dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
b. Peningkatan investasi infrastruktur, dimana dengan tingginya permintaan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

2.2.3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan analisa mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan kereta api baik angkutan penumpang maupun angkutan barang pada periode tertentu. Kategori kecelakaan kereta api meliputi anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA, dan terbakar. Selain itu, terdapat pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh keterjadian/pelanggaran/gangguan keamanan di lokasi perpotongan/ perlintasan sebidang yang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api sebagaimana ketentuan:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
   a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api;
   b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan tidak terjadi kecelakaan kereta api (*zero accident*) baik target tahunan maupun periode triwulan dengan tingkat keselamatan 100%. Namun pada periode Triwulan I 2026 telah terjadi 1 kejadian kecelakaan kereta api sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2- 22 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2026

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	-
2	Anjlokan	1
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		**1**

Tabel 2- 23 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2026

Wilayah Balai	Daop/ Divre	Bulan			Jumlah
		Jan	Feb	Mar	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	**0**
BTP Bandung	Bandung	-	-	-	**0**
	Cirebon	-	-	-	**0**
	Semarang	-	-	-	**0**
BTP Semarang	Purwokerto	-	-	-	**0**
	Yogyakarta	-	-	-	**0**
	Madiun	-	-	-	**0**
BTP Surabaya	Surabaya	-	-	-	**0**
	Jember	-	-	-	**0**
Pulau Jawa		**0**	**0**	**0**	**0**

Wilayah Balai	Daop/ Divre	Bulan			Jumlah
		Jan	Feb	Mar	
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	-	-	**0**
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	**0**
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	1	-	**1**
	Lampung	-	-	-	**0**
Pulau Sumatera		**0**	**1**	**0**	**1**
Jumlah (Jawa + Sumatera)		**0**	**1**	**0**	**1**

Dengan jumlah kejadian kecelakaan kereta api sebanyak 1 kejadian serta jumlah keberangkatan kereta api sampai dengan Triwulan I 2026 sebanyak 266.881 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode Triwulan I 2026 sebesar 99,625% dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian} = \left[1 - \left(\frac{1 \text{ Kejadian Kecelakaan Kereta Api}}{266.881 \text{ Perjalanan Kereta Api}} x\ 1.000\right)\right] x\ 100\% = 99{,}625\%$$

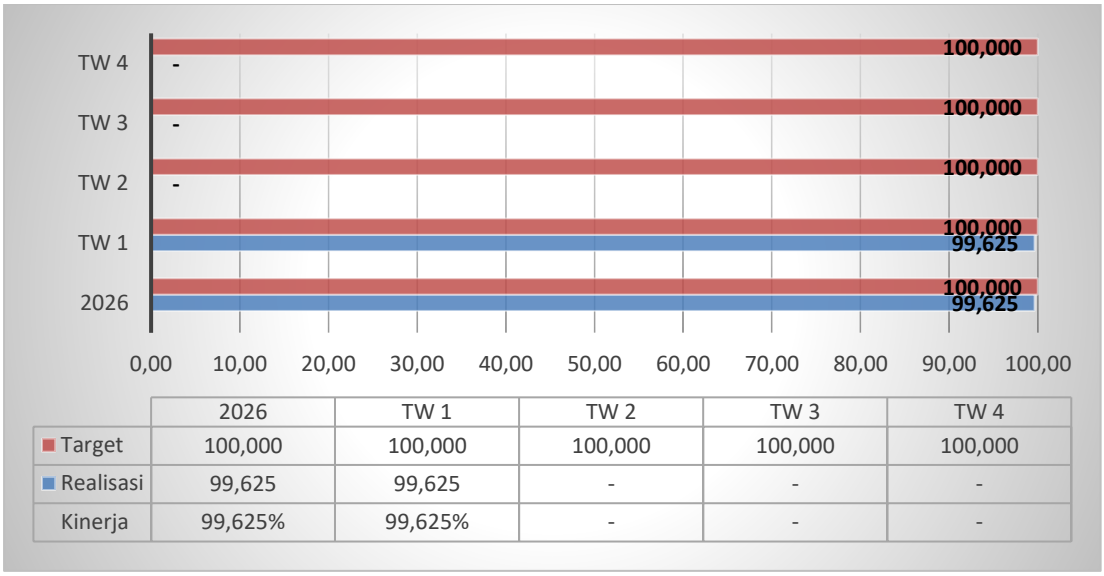
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian periode Triwulan I 2026 sebesar 99,625%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,625% dibandingkan target yang ditetapkan pada periode Triwulan I dan Tahun 2026 sebesar 100%. Kejadian kecelakaan kereta api terjadi di wilayah Sumatera Selatan dimana mayoritas layanan kereta api berupa layanan angkutan barang. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 24 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	99,625	-	-	-	99,625	-	-	-	99,625



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Realisasi	99,625	99,625	-	-	-
Kinerja	99,625%	99,625%	-	-	-

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan kereta api dilakukan perbandingan dengan negara lain mengacu pada publikasi yang ada berupa jumlah kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokan) dan *collision* (tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data *benchmarking*, perbandingan kinerja dilakukan antara data negara lain di Eropa (Uni Eropa) dengan data Indonesia periode Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa jumlah kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Uni Eropa. Namun apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Uni Eropa lebih baik dari Indonesia. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 25 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Uni Eropa	202.131	405	0,0020
2	Indonesia	6.915	1*	0,0001

Sumber No.1 : Website European Union Agency of Railways, data periode Tahun 2025
**) Data Periode Triwulan I 2026*

Perbandingan kinerja di level nasional juga dilakukan dengan perbandingan kinerja sub sektor transportasi lain yaitu transportasi laut dan udara. Untuk transportasi laut sampai dengan periode Triwulan I 2026 diperoleh jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 12 kejadian dan dibandingkan dengan jumlah

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 228.915 keberangkatan sehingga diperoleh tingkat keselamatan transportasi laut sebesar 99,99%. Sedangkan untuk transportasi udara diperoleh nol kejadian kecelakaan (*zero accident*) dan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan penerbangan pesawat sehingga diperoleh tingkat keselamatan transportasi udara sebesar 100,00%.

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan transportasi laut dan udara sehingga diperlukan upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian yang lebih intensif sesuai dengan faktor penyebab terjadinya kecelakaan kereta api khususnya anjlokan.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I 2026 terjadi 1 kejadian anjlokan kereta api yaitu anjlokan KA barang (Barapati) pada petak jalan antara Stasiun Serdang – Stasiun Payakabung dengan kronologis sebagai berikut:

a. Pada tanggal 7 Februari 2026 pukul 22:40 WIB terjadi kecelakaan anjlokan KA 3100 (Barapati) rangkaian ke-16 terputus dari rangkaian di depannya dan dua gerbong anjlok (GB459941 anjlok 1 as dan GB450067 anjlok 3 as) serta 3 gerbong terguling (GB450064, GB450061, GB450047);
b. Dampak kejadian kecelakaan KA tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional pada 9 KA;
c. Penyebab kejadian kecelakaan KA yaitu patahnya rel di KM 370+570;
d. Patahnya rel kereta api diakibatkan kegagalan material bersifat *brittle* yang diawali oleh retak permukaan kemudian dilakukan penanganan sementara dengan pemopokan (pengelasan) dan berkembang menjadi retak struktural, dengan lokasi patahan berada di atau dekat area pemopokan. Hal ini dikarenakan SOP pemopokan yang digunakan belum menetapkan kriteria teknis dan klasifikasi tingkat kerusakan rel secara jelas, sehingga pengambilan keputusan perawatan berpotensi bersifat subjektif. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kegagalan rel berulang dan menunjukkan bahwa penggantian rel merupakan opsi penanganan yang lebih tepat dibandingkan perbaikan sementara.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Triwulan I 2026 diantaranya:

a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM perkeretaapian dengan rincian:
    1) Pengujian prasarana perkeretaapian sebanyak 22 unit dan 8,767 km dengan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 13 sertifikat jalur dan bangunan termasuk sertifikasi fasilitas operasi;
    2) Pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 2.534 unit dengan sertifikasi sebanyak 1.247 sertifikat;
    3) Pengujian SDM perkeretaapian sebanyak 1.284 orang dengan sertifikasi sebanyak 853 sertifikasi.
b. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian diantaranya melalui inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretaapian termasuk pengawasan oleh Satuan Pelayanan masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api;
c. Pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Usaha/Pemerintah Daerah/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
d. Tindak lanjut hasil Audit SMKP diantaranya oleh:
    1) PT. KAI (Persero) Manajer Unit Makassar – Parepare;
    2) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
    3) PT. Celebes *Railway* Indonesia (CRI) ;
    4) PT. KAI (Persero) Divisi LRT Jabodebek.
e. Penyampaian himbauan keselamatan mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian;
f. Evaluasi manajemen tanggap darurat dan pemantauan tindak lanjutnya oleh Badan Usaha.

Selain itu, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

a. Bencana alam/cuaca ekstrim/*force major* di beberapa wilayah (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur), menyebabkan beberapa segmen prasarana perkeretaapian rusak/butuh penanganan;
b. Gangguan keamanan dari eksternal, diantaranya kondisi perlintasan sebidang yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kereta api;
c. Kebutuhan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan penanganan prasarana rusak/*urgent*;
d. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan, termasuk keterbatasan anggaran untuk pengawasan berkala terhadap kondisi dan pelaksanaan perawatan prasarana/sarana perkeretaapian. Pada Tahun 2026, beberapa kegiatan mendukung keselamatan belum dapat dilaksanakan diantaranya:
    1) Penggantian Jembatan BH 46 dan BH 59 Brumbung – Gubug, anggaran diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN;
    2) Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 dan BH 1164 Cirebon – Kroya, anggaran diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN;
    3) Penanganan Rintang Jalan Jalur KA antara Mluwungcipari, Kawunganten-Lebeng dan Sikampuh-Kroya segmen Banjar–Kroya, kegiatan ditunda untuk pemenuhan kebutuhan anggaran prioritas (butir 1 dan 2), lingkup kegiatan mendesak diusulkan masuk lingkup kegiatan IMO;
    4) Peningkatan Jembatan BH 397 dan BH 537 Blitar – Rejotangan, anggaran diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN;
    5) Penanganan Rintang Jalan lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam, kegiatan ditunda untuk pemenuhan kebutuhan anggaran prioritas (butir 1 dan 2), lingkup kegiatan mendesak diusulkan masuk lingkup kegiatan IMO;

6) Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO), saat ini belum berkontrak dikarenakan menunggu persetujuan rancangan Instruksi Presiden terkait penugasan PT KAI (persero) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kendala lain juga terdapat kebutuhan pemenuhan IMO Tahun 2026 untuk wilayah Sumatera Selatan dan Lampung serta LRT Sumsel (BTP Palembang, BPKAR Sumsel) sebesar Rp180 Milyar dimana anggaran Tahun 2026 diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN. Selain itu, juga terdapat kebutuhan anggaran IMO berupa *backlog* IMO Tahun 2023 sebesar Rp389,45 Milyar serta *backlog* IMO Tahun 2024 sebesar Rp1,3 T (proses pengajuan reviu BPKP).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan audit/inspeksi keselamatan yang memiliki hubungan kerja dengan badan usaha penyelenggara prasarana/sarana/operator perkeretaapian serta Pemerintah Daerah. Koordinasi juga diperlukan dengan BMKG dalam hal berbagi informasi kondisi cuaca untuk mendukung kelancaran operasional kereta api, KNKT terkait investigasi kejadian kecelakaan, serta Badan SAR terkait penanganan kejadian kecelakaan kereta api. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait penyelesaian kendala keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran khususnya untuk kegiatan pendukung keselamatan transportasi perkeretaapian.

Dalam mendukung pencapaian target Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 60 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait indikator kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian. Dari 60 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 14 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 14,286% dari 14 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi kegiatan penanganan risiko yang telah dilakukan pada Triwulan I 2026 yaitu:

1. Inventarisasi data prasarana sesuai dengan jenisnya terhadap penetapan sertifikasi uji pertama/berkala yang telah ditetapkan sampai Tahun 2025;
2. Bersurat ke Balai dan Badan Usaha untuk melakukan pengajuan sertifikasi uji berkala prasarana perkeretaapian.

Tabel 2- 26 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
1	Pengelolaan Keselamatan Perkeretaapian	34	3	11	0	0,000
2	Keselamatan dan Keamanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	8	1	3	2	66,667
3	Keselamatan dan Keamanan Bidang Sarana Perkeretaapian	18	-	-	-	-
Jumlah		**60**	**4**	**14**	**2**	**14,286**

Selain itu, pada periode Triwulan I 2026 juga tercatat 1 keterjadian risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian berupa kejadian kecelakaan kereta akibat kondisi jalur kereta api rusak/rel patah sebagaimana uraian pada Tabel berikut:

Tabel 2- 27 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026

Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
Kondisi jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus	Kurangnya perawatan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana	1 Kejadian	• Terdapat rel patah akibat ketidaktepatan penanganan sementara/ kurangnya perawatan prasarana perkeretaapian sehingga menyebabkan KA 3100 (Barapati) mengalami anjlok dan terguling pada segmen Serdang –Payakabung (Sumatera Selatan)

Sebagaimana Tabel di atas, kejadian kecelakaan kereta api dipengaruhi oleh kondisi prasarana perkeretaapian yang tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus sehingga terjadi anjlokan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui percepatan penyelenggaraan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) serta peningkatan pengawasan kelaikan prasarana guna tindak lanjut perawatan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana pada periode berikutnya.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan***:

1) Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, diantaranya berupa pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/*rampcheck*/audit dan pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);
2) Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Badan Usaha, Pemerintah Daerah) untuk penanganan daerah rawan gangguan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, diantaranya daerah rawan perlintasan sebidang, daerah rawan bencana alam/cuaca ekstrim;
3) Mendorong Badan Usaha untuk melakukan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) secara berkala/setiap bulan melalui fitur pelaporan badan usaha pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjadi bahan telaah/pengawasan dari Direktorat teknis/Balai terkait.

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

1) Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran keselamatan (realokasi anggaran RM Tahun 2026 dari kegiatan yang dapat ditunda/tidak dapat dilaksanakan), diantaranya kegiatan IMO, penggantian/peningkatan jembatan di beberapa lokasi, penanganan rintang jalan/amblesain, kegiatan mendesak lainnya;

2) Melaksanakan pengembangan fitur pengawasan keselamatan didukung *database* yang memadai pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian secara *realtime*.

c. ***Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai***:
Menugaskan pegawai dengan kompetensi/fungsional tertentu (inspektur perkeretaapian) untuk intensif melakukan inspeksi kondisi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian yang beroperasi.

Kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat semaksimal mungkin menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risiko kecelakaan.
b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga menganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

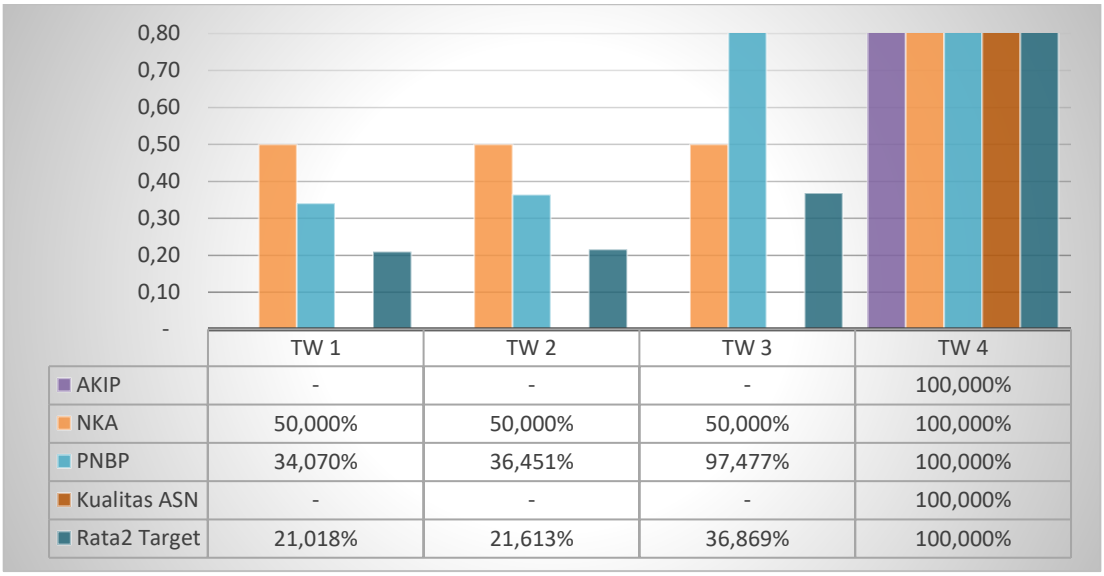
Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Perolehan PNBP dan Nilai Kualitas ASN.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2026 dan sebesar 21,018% pada Triwulan I 2026. Adapun uraian target sebagaimana pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-28 Uraian Target Indikator Kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2026

No	Komponen Penilaian	Target							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	-	83,750	100,000
2	Nilai Kinerja Anggaran	42,500	50,000	42,500	50,000	42,500	50,000	85,000	100,000
3	Perolehan PNBP	455,950M	34,070	487,808M	36,451	1.304,510M	97,477	1.338,270M	100,000
4	Nilai Kualitas ASN	-	-	-	-	-	-	89,500	100,000
Rata-Rata Target		21,018%		21,613%		36,869%		100,000%	



Gambar 2-6 Uraian Target Triwulan Indikator Kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2026

Tingkat Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Target Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 83,750 dan pada Triwulan I 2026 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV 2026) dikarenakan evaluasi/penilaian dilaksanakan secara berjenjang pada Triwulan II 2026 dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian kemudian dilaksanakan *assessment* oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pada Triwulan I 2026 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP ***(Tingkat Pencapaian = 0,000%)***.

Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, dimana nilai kinerja anggaran tersebut dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Adapun Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 85,000 dan pada Triwulan I 2026 ditargetkan sebesar 42,500 (50,000% dari target Tahun 2026). Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode Triwulan I 2026 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu adalah sebesar 36,815 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 0,270;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 73,360.

Dengan realisasi sebesar 36,815, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 sebesar 43,312% dari target Tahun 2026 sebesar 85,000 ***(Tingkat Pencapaian = 43,312%).***

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tingkat pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi perolehan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada dokumen DIPA Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 dan pada Triwulan I Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp455.950.163.534,00 atau sebesar 34,070%. Berdasarkan data pada aplikasi *MyIntress* dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2026 sebesar Rp241.775.985.162,00. Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 29 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**	**1.097.243.054.000**	**89.529.105.724**	**8,159**
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.302.744.000	140.271.884	6,092
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	3.883.450.000	552.940.000	14,238
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.087.623.104.000	88.319.893.840	8,120
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3.433.756.000	516.000.000	15,027
2	**Pendapatan BLU**	**97.654.591.000**	**15.460.590.128**	**15,832**
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	85.450.717.000	14.803.352.986	17,324
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.978.500.000	165.360.000	1,657
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.100.000.000	392.360.608	35,669
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000	56.700.000	5,038
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	g. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	h. Pendapatan Lain-Lain BLU	-	42.816.534	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**	**143.372.000.000**	**136.786.289.310**	**95,407**
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	114.448.000.000	1.593.692.132	1,393
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.924.000.000	-	-
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.214.812.323	-
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	512.223	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	13.473.684	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	129.293.048.819	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.616.931.950	-
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.053.818.179	-
Jumlah		**1.338.269.645.000**	**241.775.985.162**	**18,066**

Dengan realisasi sebesar Rp241.775.985.162,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan I 2026 sebesar 18,066% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 ***(Tingkat Pencapaian = 18,066%)***.

Tingkat Pencapaian Nilai Kualitas ASN

Untuk mengetahui dan memetakan kualitas ASN, pengukuran Nilai Kualitas ASN dilakukan dengan mengadopsi metodologi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas ASN berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas jabatan masing-masing pegawai.

Hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN diharapkan dapat menjadi dasar pemetaan kualitas ASN serta rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah. Selain itu, pengukuran ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam peningkatan kualitas manajemen SDM serta kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori:

1. 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi;
2. 81 – 90: Kategori Tinggi;
3. 71 – 80: Kategori Sedang;
4. 61 – 70: Kategori Rendah;
5. 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.

Penilaian kualitas ASN terdiri dari 4 aspek utama yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian:

1. ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2. ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal/aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK);
3. ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;
4. ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Tahun 2026 ditargetkan Nilai Kualitas ASN sebesar 89,500 dan pada periode Triwulan I 2026 belum ditetapkan target karena menyesuaikan periode penilaian dan target ditetapkan pemenuhannya pada Triwulan IV 2026. Pada periode Triwulan I 2026 masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK dan aplikasi e-Kinerja oleh masing-masing pegawai. Secara pararel juga dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/pelatihan/*workshop* baik yang dilaksanakan mandiri oleh Setditjen/Direktorat teknis maupun lembaga lain, serta himbauan peningkatan disiplin dan kinerja pegawai secara berkala oleh Pimpinan masing-masing unit kerja.

Selain itu, untuk optimalisasi perolehan nilai juga dilakukan pemantauan terhadap capaian Nilai Kualitas ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala (setiap triwulan). Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada periode Triwulan I 2026 diperoleh nilai sementara kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 86,710 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari perolehan periode sebelumnya (Triwulan IV 2025) yakni sebesar 86,090. Adapun rincian perubahan/peningkatan nilai sementara kualitas ASN pada Triwulan I 2026 sebagai berikut:

Tabel 2- 30 Pemantauan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I 2026

No	Kriteria	Bobot	Triwulan IV 2025	Triwulan I 2026
1	Kualifikasi	25,00	23,56	23,37
2	Kompetensi	40,00	31,12	32,41
3	Kinerja	30,00	26,41	25,96
4	Disiplin	5,00	5,00	4,97
Nilai Kualitas ASN			**86,09**	**86,71**

Dengan demikian, pada Triwulan I 2026 belum terdapat penetapan hasil pengukuran terhadap Tingkat Pencapaian Nilai Kualitas ASN ***(Tingkat Pencapaian = 0,000%)***.

Mengacu pada perolehan tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing komponen penilaian di atas (AKIP, NKA, PNBP, Nilai Kualitas ASN), maka diperoleh realisasi pencapaian tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2026 sebesar 15,345% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \textit{Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian} &= (TP\ AKIPDJKA + TP\ NKADJKA + TP\ PNBP + TP\ ASNDJKA)/4 \\ &= (0{,}000\% + 43{,}312\% + 18{,}066\% + 0{,}000\%)\ /\ 4 = 61{,}378\ /\ 4 \\ &= 15{,}345 \end{aligned}$$

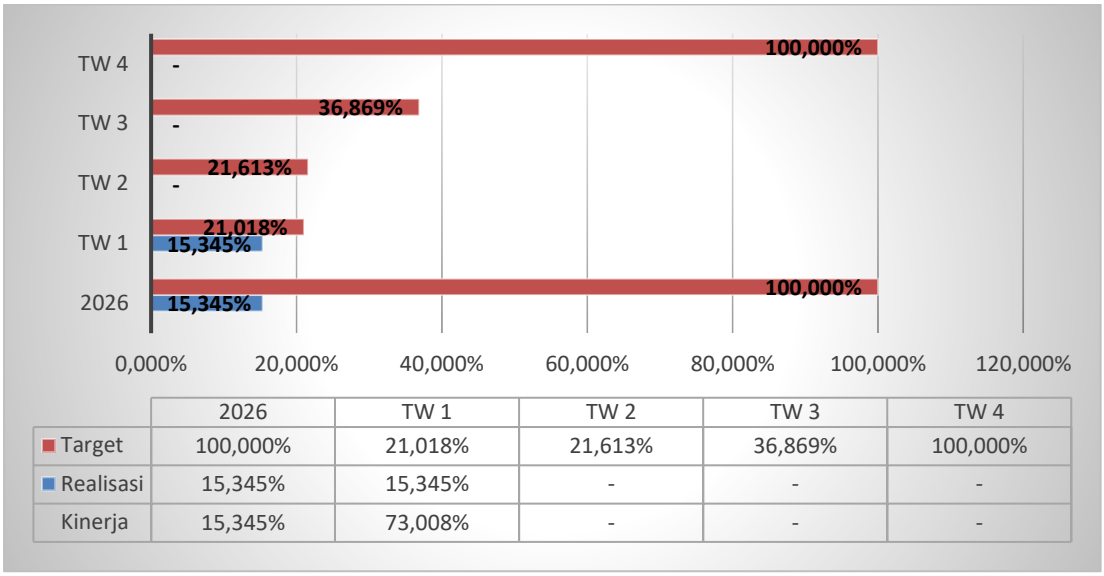
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 15,345%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 73,008% terhadap target Triwulan I dan capaian kinerja sebesar 15,345% terhadap target Tahun 2026. Capaian kinerja pada Triwulan I masih di bawah kriteria *on the right track* (90-110%) diantaranya karena tidak tercapainya target kinerja PNBP serta Nilai Kinerja Anggaran, untuk itu diperlukan peninjauan rencana aksi per Triwulan. Realisasi kumulatif per Triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-31 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan	%	100,000	21,018	21,613	36,869	100,000	15,345	-	-	-	73,008	-	-	-	15,345



Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) dilakukan terhadap capaian dari komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran dan Perolehan PNBP, sedangkan untuk Nilai Evaluasi AKIP dan Nilai Kualitas ASN tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada periode Triwulan I 2026 belum terdapat realisasi kinerja. Perbandingan kinerja pada komponen Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan perolehan PNBP, dilakukan perbandingan terhadap realisasi antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu (terkait NKA) dan *MyIntress* (terkait PNBP).

Tabel 2-32 Realisasi NKA Per-Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	1,47	91,15	46,31
2	Inspektorat Jenderal	0,00	75,00	37,50
3	Ditjen Perhubungan Darat	1,63	81,75	41,69
4	Ditjen Perhubungan Laut	0,83	82,01	41,42
5	Ditjen Perhubungan Udara	2,60	82,32	42,46
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**0,270**	**73,360**	**36,815**
7	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	0,00	72,07	36,04
8	Badan Kebijakan Transportasi	0,94	90,08	45,51
9	BPSDM Perhubungan	3,07	80,26	41,67

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 menduduki peringkat ke-8 dari 9 unit kerja eselon I dengan realisasi sebesar 36,815. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan/peningkatan komponen perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian *output* khususnya pada Rincian *Output* (RO) dengan kategori SBK baik SBKU maupun SBKK di periode berikutnya.

Tabel 2-33 Perolehan PNBP Per-Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.519.834.000	1.192.247.664	33,87
2	Inspektorat Jenderal	-	10.400.970	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.309.642.722.000	323.309.515.424	24,69
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.632.393.145.000	1.742.074.890.644	30,93
5	Ditjen Perhubungan Udara	2.090.049.630.000	839.047.313.560	40,14
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**1.338.269.645.000**	**241.775.985.162**	**18,066**
7	Badan Kebijakan Transportasi	-	49.764	-
8	BPSDM Perhubungan	1.545.065.320.000	381.651.308.205	24,70
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	-	-	-
	Jumlah	**11.918.940.296.000**	**3.529.061.711.393**	**29,61%**

Sedangkan untuk perolehan PNBP antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa secara persentase perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (18,066%) berada di posisi terendah dari 6 unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki target PNBP. Sedangkan berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp1,74 triliun. Capaian unit kerja Eselon I Ditjen Perkeretaapian masih di bawah rata-rata perolehan PNBP tingkat Kementerian Perhubungan yakni sebesar 29,61%, untuk itu diperlukan upaya peningkatan perolehan PNBP diantaranya melalui penyelesaian pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI sebesar Rp1.334.108.662.510,00 yang direncanakan pembayaran secara bertahap pada Triwulan II-III 2026 serta upaya optimalisasi pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Triwulan I 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari tidak tercapainya target Triwulan I 2026 pada 2 dari 4 komponen penilaian, yaitu komponen Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Perolehan PNBP (pengukuran terhadap Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN belum dilakukan pada Triwulan I 2026). Pencapaian yang rendah pada realisasi NKA dan PNBP berdampak signifikan pada kinerja indikator secara *aggregat* dimana masih di bawah kriteria *on the right track* (90-110%).

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya optimalisasi khususnya dalam percepatan realisasi anggaran serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP. Selain itu, perbaikan penyelenggaraan SAKIP yang berkelanjutan termasuk penguatan kompetensi, kinerja dan disiplin ASN juga perlu terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja pada Triwulan I 2026, diantaranya:

a. Penyelenggaraan SAKIP:

1) Penetapan dokumen perencanaan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2025, arah kebijakan Tahun 2025-2029, analisa mendalam terkait ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Sekretariat, Direktorat, Balai);
2) Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 secara berkala dan tepat waktu meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV 2025, Laporan Kinerja 2025, Penetapan Indikator Kinerja, Pohon Kinerja, serta DIPA Tahun 2026;
3) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja berjenjang dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja;
4) Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, termasuk pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5) Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2025, serta monitoring kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-*Performance*, e-Kinerja, Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan lainnya) untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian;

6) Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan bimbingan teknis dan penjelasan/penyamaaan persepsi terkait lembar kerja evaluasi dan kebutuhan data dukung dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian PANRB;
7) Monitoring pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dengan penyusunan berita acara, serta pengembangan fitur monitoring rekomendasi hasil evaluasi pada Portal Layanan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan/dialog kinerja yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal.

b. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran:

1) Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi periode sebelumnya;
2) Menyampaikan himbauan dan surat edaran kepada seluruh Satuan Kerja terkait mekanisme revisi anggaran, buka blokir, luncuran, kontrak tahun jamak, serta penilaian IKPA Tahun 2026 untuk memberikan pedoman yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan anggaran serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
3) Melakukan inventarisasi data blokir pada halaman IV.A DIPA sebesar sebesar Rp1.316.190.132.000,00 termasuk mengajukan usulan buka blokir (kode 2) sebesar Rp1.399.000.000,00 sebagai tindak lanjut kebijakan strategis belanja pemerintah dengan mempercepat proses pelaksanaan anggaran dan memastikan ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan prioritas;

4) Melakukan identifikasi kebutuhan dan kekurangan belanja pegawai Tahun Anggaran 2026 pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memastikan kecukupan alokasi anggaran belanja pegawai serta mengantisipasi potensi kekurangan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
5) Melaksanakan pembahasan dan proses revisi anggaran, termasuk pengajuan kontrak tahun jamak sesuai kebutuhan program/kegiatan, guna meningkatkan fleksibilitas dan ketepatan alokasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan;
6) Meningkatkan kinerja perencanaan anggaran melalui koordinasi dengan Satuan Kerja dalam pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI serta penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU), guna memastikan akuntabilitas kinerja serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
7) Melakukan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA secara berkala, guna meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi penyerapan anggaran serta mendukung pencapaian nilai kinerja anggaran yang optimal.

c. Pengelolaan PNBP:

1) Monitoring dan evaluasi pencapaian target PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada seluruh unit kerja yang dilaksanakan pada bulan Februari 2026 termasuk melakukan pembahasan terkait potensi perolehan PNBP dari sumber pendapatan lainnya;
2) Penyesuaian tarif PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun untuk PNBP yang berasal dari sewa/pemanfaatan aset berupa tanah, gedung dan bangunan tetap mengikuti tarif penilaian aset yang sudah ditetapkan oleh KPKNL;
3) Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN guna memastikan seluruh usulan berproses sesuai ketentuan;

4) Pengelolaan PNBP khususnya pembayaran TAC dengan menindaklanjuti permohonan keringanan PNBP TAC dari PT.KAI dimana telah disampaikan surat Menteri Perhubungan Nomor KU.102/1/1/MHB/2026 tanggal 30 Maret 2026 bahwa usulan penundaan pembayaran TAC yang dapat disetujui sebesar Rp1.009.000.000.000,00 dan diwajibkan untuk dibayar maksimal pada tanggal 14 Agustus 2026, sedangkan sisanya sebesar Rp325.108.662.510,00 (nilai pokok dan sanksi administratif) tidak dapat disetujui sehingga harus dibayarkan paling lambat tanggal 14 April 2026;
5) Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dana PNBP dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target PNBP, termasuk mendorong peningkatan kualitas dan layanan.

d. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN):

1) Pelaksanaan evaluasi pembahasan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis perkeretaapian Tahun 2025 dan persiapan program pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis perkeretaapian Tahun 2026 guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan diklat yang lebih terarah, berbasis kebutuhan organisasi, serta mendukung peningkatan kompetensi teknis ASN secara berkelanjutan;
2) Sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisa *gap* kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mewujudkan pengelolaan SDM yang berbasis *merit system*, meningkatkan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan kebutuhan jabatan, serta mendukung pengembangan karier ASN secara optimal;
3) Perbaikan dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi) pada tanggal 24 Februari 2026;

4) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi SIK Kementerian Perhubungan untuk mendukung penerapan manajemen talenta melalui surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/4/K1/DJKA/2026 tanggal 12 Februari 2026, bahwa ASN wajib memperbarui data SIK secara lengkap dan akurat karena data SIK menjadi dasar manajemen talenta dan karier, sehingga ketidaklengkapan data dapat menghambat pengembangan, promosi, dan penilaian ASN;
5) Melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung;
6) Mendorong peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi BPSDMP, Setjen Kementerian Perhubungan, serta lembaga pendidikan/pelatihan lainnya baik kompetensi teknis perkeretaapian maupun kompetensi manajerial.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) baik secara internal maupun eksternal. Pada lingkup internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tercermin dalam sinergi antara Direktorat, Bagian dan Balai pada proses perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk unit di lingkungan Kementerian Perhubungan mencakup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pada lingkup eksternal, kerja sama dan hubungan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Bappenas, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian ATR/BPN, Badan Usaha dan instansi lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kinerja diantaranya pembinaan penyelenggaraan SAKIP, perencanaan dan pelaksanaan APBN, program lanjutan pensertifikatan aset/rumija/rumaja, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan organisasi. Kolaborasi

ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien dan akuntabel.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/setiap triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 104 risiko yang diidentifikasi dari 14 proses bisnis terkait indikator kinerja tata kelola pemerintahan. Dari 104 risiko tersebut, terdapat 6 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 18 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada Triwulan I 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 22,22% dari 18 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian kegiatan penanganan risiko yang telah dilakukan pada periode Triwulan I 2026 yaitu:

a. Percepatan usulan buka blokir sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
b. Melakukan rotasi berkala bagi personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. Integrasi sistem dan data antara Badan Usaha dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui API; dan
d. Penyempurnaan KAK/RAB serta penyusunan rekomendasi teknis untuk usulan buka blokir.

Tabel 2-34 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
1	Pelaksanaan Anggaran	6	1	7	1	**14,29**
2	Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	6	0	-	-	**-**
3	Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	6	0	-	-	**-**
4	Pengadaan Barang dan Jasa	9	1	3	1	**33,33**

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)	
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	Triwulan I	%
5	Pengelolaan BMN	6	0	-	-	-
6	Pengelolaan Karier SDM	6	0	-	-	-
7	Pengelolaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai	6	0	-	-	-
8	Pengelolaan Kinerja Organisasi	9	1	1	1	**100,00**
9	Pengelolaan Kinerja Pegawai	6	0	-	-	-
10	Pengelolaan PNBP dan BLU	8	0	-	-	-
11	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran	6	3	7	1	**14,29**
12	Pengembangan SDM	12	0	-	-	-
13	Perencanaan dan Pengadaan SDM	12	0	-	-	-
14	Perencanaan Strategis Organisasi	6	0	-	-	-
Jumlah		**104**	**6**	**18**	**4**	**22,22**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan pada Triwulan I 2026 diantaranya:

a. Penambahan fitur dalam Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu fitur monitoring rekomendasi hasil evaluasi untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam penyelenggaraan SAKIP serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi berjalan optimal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
b. Penerapan manajemen talenta serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis *GAP* kompetensi guna mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN melalui pembinaan manajerial dan pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian;
c. Pelaksanaan kegiatan *Refreshment* Manajemen Risiko guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas ASN dalam penerapan manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir potensi risiko dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi tingkat Eselon I terhadap unit kerja Sekretariat/Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
2) Koordinasi dan pembahasan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan dan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026;
3) Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran;
4) Koordinasi lanjutan untuk pembayaran PNBP TAC serta inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa aset/lahan/bangunan yang belum dipungut PNBP, termasuk melakukan penertiban atas pihak yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Mengusulkan kembali kebutuhan anggaran mendesak dan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan pemenuhan dari realokasi anggaran kegiatan hasil identifikasi yang dapat ditunda/belum berkontrak/tidak dapat dilaksanakan yang bersumber dari Rupiah Murni.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

1) Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi;

2) Mendorong pembangunan zona integritas dengan pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan, termasuk menyelenggarakan simulasi penilaian internal (*pre-assessment*) unit kerja yang diusulkan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil penilaian.

Adapun pencapaian target Tata Kelola Pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

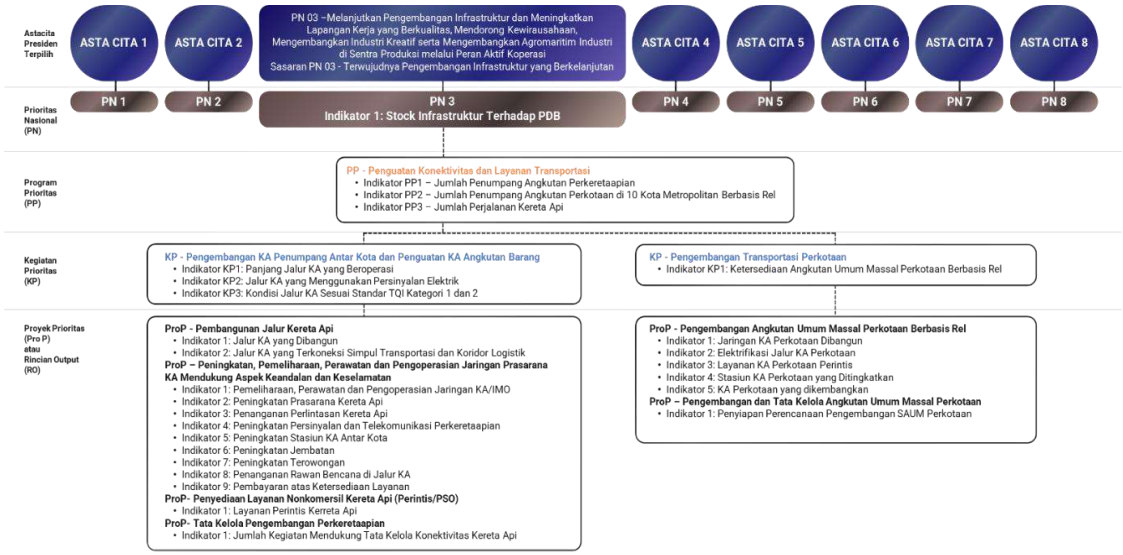
a. Peningkatan efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor perkeretaapian;
b. Penguatan sistem manajemen kinerja dan pelaksanaan prinsip *good governance* melalui penerapan SAKIP yang semakin terintegrasi dan berkualitas;
c. Optimalisasi pengelolaan anggaran, penerimaan PNBP, serta pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan keselamatan dan layanan perkeretaapian;
d. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi difokuskan pada Prioritas Nasional 3 (PN 3), termasuk memberikan dukungan prioritas nasional lainnya melalui beberapa Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam implementasi PN3, sektor transportasi perkeretaapian dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP) Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi dengan 2 Kegiatan Prioritas (KP) yaitu (1) Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang, serta (2) Pengembangan

Transportasi Perkotaan. Selanjutnya masing-masing Kegiatan Prioritas (KP) dijabarkan menjadi beberapa Proyek Prioritas (ProP) atau Rincian *Output* (RO) sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 2- 8 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Prioritas Nasional 3

Adapun target indikator RPJMN Tahun 2025-2029 terkait transportasi perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2- 35 Target Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 terkait Transportasi Perkeretaapian

Indikator RPJMN	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
• Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	501 (2024)	519	538	558	579	601
• Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	685 (2023)	850* (460)**	870* (476)**	895* (493)**	925* (511)**	950* (529)**
• Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,86 (2024)	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
• Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.880 (2023)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.937
• Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63 (2023)	65	66	67	68	70
• Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	93,85 (2023)	94	95	96	97	98
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
• Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/Hari	2,989 (2023)	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836

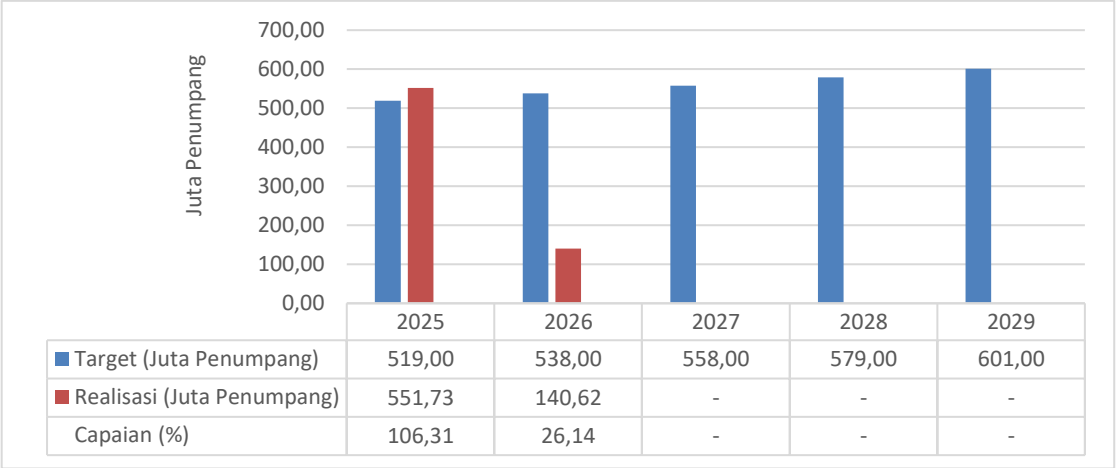
**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN*
***) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)*

A. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api (PP1)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa pengguna transportasi perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan diantaranya melalui peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan KA penumpang antar kota dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Sampai dengan Triwulan I 2026, jumlah penumpang angkutan kereta api telah mencapai 140,62 juta

penumpang atau sekitar 26,14% dari target Tahun 2026 berdasarkan RPJMN sebesar 538,00 juta penumpang. Capaian tersebut masih *on the right track* (>25%) untuk dapat mencapai target 100,00% pada Triwulan IV 2026, serta juga menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai kereta api sebagai moda transportasi utama yang aman dan nyaman.

Dalam rangka mendukung kinerja angkutan kereta api, diperlukan percepatan kontrak penyelenggaraan kereta api perintis dan *Public Service Obligation* (PSO), dimana masih menunggu penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Selain itu, dalam penyelenggaraan angkutan kereta api juga perlu dipastikan pemenuhan sarana kereta api sesuai kebutuhan perjalanan kereta api dan memenuhi standar pelayanan minimum, termasuk ketersediaan sarana cadangan untuk memastikan layanan dapat berkelanjutan/tidak berhenti guna memberikan layanan yang optimal kepada Masyarakat.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (Juta Penumpang)	519,00	538,00	558,00	579,00	601,00
Realisasi (Juta Penumpang)	551,73	140,62	-	-	-
Capaian (%)	106,31	26,14	-	-	-

Gambar 2- 9 Capaian RPJMN terkait Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan I 2026

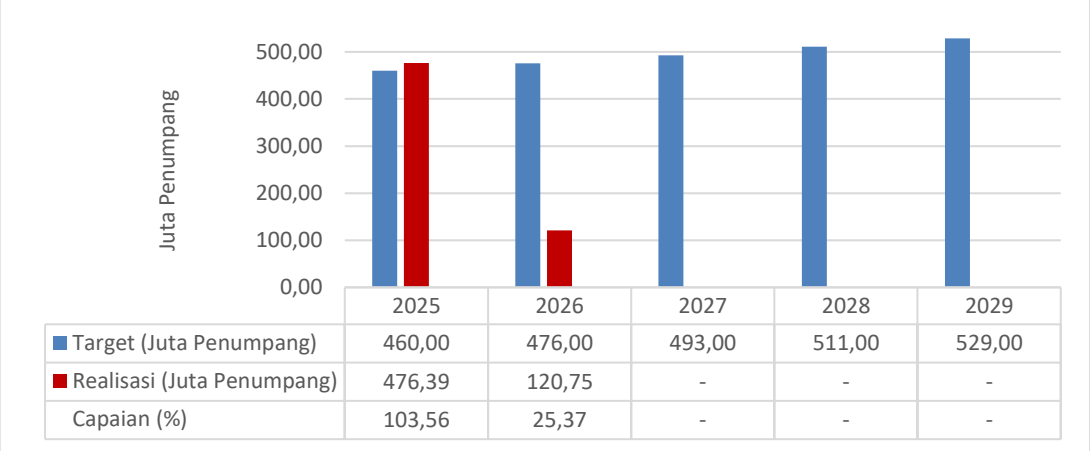
B. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di Kota Metropolitan Berbasis Rel (PP2)

Target dan capaian jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 Kota Metropolitan pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 merupakan gabungan dari angkutan perkotaan berbasis rel dan angkutan darat dengan target pada Tahun 2026 sebesar 870 juta penumpang. Dari target Tahun 2026 tersebut, jumlah untuk angkutan berbasis rel/kereta api pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 476 juta penumpang untuk 6 kota metropolitan. Adapun realisasi

jumlah penumpang angkutan perkotaan berbasis rel di 6 kota metropolitan pada Triwulan I 2026 mencapai 120,75 juta penumpang atau 25,37% dari target angkutan berbasis rel/kereta api sebesar 476 juta penumpang di Tahun 2026. Rincian realisasi jumlah penumpang kereta perkotaan untuk 6 kota metropolitan pada Triwulan I 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Kereta perkotaan Jakarta (Jabodetabek) realisasi sebanyak 109.446.982 penumpang;
2. Kereta perkotaan Bandung sebanyak 1.058.026 penumpang;
3. Kereta perkotaan Medan sebanyak 1.084.242 penumpang;
4. Kereta perkotaan Surabaya sebanyak 4.067.386 penumpang;
5. Kereta perkotaan Palembang sebanyak 5.049.997 penumpang;
6. Kereta perkotaan Semarang sebanyak 40.765 penumpang.

Hal tersebut menggambarkan cukup tingginya preferensi masyarakat perkotaan terhadap transportasi massal berbasis rel yang terus perlu diperkuat dari sisi layanan, frekuensi, dan integrasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas angkutan perkotaan yang memadai dan nyaman termasuk integrasi antar moda serta dukungan subsidi keperintisan dan PSO. Upaya lainnya juga dilakukan dengan terus mendorong kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian di wilayah perkotaan termasuk dengan pembiayaan alternatif, diantaranya pengembangan KA perkotaan Jabodatebek (perpanjangan LRT Jakarta dan MRT Jakarta, pengembangan/peningkatan stasiun, peningkatan fasilitas operasi, perpanjangan elektrifikasi, modernisasi sarana KRL), pengembangan KA perkotaan Bandung raya (pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi), pengembangan KA perkotaan Yogyakarta – Solo (perpanjangan elektrifikasi), pengembangan KA perkotaan Surabaya (pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi), pengembangan KA perkotaan Medan (pembangunan jalur KA layang).

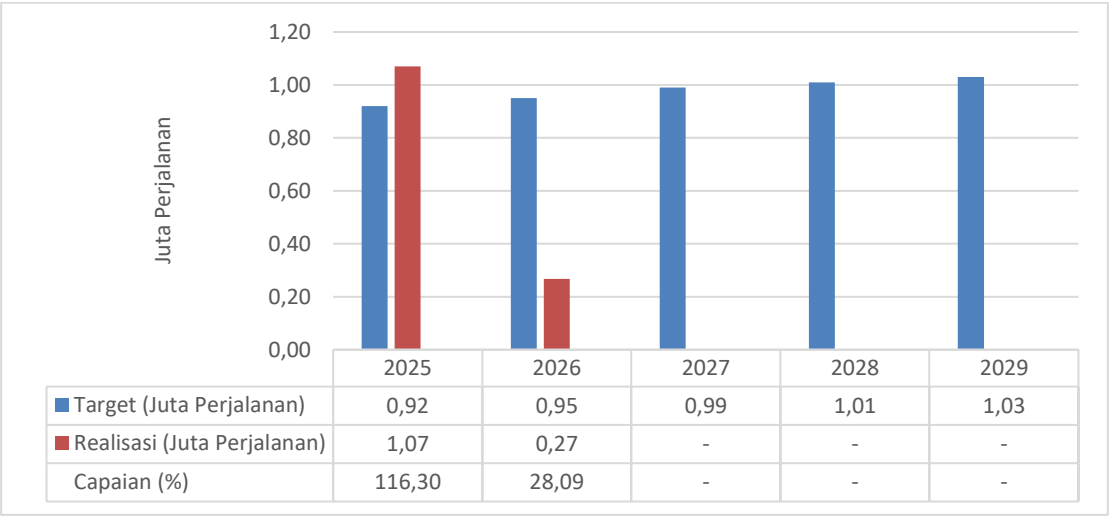


	2025	2026	2027	2028	2029
Target (Juta Penumpang)	460,00	476,00	493,00	511,00	529,00
Realisasi (Juta Penumpang)	476,39	120,75	-	-	-
Capaian (%)	103,56	25,37	-	-	-

Gambar 2- 10 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di Kota Metropolitan Berbasis Rel Periode Triwulan I 2026

C. Jumlah Perjalanan Kereta Api (PP3)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat, telah diprogramkan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang disusun mempertimbangkan kondisi prasarana, sarana, dan sumber daya lainnya termasuk kebutuhan masyarakat. GAPEKA tersebut selanjutnya menjadi acuan realisasi perjalanan kereta api. Jumlah perjalanan kereta api ditargetkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026 sebesar 0,95 juta perjalanan, dan pada Triwulan I 2026 telah terealisasi perjalanan kereta api mencapai 0,27 juta perjalanan atau sebesar 28,09% dari target Tahun 2026 tersebut.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (Juta Perjalanan)	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03
Realisasi (Juta Perjalanan)	1,07	0,27	-	-	-
Capaian (%)	116,30	28,09	-	-	-

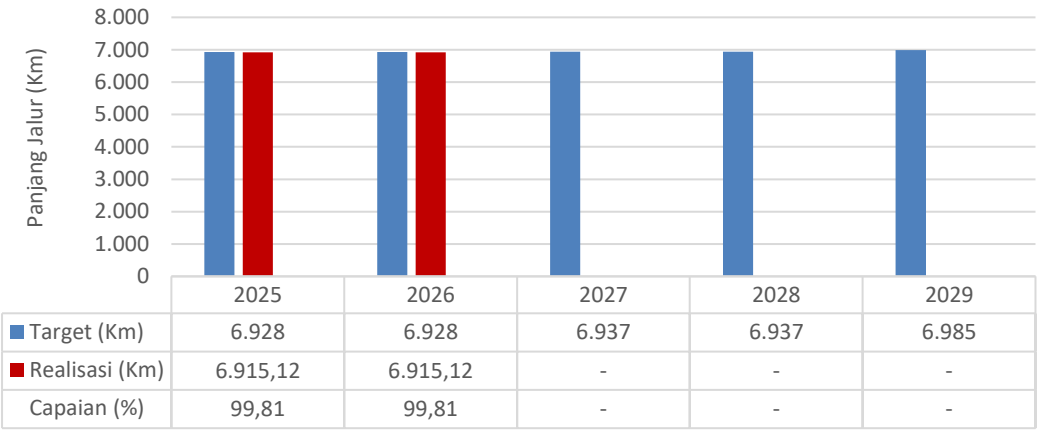
Gambar 2- 11 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan I 2026

Pemenuhan target jumlah perjalanan kereta api salah satunya dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat terutama di wilayah perkotaan dalam penggunaan transportasi massal kereta api serta didukung dengan pengaturan grafik perjalanan kereta api yang optimal dan dukungan kapasitas prasarana dan sarana perkeretaapian yang memadai.

D. Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi (KP1)

Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan konektivitas nasional sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sebagai moda transportasi andalan baik wilayah perkotaan maupun antar kota. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029 telah ditetapkan target panjang jalur kereta api yang beroperasi pada Tahun 2026 sepanjang 6.928,00 Km'sp dan realisasi sepanjang 6.915,12 Km'sp atau capaian sebesar 99,81%. Terdapat sinkronisasi dan *updating* data panjang jalur dengan seluruh Balai Teknik Perkeretaapian pada awal Triwulan I 2026 dengan hasil terdapat penyesuaian lintas aktif. Disamping itu juga terdapat kendala atau tantangan pada Triwulan I 2026 dalam pembangunan jalur kereta api diantaranya:

1. *Force major*/bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang mengakibatkan pengurangan panjang rel beroperasi (jalur KA lintas Muara Satu-Kuta Blang tidak dapat beroperasi dan membutuhkan kajian teknis untuk perbaikan/rehabilitasi/rekonstruksi);
2. Kendala dalam penyiapan lahan untuk beberapa kegiatan pembangunan jalur kereta api (jalur ganda kereta api *elevated* Medan – Binjai, jalur kereta api Makassar - Parepare);
3. Kendala ketersediaan anggaran/APBN sehingga kegiatan pembangunan tertunda (jalur ganda kereta api *elevated* Solo Balapan – Kalioso), termasuk minimnya minat investasi swasta dalam pembangunan jalur kereta api baru;
4. Ketidaklengkapan *readiness criteria* dan/atau keperluan reviu dokumen perencanaan teknis sehingga kegiatan pembangunan tertunda (jalur ganda kereta api Sepanjang – Wonokromo).



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (Km)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
Realisasi (Km)	6.915,12	6.915,12	-	-	-
Capaian (%)	99,81	99,81	-	-	-

Gambar 2- 12 Capaian Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi Periode Triwulan I 2026

E. Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (KP2)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program peningkatan kehandalan perjalanan kereta api diantaranya dengan upaya peningkatan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan dan lebih menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta mendukung peningkatan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kinerja moda kereta api dan mendorong minat masyarakat untuk *shitfing* dari moda angkutan pribadi ke angkutan kereta api.

Pada Tahun 2026, Indikator jalur kereta api yang menggunakan persinyalan elektrik ditargetkan sebesar 66,00% dengan *baseline* Tahun 2025 dan realisasi sampai dengan Triwulan I 2026 sebesar 65,21%. Adapun untuk pemenuhan target di Tahun 2026, sedang berprogres perizinan/pemenuhan persyaratan dokumen perencanaan teknis terkait kegiatan peningkatan sistem persinyalan yang dilaksanakan oleh badan usaha/PT KAI pada 2 lokasi yaitu Lahat dan Marapi (Sumatera Selatan).



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (%)	65,00	66,00	67,00	68,00	70,00
Realisasi (%)	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00
Capaian (%)	100,32	98,80	0,00	0,00	0,00

Gambar 2-13 Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik Periode Triwulan I Tahun 2026

F. Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (KP3)

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kelancaran serta menjamin keselamatan perjalanan kereta api, diperlukan upaya peningkatan dan perawatan jalur kereta api secara berkala yang salah satu acuannya dapat menggunakan hasil penilaian *Track Quality Index (TQI).* TQI merupakan ukuran kondisi jalur kereta api (nyaman/aman/waspada/bahaya) serta kecepaatan pengoperasiannya, sehingga dapat digunakan dalam penentuan titik petak atau koridor jalan rel yang diprioritaskan untuk ditingkatkan/dirawat.

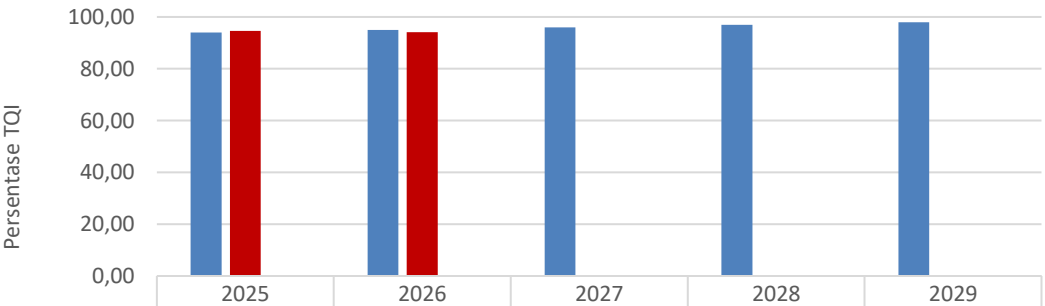
Perhitungan persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI mengacu pada hasil pengukuran Badan Usaha dengan supervisi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai *Track Quality Index* (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2- 36 Klasifikasi *Track Quality Index* (TQI)

Klasifikasi TQI	Kualifikasi			
TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori I	Kecepatan	:	100 s.d 120 km/jam
		Kondisi	:	Nyaman
	Kategori II	Kecepatan	:	80 s.d 100 km/jam
		Kondisi	:	Aman
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori III	Kecepatan	:	60 s.d 80 km/jam
		Kondisi	:	Waspada
	Kategori IV	Kecepatan	:	40 s.d 60 km/jam
		Kondisi	:	Bahaya

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, kondisi jalur kereta api sesuai standar TQI Kategori 1 dan 2 ditargetkan pada Tahun 2026 sebesar 95,00%. Adapun capaian kondisi jalur kereta api sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2 pada Triwulan I 2026 diperoleh sebesar 94,07% (panjang jalur 5.636,718 km dari panjang jalur terukur 5.992,003 km) atau capaian sebesar 99,02% dari target RPJMN tersebut. Hasil pengukuran TQI periode Triwulan I 2026 menggunakan data hasil pengukuran pada Triwulan IV 2025 dikarenakan pengukuran periode Triwulan I 2026 masih berproses pembahasan/evaluasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Badan Usaha/PT KAI.

Terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan target nilai TQI, diantaranya keterbatasan anggaran karena terdampak kebijakan blokir/efisiensi pada beberapa kegiatan pendukung berupa peningkatan dan rehabilitasi/perawatan jalur kereta api (Lampegan – Cianjur, penanganan rintang jalan/penggantian jembatan, IMO BTP Palembang dan LRT Sumsel). Selain itu kegiatan IMO/pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian saat ini juga belum berkontrak dikarenakan menunggu persetujuan rancangan Instruksi Presiden terkait penugasan badan usaha/PT KAI (persero) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga.



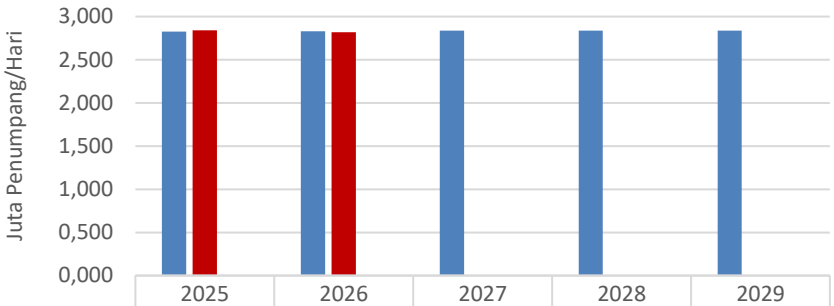
	2025	2026	2027	2028	2029
Target (%)	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
Realisasi (%)	94,64	94,07	-	-	-
Capaian (%)	100,68	99,02	-	-	-

Gambar 2- 14 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan I Tahun 2026

G. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel

Ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel diukur berupa kapasitas layanan kereta api perkotaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat (juta penumpang/hari). Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, ditargetkan ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel

pada Tahun 2026 sebesar 2,828 juta penumpang/hari. Adapun realisasi sampai dengan Triwulan I 2026 dengan kapasitas layanan kereta api perkotaan sebanyak 2,820 juta penumpang/hari atau capaian sebesar 99,717% dari target RPJMN. Beberapa kendala dalam pemenuhan target ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel diantaranya keterbatasan sarana perkeretaapian khususnya KRL yang masih dalam proses penambahan oleh Badan Usaha sebagaimana araham Presiden RI. Selain itu kapasitas dan kehandalan prasarana juga perlu dievaluasi untuk mendukung peningkatan kapasitas yang dibutuhkan diantaranya terkait kapasitas gardu listrik, kondisi rel/jembatan, serta dukungan penanganan perlintasan sebidang agar kapasitas lintas dapat ditingkatkan.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (Juta Penumpang/Hari)	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836
Realisasi (Juta Penumpang/Hari)	2,840	2,820	-	-	-
Capaian (%)	100,531	99,717	-	-	-

Gambar 2- 15 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Periode Triwulan I Tahun 2026

Dengan kinerja penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis rel yang baik, maka diharapkan dapat mendorong tingginya tingkat pemanfaatan layanan kereta api oleh masyarakat serta mencerminkan efektivitas kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan keberlanjutan transportasi perkotaan.

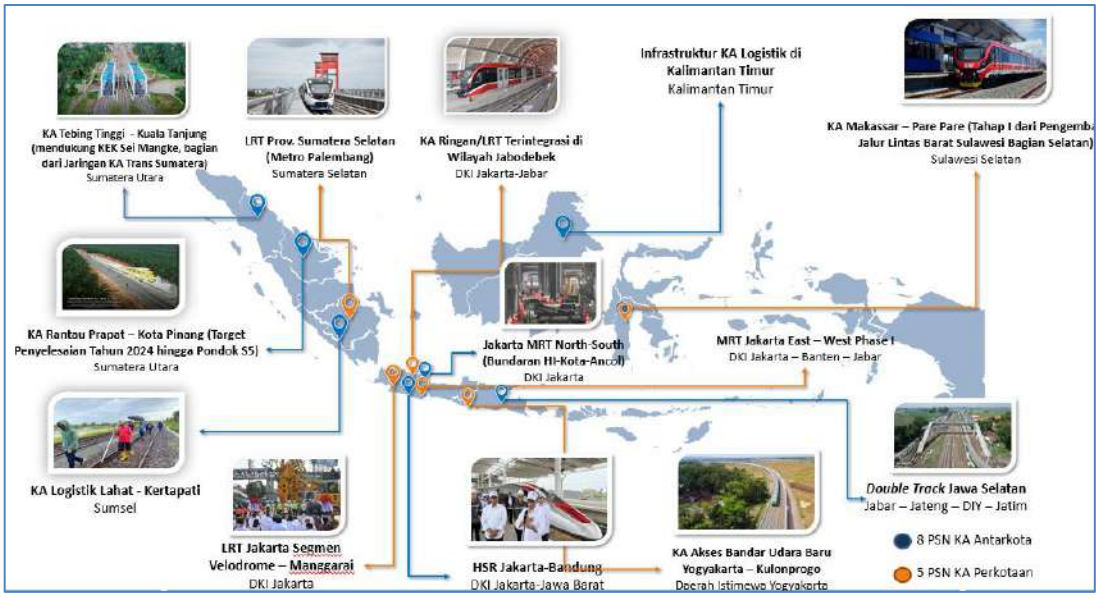
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada periode Triwulan I 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya diantaranya:

A. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, PSN bidang perkeretaapian sebanyak 13 proyek yang terdiri dari perkeretaapian antar kota sebanyak 8 proyek dan perkeretaapian perkotaan sebanyak 5 proyek sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 2- 16 Proyek Strategis Nasional Bidang Perkeretaapian

Berikut uraian dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang perkeretaapian posisi Triwulan I 2026:

1. **PSN status selesai konstruksi s.d Triwulan I 2026 dan isu/dukungan yang dibutuhkan (7 proyek)**:
    a. LRT Provinsi Sumatera Selatan (KA perkotaan, selesai pada 2018):
        - Isu sertifikasi Depo masih berprogres (7 sertifikat yang dimohonkan menunggu peta bidang yang dikeluarkan dari BPN Banyuasin guna mengajukan permohonan pelepasan hak), serta pemanfaatan aset guna pengoptimalan perolehan PNBP.
    b. KA Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (KA antar kota, selesai pada 2020):
        - Pembangunan *frontage road* belum sempurna dikarenakan terdapat lahan yang belum dibebaskan (progress 90%), sehingga terdapat beberapa pintu perlintasan belum bisa dimanfaatkan;
        - Pengadaan tanah terkendala anggaran BOPP yang tidak tersedia, dan apabila penyelesaian lahan tertunda berpotensi munculnya dampak sosial/protes Masyarakat.
    c. KA Akses Bandara Udara Baru Yogyakarta – Kulonprogo (KA antar kota, selesai pada 2021):
        - Kepemilikan Pakualaman *Ground* telah bersedia melepaskan tanahnya, namun anggaran BOBP untuk pengurusan penlok baru belum tersedia.
    d. KA Makasar – Parepare Tahap I segmen Barru – Pangkep – Maros (KA antar kota, selesai pada 2023):
        - Pembangunan prasarana perkeretaapian antara Mandai – Palanro terkendala Penlok *Overpass* Tonasa (Kab. Pangkep)
    e. LRT terintegrasi di wilayah Jabodebek (KA perkotaan, selesai pada 2023):
        - Terdapat kelanjutan proses pengadaan lahan di kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede dengan luas 773 m² dan kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dengan luas 7 m² (proses pembaruan Penlok);
        - Terdapat kebutuhan addendum kontrak penyelenggaraan LRT Jabodebek (menentukan nilai 100% untuk FHO).

f. *High Speed Railway* Jakarta – Bandung (KA antar kota, selesai pada 2023):
   - Saat ini masih berlangsung proses penlok, penyusunan dokumen perencanaan (andalalin, desain, amdal dll), perizinan dan pengadaan tanah di Jawa Barat untuk mendukung peningkatan akses di Stasiun Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

g. KA Logistik Lahat-Kertapati (KA antar kota, *double track* selesai pada Tahun 2025):
   - Dukungan perizinan kepelabuhanan oleh PT KAI terkait pembangunan coal terminal unloading system di area stasiun Kramasan.

2. PSN status *on progres* s.d. Triwulan I 2026 (4 proyek):

Tabel 2-37 Proyek Strategis Nasional Status *On Progress*

No	Kegiatan	Status
1	KA Rantau Prapat – Kota Pinang	Konstruksi segmen Rantauprapat - Pondok S5 telah selesai 100%, saat ini dalam proses tindak lanjut hasil pengujian/persiapan pengoperasian. Untuk segmen Pondok S5 – Kota Pinang masih dalam proses pengadaan lahan (progres 93%)
2	*Double Track* Selatan Jawa	Pembangunan *Double Track Selatan Jawa* dibagi menjadi beberapa segmen pekerjaan dengan progres saat ini pembangunan segmen Cirebon-Sepanjang 100%, Bogor-Sukabumi 100%, Kiaracondong-Cicalengka 100%, segmen Sepanjang-Wonokromo masih tahap penyiapan *readiness criteria*/perencanaan teknis dan penyiapan lahan
3	LRT Velodrome-Manggarai	Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome - Manggarai dengan progres fisik sebesar 91,75% dan ditargetkan beroperasi pada Tahun 2026
4	Jakarta MRT *North-South Phase 2*	• **Fase 2A**: 56,89% (segmen 1 BHI – Monas 78,70%, Segmen 2 Harmoni – Kota 48,61%). Target *commercial operation* pada Maret 2028 serta segmen II (*partial and full operation*) pada Tahun 2030. • **Fase 2B:** o MRT FASE 2B masih dalam tahapan pemenuhan prasyarat ke tahapan *Basic Engineering Study;* o Membutuhkan kepastian kebijakan terkait Depo Ancol dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. PSN status belum mulai/persiapan s.d. Triwulan I 2026 (2 proyek):

Tabel 2- 38 Proyek Strategis Nasional Status Persiapan

No	Kegiatan	Status
1	MRT Jakarta *East-West Phase* I	• Pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan Lokasi; • Pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pembiayaan LMAN; • Proses verifikasi DPPT masih berlangsung dan sedang dilakukan proses *re-baseline* untuk mengakomodir perubahan durasi konstruksi hasil *market sounding* dan pembaruan pada proses pengadaan lahan dan proses tender.
2	Infrastruktur KA Logistik di Kalimantan Timur	• PT Bayan Laju Trans Kalimantan masih berprogres penyusunan studi kelayakan/perencanaan teknis, serta telah dilaksanakan audiensi dengan PT Bayan Laju Trans Kalimantan perihal persyaratan penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

B. PROGRAM PRIORITAS PANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN

Untuk mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional menuju Asta Cita Presiden, upaya pengendalian dan pengelolaan isu strategis terhadap program prioritas tersebut menjadi tugas dari Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai *delivery assurance agency*. Pada Tahun 2026, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemantauan sebanyak 30 rencana aksi dimana 3 rencana aksi yang menjadi pantauan Kantor Staf Presiden terkait sub sektor perkeretaapian. Berikut diuraikan program prioritas pantauan Kantor Staf Presiden terkait sub sektor perkeretaapian sampai dengan Triwulan I 2026:

1. Pembangunan jalur kereta api antara Medan-Binjai (jalur kereta api layang), dengan skema pembiayaan MYC 2022 – 2026 dan progres fisik kumulatif sampai dengan Triwulan I 2026 sebesar 84% atau capaian sebesar 100% dari target Bulan April (B04) sebesar 84%. Kegiatan terkendala kesiapan lahan yang terlambat/masih berproses di lokasi Stasiun Sunggal dan Stasiun Helvetia serta juga membutuhkan dukungan anggaran BOPP untuk pengadaan dan penertiban lahan;

2. Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai – Jatinegara Tahap III, dengan skema pembiayaan MYC 2023 – 2027 dan progres fisik kumulatif sampai dengan Triwulan I 2026 sebesar 6% atau capaian sebesar 120% dari target Bulan April (B04) sebesar 5%. Saat ini masih terdapat 2 paket pekerjaan yang masih dalam proses persiapan/lelang (1 paket pekerjaan bangunan, *track*, dan fasop serta 1 paket konsultan MK lanjutan);
3. Pembangunan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian kereta api Makassar – Parepare antara Mandai – Palanro, dengan skema pembiayaan MYC 2022 – 2026 dan progres fisik kumulatif sampai dengan Triwulan I 2026 sebesar 96,40% atau capaian sebesar 100% dari target Bulan April (B04) sebesar 96,40%. Kegiatan masih terkendala proses penetapan lokasi pada pembangunan *overpass* Tonasa (Kabupaten Pangkep) sehingga mempengaruhi terhadap progres pembangunan.

C. PROGRAM PADAT KARYA

Program padat karya merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan melibatkan tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus pada kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur transportasi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja guna mengurangi angka kemiskinan. Pada Tahun 2026, program padat karya tunai (*cash for work*) Kementerian Perhubungan merupakan salah satu program strategis sebagai pendukung paket kebijakan ekonomi dan program akselerasi penyerapan tenaga kerja. Kementerian Perhubungan diminta untuk melakukan akselerasi program padat karya tersebut yang dilakukan monitoring oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Kementerian Keuangan melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Selain itu, Kementerian Perhubungan juga melakukan langkah pemadanan data pekerja padat karya dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat guna penyerapan kegiatan padat karya lebih tepat kepada masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program tersebut dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan tidak memerlukan keahlian

khusus/*unskill* pada kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian. Adapun jenis kegiatan padat karya yang dilaksanakan meliputi:

1. Pekerjaan persiapan/pra konstruksi prasarana perkeretaapian;
2. Pekerjaan konstruksi prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan serta fasilitas operasi);
3. Pekerjaan pasca konstruksi prasarana perkeretaapian;
4. Pekerjaan pendukung lainnya (*security/safetyman*/penjaga malam/penjaga semboyan/keamanan lokasi kerja, juru masak/kebersihan kantor, kegiatan pendukung pengukuran/survei dan lainnya yang tidak perlu keahlian khusus).

Pada Tahun 2026, program padat karya dilaksanakan pada kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian serta kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api yang tersebar di 6 wilayah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota. Adapun target besaran upah untuk didistribusi pada Tahun 2026 adalah Rp4.160.273.100,00 dengan pelibatan tenaga kerja orang sebanyak 294 orang atau 32.277 orang hari.

Tabel 2- 39 Target Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2026

No	Unit Kerja	Target Biaya Upah (Rp)	Target Tenaga Kerja (Orang)	Target Tenaga Kerja (OH)
1.	BTP Kelas I Jakarta	107.986.125	10	490
2.	BTP Kelas I Bandung	60.200.000	7	602
3.	BTP Kelas I Semarang	72.000.000	3	720
4.	BTP Kelas I Medan	2.975.399.400	143	23.535
5.	BTP Kelas II Padang	525.187.575	111	3.330
6.	BPKA Sulawesi Selatan	419.500.000	20	3.600
Jumlah		**4.160.273.100**	**294**	**32.277**

Sampai dengan Triwulan I 2026, terdapat realisasi program padat karya dengan upah sebesar Rp687.187.575,00 (16,52%) dan tenaga kerja sebanyak 121 Orang (41,16%) atau 4.230 OH (13,11%). Program padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan kegiatan pendukung pembangunan/peningkatan prasarana dan kegiatan lainnya untuk itu untuk meningkatkan progres maka perlu juga dilakukan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian.

D. PROGRAM STIMULUS DISKON TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API

Stimulus pertumbuhan ekonomi sektor transportasi melalui diskon tarif angkutan penumpang kereta api diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan daya beli dan minat masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api;
2. Mendorong peningkatan mobilitas orang yang berdampak pada penguatan aktivitas ekonomi dan pariwisata;
3. Mengoptimalkan tingkat okupansi dan pemanfaatan kapasitas angkutan kereta api; dan
4. Mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kinerja sektor transportasi.

Pada Triwulan I 2026 diselenggarakan 2 kali program stimulus diskon tarif angkutan penumpang kereta api yaitu pada masa Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dan angkutan Lebaran Tahun 2026, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Stimulus diskon tarif angkutan penumpang kereta api pada masa Angkutan Nataru 2025/2026 diselenggarakan pada periode tanggal 22 Desember 2025 s.d. 10 Januari 2026 dengan rincian:
    a. Alokasi anggaran sebesar Rp120.682.092.000,00;
    b. Jumlah perjalanan kereta api sebanyak 182 KA yang terdiri dari 156 KA reguler dan 26 KA tambahan;
    c. Besaran diskon 30% untuk seluruh kereta api ekonomi non penugasan (*non* PSO/*non* perintis);
    d. Kapasitas sebanyak 1.509.080 *seat* dengan realisasi penumpang sebanyak 1.700.151 penumpang atau capaian sebesar 113%; dan
    e. Realisasi diskon tarif angkutan penumpang kereta api sebesar Rp122.714.105.000,00.
2. Stimulus diskon tarif angkutan penumpang kereta api pada masa Lebaran Tahun 2026 diselenggarakan pada periode tanggal 14 Maret 2026 s.d. 29 Maret 2026 dengan rincian:

a. Alokasi anggaran sebesar Rp116.152.400.000,00;
b. Jumlah perjalanan kereta api sebanyak 188 KA yang terdiri dari 156 KA reguler dan 32 KA tambahan;
c. Besaran diskon 30% untuk seluruh kereta api ekonomi non penugasan (non PSO/non perintis);
d. Kapasitas sebanyak 1.285.056 seat dengan realisasi penumpang sebanyak 1.295.069 penumpang atau capaian sebesar 100,78%; dan
e. Realisasi diskon tarif angkutan penumpang kereta api sebesar Rp 96.730.106.000,00

E. PERESMIAN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN

Pada tanggal 28 Januari 2026, telah dilaksanakan peresmian Stasiun Jatake oleh Menteri Perhubungan bersama Gubernur Banten serta pihak terkait lainnya (Pemerintah Kabupaten Tangerang, PT KAI, Sinar Mas Land). Stasiun Jatake merupakan penghubung Kawasan Perkotaan Permukiman BSD City. yang dibangun dengan harapan dapat berkontribusi menambah penumpang ke Stasiun Rawabuntu sebesar 8.212 orang per hari dan ke Stasiun Cisauk sebesar 40.848 orang per hari. Pembangunan Stasiun Jatake dibangun seluas 3.047 meter^2 diatas lahan seluas 2.435 meter^2.

Skema kerjasama dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui perjanjian konsesi termasuk perjanjian penggunaan BMN berupa tanah untuk pembangunan Prasarana perkeretaapian Stasiun Baru Jatake. Pembangunan Stasiun Baru Jatake mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang nyaman, aman, dan berdaya saing serta melibatkan *stakeholder* lain dalam proses pengembangan prasarana perkeretaapian.



Gambar 2-17 Peresmian Stasiun Jatake

2.5 REALISASI ANGGARAN

2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar Rp5.481.958.278.000,00. Pada akhir Triwulan I 2026, terdapat perubahan jumlah anggaran menjadi sebesar Rp4.816.755.848.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dukungan alokasi Direktif Presiden sebesar Rp255.772.535.000,00 ***(tidak merubah pagu);***
2. Blokir anggaran IVA DIPA sebesar Rp1.316.190.132.000,00 ***(tidak merubah pagu);***
3. Penambahan saldo awal BLU Rp5.709.744.000 pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada 3 Februari 2026 ***(menambah pagu);***
4. Pembukaan blokir kode 2 pada catatan halaman IVA DIPA sebesar Rp1.399.000.000,00 pada 25 Februari 2026 ***(tidak merubah pagu)***;
5. Luncuran kegiatan kontrak tahun jamak sumber dana SBSN Tahun 2025 sebesar Rp1.012.355.237.459,00 ***(menambah pagu);***
6. Realokasi/pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA Kementerian Perhubungan) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pengelolaan belanja lainnya sebesar Rp1.683.267.413.000,00 ***(mengurangi pagu)***;
7. Blokir efisiensi dari belanja barang dan belanja modal sebesar Rp8.971.181.000,00, sehingga ***pagu efektif*** dari Rp4.816.755.848.000,00 adalah sebesar Rp4.807.784.667.000,00.

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026 diperoleh sebesar Rp298.466.126.565,00 (6,20% dari pagu total atau 6,21% dari pagu efektif), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2- 40 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2026

No	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1	Belanja Pegawai	206.957.690.000	206.957.690.000	-	206.957.690.000	109.800.932.728	53,05%	97.156.757.272	46,95%
2	Belanja Barang	3.413.673.100.000	3.062.302.104.000	7.495.172.000	3.054.806.932.000	181.820.830.047	5,95%	2.872.986.101.953	94,05%
3	Belanja Modal	543.153.631.000	1.547.496.054.000	1.476.009.000	1.546.020.045.000	6.844.363.790	0,44%	1.539.175.681.210	99,56%
Total		**4.163.784.421.000**	**4.816.755.848.000**	**8.971.181.000**	**4.807.784.667.000**	**298.466.126.565**	**6,21%**	**4.509.318.540.435**	**93,79%**

Tabel 2-41 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1.	**Program infrastruktur konektivitas**	**3.517.273.369.000**	**4.257.452.101.000**	**818.675.000**	**4.256.633.426.000**	**119.510.904.806**	**2,81%**	**4.137.122.521.194**	**97,19%**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	377.937.809.000	606.101.923.000	-	606.101.923.000	39.430.444.203	6,51%	566.671.478.797	93,49%
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	579.390.083.000	2.262.285.830.000	576.283.000	2.261.709.547.000	10.679.555.182	0,47%	2.251.029.991.818	99,53%
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.526.501.421.000	1.349.668.156.000	-	1.349.668.156.000	67.849.946.587	5,03%	1.281.818.209.413	94,97%

No	Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	33.444.056.000	39.396.192.000	242.392.000	39.153.800.000	1.550.958.834	3,96%	37.602.841.166	96,04%
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**646.511.052.000**	**559.303.747.000**	**8.152.506.000**	**551.151.241.000**	**178.955.221.759**	**32,47%**	**372.196.019.241**	**67,53%**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	26.294.617.000	19.609.511.000	-	19.609.511.000	4.844.356.734	24,70%	14.765.154.266	75,30%
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	582.883.956.000	512.939.685.000	7.919.706.000	505.019.979.000	171.378.547.108	33,94%	333.641.431.892	66,06%
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	23.908.087.000	17.153.196.000	232.800.000	16.920.396.000	157.975.180	0,93%	16.762.420.820	99,07%
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.197.555.000	8.893.157.000	-	8.893.157.000	2.505.731.637	28,18%	6.387.425.363	71,82%
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	1.226.837.000	708.198.000	-	708.198.000	68.611.100	9,69%	639.586.900	90,31%
TOTAL		**4.163.784.421.000**	**4.816.755.848.000**	**8.971.181.000**	**4.807.784.667.000**	**298.466.126.565**	**6,21%**	**4.509.318.540.435**	**93,79%**

Tabel 2-42 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	377.937.809.000	1.349.668.156.000	-	1.349.668.156.000	67.849.946.587	5,03
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	579.390.083.000	606.101.923.000	-	606.101.923.000	39.430.444.203	6,51
	IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api						
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api						
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	2.526.501.421.000	2.301.682.022.000	818.675.000	2.300.863.347.000	12.230.514.016	0,53
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	646.511.052.000	559.303.747.000	8.152.506.000	551.151.241.000	178.955.221.759	32,47
Jumlah		**4.163.784.421.000**	**4.816.755.848.000**	**8.971.181.000**	**4.807.784.667.000**	**298.466.126.565**	**6,21**

2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP pada Triwulan I 2026 sebesar Rp241.775.985.162,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.338.269.645.000,00 sehingga capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 18,066%. Rincian realisasi PNBP periode Triwulan I 2026 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-43 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**	**1.097.243.054.000**	**89.529.105.724**	**8,159**
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.302.744.000	140.271.884	6,092
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	3.883.450.000	552.940.000	14,238
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.087.623.104.000	88.319.893.840	8,120
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3.433.756.000	516.000.000	15,027
2	**Pendapatan BLU**	**97.654.591.000**	**15.460.590.128**	**15,832**
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	85.450.717.000	14.803.352.986	17,324
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.978.500.000	165.360.000	1,657
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.100.000.000	392.360.608	35,669
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000	56.700.000	5,038
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	g. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	h. Pendapatan Lain-Lain BLU	-	42.816.534	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**	**143.372.000.000**	**136.786.289.310**	**95,407**
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	114.448.000.000	1.593.692.132	1,393
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.924.000.000	-	-
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.214.812.323	-

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	512.223	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	13.473.684	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	129.293.048.819	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.616.931.950	-
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.053.818.179	-
Jumlah		**1.338.269.645.000**	**241.775.985.162**	**18,066**

2.6 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.6.1 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas dan kualitas merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Triwulan I 2026, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 2.532 pegawai yang terdiri dari 1.647 PNS, 185 CPNS, 652 PPPK dan 48 PPPK Paruh Waktu yang tersebar pada Kantor Pusat (Sekretariat dan Direktorat Teknis) dan 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK), diperoleh kebutuhan penambahan pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 1.520 pegawai. Untuk itu, jumlah kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Tahun 2029 sesuai ABK adalah sebanyak 4.052 pegawai. Selain itu, juga diperoleh perhitungan *Output* Aktual dibandingkan dengan Target *Output* untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 dari aplikasi *MyIntress* Kemenkeu sebesar 77,400%. Berdasarkan uraian data di atas, maka diperoleh nilai efisiensi SDM sebesar 48,375% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ Aktual}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Efisiensi SDM = ($\frac{2.532}{4.052}$ x 0,774) x 100%

Efisiensi SDM = (0,625 x 0,774) x 100% = **48,375%**

Nilai efisiensi tersebut menunjukkan kinerja belum optimal mengingat kebutuhan pegawai sesuai ABK masih belum terpenuhi serta *output* juga belum tercapai sesuai target. Untuk itu, perlu dilakukan reviu ABK apakah masih sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis dan/atau percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai ABK serta upaya percepatan progres kegiatan guna pencapaian target *output*.

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja, data kinerja pada periode sebelumnya (Triwulan IV 2025) telah dijadikan dasar dalam penempatan atau penghapusan jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa upaya penyesuaian/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan I 2026 antara lain:

1. Penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mewujudkan keselarasan kompetensi jabatan dengan kebutuhan organisasi, meningkatkan profesionalisme dan kualitas ASN, serta mendukung penguatan tata kelola kelembagaan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
2. Pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak 21 orang, baik di internal maupun eksternal (keluar atau masuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian) untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan/atau penyegaran organisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
3. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

4. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional perkeretaapian (Auditor, Inspektur, Penguji, dll) sebanyak 34 orang;
5. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional arsiparis (ahli muda) sebanyak 1 orang.

2.6.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, terdapat 2 pendekatan perhitungan analisis efisiensi anggaran yaitu pendekatan pertama berupa perbandingan capaian sasaran/indikator kinerja program dengan realisasi anggaran yang disandingkan dengan Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada Triwulan I 2026, sedangkan pendekatan kedua mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 berupa perbandingan realisasi anggaran dengan capaian rincian *output* (CRO).

Pada pendekatan pertama, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat efisiensi anggaran (0,00%) dikarenakan beberapa target indikator kinerja program periode Triwulan I 2026 tidak tercapai 100% (IKP1, IKP3, IKP5, IKP6) serta beberapa realisasi anggaran berdasarkan sasaran/indikator kinerja program telah melebihi Rencana Penyerapan Dana (RPD) yang ditargetkan pada Triwulan I 2026.

Pada pendekatan kedua yang menggunakan Capaian Rincian *Output* (CRO) periode Triwulan I 2026, diperoleh dari kompilasi capaian rincian *output* dari masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2026 sebesar 1,742% atau Rp83.923.506.164,00.

Perolehan efisiensi anggaran periode Triwulan I 2026 terhadap indikator kinerja program dan rincian *output* yang tercapai sebagaimana secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 2-44 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Triwulan I			Keuangan Triwulan I					Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Total	RPD Triwulan I	Realisasi	% Penyerapan	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11) = (8) - (9)	(12)
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,457	99,348	1.349.668.156.000	72.747.113.608	67.849.946.587	93,27	-	Pada Sasaran Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, target indikator kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran
2	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750	95,862	101,174	606.101.923.000	32.668.893.650	39.430.444.203	120,70	-	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan, realisasi anggaran melebihi RPD Triwulan I 2026 dan terdapat target indikator kinerja yang tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran
3	IKP3 Persentase *On Time Performance (OTP)* Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,529	99,754						
4	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	22,827	24,112	105,629						
5	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,625	99,625	2.300.863.347.000	124.016.534.403	12.230.514.016	9,86	-	Pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Konektivitas, target indikator kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,018	15,345	73,009	551.151.241.000	29.707.051.890	178.955.221.759	602,40	-	Pada Sasaran Kinerja Tata Kelola Pemerintahan, realisasi anggaran melebihi RPD Triwulan I 2026 dan target indikator kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran
Jumlah						**4.807.784.667.000**	**259.139.593.551**	**298.466.126.565**	**115,18**	**-**	**Tidak terdapat efisiensi anggaran pada Triwulan I 2026**

Tabel 2-45 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Capaian Rincian *Output* Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
1	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	1.055.265.000	-	1.055.265.000	147.936.550	263.715.722	115.779.172
2	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	001 Layanan SDM (Orang)	1045,00	0,00	15,00%	2.079.062.000	-	2.079.062.000	229.196.000	311.862.300	82.664.300
3	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Kebijakan Perencanaan (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	0,00	15,00%	9.920.517.000	-	9.920.517.000	151.296.550	1.488.077.550	1.336.779.000
4	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	403.120.000	-	403.120.000	124.452.050	100.739.688	(23.712.362)
5	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	8.550.697.000	-	8.550.697.000	1.107.601.696	2.136.619.160	1.029.217.264
6	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	45,33%	56.332.595.000	-	56.332.595.000	29.152.993.216	25.535.565.314	(3.617.427.903)
7	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	3.603.399.000	-	3.603.399.000	521.006.520	900.469.410	379.462.890
8	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	7.643.527.000	-	7.643.527.000	2.335.175.716	1.910.117.397	(425.058.321)
9	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	1,00	0,00	15,00%	296.000.000	-	296.000.000	-	44.700.000	44.700.000
10	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	21,66%	1.766.964.000	-	1.766.964.000	55.007.100	383.157.602	328.150.502
11	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	001 Sistem Informasi (Layanan)	1,00	0,00	15,00%	11.274.596.000	-	11.274.596.000	-	1.691.189.400	1.691.189.400
12	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	21,66%	6.562.433.000	-	6.562.433.000	664.739.409	1.421.422.966	536.683.579
13	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	21,66%	706.196.000	-	706.196.000	63.291.100	153.395.667	90.104.567
15	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Rekomendasi Kebijakan)	15,00	0,00	1,00%	6.671.189.000	-	6.671.189.000	-	66.711.890	66.711.890
16	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	002 Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api (layanan)	1,00	0,00	33,64%	18.636.000.000	-	18.636.000.000	6.569.843.670	6.269.150.400	(600.693.270)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
210	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	10,00%	1.626.465.000	-	1.626.465.000	-	162.646.500	162.646.500
211	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	5,00	0,00	10,00%	7.692.726.000	-	7.692.726.000	10.256.400	769.272.600	759.016.200
212	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	006 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	10,00%	3.616.207.000	-	3.616.207.000	288.961.500	361.620.700	72.659.200
213	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	018 Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) (Paket)	60,00	0,00	0,00%	246.023.000.000	-	246.023.000.000	-	-	-
214	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	231.000.000	-	231.000.000	-	57.726.900	57.726.900
215	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	12.000.000	-	12.000.000	-	2.998.800	2.998.800
216	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	10.327.839.000	-	10.327.839.000	1.466.550.430	2.580.926.966	1.094.376.536
217	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	26,17%	18.856.460.000	-	18.856.460.000	5.499.965.429	4.934.740.816	(565.247.613)
218	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	966.217.000	-	966.217.000	142.321.758	246.455.628	104.133.870
219	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	123.577.000	-	123.577.000	26.183.000	30.861.692	4.696.692
220	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	20.049.000	-	20.049.000	5.250.000	5.010.245	(239.755)
221	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	45,00	0,00	0,00%	593.371.000	-	593.371.000	-	-	-
222	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	226.516.000	-	226.516.000	13.260.350	56.606.646	43.326.496
Jumlah								11,935%	4.816.755.848.000	8.971.181.000	4.807.784.667.000	144.724.144.890	228.647.651.054	83.923.506.164

(Rincian perhitungan secara lengkap disampaikan pada Lampiran 3)

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV 2025 / Laporan Kinerja Tahun 2025) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	▪ Mempersiapkan kajian perencanaan teknis untuk persiapan penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam.	▪ Penyiapan dokumen perencanaan teknis terhadap infrastruktur yang terdampak bencana alam di Sumatera telah diusulkan kepada Kemenkeu melalui usulan relaksasi anggaran buka blokir Tahun 2026 namun usulan tersebut ditolak oleh Kemenkeu; ▪ Kebutuhan kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan kembali melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dengan penyampaian surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 pada tanggal 26 Maret 2026.
	▪ Mempersiapkan kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dilengkapi reviu *masterplan* pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah.	▪ Pada Triwulan I 2026, sedang berproses pelelangan untuk kegiatan reviu *masterplan* pengembangan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta Kajian Evaluasi Capaian dan Reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Kegiatan tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Mei 2026.
	▪ Koordinasi dengan Kemenko Infraswil dan Kementerian/Lembaga/instansi terkait lainnya untuk rencana tindak lanjut arahan Presiden dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.	▪ Pada Triwulan I 2026 telah dihadiri beberapa rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Infraswil termasuk FGD terkait pengembangan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Penyiapan kebutuhan anggaran prioritas pada Tahun 2026 melalui revisi dokumen anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kajian perencanaan teknis dan persiapan rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam, serta memastikan ketersediaan anggaran untuk kelanjutan kegiatan penetapan lokasi dan pengadaan lahan mendukung konektivitas perkeretaapian pada beberapa lokasi.	▪ Pada Triwulan I 2026, telah dilakukan inventarisasi data blokir dan kontraktual termasuk usulan buka blokir Tahun Anggaran 2026 serta telah dilakukan juga identifikasi kebutuhan kegiatan mendesak/prioritas Tahun 2026 dari seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kebutuhan BOPP pengadaan lahan, penyiapan perencanaan teknis dan belanja pegawai. Usulan pemenuhan anggaran tersebut telah diusulkan ke Kemenkeu namun ditolak, sehingga diperlukan upaya realokasi anggaran lainnya.
	▪ Optimalisasi penugasan pegawai untuk menjadi PIC dalam persiapan dan percepatan pelaksanaan kajian perencanaan teknis/rehabilitasi/ rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam.	▪ PIC terkait perencanaan teknis/rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam di Sumatera telah ditugaskan kepada tim Direktorat Prasarana Perkeretaapian di dukung tim BTP Medan dan BTP Padang. PIC tersebut juga telah rutin mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan Kemendagri selaku koordinator tingkat nasional.
IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	▪ Koordinasi melibatkan *stakeholder*/ pengguna jasa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Tahun 2025 dan mempersiapkan upaya peningkatan layanan pada Tahun 2026.	▪ Rapat koordinasi layanan regulator perkeretaapian diantaranya telah dilaksanakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian dan Direktorat Sarana Perkeretaapian pada Januari 2026 terkait evaluasi dan persiapan layanan pengujian perkeretaapian. Koordinasi juga telah dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terkait layanan sertifikasi dan perizinan bidang prasarana perkeretaapian.
	▪ Tindak lanjut pengaduan terkait perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui OSS BPKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	▪ Pada Triwulan I 2026, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Direktorat LLAKA, PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta terkait penyesuaian sistem OSS sesuai pengaduan dari PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta, termasuk untuk penyesuaian perizinan pada KBLI 49110 Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang sesuai dengan PM 1 Tahun 2026;

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Pada Triwulan I 2026, juga telah dilakukan UAT untuk Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian.
	▪ Pengelolaan sistem informasi terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps*.	▪ Pengelolaan sistem informasi terkait layanan regulator perkeretaapian dilaksanakan secara terpadu melalui pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* oleh Setditjen dengan dukungan masing-masing pemilik proses bisnis/Direktorat/Balai; ▪ Pada Triwulan I 2026, kegiatan pengelolaan/pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dalam tahap pelelangan dan direncanakan kegiatan mulai pada Mei/Juni 2026.
	▪ Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan terutama yang secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat/pengguna jasa (misalnya narahubung layanan perizinan, petugas yang berada di stasiun/kereta).	▪ Pada Triwulan I 2026, telah dilakukan pembinaan kepada petugas pelayanan khususnya oleh BPKAR Sumsel dan BPKA Sulsel guna memastikan pelayanan dilakukan sesuai dengan standar proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan. Selain itu telah dioptimalkan pengawasan kepatuhan petugas terhadap pemenuhan SPM melalui Satuan Pelayanan (Satpel) masing-masing wilayah.
IKP3 Persentase *On Time Performance (OTP)* Transportasi Kereta Api	▪ Koordinasi *stakeholder* terkait untuk melakukan pembinaan pengelolaan perlintasan sebidang diantaranya monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas keamanan perlintasan sebidang termasuk memastikan pemeliharaan peralatan sesuai kewenangan, peningkatan kompetensi penjaga perlintasan sebidang, serta pemberian rekomendasi penataan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar teknis.	▪ Pada Triwulan I 2026, terdapat 4 rekomendasi teknis keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti. Selain itu, juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi keselamatan yang telah diterbitkan pada beberapa wilayah diantaranya Jawa Barat;
	▪ Melakukan inspeksi/pemantauan/ *rampcheck* terhadap perjalanan KA di lokasi rawan bencana/banjir/ longsoran/amblesan/taspat serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan.	▪ BTP dan Satuan Pelayanan (Satpel) di masing-masing wilayah berperan aktif melakukan pengawasan terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana alam/kecelakaan;

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Direktorat teknis didukung Balai Perawatan Perkeretaapian yang mengelola sarana perkeretaapian milik negara memastikan kondisi siap operasi dalam hal dibutuhkan.
	▪ Penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) berupa penetapan perjalanan kereta api di luar GAPEKA sesuai hasil evaluasi serta pemenuhan kebutuhan perjalanan kereta api/pemberhentian stasiun tertentu.	▪ Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan KeretaApi >30 hari berturut-turut pada tanggal 27 Januari 2026 dan 23 Februari 2026 guna memastikan pengendalian dan penetapan perjalanan kereta api tetap terkelola secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan operasional baik pada GAPEKA maupun perjalanan di luar GAPEKA. Untuk penetapan GAPEKA Tahun 2026 direncanakan pada Triwulan IV 2026.
	▪ Upaya pemenuhan anggaran untuk mendukung kelanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA *elevated* Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) guna meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.	▪ Telah dilakukan pengusulan luncuran kegiatan SBSN Tahun 2025 ke Tahun 2026 pada kegiatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan sebagaimana surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur Jenderal Anggaran nomor S-154/AG/AG.3/2026 tanggal 2 April 2026 bahwa telah disetujui usulan revisi anggaran Tahun 2026 berupa lanjutan kegiatan kontrak tahun jamak sumber dana SBSN Tahun 2025 sebesar Rp1.012.355.237.459,-; ▪ Untuk anggaran pembangunan jalur ganda KA Solo – Semarang tidak dapat diluncurkan karena perpanjangan MYC tidak disetujui dan untuk kelanjutannya telah diusulkan pada RKA Tahun 2027.
	▪ Peningkatan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian dalam pengawasan perjalanan kereta api melalui pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama Tahun 2026.	▪ Pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama Tahun 2026 direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II 2026.

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	▪ Mempersiapkan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional termasuk reviu Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing wilayah.	▪ Pada Triwulan I 2026, sedang berproses pelelangan untuk kegiatan reviu *masterplan* pengembangan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta Kajian Evaluasi Capaian dan Reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Kegiatan tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Mei 2026.
	▪ Penyelenggaraan layanan subsidi kereta api perintis dan PSO dengan kontrak Tahun 2026 sesuai kebutuhan dan berkelanjutan yang mencakup layanan kereta api perkotaan dan antar kota.	▪ Penyelenggaraan layanan subsidi kereta api perintis dan PSO Tahun 2026 terus dilaksanakan dengan pararel berproses penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga (Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN); ▪ Pada Tahun 2026, layanan subsidi kereta api perintis diselenggarakan pada LRT Sumatera Selatan dan KA Makassar Pare-pare, sedangkan untuk KA Cut Meutia tidak beroperasi karena terdampak bencana alam Sumatera dan 2 layanan lainnya telah beralih menjadi skema PSO (KA Lembah Anai, KA Bathara Kresna).
	▪ Persiapan dan pelaksanaan angkutan motor gratis dengan kereta api pada masa penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026.	▪ Telah dilaksanakan penyelenggaraan angkutan Motor Gratis (Motis) dengan capaian tercatat sebanyak 12.419 unit (104,4% dari target 11.900 unit), dengan peserta motis terbanyak terdapat pada layanan lintas utara. Secara kumulatif, terdapat 19.789 penumpang yang memanfaatkan program KA Motis pada periode angkutan Lebaran Tahun 2026.
	▪ Merumuskan usulan pengaturan tarif angkutan barang sebagai dasar penyusunan pedoman/regulasi tarif angkutan barang dalam rangka memberikan kepastian untuk mendukung efisiensi logistik sesuai rekomendasi BPKP.	▪ Penyusunan dan pembahasan pedoman/regulasi tarif angkutan barang masih berproses oleh Direktorat LLAKA.
	▪ Mempersiapkan kajian perencanaan teknis untuk penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam dengan pemenuhan anggaran sesuai kebutuhan.	▪ Penyiapan dokumen perencanaan teknis terhadap infrastruktur yang terdampak bencana alam telah diusulkan kepada Kemenkeu melalui usulan relaksasi anggaran buka blokir Tahun 2026 namun usulan tersebut ditolak oleh Kemenkeu;

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Kebutuhan kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan kembali melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dengan penyampaian surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 pada tanggal 26 Maret 2026.
	▪ Penyelesaian peningkatan Stasiun Rangkasbitung.	▪ Kegiatan peningkatan Stasiun Rangkasbitung telah diselesaian dan dilakukan Berita Acara Serah Terima dengan rincian sebagai berikut: o Konstruksi gedung sudah BAST 100% per 31 Desember 2025; o Konstruksi *Track* sudah BAST 100% per 31 Desember 2025; o Konstruksi Fasilitas Operasi sudah BAST 100% per 31 Desember 2025; o Pekerjaan Selasar, *Drop Off* dan *Rampcheck* JPO sudah BAST 100% per 31 Maret 2026.
	▪ Pembentukan Tim Terpadu dengan melibatkan *stakeholder* terkait dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026.	▪ Telah dilaksanakan rapat koordinasi berkala dan posko terpadu penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026 melibatkan seluruh *stakeholders* transportasi termasuk Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian.
IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	▪ Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ *rampcheck* guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026.	▪ Pada Triwulan I 2026, telah dilaksanakan pengawasan keselamatan melalui inspeksi dan *rampcheck* mendukung angkutan Lebaran Tahun 2026 mencakup: o *Rampcheck* SPM pada 27 Januari s.d. 14 Februari 2026; o Inspeksi Keselamatan pada 26 Januari s.d. 20 Februari 2026; o Rampcheck Sarana pada 2 s.d. 20 Februari 2026.
	▪ Peningkatan pengawasan daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak bencana.	▪ Pengawasan perjalanan KA di lokasi rawan bencana/rawan kecelakaan telah dilakukan oleh BTP/Satuan Pelayanan dengan koordinasi badan usaha; ▪ Terdapat 2 lokasi penanganan jembatan kritis yang prioritas namun anggaran diblokir dan dialihkan ke BA BUN, untuk itu sedang dipersiapkan usulan realokasi anggaran dari kegiatan lain serta reviu desain dan koordinasi badan usaha terkait skenario penanganannya;

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BMKG perihal Mitigasi Cuaca Ekstrim pada Masa Angkutan Lebaran 2026 di Jawa Tengah pada 4 Maret 2026 dan telah dilaksanakan Rapat Lanjutan dengan BMKG Mitigasi Risiko Cuaca Ekstrem pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2026 pada 10 Maret 2026.
	▪ Koordinasi dan penyelesaian analisis kejadian kecelakaan kereta api/ anjlokan yang terjadi pada Tahun 2025 untuk memperoleh rekomendasi/ upaya tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.	▪ Telah dilaksanakan koordinasi dan penyelesaian analisis kejadian kecelakaan kereta api yang terjadi pada Tahun 2025 dengan jumlah kecelakan sebanyak 10 kejadian kecelakaan dan hasil analisis telah dikomunikasikan ke pihak terkait untuk proses lanjut.
	▪ Pelaksanaan verifikasi tindak lanjut hasil audit SMKP Penyelenggara Perkeretaapian termasuk kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan untuk penilaian sistem keselamatan perkeretaapian.	▪ Sampai dengan bulan Maret 2026, terdapat 4 hasil audit SMKP yang telah ditindaklanjuti/dimanfaatkan.
	▪ Penyiapan kebutuhan anggaran prioritas pada Tahun 2026 melalui revisi dokumen anggaran untuk mendukung kegiatan rehabilitasi/ rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam termasuk pelaksanaan pengawasan daerah rawan bencana.	▪ Penyiapan dokumen perencanaan teknis terhadap infrastruktur yang terdampak bencana alam di Sumatera telah diusulkan kepada Kemenkeu melalui usulan relaksasi anggaran buka blokir Tahun 2026 namun usulan tersebut ditolak oleh Kemenkeu; ▪ Kebutuhan kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan kembali melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dengan penyampaian surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 pada tanggal 26 Maret 2026.
	▪ Penyesuaian penugasan pegawai dengan kompetensi/ fungsional tertentu sesuai kebutuhan pelaksanaan pengujian SDM, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pengujian Tahun 2025.	▪ Telah dilakukan penyesuaian penugasan pegawai khususnya fungsional tertentu bidang perkeretaapian (penguji, asisten penguji) sesuai kebutuhan pelaksanaan pengujian (SDM, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian) di Balai Pengujian Perkeretaapian dengaan dukungan pembinaan Direktorat teknis.

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	▪ Persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 mencakup pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilengkapi rencana aksi dan perjanjian kinerja berjenjang untuk menjadi acuan sasaran kinerja pegawai.	▪ Telah ditetapkan Tim Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Kepdirjen, termasuk pembentukan Tim Evaluasi AKIP; ▪ Telah dilaksanakan pembahasan lonsep Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada 5–6 Januari 2026, serta selanjutnya telah dilakukan penandatangan oleh Pimpinan pada 14 Januari 2026 termasuk ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi serta perjanjian kinerja berjenjang.
	▪ Pelaksanaan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memastikan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja dalam KM 74 Tahun 2024.	▪ Telah dilakukan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 12 s.d. 13 Januari 2026.
	▪ Pelaksanaan rekonsiliasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2025.	▪ Pada Triwulan I 2026 telah dilakukan rekonsiliasi capaian PNBP Semester II Tahun 2025 pada unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan hasil bahwa perolehan PNBP unit eselon I Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp2.022.678.845.172,00. Selain itu telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian target PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan masing-masing unit kerja termasuk pembahasan terkait potensi perolehan PNBP dari sumber pendapatan lainnya yang dilaksanakan pada Februari 2026.
	▪ Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026, termasuk koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk appraisal nilai sewa aset.	▪ Telah dilakukan pembahasan dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk melibatkan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN. ▪ Telah dilakukan penyesuaian tarif PNBP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Koordinasi persiapan pelaksanan anggaran Tahun 2026 termasuk konsolidasi dengan Biro LPPBMN/*stakeholder* terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan kontraktual.	▪ Pada Januari 2026, telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi periode sebelumnya; ▪ Untuk konsolidasi dengan Biro LPPBMN/*stakeholder* terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja belum dilaksanakan pada Triwulan I 2026 dan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II 2026.
	▪ Koordinasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi/ rekonstruksi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera.	▪ Telah dilakukan koordinasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi/ rekonstruksi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera dengan usulan perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan prasarana perkeretaapian sebesar Rp.692.382.169.000 dan usulan kebutuhan anggaran studi teknis pemulihan prasarana sebesar Rp.9.750.000.000; ▪ Untuk penyiapan dokumen perencanaan teknis terhadap infrastruktur yang terdampak bencana alam di Sumatera, telah diusulkan kepada Kemenkeu melalui usulan relaksasi anggaran buka blokir namun usulan ditolak oleh Kemenkeu; ▪ Kebutuhan kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan kembali melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dengan penyampaian surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 pada tanggal 26 Maret 2026.
	▪ Koordinasi penerapan manajemen talenta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	▪ Telah dilaksanakan koordinasi implementasi penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis gap kompetensi pada tanggal 2 s.d. 3 Februari 2026;

Indikator Kinerja Program	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Selain itu, telah disampaikan surat Sesditjen Perkeretaapian tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) sebagai dasar penerapan manajemen talenta.
	▪ *Benchmarking* penyelarasan jabatan fungsional dan persiapan penyusunan dokumen turunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidang Transportasi.	▪ Telah dilakukan koordinasi dan pembahasan secara simultan bersama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Biro SDM dan Organisasi, serta melibatkan Kementerian PANRB dan seluruh subsektor dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Transportasi, melalui penyelarasan 22 Jabatan Fungsional bidang transportasi menjadi 5 Jabatan Fungsional bidang transportasi. ▪ Selanjutnya, telah dilakukan pembahasan lanjutan dalam rangka penyusunan 9 (sembilan) peraturan turunan dari peraturan dimaksud. Saat ini telah tersusun identifikasi beban kerja pada bidang prasarana, sarana, lalu lintas, dan keselamatan yang akan menjadi dasar penyusunan formulir kalkulator kebutuhan formasi jabatan fungsional dan selanjutnya dituangkan dalam peraturan pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Selain itu, juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi pada Triwulan I 2026 diantaranya:

Tabel 3-1 Perubahan Budaya Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Orientasi Kerja	• Berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tanpa melihat dampak/hasil;	• Berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat (*outcome–impact*); • Indeks kepuasan masyarakat telah menjadi indikator kinerja beberapa unit kerja,	• Peningkatan kualitas layanan publik bidang perkeretaapian berbasis partisipatif masyarakat/ *stakeholder* terkait;

No	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
		• Pelaksanaan dan pemanfaatan survei kepuasan masyarakat masih minim/tidak optimal.	sehingga pelaksanaan survei telah rutin dilaksanakan untuk menjadi acuan perbaikan layanan kedepan; • Pemanfaatan aplikasi survey SKM pada BPKA Sulawesi Selatan dan Balai Perawatan dimana sebelumnya survey dilakukan secara manual.	• Dengan digitalisasi survei kepuasan masyarakat, dapat memastikan pengolahan data hasil survei lebih valid dan cepat sehingga evaluasi terhadap layanan dapat dilakukan lebih optimal.
2	Disiplin dan Etos Kerja Pegawai	• Kebersihan lingkungan kantor mengandalkan tenaga kebersihan; • Penggunaan seragam KORPRI hanya dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan dan hari tertentu	• Melakukan bersih-bersih/kerja bakti tentang kebersihan di lingkungan kantor dalam mendukung Gerakan Indonesia Bersih: Aman Sehat Resik sejalan dengan arahan Presiden RI • Penerapan penggunaan seragam KORPRI secara rutin setiap hari Kamis sebagai bagian dari penguatan budaya kerja dan identitas aparatur	• Menciptakan suasana kerja yang lebih profesional dan nyaman dan sehingga menjadi produktif dan kondusif. • Meningkatnya konsistensi kedisiplinan pegawai dalam mematuhi ketentuan berpakaian • Penguatan identitas dan rasa kebersamaan sebagai anggota KORPRI • Meningkatnya citra profesional dan integritas pegawai di lingkungan kerja
3	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	• Pelaksanaan pekerjaan secara penuh melalui mekanisme *Work From Office* (WFO) setiap hari kerja; • Pelaksanaan perjalanan dinas/ konsinyering sesuai kebutuhan.	• Penerapan kebijakan pola kerja fleksibel melalui kombinasi *Work From Office* (WFO) sebesar 60% dan *Work From Home* (WFH) sebesar 40% mendukung kebijakan tingkat nasional; • Pembatasan perjalanan dinas/konsinyering dengan kombinasi metode *hybrid* (daring, luring) serta pembatasan peserta rapat.	• Meningkatnya efektivitas pemanfaatan waktu kerja yang berorientasi pada pencapaian kinerja (*output-based*); • Mendorong peningkatan produktivitas pegawai melalui pola kerja yang lebih adaptif dan fleksibel; • Penghematan anggaran belanja negara dengan *output*/*outcome* yang sama.

No	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
4	Pengendalian dan Pemantauan Kinerja	• Pengendalian intern terhadap pencapaian kinerja dilaksanakan tidak secara rutin	• Pengendalian intern terhadap pencapaian kinerja dilaksanakan dengan terintegrasi manajemen risiko dengan pelaksanaan monitoring/ evaluasi setiap triwulan	• Meningkatkan pengendalian intern berbasis risiko dalam pencapaian kinerja • Mempercepat penyelesaian hambatan dan kendala serta mitigasi risiko dalam upaya peningkatan kinerja unit kerja
5	Transformasi Digital dan Tata Kelola Data	• Pemanfaatan sistem informasi dan layanan digital masih terpisah-pisah; • Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum secara resmi terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.	• Pengembangan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai *superapps* terintegrasi serta penggunaan SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital tata kelola administrasi; • Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki Tanda Daftar Sistem Elektronik (TD-PSE) Lingkup Publik Nomor 94 dari Komdigi.	• Meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan kemudahan akses data serta layanan melalui tata kelola pemerintahan digital; • Menjamin transparansi dan akuntabilitas layanan digital Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian; • Melindungi hak pengguna sistem elektronik dengan menjamin akses terhadap layanan yang aman, terjamin, dan andal; • Meningkatkan keamanan dan keandalan sistem elektronik dengan menegakkan kepatuhan standar teknis dan protokol keamanan siber
4	Inovasi Peningkatan Kinerja dan Upaya Perbaikan Berkelanjutan	• Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum dipantau berkala dan tidak terdokumentasi dengan baik	• Pemantauan rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah dapat dilaksanakan secara digital melalui fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	• Meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP melalui sistem yang terintegrasi guna memastikan tindak lanjut hasil evaluasi berjalan optimal; • Meningkatkan efektivitas pengendalian internal penyelenggaraan SAKIP. • Meningkatkan komitmen perbaikan berkelanjutan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja.

No	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
		• Pengembangan karir ASN belum optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.	• Penerapan manajemen talenta serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis gap kompetensi	• Meningkatkan produktivitas dan pengembangan karir ASN; • Meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN melalui pembinaan manajerial dan pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perkeretapian.
		• Perolehan PNBP dari pemanfaatan asset/BMN belum optimal.	• Promosi aset/BMN bidang perkeretaapian diantaranya melalui media elektronik/media sosial, penggunaan stasiun sebagai lokasi pemotretan pranikah (LRT Sumsel), festival/event lainnya; • Sosialisasi persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN; • Usulan penyesuaian tarif PNBP.	• Peningkatan kinerja perolehan PNBP bidang perkeretaapian.
		• Kompetensi manajemen risiko pada beberapa pegawai Ditjen Perkeretaapian telah *expired*/habis masa berlaku	• Pelaksanaan kegiatan *refreshment* manajemen risiko secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran	• Memastikan kompetensi manajemen risiko pada pegawai Ditjen Perkeretaapian tetap terjaga dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja • Mendorong pengelolaan risiko yang lebih efektif dan peningkatan kinerja organisasi

Komitmen seluruh unit kerja senantiasa diperlukan secara aktif untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai inovasi dan perbaikan budaya kinerja yang relevan, terencana, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperkuat tata kelola organisasi.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan monitoring kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 mengacu target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar 96,423% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,457	99,348
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	94,750	95,862	101,174
		IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,529	99,754
		IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	22,827	24,112	105,629
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,625	99,625
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,018	15,345	73,009
Rata-rata Capaian Kinerja						**96,423**

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I 2026, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian:

a. Merumuskan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang difokuskan di luar pulau Jawa dengan berkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

b. Melaksanakan reviu *master plan* pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan kajian evaluasi dan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

c. Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran konektivitas dengan identifikasi kegiatan pembiayaan rupiah murni yang dapat ditunda/tidak dilaksanakan di Tahun 2026, diantaranya untuk kajian perencanaan teknis mendukung rehabilitasi/rekonstruksi perkeretaapian pasca bencana alam, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) untuk pengadaan lahan, dan kegiatan pendukung lainnya;

d. Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas, termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan *stakeholder* terkait (MRT Jakarta *North – South*, MRT Jakarta *East – West*, LRT Jakarta, Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, lainnya);

e. Mendorong peningkatan kompetensi inspektur perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.

2. IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pubik Bidang Perkeretaapian:

a. Peningkatan pengawasan terhadap layanan publik perkeretaapian sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan termasuk pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api sesuai standar pelayanan minimum dengan dukungan prasarana dan sarana yang andal;

b. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan *database* mendukung layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) guna meningkatkan kehandalan dan mencegah terjadinya gangguan pada layanan;

c. Koordinasi lanjutan usulan pemanfaatan perolehan PNBP untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung peningkatan kualitas layanan regulator perkeretaapian;

d. Mempersiapkan pengembangan organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum (Balai Perawatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder*.

3. IKP3 Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

a. Penyusunan program prioritas penanganan perlintasan sebidang serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi fasilitas keamanan perlintasan sebidang termasuk kompetensi SDM penjaga perlintasan;

b. Melakukan inspeksi/pemantauan terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat;

c. Lanjutan evaluasi terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) khususnya membahas layanan kereta api yang berkinerja OTP sangat rendah;

d. Lanjutan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian mendukung peningkatan kapasitas dan kecepatan operasional KA (pengembangan jalur KA komuter Medan-Binjai, pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, lainnya) serta mengusulkan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan

pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian prioritas yang ditunda/tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2026;

e. Peningkatan kompetensi Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dalam pengawasan perjalanan kereta api melalui pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana Perkeretaapian.

4. IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api:

a. Dukungan kebijakan melalui penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga (Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN) untuk mendukung penyelenggaraan angkutan kereta api subsidi perintis dan *Public Service Obligation* (PSO) Tahun 2026;

b. Penambahan lintas pelayanan kereta api penumpang pada beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa menyesuaikan potensi bangkitan penumpang, termasuk dukungan penyediaan sarana kereta api oleh badan usaha untuk meningkatkan kapasitas angkut terutama pada layanan kereta api perkotaan/KRL Jabodetabek;

c. Evaluasi program perjalanan kereta api (reguler dan fakultatif) pada GAPEKA khususnya angkutan barang yang tidak beroperasi di beberapa wilayah guna menyesuaikan *demand* angkutan barang;

d. Lanjutan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan stasiun dan akses stasiun (Makassar – Parepare, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penggunaan moda kereta api;

e. Percepatan pengembangan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagai Badan Layanan Umum agar dapat lebih berorientasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

5. IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:

a. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, diantaranya berupa pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/*rampcheck*/audit dan pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);

b. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Badan Usaha, Pemerintah Daerah) untuk penanganan daerah rawan gangguan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, diantaranya daerah rawan perlintasan sebidang, daerah rawan bencana alam/cuaca ekstrim;

c. Mendorong Badan Usaha untuk melakukan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) secara berkala/setiap bulan melalui fitur pelaporan badan usaha pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjadi bahan telaah/pengawasan dari Direktorat teknis/Balai terkait.

d. Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran keselamatan, diantaranya kegiatan IMO, penggantian/peningkatan jembatan di beberapa lokasi, penanganan rintang jalan/amblesain, kegiatan mendesak lainnya;

e. Melaksanakan pengembangan fitur pengawasan keselamatan didukung *database* yang memadai pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian secara *realtime*.

f. Menugaskan pegawai dengan kompetensi/fungsional tertentu (inspektur perkeretaapian) untuk intensif melakukan inspeksi kondisi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian yang beroperasi.

6. IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi tingkat Eselon I terhadap unit kerja Sekretariat/Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;

b. Koordinasi dan pembahasan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan dan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026;

c. Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran;

d. Koordinasi lanjutan untuk pembayaran PNBP TAC serta inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa aset/lahan/bangunan yang belum dipungut PNBP, termasuk melakukan penertiban atas pihak yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan;

e. Mengusulkan kembali kebutuhan anggaran mendesak dan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan pemenuhan dari realokasi anggaran kegiatan hasil identifikasi yang dapat ditunda/belum berkontrak/tidak dapat dilaksanakan yang bersumber dari Rupiah Murni;

f. Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi;

g. Mendorong pembangunan zona integritas dengan pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan, termasuk menyelenggarakan simulasi penilaian internal (*pre-assessment*) unit kerja yang diusulkan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil penilaian.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DAN
RENCANA AKSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	ALLAN TANDIONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750
		IKP3	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

	Kegiatan		Anggaran Efektif
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	377.937.809.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	579.390.083.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.526.501.421.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	33.444.056.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	26.294.617.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	582.883.956.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	23.908.087.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	12.197.555.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	1.226.837.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2026
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai
		IKP3	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%

Jakarta, Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

RENCANA AKSI PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIAKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru,reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,486		Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (%)	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	46,000		
				Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian (%)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	**377.937.809.000**	Dit. LLAKA
				Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA (%)	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700		
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana (%)	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian (%)	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	70,139		Dit. Sarana Perkeretaapian
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai		Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	**579.390.083.000**	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit Keselamatan, BPKA dan BPKARS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai)	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500		Dit. LLAKA
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750		Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250		Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	IK3 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770		Dit. LLAKA, Dit Prasarana, BTP
				Persentase pemenuhan NSPK LLAKA (%)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	55,000		
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	35,590		Dit. LLAKA
				Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%)	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64		Dit. Prasarana Perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIAKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
				Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,530		Dit. Prasarana Perkeretaapian
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000	Pelaksanaan subsidi perintis dan monitoring PSO	19,547	21,187	22,827	24,467	26,107	27,747	29,387	31,027	32,667	34,307	35,947	40,000		Dit LLAKA
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	50,850											62,790	2.526.501.421.000	Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	81,820		
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)												80,940		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Persentase Hasil *Rampcheck* Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti (%)												94,560		
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian (%)	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	59,250		
				Persentase Pemenuhan Sertilikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%)	22,770											39,160		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
				Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	40,000		
				Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti (%)	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	40,000		
				Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti (%)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	33,330		
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%)	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	96,290		
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%)												34,448		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)												39,580		
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)												39,067		
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapiani	%	100,000	**Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM**	**16,10%**	**20,83%**	**21,02%**	**21,25%**	**21,41%**	**21,61%**	**35,10%**	**35,39%**	**36,87%**	**62,06%**	**62,19%**	**100,00%**		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian : 83,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	**646.511.052.000**	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIAKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
				Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian : 85	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000		
				Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian : 100	14,410	33,335	34,070	35,015	35,621	36,451	90,403	91,551	97,477	98,223	98,766	100,000		
				Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian : 89,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000		

Jakarta, Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP. 198801182025211023

LAMPIRAN II

KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**SASARAN : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur** **INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian**		
1	Merumuskan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang difokuskan di luar pulau Jawa dengan berkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA
2	Melaksanakan reviu *master plan* pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan kajian evaluasi dan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktoral LLAKA
3	Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran konektivitas dengan identifikasi kegiatan pembiayaan rupiah murni yang dapat ditunda/tidak dilaksanakan di Tahun 2026, diantaranya untuk kajian perencanaan teknis mendukung rehabilitasi/rekonstruksi perkeretaapian pasca bencana alam, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) untuk pengadaan lahan, dan kegiatan pendukung lainnya;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktoral Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
4	Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas, termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan *stakeholder* terkait (MRT Jakarta *North – South*, MRT Jakarta *East – West*, LRT Jakarta, Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, lainnya);	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktoral Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
5	Mendorong peningkatan kompetensi inspektur perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
B.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian**		
1	Peningkatan pengawasan terhadap layanan publik perkeretaapian sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan termasuk pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api sesuai standar pelayanan minimum dengan dukungan prasarana dan sarana yang andal;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat/Balai terkait yang melakukan layanan publik bidang perkeretaapian
2	Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan *database* mendukung layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) guna meningkatkan kehandalan dan mencegah terjadinya gangguan pada layanan;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat/Balai terkait yang melakukan layanan publik bidang perkeretaapian
3	Koordinasi lanjutan usulan pemanfaatan perolehan PNBP untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung peningkatan kualitas layanan regulator perkeretaapian;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
4	Mempersiapkan pengembangan organisasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum (Balai Perawatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder*.	Triwulan II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat/Balai terkait yang melakukan layanan publik bidang perkeretaapian
C	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Presentase Capaian *On Time Performace* (OTP) Transportasi Kereta Api**		
1	Penyusunan program prioritas penanganan perlintasan sebidang serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi fasilitas keamanan perlintasan sebidang termasuk kompetensi SDM penjaga perlintasan;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
2	Melakukan inspeksi/pemantauan terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
3	Lanjutan evaluasi terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) khususnya membahas layanan kereta api yang berkinerja OTP sangat rendah;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat LLAKA

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Lanjutan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian mendukung peningkatan kapasitas dan kecepatan operasional KA (pengembangan jalur KA komuter Medan-Binjai, pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, lainnya) serta mengusulkan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian prioritas yang ditunda/tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2026;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
5	Peningkatan kompetensi Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dalam pengawasan perjalanan kereta api melalui pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana Perkeretaapian.	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
D.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Presentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api**		
1	Dukungan kebijakan melalui penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga (Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN) untuk mendukung penyelenggaraan angkutan kereta api subsidi perintis dan *Public Service Obligation* (PSO) Tahun 2026;	Triwulan II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA
2	Penambahan lintas pelayanan kereta api penumpang pada beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa menyesuaikan potensi bangkitan penumpang, termasuk dukungan penyediaan sarana kereta api oleh badan usaha untuk meningkatkan kapasitas angkut terutama pada layanan kereta api perkotaan/KRL Jabodetabek;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Direktorat Sarana Perkeretaapian
3	Evaluasi program perjalanan kereta api (reguler dan fakultatif) pada GAPEKA khususnya angkutan barang yang tidak beroperasi di beberapa wilayah guna menyesuaikan *demand* angkutan barang;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Balai terkait
4	Lanjutan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan stasiun dan akses stasiun (Makassar – Parepare, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penggunaan moda kereta api;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
5	Percepatan pengembangan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagai Badan Layanan Umum agar dapat lebih berorientasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
E.	**SASARAN : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian**		
1	Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, diantaranya berupa pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/*rampcheck*/audit dan pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
2	Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Badan Usaha, Pemerintah Daerah) untuk penanganan daerah rawan gangguan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, diantaranya daerah rawan perlintasan sebidang, daerah rawan bencana alam/cuaca ekstrim;	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
3	Mendorong Badan Usaha untuk melakukan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) secara berkala/setiap bulan melalui fitur pelaporan badan usaha pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjadi bahan telaah/pengawasan dari Direktorat teknis/Balai terkait.	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
4	Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran keselamatan, diantaranya kegiatan IMO, penggantian/peningkatan jembatan di beberapa lokasi, penanganan rintang jalan/amblesain, kegiatan mendesak lainnya;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
5	Melaksanakan pengembangan fitur pengawasan keselamatan didukung *database* yang memadai pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian secara *realtime*.	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
6	Menugaskan pegawai dengan kompetensi/fungsional tertentu (inspektur perkeretaapian) untuk intensif melakukan inspeksi kondisi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian yang beroperasi.	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
F.	**SASARAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi tingkat Eselon I terhadap unit kerja Sekretariat/Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;	Triwulan II s.d III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Koordinasi dan pembahasan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan dan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran;	Triwulan II s.d III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Koordinasi lanjutan untuk pembayaran PNBP TAC serta inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa aset/lahan/bangunan yang belum dipungut PNBP, termasuk melakukan penertiban atas pihak yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian
5	Mengusulkan kembali kebutuhan anggaran mendesak dan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan pemenuhan dari realokasi anggaran kegiatan hasil identifikasi yang dapat ditunda/belum berkontrak/tidak dapat dilaksanakan yang bersumber dari Rupiah Murni;	Triwulan II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
6	Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi;	Triwulan II s.d.III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
7	Mendorong pembangunan zona integritas dengan pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan, termasuk menyelenggarakan simulasi penilaian internal (*pre-assessment*) unit kerja yang diusulkan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil penilaian.	Triwulan II s.d III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Balai terkait

Jakarta, April 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

LAMPIRAN III

REALISASI DAN ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	4600 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	15.145.227.000	4.464.284.000	0	0	0	0	0	0	19.609.511.000
		REALISASI	0	2.593.363.550	2.250.993.184	0	0	0	0	0	0	4.844.356.734
			0%	17.12%	50.42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24.70%
		SISA	0	12.551.863.450	2.213.290.816	0	0	0	0	0	0	14.765.154.266
2	4601 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	206.957.690.000	290.765.703.000	15.216.292.000	0	0	0	0	0	0	512.939.685.000
		REALISASI	109.800.932.728	58.648.105.445	2.979.062.994	0	0	0	0	0	0	171.428.101.167
			53.05%	20.17%	19.58%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33.42%
		SISA	97.156.757.272	232.117.597.555	12.237.229.006	0	0	0	0	0	0	341.511.583.833
3	4602 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	15.352.576.000	1.800.620.000	0	0	0	0	0	0	17.153.196.000
		REALISASI	0	157.975.180	0	0	0	0	0	0	0	157.975.180
			0%	1.03%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.92%
		SISA	0	15.194.600.820	1.800.620.000	0	0	0	0	0	0	16.995.220.820
4	4603 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	8.893.157.000	0	0	0	0	0	0	0	8.893.157.000
		REALISASI	0	2.505.731.637	0	0	0	0	0	0	0	2.505.731.637
			0%	28.18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28.18%
		SISA	0	6.387.425.363	0	0	0	0	0	0	0	6.387.425.363
5	4604 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	708.198.000	0	0	0	0	0	0	0	708.198.000
		REALISASI	0	68.611.100	0	0	0	0	0	0	0	68.611.100
			0%	9.69%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9.69%
		SISA	0	639.586.900	0	0	0	0	0	0	0	639.586.900
6	4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	318.849.850.000	287.252.073.000	0	0	0	0	0	0	606.101.923.000
		REALISASI	0	38.655.529.690	774.914.513	0	0	0	0	0	0	39.430.444.203
			0%	12.12%	0.27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6.51%
		SISA	0	280.194.320.310	286.477.158.487	0	0	0	0	0	0	566.671.478.797
7	4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	2.067.639.444.000	194.646.386.000	0	0	0	0	0	0	2.262.285.830.000
		REALISASI	0	10.141.404.982	538.150.200	0	0	0	0	0	0	10.679.555.182
			0%	0.49%	0.28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.47%
		SISA	0	2.057.498.039.018	194.108.235.800	0	0	0	0	0	0	2.251.606.274.818
8	4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	306.996.996.000	1.042.671.160.000	0	0	0	0	0	0	1.349.668.156.000
		REALISASI	0	67.679.617.088	170.329.499	0	0	0	0	0	0	67.849.946.587
			0%	22.05%	0.02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5.03%
		SISA	0	239.317.378.912	1.042.500.830.501	0	0	0	0	0	0	1.281.818.209.413
9	4644 | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	37.950.953.000	1.445.239.000	0	0	0	0	0	0	39.396.192.000
		REALISASI	0	1.420.045.434	130.913.400	0	0	0	0	0	0	1.550.958.834
			0%	3.74%	9.06%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3.94%
		SISA	0	36.530.907.566	1.314.325.600	0	0	0	0	0	0	37.845.233.166

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
GRAND TOTAL		PAGU	206.957.690.000	3.062.302.104.000	1.547.496.054.000	0	0	0	0	0	0	4.816.755.848.000
		REALISASI	109.800.932.728	181.870.384.106	6.844.363.790	0	0	0	0	0	0	298.515.680.624
		%	53.05%	5.94%	0.44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6.20%
		SISA	97.156.757.272	2.880.431.719.894	1.540.651.690.210	0	0	0	0	0	0	4.518.240.167.376

tanggal cetak : 24-04-26 10:49:18

PERHITUNGAN EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Triwulan I Tahun 2026

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
1	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	1.055.285.000	-	1.055.285.000	147.938.850	263.715.722	115.776.872
2	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	001 Layanan SDM (Orang)	1045,00	0,00	15,00%	2.079.082.000	-	2.079.082.000	229.198.000	311.862.300	82.664.300
3	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Kebijakan Perencanaan (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	0,00	15,00%	9.920.517.000	-	9.920.517.000	151.298.550	1.488.077.550	1.336.779.000
4	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	403.120.000	-	403.120.000	124.452.050	100.739.688	(23.712.362)
5	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	8.550.697.000	-	8.550.697.000	1.107.601.896	2.136.819.180	1.029.217.284
6	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	45,33%	56.332.595.000	-	56.332.595.000	29.152.993.216	25.535.565.314	(3.617.427.903)
7	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	3.603.399.000	-	3.603.399.000	521.006.520	900.489.410	379.482.890
8	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	7.643.527.000	-	7.643.527.000	2.335.175.718	1.910.117.397	(425.058.321)
9	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	1,00	0,00	15,00%	298.000.000	-	298.000.000	-	44.700.000	44.700.000
10	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	21,66%	1.768.964.000	-	1.768.964.000	55.007.100	383.157.602	328.150.502
11	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	001 Sistem Informasi (Layanan)	1,00	0,00	15,00%	11.274.596.000	-	11.274.596.000	-	1.691.189.400	1.691.189.400
12	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	21,66%	6.562.433.000	-	6.562.433.000	884.739.409	1.421.422.988	536.683.579
13	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	21,66%	708.198.000	-	708.198.000	63.291.100	153.395.687	90.104.587
15	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Rekomendasi Kebijakan)	15,00	0,00	1,00%	8.671.189.000	-	8.671.189.000	-	86.711.890	86.711.890
16	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	002 Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api (layanan)	1,00	0,00	33,64%	18.636.000.000	-	18.636.000.000	6.869.843.670	6.269.150.400	(600.693.270)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
17	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	004 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru (layanan)	1,00	0,00	12,99%	2.115.600.000	-	2.115.600.000	428.054.918	274.816.440	(153.238.478)
18	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	2,00	0,00	17,19%	4.529.592.000	-	4.529.592.000	778.096.000	778.636.865	540.865
19	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	1,00%	4.200.000.000	-	4.200.000.000	-	42.000.000	42.000.000
20	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	13,88%	1.130.760.000	-	1.130.760.000	189.151.208	156.949.488	(32.201.720)
21	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	2.147.279.000	-	2.147.279.000	391.110.389	536.605.022	145.494.633
22	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	4,83%	24.392.404.000	-	24.392.404.000	1.761.728.510	1.178.153.113	(583.575.397)
23	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	17,33%	184.628.000	-	184.628.000	44.903.956	31.996.032	(12.907.924)
24	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	001 Pengelolaan Data dan Informasi (layanan)	1,00	0,00	1,00%	1.089.623.000	-	1.089.623.000	-	10.896.230	10.896.230
25	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	001 Sistem Informasi (Layanan)	1,00	0,00	1,00%	60.657.000	-	60.657.000	-	606.570	606.570
26	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	40,39%	109.697.000	-	109.697.000	48.777.568	44.306.618	(4.470.950)
28	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	035 Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I (Paket)	1,00	0,00	3,00%	63.050.000.000	-	63.050.000.000	-	1.891.500.000	1.891.500.000
29	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	3,98	0,00	3,00%	2.673.453.000	-	2.673.453.000	-	80.203.590	80.203.590
30	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	022 Penanganan Perlintasan Sebidang untuk Integrasi Telekomunikasi antar Pos Jaga DJKA dengan Dinas Perhubungan/Swasta di Pulau Jawa (Paket)	1,00	0,00	1,00%	9.500.000.000	-	9.500.000.000	-	95.000.000	95.000.000
31	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	30,91%	4.244.139.000	-	4.244.139.000	1.272.770.000	1.311.863.365	39.093.365
32	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	019 Surabaya Regional Railway Line (Phase I) (Paket)	1,00	0,00	4,00%	50.000.000.000	-	50.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
33	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	9.624.936.000	-	9.624.936.000	2.593.771.928	2.405.271.506	(188.500.422)
34	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	3.572.068.000	-	3.572.068.000	1.344.115.594	892.659.793	(451.455.801)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
35	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	0,00	7,00%	777.000.000	-	777.000.000	-	54.390.000	54.390.000
36	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	4,41%	3.247.240.000	-	3.247.240.000	299.460.401	143.203.284	(156.257.117)
37	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	3,00%	2.678.793.000	-	2.678.793.000	95.640.500	80.363.790	(15.276.710)
42	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)	002 Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian (NSPK)	17,00	0,00	3,00%	20.113.564.000	-	20.113.564.000	-	603.406.920	603.406.920
43	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	001 Operasi Sarana Perkeretaapian (Unit)	14,00	0,00	10,00%	4.046.783.000	-	4.046.783.000	404.678.250	404.678.300	50
44	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	30,00	0,00	5,00%	33.155.759.000	-	33.155.759.000	1.531.531.837	1.657.787.950	126.256.113
45	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	10,00%	359.392.000	-	359.392.000	27.359.500	35.939.200	8.579.700
46	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	33,32%	2.966.936.000	-	2.966.936.000	913.226.487	988.583.075	75.356.588
47	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	18,00%	6.454.680.000	-	6.454.680.000	1.703.834.519	1.161.842.400	(541.992.119)
48	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	18,00%	79.568.000	-	79.568.000	26.516.000	14.322.240	(12.193.760)
49	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	1,00	0,00	3,00%	94.154.000	-	94.154.000	-	2.824.620	2.824.620
50	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	1,00	0,00	3,00%	20.000.000	-	20.000.000	-	600.000	600.000
51	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	001 Sistem Informasi (Layanan)	1,00	0,00	3,00%	800.000.000	-	800.000.000	-	24.000.000	24.000.000
52	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)	001 Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian (NSPK)	6,00	0,00	1,00%	2.704.220.000	-	2.704.220.000	-	27.042.200	27.042.200
53	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	1.586.549.000	-	1.586.549.000	372.519.119	396.478.595	23.959.476

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
54	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	769.562.000	-	769.562.000	179.310.366	192.313.544	13.003.178
55	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	22.319.495.000	-	22.319.495.000	3.420.188.392	5.577.641.801	2.157.453.409
56	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	129.852.000	-	129.852.000	36.593.470	32.450.015	(4.143.455)
57	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	1,13%	1.060.525.000	-	1.060.525.000	11.898.090	11.983.933	85.843
58	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	6,00	0,00	9,42%	18.913.566.000	-	18.913.566.000	915.471.603	1.781.657.917	866.186.314
59	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,30%	391.600.000.000	-	391.600.000.000	222.260.428	1.174.800.000	952.539.572
60	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	023 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (4 Lintas Pelayanan) (Paket)	1,00	0,00	0,10%	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000	400.000
61	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	003 Studi Kelayakan (Feasibility Study) (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	0,00	0,10%	6.650.000.000	-	6.650.000.000	-	6.650.000	6.650.000
62	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	030 Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara (Paket A Tahap III) (km)	1,00	0,00	0,00%	636.159.734.000	-	636.159.734.000	-	-	-
63	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	1.710.171.000	-	1.710.171.000	258.748.259	427.371.733	168.623.474
64	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	16,00	0,00	24,99%	2.133.843.000	-	2.133.843.000	478.435.699	533.247.366	54.811.667
65	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	29.109.495.000	-	29.109.495.000	9.109.000.671	7.274.462.801	(1.834.537.871)
66	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	0,00	93,25%	566.650.000	-	566.650.000	446.837.830	528.401.125	81.563.295
67	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	6,00	0,00	24,99%	2.771.783.000	-	2.771.783.000	1.173.309.256	692.668.572	(480.640.684)
68	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	2,00	0,00	24,99%	413.904.000	-	413.904.000	112.200.649	103.434.610	(8.766.039)
69	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	001 Pengelolaan Data dan Informasi (layanan)	1,00	0,00	24,99%	40.736.000	-	40.736.000	-	10.179.926	10.179.926

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
70	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	2,00	0,00	24,99%	618.066.000	-	618.066.000	247.106.550	154.454.693	(92.651.857)
72	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Jembatan Kereta Api (km)	1,00	0,00	0,00%	11.010.817.000	-	11.010.817.000	-	-	-
73	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	2,00	0,00	0,00%	6.015.191.000	-	6.015.191.000	-	-	-
74	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,00%	467.082.627.000	-	467.082.627.000	-	-	-
75	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	0,00%	2.030.625.000	-	2.030.625.000	-	-	-
76	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	0,00%	6.970.283.000	-	6.970.283.000	-	-	-
77	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	6,00	0,00	0,00%	1.993.489.000	-	1.993.489.000	-	-	-
78	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	0,00%	29.281.057.000	-	29.281.057.000	-	-	-
79	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	0,00	0,00%	1.837.498.000	-	1.837.498.000	-	-	-
80	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	2,00	0,00	0,00%	9.149.527.000	-	9.149.527.000	-	-	-
81	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	9,00	0,00	0,00%	2.075.356.000	-	2.075.356.000	-	-	-
82	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	6,00	0,00	0,00%	231.731.000	-	231.731.000	-	-	-
83	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	2,00	0,00	0,00%	1.640.073.000	-	1.640.073.000	-	-	-
84	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	2,00	0,00	0,00%	93.907.000	-	93.907.000	-	-	-
88	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	0,10	0,00	0,03%	965.000.000	-	965.000.000	-	289.500	289.500
89	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	009 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri (layanan)	1,00	0,00	0,11%	12.679.929.000	-	12.679.929.000	14.048.600	13.947.922	(100.678)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
90	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	082 Pembangunan Gardu Listrik Delanggu (Unit)	1,00	0,00	0,03%	38.000.000.000	-	38.000.000.000	-	11.400.000	11.400.000
91	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,03%	652.555.032.000	-	652.555.032.000	-	195.766.510	195.766.510
92	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	007 Penanganan Rintang Jalan Pada Jalur KA Antara Mluwung - Cipari, Kawunganten - Lebeng, dan Sikampuh - Kroya Segmen Banjar - Kroya Lintas Bogor - Yogyakarta (Paket)	1,00	0,00	0,03%	104.382.663.000	-	104.382.663.000	-	31.314.799	31.314.799
93	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	2.428.521.000	-	2.428.521.000	136.099.523	606.887.398	470.787.875
94	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	292.046.000	-	292.046.000	12.302.000	72.982.295	60.680.295
95	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	1.805.623.000	-	1.805.623.000	174.730.029	451.225.188	276.495.159
96	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2,00	0,00	24,99%	38.390.388.000	-	38.390.388.000	7.231.848.083	9.593.757.961	2.361.909.878
97	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	79,00	0,00	0,03%	50.000.000	-	50.000.000	-	15.000	15.000
98	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	2.860.846.000	-	2.860.846.000	221.288.935	714.925.415	493.636.480
99	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	408.146.000	-	408.146.000	59.638.101	101.995.685	42.357.584
100	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	380.854.000	-	380.854.000	6.495.500	95.175.415	88.679.915
101	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	30,00	0,00	0,03%	331.100.000	-	331.100.000	-	99.330	99.330
106	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	15,00%	24.459.144.000	-	24.459.144.000	35.278.000	3.668.871.600	3.633.593.600
107	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	1,00	0,00	5,00%	200.000.000	-	200.000.000	-	10.000.000	10.000.000
108	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	3,00	0,00	15,00%	5.724.775.000	-	5.724.775.000	49.482.500	858.716.250	809.233.750
109	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	15,00%	255.863.004.000	-	255.863.004.000	-	38.379.450.600	38.379.450.600

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
110	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	007 Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	0,00	0,00%	2.428.200.000	-	2.428.200.000	-	-	-
111	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	825.931.000	-	825.931.000	384.715.680	206.400.157	(178.315.523)
112	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	5.314.837.000	-	5.314.837.000	850.180.170	1.328.177.766	477.997.596
113	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	21.155.649.000	-	21.155.649.000	4.839.692.741	5.286.796.685	447.103.944
114	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	1.315.809.000	-	1.315.809.000	776.921.320	328.820.669	(448.100.651)
115	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	152.987.000	-	152.987.000	84.831.300	38.231.451	(46.599.849)
116	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	488.940.000	-	488.940.000	477.675.200	488.940.000	11.264.800
117	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	10,00	0,00	0,00%	115.995.000	-	115.995.000	-	-	-
121	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,00%	1.847.597.000	-	1.847.597.000	-	-	-
122	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,00%	101.656.365.000	-	101.656.365.000	-	-	-
123	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	1,91%	350.000.000	-	350.000.000	6.664.800	6.685.000	20.200
124	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	012 Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai (km)	6,80	0,00	0,00%	337.865.770.000	-	337.865.770.000	-	-	-
125	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	4,68%	610.886.000	-	610.886.000	68.035.149	28.589.465	(39.445.684)
126	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	20,98%	1.807.180.000	-	1.807.180.000	639.829.792	379.146.364	(260.683.428)
127	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	40,81%	20.676.540.000	-	20.676.540.000	7.153.489.932	8.438.095.974	1.284.606.042
128	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	11,56%	956.960.000	-	956.960.000	249.736.945	110.624.576	(139.112.369)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
129	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	11,35%	258.775.000	-	258.775.000	47.556.173	29.370.963	(18.185.211)
130	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	19,36%	207.776.000	-	207.776.000	84.655.710	40.225.434	(44.430.276)
138	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	8,50	0,00	0,00%	1.924.578.000	-	1.924.578.000	-	-	-
139	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	127,00	0,00	0,00%	9.217.696.000	-	9.217.696.000	-	-	-
140	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	1,00	0,00	0,00%	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-
141	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,00%	51.573.070.000	-	51.573.070.000	-	-	-
142	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	004 Penanganan Rintang Jalan lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam termasuk supervisi (Paket)	1,00	0,00	0,00%	68.763.061.000	-	68.763.061.000	-	-	-
143	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CAK Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	001 Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit)	1,00	0,00	0,00%	1.042.059.000	-	1.042.059.000	-	-	-
144	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	0,00%	2.441.380.000	-	2.441.380.000	-	-	-
145	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	0,00%	1.017.786.000	-	1.017.786.000	-	-	-
146	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	0,00%	18.266.543.000	-	18.266.543.000	-	-	-
147	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00%	1.156.402.000	-	1.156.402.000	-	-	-
148	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	0,00%	407.744.000	-	407.744.000	-	-	-
149	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	0,00%	306.174.000	-	306.174.000	-	-	-
151	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	0,00%	850.000.000	-	850.000.000	-	-	-
152	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	4,21	0,00	0,00%	2.989.052.000	-	2.989.052.000	-	-	-
153	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	0,00%	688.330.000	-	688.330.000	-	-	-

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
154	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	7,00	0,00	0,00%	4.533.186.000	-	4.533.186.000	-	-	-
155	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2,00	0,00	0,00%	11.565.414.000	-	11.565.414.000	-	-	-
156	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	0,00	0,00%	378.038.000	-	378.038.000	-	-	-
157	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00%	483.508.000	-	483.508.000	-	-	-
158	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	0,00%	90.925.000	-	90.925.000	-	-	-
159	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	0,00%	125.335.000	-	125.335.000	-	-	-
165	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)	001 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian (produk)	1,00	0,00	11,88%	11.137.076.000	224.396.000	10.912.680.000	1.239.723.906	1.296.426.384	56.702.478
166	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)	002 Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (produk)	3,00	0,00	4,80%	9.487.120.000	217.300.000	9.269.820.000	371.917.295	444.951.360	73.034.065
167	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang, Sertifikat)	001 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian (Orang)	1,00	0,00	5,29%	16.695.806.000	134.587.000	16.561.219.000	722.347.459	876.088.485	153.741.026
168	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	3,00	0,00	3,00%	5.396.439.000	-	5.396.439.000	-	161.893.170	161.893.170
169	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	5,00	0,00	3,95%	21.357.983.000	242.392.000	21.115.591.000	629.339.492	834.065.845	204.726.353
170	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi)	001 Sistem Informasi (Sistem Informasi)	1,00	0,00	3,00%	499.500.000	-	499.500.000	-	14.985.000	14.985.000
171	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	7,00	1,00	17,96%	1.358.563.000	-	1.358.563.000	246.148.320	243.997.915	(2.150.405)
172	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	26,94%	17.407.033.000	-	17.407.033.000	4.894.697.588	4.689.454.690	(205.242.898)
173	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	15,00	0,00	5,09%	12.759.654.000	424.534.000	12.335.120.000	394.704.000	627.857.608	233.153.608
174	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	12,61%	509.160.000	-	509.160.000	74.432.493	64.205.076	(10.227.417)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
175	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	22,53%	774.462.000	-	774.462.000	208.931.800	174.486.289	(34.445.511)
176	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	6,01%	706.777.000	-	706.777.000	36.630.000	42.477.298	5.847.298
177	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	1,00	0,00	3,00%	666.000.000	232.800.000	433.200.000	-	12.996.000	12.996.000
178	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	2,60%	268.248.000	-	268.248.000	8.405.500	6.974.448	(1.431.052)
179	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	005 Rencana Induk (Master Plan) (Kajian)	2,00	0,00	0,00%	2.680.000.000	-	2.680.000.000	-	-	-
180	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	003 Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	17,00	1,00	1,59%	35.307.018.000	-	35.307.018.000	564.284.243	561.381.586	(2.902.657)
181	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	1,00	0,00	0,00%	177.600.000	-	177.600.000	-	-	-
182	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CAK Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	001 Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit)	1,00	0,00	0,00%	1.940.316.000	-	1.940.316.000	-	-	-
183	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	4.962.172.000	-	4.962.172.000	833.876.998	1.240.046.783	406.169.785
184	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2,00	0,00	24,99%	27.101.366.000	-	27.101.366.000	7.682.458.790	6.772.631.363	(909.827.427)
185	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	0,00	18,87%	1.209.581.000	-	1.209.581.000	228.220.440	228.247.935	27.495
186	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	741.958.000	-	741.958.000	313.288.540	185.415.304	(127.873.236)
187	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	122.368.000	-	122.368.000	95.836.625	30.579.763	(65.256.862)
188	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	5,00	0,00	0,00%	1.012.534.000	-	1.012.534.000	-	-	-
190	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	007 Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan (layanan)	1,00	0,00	8,05%	191.214.326.000	-	191.214.326.000	15.409.865.479	15.392.753.243	(17.112.236)
191	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	1,00	0,00	0,21%	999.000.000	-	999.000.000	-	2.097.900	2.097.900

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
192	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	0,21%	2.100.000.000	-	2.100.000.000	-	4.410.000	4.410.000
193	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	2,00	0,00	0,21%	3.376.141.000	-	3.376.141.000	-	7.089.896	7.089.896
194	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	1,62%	13.338.709.000	-	13.338.709.000	214.791.400	216.087.086	1.295.686
195	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. (Layanan)	1,00	0,00	22,29%	436.204.000	-	436.204.000	173.845.691	97.229.872	(76.615.819)
196	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	001 Layanan SDM (Orang)	239,00	0,00	0,21%	132.438.000	-	132.438.000	-	278.120	278.120
197	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Kebijakan Perencanaan (Rekomendasi Kebijakan)	2,00	0,00	26,66%	53.206.000	-	53.206.000	34.569.255	14.184.720	(20.384.535)
198	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	17,31%	827.445.000	-	827.445.000	144.747.082	143.230.730	(1.516.353)
199	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	14,74%	27.442.818.000	7.495.172.000	19.947.646.000	2.957.502.279	2.940.283.020	(17.219.259)
200	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	4,00	0,00	18,70%	295.187.000	-	295.187.000	140.051.745	55.199.969	(84.851.776)
201	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	2,00	0,00	3,22%	395.425.000	-	395.425.000	22.099.323	12.732.685	(9.366.638)
202	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	3,00	0,00	1,10%	1.014.288.000	-	1.014.288.000	10.265.169	11.157.168	891.999
204	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	001 Perintis Perkeretaapian (layanan)	1,00	0,00	0,00%	412.670.000	-	412.670.000	-	-	-
205	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	008 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare (layanan)	1,00	0,00	24,90%	80.505.992.000	-	80.505.992.000	3.301.616.000	20.045.992.008	16.744.376.008
206	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	139 Pembangunan Jalan Akses Stasiun Lintas Makassar - Parepare Tahap I (Paket)	1,00	0,00	10,00%	70.779.756.000	-	70.779.756.000	-	7.077.975.600	7.077.975.600
207	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	144 Peningkatan Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi Lintas Mandai - Garongkong termasuk Supervisi (Paket)	1,00	0,00	10,00%	40.681.240.000	-	40.681.240.000	138.005.902	4.068.124.000	3.930.118.098
208	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	050 Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro (Paket)	1,00	0,00	0,00%	38.329.735.000	-	38.329.735.000	-	-	-
209	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	4,00	0,00	10,00%	7.772.877.000	-	7.772.877.000	72.400.000	777.287.700	704.887.700

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
210	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	0,00	10,00%	1.828.485.000	-	1.828.485.000	-	182.848.500	182.848.500
211	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	5,00	0,00	10,00%	7.692.726.000	-	7.692.726.000	10.256.400	769.272.600	759.016.200
212	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	10,00%	3.618.207.000	-	3.618.207.000	288.961.500	361.820.700	72.859.200
213	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	018 Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) (Paket)	60,00	0,00	0,00%	246.023.000.000	-	246.023.000.000	-	-	-
214	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	231.000.000	-	231.000.000	-	57.726.900	57.726.900
215	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	12.000.000	-	12.000.000	-	2.998.800	2.998.800
216	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	10.327.839.000	-	10.327.839.000	1.486.550.430	2.580.926.966	1.094.376.536
217	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	0,00	26,17%	18.856.480.000	-	18.856.480.000	5.499.988.429	4.934.740.816	(565.247.613)
218	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	986.217.000	-	986.217.000	142.321.758	246.455.628	104.133.870
219	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	123.577.000	-	123.577.000	26.183.000	30.881.892	4.698.892
220	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	0,00	24,99%	20.049.000	-	20.049.000	5.250.000	5.010.245	(239.755)
221	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	45,00	0,00	0,00%	593.371.000	-	593.371.000	-	-	-
222	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	0,00	24,99%	226.518.000	-	226.518.000	13.280.350	56.606.848	43.326.498
Jumlah								**11,935%**	**4.816.755.848.000**	**8.971.181.000**	**4.807.784.667.000**	**144.724.144.890**	**228.647.651.054**	**83.923.506.164**

EFISIENSI RO DJKA → **1,742%**

"Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 1,742% atau Rp83.923.506.164,00 dengan rata-rata pencapaian rincian output 11,935% "

LAMPIRAN IV

MONITORING RENCANA AKSI
TRIWULAN I TAHUN 2026

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Januari, Tahun: 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru,reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	31.482.219.489	1.28	0.453	-	98.48%	0%	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target rasio konektivitas antarwilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460. Nilai tersebut masih sama dengan baseline periode sebelumnya, dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan dan/atau perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2026. Rincian target Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), simpul transportasi, dan Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api pada Tahun 2026 sebanyak 69 lokasi, yang terdiri dari 52 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan, dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Jumlah tersebut masih di bawah target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yaitu sebanyak 150 lokasi yang terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan, dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga Januari 2026 realisasi jumlah lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan kereta api masih sama dengan baseline periode sebelumnya yakni 0,453 atau capaian sebesar 98,48% dari target Tahun 2026 sebesar 0,460.	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antarwilayah pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1) Pelaksanaan kajian inventarisasi dan pemeriksaan secara rinci terhadap jumlah kerusakan dan/atau kehilangan prasarana akibat bencana, termasuk penyusunan dokumen teknis perencanaan sebagai dasar penanganan permanen; 2) Pelaksanaan penanganan terhadap kerusakan prasarana akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera; 3) Tindak lanjut terhadap persiapan pengoperasian lintas Semarang Tawang–Pelabuhan Tanjung Emas, termasuk pengajuan skema sewa aset serta tindak lanjut hasil pengujian kelaikan prasarana; 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, antara lain penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa pada kegiatan MRT Jakarta East–West Phase 1. b. Penyesuaian aktivitas/anggaran Penyusunan data dukung dan reviu anggaran dalam rangka penyusunan Detail Engineering Design (DED) rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian pascabencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan Optimalisasi penugasan pegawai sesuai Surat Keputusan Direktur Prasarana Nomor SK-K3D/JK.A 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025.	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana (%))	24	288	24.14	8.38	-	-	24.14	-	100%	-	masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan	Persiapan pengadaan barang/jasa	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	km	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Panjang jalur KA yang beroperasi (Km))	6915	82980	6915.12	8.33	-	-	6915.12	-	100%	-	Realisasi sama dengan capaian baseline 2025		Dit. Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (%))	23	362	23	6.35	-	-	23	-	100%	-	Belum terdapat pemenuhan dokumen perencanaan pada bulan Januari 2026	Melakukan pembahasan dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait pengusulan dokumen perencanaan	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian (%))	20	260	20	7.69	-	-	20	-	100%	-	Belum terdapat pemenuhan dokumen kerja sama pada bulan Januari 2026	Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Stakeholder terkait penyusunan pengusulan dokumen kerja sama	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA (%))	105	1140	95.73	8.4	-	-	105.9	-	110.62%	-	Data sementara menggunakan capaian kinerja persentase realisasi gapeka pada bulan Desember 2025	Melakukan koordinasi dengan Operator terkait pemenuhan data capaian Januari 2026	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian (%))	77	924	77.78	8.42	-	-	77.78	-	100%	-	Pada tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : DED : 1 dokumen Spesifikasi Teknis : 82 dokumen Rancang Bangun : 18 dokumen Rekayasa : 11 dokumen		Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	1200	100	8.33	210.457.568.369	1.62	100	-	100%	0%	Pada bulan Januari 2026 tidak terjadi kecelakaan KA	Upaya peningkatan kinerja terhadap rasio kejadian kecelakaan kereta api pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan, dan rampcheck guna memastikan keandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026; b. Pelaksanaan verifikasi tindak lanjut hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Penyelenggara Perkeretaapian di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Jabodetabek; c. Pelaksanaan kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan dalam rangka Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Prasarana; d. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana perkeretaapian; e. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta penugasan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif, termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan dan amblesan, serta penggantian jembatan yang kritis dan telah terdampak; f. Koordinasi persiapan penyelenggaraan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) Tahun 2026 yang berpotensi terdampak kebijakan penghematan anggaran; g. Percepatan penanganan prasarana yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%))	55	690	50.936	7.38	-	-	55.39	-	108.74%	-	Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan hasil pengujian	Koordinasi dengan Balai Pengujian dan stakeholder terkait	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian (%))	79	950	79.545	8.37	-	-	79.55	-	100.01%	-	Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 penambahan sebanyak 1 dokumen NSPK.	Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSPK	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%))	-	341	0	0	-	-	-	-	-	-	Jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 12.633 sertifikat (saat ini masih dalam tahap persiapan)	Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti (%))	-	940	0	0	-	-	-	-	-	-	Persiapan pelaksanaan Rampcheck Sarana Perkeretaapian	Koordinasi dengan BUPS	Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian (%))	37	466	37.03	7.95	-	-	37.03	-	100%	-	Capaian merupakan baseline 2025 Pada tahun 2026 ditargetkan penyusunan NSPK : a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT) d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkerjetaapian e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad) f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertilikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%))	23	353	22.97	6.51	-	-	23.55	-	102.53%	-	pada bulan januari terdapat 207 sertifikasi SDM Operator. akumulasi jumlah sertifikasi dari tahun sebelumnya ditambahkan dengan capaian pada tahun ini adalah sebesar (8271 + 207) = 8478 sertifikat. Jumlah total sertifikasi dibagi dengan target renstra (8.478/36.000) = 23,55	Direktorat Keselamatan akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan permohonan sertifikasi SDM Operator dan Regulator	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%))	15	295	15	5.08	-	-	15	-	100%	-	Pada bulan januari masih belum terdapat rekomendasi teknis keamanan perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti, dengan demikian capaiannya masih sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 15% atau 3 rekomndasi	akan melaksanakan tinjauan lapangan bersama dengan dishub jember terkait dengan permohonan rekomendasi teknis pembangunan pos jaga dan pemasangan palang pintu perlintasan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti (%))	16	292	20	6.85	-	-	16.84	-	84.2%	-	Pada bulanja januari telah di sampaikan rekomendasi keselamatan pada Lokasi Perlintasan Sebidang JPL 405 KM 225+492 Sukomanunggal Kota Surabaya	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan memonitor terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti (%))	16	278	16.66	5.99	-	-	16.66	-	100%	-	Direktorat keselamatan Perkeretaapian sedang melaksanakan rangkaian kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka angkutan lebaran 2026	akan melanjutkan pelaksanaan rangkaian kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka angkutan lebaran 2026	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%))	90	1096	90.74	8.28	-	-	90.74	-	100%	-	pada bulan januari 2026 masih belum terdapat tambahan NSPK bidang keselamatan perkeretaapian sehingga capaiannya masih sama dengan capaian sebelumnya yaitu sebesar 90,74 atau 49 NSPK	melakukan koordinasi dengan sesditjen perkeretaapian terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi pengendali distribusi listrik	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%))	20	325	19.91	6.13	-	-	20.79	-	104.42%	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian bulan Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut : Uji Pertama Lokomotif : 2 Unit Gerbong : 60 Unit Uji Berkala Lokomotif : 5 Unit Gerbong : 60 Unit	Melaksanakan kegiatan pengujian sarana perkeretaapian berdasarkan permohonan pada bulan Februari 2026	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%))	21	328	20.19	6.16	-	-	21.17	-	104.85%	-	Masih dalam tahap persiapan kegiatan	Pelaksanaan pengujian sesuai dengan usulan dari Operator pada bulan Februari 2026	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%))	20	334	19.89	5.96	-	-	20	-	100.55%	-	dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Pengujian Prasarana Perkeretaapian berdasarkan permohonan pada bulan Februari 2026	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	94	1128	94.75	8.4	48.263.193.913	1.28	94.75	-	100%	0%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup layanan administrasi pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, antara lain perizinan, sertifikasi, dan pengujian, serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan, dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun pada Januari 2026 belum dilakukan pengukuran terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dan pengukuran akan dilaksanakan setiap Triwulan yakni pada bulan April untuk Triwulan I, Juli untuk Triwulan II, Oktober untuk Triwualan III, dan Januari untuk Triwulan IV.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1) Pengelolaan sistem layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, dan layanan lainnya) secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya gangguan layanan, serta pengembangan lanjutan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi; 2) Fasilitasi dan tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan angkutan penumpang, khususnya layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan, antara lain melalui pemanfaatan barcode pada area boarding dan media sosial; 3) Partisipasi aktif dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman; 4) Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perkeretaapian; 5) Pelaksanaan pembinaan secara berkala kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun petugas yang bertugas di dalam kereta. b. Penyesuaian aktivitas/anggaran Penyusunan dan penyiapan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan layanan angkutan perintis perkeretaapian. c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai Pelaksanaan layanan sertifikasi dan/atau pengujian yang didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai jabatan fungsional tertentu perkeretaapian sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya, antara lain penguji dan asisten penguji.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit Keselamatan, BPKA dan BPKARS
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai))	87	1128	94.5	8.38	-	-	87	-	92.06%	-	Pada pelaksanaan survei periode Januari 2026, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.48 dalam skala 4 atau 15.20 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan DLLAKA	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai))	95	1140	95.25	8.36	-	-	95.25	-	100%	-	Masih menggunakan capaian Hasil survey IKM pada tahun 2025	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Sarana	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai))	97	1164	97.5	8.38	-	-	97.25	-	99.74%	-	Masih mengacu hasil survey IKM 2025	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dit Prasarana KA	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Nilai))	97	1152	96.75	8.4	-	-	97.75	-	101.03%	-	Pada bulan Januari 2026 terdapat 39 responden yang telah mengisi survey kepuasan masyarakat terkait layanan sertifikasi SDM dengan nilai 3,91 , jika menggunakan rumus perhitungan nilai IKM maka nilainya sebesar 97,75	akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terkait permohonan sertifikasi SDM	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai))	96	1152	96.75	8.4	-	-	96	-	99.22%	-	Capaian survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada periode bulan Februari tahun 2026	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai))	89	1068	89.75	8.4	-	-	89.75	-	100%	-	Masih mengacu pada hasil IKM tahun 2025	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada bulan Februari 2026	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai))	82	972	81.25	8.36	-	-	82.5	-	101.54%	-	Mengacu hasil IKM pada tahun 2025	Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat pada bulan Februari 2026	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk	97	1164	97.77	8.4	-	-	97.703	-	99.93%	-	Target On Time Performance (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 97,77%, baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api. Pada Januari 2026, realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang (kedatangan dan keberangkatan) yang tepat waktu sesuai jadwal diasumsikan masih sama seperti capaian/realisasi di Desember 2025 yakni sebanyak 1.054.081 KA dibandingkan dengan total perjalanan kereta api baik kedatangan dan keberangkatan sebanyak 1.078.866 KA dikarenakan belum dilakukan perhitungan oleh unit Direktorat Teknis terkait (Direktorat LLAKA).	Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a.Penyesuaian strategi/kebijakan: 1)Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjafa agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA; 2)Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan; 3)Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jabodetabek, lainnya) termasuk penyelesaian/finalisasi pada beberapa pekerjaan pembangunan/peningkatan jalur kereta api yang hamper selesai (Solo-Semarang, Jember-Kalisat, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. b.Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja On Time Performance. c.Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai: Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api	Dit. LLAKA, Dit Prasarana, BTP
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Persentase pemenuhan NSPK LLAKA (%))	38	451	36	7.98	-	-	38.1	-	105.83%	-	Capaian NSPK pada bulan Januari 2026 menggunakan data sementara yaitu data bulan Desember 2025 sebesar 38,10%	Melakukan pembahasan dan koordinasi terkait penyusunan dokumen NSPK LLAKA	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%))	24	398	33.9	8.52	-	-	24.14	-	71.21%	-	Capaian mengacu realisasi 2025 sebesar 24,14% dengan capaian sebesar 100% dengan realisasi pengesahan sebanyak 2 dokumen yaitu : 1. DED Balai Yasa KRL Cicalengka a. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Balai Yasa (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; b. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Depo (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Koordinator/ Ketua Tim Kelompok Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; c. Album MEP Gedung Balai Yasa dan Depo saat ini akan dijadwalkan kembali proses asistensi. 2. Telah dilakukan pengesahan Gambar Teknis Perencanaan Prasarana MRT Jakarta Jalur Utara Selatan Fase 2A (Bundaran HI - Kota)	akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan pendapat hukum terhadap draft kontrak RDC pada bulan januari 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Biro Hukum	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%))	94	1128	94.64	8.39	-	-	94.64	-	100%	-	Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode III tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode III pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil : 1. Realisasi hasil TQI periode III Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan panjang jalur 5.686,18 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.900,059 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.786,116 KM 2. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,36% dengan panjang jalur 321,83 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 277,190 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 44,640 KM 3. Dari hasil pengukuran periode II dan periode III terdapat Kenaikan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71% dan pada periode III meningkat menjadi sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64%. Kategori III dan IV periode II sepanjang 374,77 KM atau 6,29% dan pada periode III menurun menjadi sepanjang 321,83 KM atau 5,36%. Pada periode triwulan IV telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel pada : 1. lintas utara Jawa pada 10 s.d 14 November, lintas selatan Jawa pada 17 s.d 22 November, serta lintas Daop 1 pada 25 s.d 28 November. 2. Wilayah Divre I Sumatera Utara (Medan) dilaksanakan pada 18 s.d 25 Desember 2025, Divre II Sumatera Barat (Padang) dilaksanakan pada 1 s.d 4 Desember 2025, serta Divre III Palembang dan IV Tanjung Karang dilaksanakan pada 4 s.d 14 Desember 2025.	1. Akan dilaksanakan evaluasi Pengukuran TQI Periode IV pada bulan januari 2026 2. Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel (TQI) dengan KA ukur tahun 2026 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%))	65	780	65.21	8.36	-	-	65.21	-	100%	-	Realisasi mengacu baseline 202% sebesar 65,21% dengan ditetapkannya izin teknis pembangunan dan pengoperasian fasilitas operasi kereta api dengan sistem persinyalan elektrik di 5 stasiun yang ditargetkan di 2025 yaitu : 1. Stasiun Serdang 2. Stasiun Payakabung 3. Stasiun Gelumbang 4. Stasiun Karangendah 5. Stasiun Lembak	tahap persiapan pelaksanaan kegiatan	Dit. Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	40,000	Pelaksanaan subsidi perintis dan monitoring PSO	20	340	19.547	5.75	-	-	20.596	-	105.37%	-	Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 termasuk mempertimbangkan target pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2025 sebesar 40,00% . Adapun realisasi jumlah angkutan penumpang dan barang terangkut dengan kereta api hingga Januari 2026 masih menggunakan asumsi kenaikan sebesar 1% dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 19,596% dikarenakan Direktorat Teknis terkait (Direktorat LLAKA) belum melakukan perhitungan capaian kinerja.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain sebagai berikut: a. Percepatan perbaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana alam sebagai bagian dari kegiatan persiapan; b. Penyelenggaraan layanan subsidi Kereta Api (KA) perintis sesuai kebutuhan dan layanan Public Service Obligation (PSO) perkeretaapian, serta pengelolaan PSO Tahun 2026 yang mencakup layanan KA Perkotaan dan KA antarkota, termasuk pelaksanaan proses verifikasi; c. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara real time serta pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara berkala guna memastikan pelayanan sesuai dengan ketentuan; d. Percepatan kajian pendukung angkutan barang, antara lain melalui penyusunan tarif angkutan logistik kereta api serta penyusunan studi komprehensif mengenai perbandingan tarif angkutan kereta api dengan angkutan barang truk; e. Penyelesaian peningkatan Stasiun Rangkasbitung. Selain itu, diusulkan pula beberapa penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran sebagai berikut: Penyesuaian strategi/kebijakan Penyusunan reviu Rencana Induk Perkeretaapian, termasuk reviu Masterplan Kereta Api di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan serta penetapan target jumlah angkutan penumpang dan barang pada masing-masing layanan dan lokasi. Penyesuaian aktivitas/anggaran Antisipasi pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA, termasuk subsidi perintis, yang terdampak kebijakan Automatic Adjustment (AA) atau blokir dengan melakukan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	Dit LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	-	450	16.1	3.58	53.854.370.631	1.28	-	-	-	0%	Masih dalam tahap persiapan kegiatan (telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKIP) Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2026. Adapun IKP ini terdiri 4 komponen penilaian yakni Nilai AKIP, PNBP, NKA dan Nilai Kualitas ASN. Adapun realisasi pada Januari 2026 baru terealisasi 1 dari 4 komponen karena 3 komponen lainnya (NKA, Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN) baru terdapat realisasi di Maret 2026 (untuk NKA) dan Triwulan IV 2026 (untuk Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN). Untuk realisasi PNBP per-Januari 2026 sebesar Rp220.492.467.734,00 dari target PNBP sebagaimana tercantum pada DIPA DJKA Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 (16,48%).	a.Penyesuaian strategi/kebijakan: 1)Melakukan persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 seperti penyusunan konsep SK Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilengkapi dengan rencana aksi; 2)Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja; 3)Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026; 4)Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja. b.Penyesuaian aktivitas dan anggaran: 1)Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran; 2)Melakukan assessment terhadap rincian output seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan; 3)Melakukan pemutakhiran/update data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis; 4)Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian)	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 dan LKIP 2025 Ditjen Perkeretaapian	Pelaksanaan evaluasi berdasarkan LKIp 2025	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	masih dalam tahap persiapan kegiatan	a. Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran; b. Melakukan assessment terhadap rincian output seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan; c. Melakukan pemutakhiran/update data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	-	1200	100	8,33	-	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap persiapan kegiatan	a. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026; b.Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	masih dalam tahap persiapan kegiatan	a. Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri; b. Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. c.Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai: 1)Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Februari, Tahun: 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru,reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	63.002.232.760	2.56	0.453	-	98.48%	0%	asarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target rasio konektivitas antarwilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460. Nilai tersebut masih sama dengan baseline periode sebelumnya, dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan dan/atau perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2026. Rincian target Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), simpul transportasi, dan Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api pada Tahun 2026 sebanyak 68 lokasi, yang terdiri dari 51 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan, dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Jumlah tersebut masih di bawah target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yaitu sebanyak 150 lokasi yang terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan, dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga Januari 2026 realisasi jumlah lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan kereta api masih sama dengan baseline periode sebelumnya yakni 0,453 atau capaian sebesar 98,48% dari target Tahun 2026 sebesar 0,460.	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antarwilayah pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1) Pelaksanaan kajian inventarisasi dan pemeriksaan secara rinci terhadap jumlah kerusakan dan/atau kehilangan prasarana akibat bencana, termasuk penyusunan dokumen teknis perencanaan sebagai dasar penanganan permanen; 2) Pelaksanaan penanganan terhadap kerusakan prasarana akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera; 3) Tindak lanjut terhadap persiapan pengoperasian lintas Semarang Tawang–Pelabuhan Tanjung Emas, termasuk pengajuan skema sewa aset serta tindak lanjut hasil pengujian kelaikan prasarana; 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, antara lain penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa pada kegiatan MRT Jakarta East–West Phase 1. b. Penyesuaian aktivitas/anggaran Penyusunan data dukung dan reviu anggaran dalam rangka penyusunan Detail Engineering Design (DED) rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian pascabencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan Optimalisasi penugasan pegawai sesuai Surat Keputusan Direktur Prasarana Nomor SK-K3D/JK.A 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025.	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana (%))	-	288	24.14	8.38	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	km	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Panjang jalur KA yang beroperasi (Km))	6915	82980	6915.12	8.33	-	-	6915.12	-	100%	-	Realisasi sama dengan capaian baseline 2025	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (%))	23	362	23	6.35	-	-	23	-	100%	-	Belum terdapat pemenuhan dokumen perencanaan pada bulan Januari 2026	Melakukan pembahasan dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait pengusulan dokumen perencanaan	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian (%))	20	260	20	7.69	-	-	20	-	100%	-	Belum terdapat pemenuhan dokumen kerja sama pada bulan Januari 2026	Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Stakeholder terkait penyusunan pengusulan dokumen kerja sama	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA (%))	99	1140	95.73	8.4	-	-	99.95	-	104.41%	-	Capaian realisasi kinerja diperoleh dari jumlah realisasi perjalanan kereta api pada bulan februari yang dibandingkan dengan program pada bulan februari. Pada bulan Februari realisasi perjalanan kereta api mencapai 82.442 perjalanan (77.285 perjalanan kereta penumpang dan 5.157 kereta barang) dari program perjalanan kereta api 82.484 perjalanan.	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan serta melakukan koordinasi dengan operator terkait dengan pemenuhan angkutan perjalanan kereta api agar sesuai dengan program yang telah ditetapkan	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian (%))	77	924	77.78	8.42	-	-	77.88	-	100.13%	-	Pada tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : DED : 1 dokumen Spesifikasi Teknis : 82 dokumen Rancang Bangun : 18 dokumen Rekayasa : 11 dokumen	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	1200	100	8.33	421.167.786.880	3.24	100	-	100%	0%	Pada bulan Februari 2026 tidak terjadi kecelakaan KA	Upaya peningkatan kinerja terhadap rasio kejadian kecelakaan kereta api pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan, dan rampcheck guna memastikan keandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026; b. Pelaksanaan verifikasi tindak lanjut hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Penyelenggara Perkeretaapian di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Jabodetabek; c. Pelaksanaan kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan dalam rangka Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Prasarana; d. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana perkeretaapian; e. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta penugasan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif, termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan dan amblesan, serta penggantian jembatan yang kritis dan telah terdampak; f. Koordinasi persiapan penyelenggaraan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) Tahun 2026 yang berpotensi terdampak kebijakan penghematan anggaran; g. Percepatan penanganan prasarana yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%))	55	690	51.426	7.45	-	-	55.39	-	107.71%	-	Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan hasil pengujian	Koordinasi dengan Balai Pengujian dan stakeholder terkait	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian (%))	79	950	79.545	8.37	-	-	79.55	-	100.01%	-	Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 penambahan sebanyak 1 dokumen NSPK.	Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSPK	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%))	-	341	0.38	0.11	-	-	-	-	-	-	Jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 12.633 sertifikat (saat ini masih dalam tahap persiapan)	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti (%))	-	940	0	0	-	-	-	-	-	-	Persiapan pelaksanaan Rampcheck Sarana Perkeretaapian	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian (%))	37	466	37.03	7.95	-	-	37.03	-	100%	-	Capaian merupakan baseline 2025 Pada tahun 2026 ditargetkan penyusunan NSPK : a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT) d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkerjetaapian e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad) f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertilikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%))	23	353	22.97	6.51	-	-	23.55	-	102.53%	-	Sampai dengan Februari terdapat 207 sertifikasi SDM Operator. akumulasi jumlah sertifikasi dari tahun sebelumnya ditambahkan dengan capaian pada tahun ini adalah sebesar (8271 + 207) = 8478 sertifikat. Jumlah total sertifikasi dibagi dengan target renstra (8.478/36.000) = 23,55	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%))	15	295	15	5.08	-	-	15	-	100%	-	Sampai dengan bulan Februari masih belum terdapat rekomendasi teknis keamanan perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti, dengan demikian capaiannya masih sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 15% atau 3 rekomendasi	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti (%))	16	292	20	6.85	-	-	16.84	-	84.2%	-	Pada bulan januari telah di sampaiakan rekomendasi keselamatan pada Lokasi Perlintasan Sebidang JPL 405 KM 225+492 Sukomanunggal Kota Surabaya	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan memonitor terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti (%))	16	278	16.66	5.99	-	-	16.66	-	100%	-	Direktorat keselamatan Perkeretaapian sedang melaksanakan rangkaian kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka angkutan lebaran	akan melanjutkan pelaksanaan rangkaian kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka angkutan lebaran 2026	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%))	90	1096	90.74	8.28	-	-	90.74	-	100%	-	pada bulan Februari 2026 masih belum terdapat tambahan NSPK bidang keselamatan perkeretaapian sehingga capaiannya masih sama dengan capaian sebelumnya yaitu sebesar 90,74 atau 49 NSPK	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%))	20	325	20.65	6.35	-	-	20.79	-	100.68%	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian sampai dengan Februari dengan rincian sebagai berikut : Uji Pertama Lokomotif : 2 Unit Gerbong : 60 Unit Uji Berkala Lokomotif : 5 Unit Gerbong : 60 Unit	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%))	21	328	20.71	6.31	-	-	21.17	-	102.22%	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%))	20	334	20.8	6.23	-	-	20	-	96.15%	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	96	1128	94.75	8.4	96.584.326.836	2.56	96.136	-	101.46%	0%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup layanan administrasi pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, antara lain perizinan, sertifikasi, dan pengujian, serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan, dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM Ditjen Perkeretaapian periode Februari sebesar 96,136	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1) Pengelolaan sistem layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, dan layanan lainnya) secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya gangguan layanan, serta pengembangan lanjutan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi; 2) Fasilitasi dan tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan angkutan penumpang, khususnya layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan, antara lain melalui pemanfaatan barcode pada area boarding dan media sosial; 3) Partisipasi aktif dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman; 4) Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perkeretaapian; 5) Pelaksanaan pembinaan secara berkala kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun petugas yang bertugas di dalam kereta. b. Penyesuaian aktivitas/anggaran Penyusunan dan penyiapan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan layanan angkutan perintis perkeretaapian. c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai Pelaksanaan layanan sertifikasi dan/atau pengujian yang didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai jabatan fungsional tertentu perkeretaapian sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya, antara lain penguji dan asisten penguji.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit Keselamatan, BPKA dan BPKARS
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai))	95	1128	94.5	8.38	-	-	95.81	-	101.39%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 95,81. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan DLLAKA	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai))	100	1140	95.25	8.36	-	-	100	-	104.99%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Sarana	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai))	91	1164	97.5	8.38	-	-	91.94	-	94.3%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 91,94. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Prasarana	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Nilai))	94	1152	96.75	8.4	-	-	94.59	-	97.77%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 94,59. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan telah memperoleh kategori Baik.	akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terkait permohonan sertifikasi SDM	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai))	97	1152	96.75	8.4	-	-	97.31	-	100.58%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 97,31. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai))	98	1068	89.75	8.4	-	-	98.52	-	109.77%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, BPKARSS secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,52. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKARSS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKARSS	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai))	96	972	81.25	8.36	-	-	96.29	-	118.51%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, BPKASS secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 96,29. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKASS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKASS	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk	97	1164	97.77	8.4	-	-	97.809	-	100.04%	-	Target On Time Performance (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 97,77%, baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api. Pada Februari 2026, capaian bulanan OTP Sebesar 97,809%	Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a.Penyesuaian strategi/kebijakan: 1)Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjafa agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA; 2)Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan; 3)Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jabodetabek, lainnya) termasuk penyelesaian/finalisasi pada beberapa pekerjaan pembangunan/peningkatan jalur kereta api yang hamper selesai (Solo-Semarang, Jember-Kalisat, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. b.Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja On Time Performance. c.Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai: Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api	Dit. LLAKA, Dit Prasarana, BTP
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Persentase pemenuhan NSPK LLAKA (%))	38	451	36	7.98	-	-	38.1	-	105.83%	-	Capaian NSPK pada bulan Februari 2026 menggunakan data sementara yaitu data bulan Desember 2025 sebesar 38,10%	Melakukan pembahasan dan koordinasi terkait penyusunan dokumen NSPK LLAKA	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%))	24	398	33.9	8.52	-	-	24.14	-	71.21%	-	Capaian mengacu realisasi 2025 sebesar 24,14% dengan capaian sebesar 100% dengan realisasi pengesahan sebanyak 2 dokumen yaitu : 1. DED Balai Yasa KRL Cicalengka a. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Balai Yasa (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; b. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Depo (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Koordinator/ Ketua Tim Kelompok Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; c. Album MEP Gedung Balai Yasa dan Depo saat ini akan dijadwalkan kembali proses asistensi. 2. Telah dilakukan pengesahan Gambar Teknis Perencanaan Prasarana MRT Jakarta Jalur Utara Selatan Fase 2A (Bundaran HI - Kota)	akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan pendapat hukum terhadap draft kontrak RDC pada bulan januari 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Biro Hukum	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%))	94	1128	94.64	8.39	-	-	94.64	-	100%	-	Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode III tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode III pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil : 1. Realisasi hasil TQI periode III Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan panjang jalur 5.686,18 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.900,059 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.786,116 KM 2. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,36% dengan panjang jalur 321,83 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 277,190 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 44,640 KM 3. Dari hasil pengukuran periode II dan periode III terdapat Kenaikan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71% dan pada periode III meningkat menjadi sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64%. Kategori III dan IV periode II sepanjang 374,77 KM atau 6,29% dan pada periode III menurun menjadi sepanjang 321,83 KM atau 5,36%. Pada periode triwulan IV telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel pada : 1. lintas utara Jawa pada 10 s.d 14 November, lintas selatan Jawa pada 17 s.d 22 November, serta lintas Daop 1 pada 25 s.d 28 November. 2. Wilayah Divre I Sumatera Utara (Medan) dilaksanakan pada 18 s.d 25 Desember 2025, Divre II Sumatera Barat (Padang) dilaksanakan pada 1 s.d 4 Desember 2025, serta Divre III Palembang dan IV Tanjung Karang dilaksanakan pada 4 s.d 14 Desember 2025.	1. Akan dilaksanakan evaluasi Pengukuran TQI Periode IV pada bulan januari 2026 2. Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel (TQI) dengan KA ukur tahun 2026 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Dit. Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%))	65	780	65.21	8.36	-	-	65.21	-	100%	-	Realisasi mengacu baseline 2025 sebesar 65,21% dengan ditetapkannya izin teknis pembangunan dan pengoperasian fasilitas operasi kereta api dengan sistem persinyalan elektrik di 5 stasiun yang ditargetkan di 2025 yaitu : 1. Stasiun Serdang 2. Stasiun Payakabung 3. Stasiun Gelumbang 4. Stasiun Karangendah 5. Stasiun Lembak	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	40,000	Pelaksanaan subsidi perintis dan monitoring PSO	21	340	21.187	6.23	-	-	21.596	-	101.93%	-	Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 termasuk mempertimbangkan target pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2025 sebesar 40,00% . Adapun realisasi jumlah angkutan penumpang dan barang terangkut dengan kereta api hingga Januari 2026 masih menggunakan asumsi kenaikan sebesar 2% dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 19,596% dikarenakan Direktorat Teknis terkait (Direktorat LLAKA) belum melakukan perhitungan capaian kinerja.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain sebagai berikut: a. Percepatan perbaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana alam sebagai bagian dari kegiatan persiapan; b. Penyelenggaraan layanan subsidi Kereta Api (KA) perintis sesuai kebutuhan dan layanan Public Service Obligation (PSO) perkeretaapian, serta pengelolaan PSO Tahun 2026 yang mencakup layanan KA Perkotaan dan KA antarkota, termasuk pelaksanaan proses verifikasi; c. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara real time serta pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara berkala guna memastikan pelayanan sesuai dengan ketentuan; d. Percepatan kajian pendukung angkutan barang, antara lain melalui penyusunan tarif angkutan logistik kereta api serta penyusunan studi komprehensif mengenai perbandingan tarif angkutan kereta api dengan angkutan barang truk; e. Penyelesaian peningkatan Stasiun Rangkasbitung. Selain itu, diusulkan pula beberapa penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran sebagai berikut: Penyesuaian strategi/kebijakan Penyusunan reviu Rencana Induk Perkeretaapian, termasuk reviu Masterplan Kereta Api di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan serta penetapan target jumlah angkutan penumpang dan barang pada masing-masing layanan dan lokasi. Penyesuaian aktivitas/anggaran Antisipasi pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA, termasuk subsidi perintis, yang terdampak kebijakan Automatic Adjustment (AA) atau blokir dengan melakukan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	Dit LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	-	450	20.83	4.63	107.773.392.368	2.56	-	-	-	0%	Masih dalam tahap persiapan kegiatan (telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKIP) Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2026. Adapun IKP ini terdiri 4 komponen penilaian yakni Nilai AKIP, PNBP, NKA dan Nilai Kualitas ASN. Adapun realisasi pada Januari 2026 baru terealisasi 1 dari 4 komponen karena 3 komponen lainnya (NKA, Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN) baru terdapat realisasi di Maret 2026 (untuk NKA) dan Triwulan IV 2026 (untuk Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN). Untuk realisasi PNBP per-Januari 2026 sebesar Rp220.492.467.734,00 dari target PNBP sebagaimana tercantum pada DIPA DJKA Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 (16,48%).	a.Penyesuaian strategi/kebijakan: 1)Melakukan persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 seperti penyusunan konsep SK Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilengkapi dengan rencana aksi; 2)Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja; 3)Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026; 4)Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja. b.Penyesuaian aktivitas dan anggaran: 1)Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran; 2)Melakukan assessment terhadap rincian output seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan; 3)Melakukan pemutakhiran/update data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis; 4)Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian)	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 dan LKIP 2025 Ditjen Perkeretaapian	Pelaksanaan evaluasi berdasarkan LKIP 2025	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	masih dalam tahap persiapan kegiatan	a. Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran; b. Melakukan assessment terhadap rincian output seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan; c. Melakukan pemutakhiran/update data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	-	1200	100	8,33	-	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap persiapan kegiatan	a. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026; b.Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	masih dalam tahap persiapan kegiatan	a. Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri; b. Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. c.Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai: 1)Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Maret, Tahun: 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru,reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	94.484.452.250	3.85	0.453	3.522.231.687	98.48%	3.73%	berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target rasio konektivitas antarwilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460. Nilai tersebut masih sama dengan baseline periode sebelumnya, dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan dan/atau perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2026. Rincian target Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), simpul transportasi, dan Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api pada Tahun 2026 sebanyak 68 lokasi, yang terdiri dari 51 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan, dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Jumlah tersebut masih di bawah target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yaitu sebanyak 150 lokasi yang terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan, dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga Januari 2026 realisasi jumlah lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan kereta api masih sama dengan baseline periode sebelumnya yakni 0,453 atau capaian sebesar 98,48% dari target Tahun 2026 sebesar 0,460.	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antarwilayah pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1) Pelaksanaan kajian inventarisasi dan pemeriksaan secara rinci terhadap jumlah kerusakan dan/atau kehilangan prasarana akibat bencana, termasuk penyusunan dokumen teknis perencanaan sebagai dasar penanganan permanen; 2) Pelaksanaan penanganan terhadap kerusakan prasarana akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera; 3) Tindak lanjut terhadap persiapan pengoperasian lintas Semarang Tawang–Pelabuhan Tanjung Emas, termasuk pengajuan skema sewa aset serta tindak lanjut hasil pengujian kelaikan prasarana; 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, antara lain penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa pada kegiatan MRT Jakarta East–West Phase 1. b. Penyesuaian aktivitas/anggaran Penyusunan data dukung dan reviu anggaran dalam rangka penyusunan Detail Engineering Design (DED) rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian pascabencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan Optimalisasi penugasan pegawai sesuai Surat Keputusan Direktur Prasarana Nomor SK-K3D/JK.A 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025.	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana (%))	-	288	24.14	8.38	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	km	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Panjang jalur KA yang beroperasi (Km))	6915	82980	6915.12	8.33	-	-	6915.12	-	100%	-	Realisasi sama dengan capaian baseline 2025	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (%))	23	362	26.9	7.43	-	-	23	-	85.5%	-	Belum terdapat pemenuhan dokumen perencanaan pada bulan Maret 2026	Melakukan pembahasan dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait pengusulan dokumen perencanaan	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian (%))	20	260	20	7.69	-	-	20	-	100%	-	Belum terdapat pemenuhan dokumen kerja sama sampai dengan Maret 2026	Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Stakeholder terkait penyusunan pengusulan dokumen kerja sama	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA (%))	99	1140	95.73	8.4	-	-	99.95	-	104.41%	-	Capaian realisasi kinerja diperoleh dari jumlah realisasi perjalanan kereta api pada bulan februari yang dibandingkan dengan program pada bulan februari. Pada bulan Februari realisasi perjalanan kereta api mencapai 82.442 perjalanan (77.285 perjalanan kereta penumpang dan 5.157 kereta barang) dari program perjalanan kereta api 82.484 perjalanan.	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan serta melakukan koordinasi dengan operator terkait dengan pemenuhan angkutan perjalanan kereta api agar sesuai dengan program yang telah ditetapkan	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian (%))	77	924	77.78	8.42	-	-	77.88	-	100.13%	-	Pada tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : DED : 1 dokumen Spesifikasi Teknis : 82 dokumen Rancang Bangun : 18 dokumen Rekayasa : 11 dokumen	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	1200	100	8.33	631.625.355.250	4.85	100	8.830.893.429	100%	1.4%	Pada bulan Maret 2026 tidak terjadi kecelakaan KA	Upaya peningkatan kinerja terhadap rasio kejadian kecelakaan kereta api pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan, dan rampcheck guna memastikan keandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026; b. Pelaksanaan verifikasi tindak lanjut hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Penyelenggara Perkeretaapian di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Jabodetabek; c. Pelaksanaan kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan dalam rangka Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Prasarana; d. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana perkeretaapian; e. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta penugasan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif, termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan dan amblesan, serta penggantian jembatan yang kritis dan telah terdampak; f. Koordinasi persiapan penyelenggaraan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) Tahun 2026 yang berpotensi terdampak kebijakan penghematan anggaran; g. Percepatan penanganan prasarana yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%))	55	690	55.392	8.03	-	-	55.39	-	100%	-	Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan hasil pengujian	Koordinasi dengan Balai Pengujian dan stakeholder terkait	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian (%))	79	950	79.545	8.37	-	-	79.55	-	100.01%	-	Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 penambahan sebanyak 1 dokumen NSPK.	Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSPK	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%))	-	341	0.385	0.11	-	-	-	-	-	-	Jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 12.633 sertifikat (saat ini masih dalam tahap persiapan)	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti (%))	-	940	94.6	10.06	-	-	-	-	-	-	Persiapan pelaksanaan Rampcheck Sarana Perkeretaapian	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian (%))	37	466	37.03	7.95	-	-	37.03	-	100%	-	Capaian merupakan baseline 2025 Pada tahun 2026 ditargetkan penyusunan NSPK : a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT) d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkerjetaapian e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad) f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertilikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%))	23	353	24	6.8	-	-	23.55	-	98.13%	-	Sampai dengan Maret terdapat 207 sertifikasi SDM Operator. akumulasi jumlah sertifikasi dari tahun sebelumnya ditambahkan dengan capaian pada tahun ini adalah sebesar (8271 + 207) = 8478 sertifikat. Jumlah total sertifikasi dibagi dengan target renstra (8.478/36.000) = 23,55	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%))	15	295	20	6.78	-	-	15	-	75%	-	Sampai dengan bulan Maret masih belum terdapat rekomendasi teknis keamanan perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti, dengan demikian capaiannya masih sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 15% atau 3 rekomendasi	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti (%))	16	292	21.05	7.21	-	-	16.84	-	80%	-	Pada bulan januari telah di sampaiakan rekomendasi keselamatan pada Lokasi Perlintasan Sebidang JPL 405 KM 225+492 Sukomanunggal Kota Surabaya	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan memonitor terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti (%))	16	278	22.22	7.99	-	-	16.66	-	74.98%	-	Direktorat keselamatan Perkeretaapian sedang melaksanakan rangkaian kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka angkutan lebaran	akan melanjutkan pelaksanaan rangkaian kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka angkutan lebaran 2026	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%))	90	1096	90.74	8.28	-	-	90.74	-	100%	-	pada bulan Maret 2026 masih belum terdapat tambahan NSPK bidang keselamatan perkeretaapian sehingga capaiannya masih sama dengan capaian sebelumnya yaitu sebesar 90,74 atau 49 NSPK	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%))	20	325	21.22	6.53	-	-	20.79	-	97.97%	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian sampai dengan Februari dengan rincian sebagai berikut : Uji Pertama Lokomotif : 2 Unit Gerbong : 60 Unit Uji Berkala Lokomotif : 5 Unit Gerbong : 60 Unit	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%))	21	328	21.17	6.45	-	-	21.17	-	100%	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%))	20	334	21.4	6.41	-	-	20	-	93.46%	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	96	1128	94.75	8.4	144.847.520.750	3.85	96.332	29.776.251.414	101.67%	20.56%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup layanan administrasi pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, antara lain perizinan, sertifikasi, dan pengujian, serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan, dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM Ditjen Perkeretaapian periode Maret sebesar 96,332	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1) Pengelolaan sistem layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, dan layanan lainnya) secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya gangguan layanan, serta pengembangan lanjutan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi; 2) Fasilitasi dan tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan angkutan penumpang, khususnya layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan, antara lain melalui pemanfaatan barcode pada area boarding dan media sosial; 3) Partisipasi aktif dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman; 4) Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perkeretaapian; 5) Pelaksanaan pembinaan secara berkala kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun petugas yang bertugas di dalam kereta. b. Penyesuaian aktivitas/anggaran Penyusunan dan penyiapan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan layanan angkutan perintis perkeretaapian. c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai Pelaksanaan layanan sertifikasi dan/atau pengujian yang didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai jabatan fungsional tertentu perkeretaapian sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya, antara lain penguji dan asisten penguji.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit Keselamatan, BPKA dan BPKARS
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai))	90	1128	94.5	8.38	-	-	90.63	-	95.9%	-	Pada pelaksanaan survei periode Maret 2026, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 90,63. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan DLLAKA	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai))	98	1140	95.25	8.36	-	-	98.13	-	103.02%	-	Pada pelaksanaan survei periode Maret 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,130. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Sarana	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai))	100	1164	97.5	8.38	-	-	100	-	102.56%	-	Pada pelaksanaan survei periode Maret 2026, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Prasarana	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Nilai))	100	1152	96.75	8.4	-	-	100	-	103.36%	-	Pada pelaksanaan survei periode Maret 2026, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan telah memperoleh kategori Baik.	akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terkait permohonan sertifikasi SDM	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai))	97	1152	96.75	8.4	-	-	97.18	-	100.44%	-	Pada pelaksanaan survei periode Maret 2026, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 97180. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai))	98	1068	89.75	8.4	-	-	98.21	-	109.43%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, BPKARSS secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,21. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKARSS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKARSS	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	%	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai))	96	972	81.25	8.36	-	-	96.67	-	118.98%	-	Pada pelaksanaan survei periode Februari 2026, BPKASS secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 96,67. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKASS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKASS	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk	97	1164	97.77	8.4	-	-	97.809	-	100.04%	-	Target On Time Performance (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar 97,77%, baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api. Pada Maret 2026, capaian bulanan OTP Sebesar 97,809%	Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a.Penyesuaian strategi/kebijakan: 1)Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjafa agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA; 2)Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan; 3)Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jabodetabek, lainnya) termasuk penyelesaian/finalisasi pada beberapa pekerjaan pembangunan/peningkatan jalur kereta api yang hamper selesai (Solo-Semarang, Jember-Kalisat, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. b.Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja On Time Performance. c.Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai: Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api	Dit. LLAKA, Dit Prasarana, BTP
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Persentase pemenuhan NSPK LLAKA (%))	38	451	36	7.98	-	-	38.1	-	105.83%	-	Capaian NSPK pada bulan Maret 2026 menggunakan data sementara yaitu data bulan Desember 2025 sebesar 38,10%	Melakukan pembahasan dan koordinasi terkait penyusunan dokumen NSPK LLAKA	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%))	24	398	33.9	8.52	-	-	24.14	-	71.21%	-	Capaian mengacu realisasi 2025 sebesar 24,14% dengan capaian sebesar 100% dengan realisasi pengesahan sebanyak 2 dokumen yaitu : 1. DED Balai Yasa KRL Cicalengka a. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Balai Yasa (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; b. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Depo (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Koordinator/ Ketua Tim Kelompok Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; c. Album MEP Gedung Balai Yasa dan Depo saat ini akan dijadwalkan kembali proses asistensi. 2. Telah dilakukan pengesahan Gambar Teknis Perencanaan Prasarana MRT Jakarta Jalur Utara Selatan Fase 2A (Bundaran HI - Kota)	akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan pendapat hukum terhadap draft kontrak RDC pada bulan januari 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Biro Hukum	Dit. LLAKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%))	94	1128	94.64	8.39	-	-	94.64	-	100%	-	Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode III tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode III pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil : 1. Realisasi hasil TQI periode III Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan panjang jalur 5.686,18 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.900,059 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.786,116 KM 2. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,36% dengan panjang jalur 321,83 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 277,190 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 44,640 KM 3. Dari hasil pengukuran periode II dan periode III terdapat Kenaikan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71% dan pada periode III meningkat menjadi sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64%. Kategori III dan IV periode II sepanjang 374,77 KM atau 6,29% dan pada periode III menurun menjadi sepanjang 321,83 KM atau 5,36%. Pada periode triwulan IV telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel pada : 1. lintas utara Jawa pada 10 s.d 14 November, lintas selatan Jawa pada 17 s.d 22 November, serta lintas Daop 1 pada 25 s.d 28 November. 2. Wilayah Divre I Sumatera Utara (Medan) dilaksanakan pada 18 s.d 25 Desember 2025, Divre II Sumatera Barat (Padang) dilaksanakan pada 1 s.d 4 Desember 2025, serta Divre III Palembang dan IV Tanjung Karang dilaksanakan pada 4 s.d 14 Desember 2025.	Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel (TQI) dengan KA ukur tahun 2026	Dit. Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk (Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%))	65	780	65.21	8.36	-	-	65.21	-	100%	-	Realisasi mengacu baseline 2025 sebesar 65,21% dengan ditetapkannya izin teknis pembangunan dan pengoperasian fasilitas operasi kereta api dengan sistem persinyalan elektrik di 5 stasiun yang ditargetkan di 2025 yaitu : 1. Stasiun Serdang 2. Stasiun Payakabung 3. Stasiun Gelumbang 4. Stasiun Karangendah 5. Stasiun Lembak	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Dit. Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	40,000	Pelaksanaan subsidi perintis dan monitoring PSO	22	340	22.827	6.71	-	-	22.596	-	98.99%	-	Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 termasuk mempertimbangkan target pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2025 sebesar 40,00% . Adapun realisasi jumlah angkutan penumpang dan barang terangkut dengan kereta api hingga Januari 2026 masih menggunakan asumsi kenaikan sebesar 3% dari realisasi Desember 2025 yang sebesar 19,596% dikarenakan Direktorat Teknis terkait (Direktorat LLAKA) belum melakukan perhitungan capaian kinerja	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain sebagai berikut: a. Percepatan perbaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana alam sebagai bagian dari kegiatan persiapan; b. Penyelenggaraan layanan subsidi Kereta Api (KA) perintis sesuai kebutuhan dan layanan Public Service Obligation (PSO) perkeretaapian, serta pengelolaan PSO Tahun 2026 yang mencakup layanan KA Perkotaan dan KA antarkota, termasuk pelaksanaan proses verifikasi; c. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara real time serta pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara berkala guna memastikan pelayanan sesuai dengan ketentuan; d. Percepatan kajian pendukung angkutan barang, antara lain melalui penyusunan tarif angkutan logistik kereta api serta penyusunan studi komprehensif mengenai perbandingan tarif angkutan kereta api dengan angkutan barang truk; e. Penyelesaian peningkatan Stasiun Rangkasbitung. Selain itu, diusulkan pula beberapa penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran sebagai berikut: Penyesuaian strategi/kebijakan Penyusunan reviu Rencana Induk Perkeretaapian, termasuk reviu Masterplan Kereta Api di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan serta penetapan target jumlah angkutan penumpang dan barang pada masing-masing layanan dan lokasi. Penyesuaian aktivitas/anggaran Antisipasi pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA, termasuk subsidi perintis, yang terdampak kebijakan Automatic Adjustment (AA) atau blokir dengan melakukan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	Dit LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	-	450	21.02	4.67	161.627.763.000	3.85	-	152.380.880.373	-	94.28%	Masih dalam tahap persiapan kegiatan (telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKIP) Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2026. Adapun IKP ini terdiri 4 komponen penilaian yakni Nilai AKIP, PNBP, NKA dan Nilai Kualitas ASN. Adapun realisasi pada Januari 2026 baru terealisasi 1 dari 4 komponen karena 3 komponen lainnya (NKA, Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN) baru terdapat realisasi di Maret 2026 (untuk NKA) dan Triwulan IV 2026 (untuk Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN). Untuk realisasi PNBP per-Januari 2026 sebesar Rp241.775.985.162 dari target PNBP sebagaimana tercantum pada DIPA DJKA Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 (18%).	a.Penyesuaian strategi/kebijakan: 1)Melakukan persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 seperti penyusunan konsep SK Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilengkapi dengan rencana aksi; 2)Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja; 3)Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026; 4)Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja. b.Penyesuaian aktivitas dan anggaran: 1)Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran; 2)Melakukan assessment terhadap rincian output seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan; 3)Melakukan pemutakhiran/update data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis; 4)Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian)	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 dan LKIP 2025 Ditjen Perkeretaapian	Pelaksanaan evaluasi berdasarkan LKIP 2025	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	a. Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran; b. Melakukan assessment terhadap rincian output seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan; c. Melakukan pemutakhiran/update data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	-	1200	100	8,33	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapanv	a. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026; b.Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	a. Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri; b. Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. c.Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai: 1)Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru;	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

LAMPIRAN V

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA
MASING-MASING INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2026

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
1	**BTP Kelas I Medan**	1	3	4	4	2	2	1	1	0	0	8	10	0,44
	Provinsi Aceh		Banda Aceh		Lhokseumawe		Lhokseumawe (NAD)							
					Langsa									
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro		Rantau Prapat	KSN Danau Toba	Belawan (Sumatera Utara)		Kualanamu						
				Pematang Siantar		Kuala Tanjung (Sumatera Utara)								
				Tebingtinggi										
				Kisaran										
	Provinsi Riau		Dumai		Rengat		Dumai (Riau)		Hang Nadim (Batam)					
			Pekanbaru											
2	**BTP Kelas II Padang**	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	4	4	0,50
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung -Pariaman		Pariaman	Solok	Teluk Bayur (Sumatera Barat)		Minangkabau						
					Bukit Tinggi									
					Payakumbuh									
					Sawahlunto									
	Provinsi Bengkulu													
3	**BTP Kelas II Palembang**	2	1	6	0	1	3	1	0	0	0	10	4	0,71
	Provinsi Jambi		Jambi											
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung		Lubuklinggau			Tanjung Api-api (Sumatera Selatan)	SM Badarudin						
				Muara enim										
				Baturaja										
				Prabumulih										
				Lahat										
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung		Kotabumi		Tarahan (Lampung)	Panjang (Lampung)							
							Bakauheni (Lampung)							
4	**BTP Kelas I Jakarta**	3	0	2	1	2	3	1	1	1	0	9	5	0,64
	Provinsi Banten	Serang		Rangkasbitung	Pandeglang	Merak (Banten)	Tanjung Lesung (Banten)	Soekarno-Hatta (Banten)	Panimban (Banten)	Kampung Rambutan (Jakarta)				
		Cilegon					Bojanegora (Banten)							
	Provinsi DKI Jakarta	Jabodetabek				Tanjung Priok (DKI Jakarta)	Kali Baru (DKI Jakarta)							
	Provinsi Jawa Barat			Cikampek										
5	**BTP Kelas I Bandung**	2	0	4	2	0	2	0	1	0	0	6	5	0,55
	Provinsi Jawa Barat	Cirebon		Sukabumi	Kadipaten		Cirebon (Jawa Barat)		Kertajati (Jawa Barat)					
		Bandung Raya		Indramayu	Pangandaran		Patimban (Jawa Barat)							
				Tasikmalaya										
				Cikampek-Cikopo										
6	**BTP Kelas I Semarang**	4	4	7	11	2	3	2	3	0	0	15	21	0,42
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur		Tegal	Wonosobo	Cilacap (Jawa Tengah)		Adisumarmo (Solo)	Ahmad Yani (Semarang)					
		Cilacap		Pekalongan	Kudus	Tanjung Mas (Jawa Tengah)								
		Surakarta		Cepu	Magelang									
				Purwokerto	KSN Borobudur									
				kebumen										
				klaten										
	Provinsi DIY	Yogyakarta		Sleman				Kulonprogo (Yogyakarta)						
	Kalimantan		Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang		Tanjung Radeb		Banjarmasin (Kalimantan Selatan)		Syamsudin Noor (Kalsel)					
			Perkotaan Banjarmasin,Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut		Sangata		Samarinda (Kalimantan Timur)		Supadio (Kalbar)					
			Palangkaraya		Martapura		Balikpapan (Kalimantan Timur)							
			Pontianak		Mempawah									
					Singkawang									
					Sanggau									
					Muara Teweh									
7	**BTP Kelas I Surabaya**	2	5	9	8	1	4	0	3	0	0	12	20	0,38
	Provinsi Jawa Timur	Malang		Bojonegoro	Tuban	Tanjung Perak (Jawa Timur)			Juanda (Surabaya)					
		Gerbangkertosusila		Madiun	Pamekasan		Tuban (Jawa Timur)							
				Jember	Sumenep		Teluk Lamong (Jawa Timur)							
				Banyuwangi										
				Probolinggo										
				Blitar										
				Pasuruan										
				Tulungagung										
				Kediri										
	Provinsi Bali		Sarbagita		Singaraja				Ngurah Rai (Denpasar)					
					Negara									
	Papua Barat		Sorong		Manokwari		Sorong (Papua Barat)							
	Provinsi Papua		Jayapura		Sarmi		Jayapura (Papua)		Sentani (Papua)					
			Timika		Tanah Merah									
			Merauke											

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
8	**Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan**	1	5	2	5	1	2	0	1	0	0	4	13	0,24
	Sulawesi Selatan	Maminasata		Pangkajene	Parepare	Garongkong (Sulawesi Selatan)	Makassar (Sulawesi Selatan)		Hasanuddin (Makassar)					
				Barru	Watampone									
					Bulukumba									
	Sulawesi Utara		Perkotaan Manado-Bitung				Bitung (Sulawesi Utara)							
	Gorontalo		Gorontalo											
	Sulawesi Tengah		Palu		Poso									
	Sulawesi Barat		Mamuju											
	Sulawesi Tenggara		Kendari		Kolaka									
	DITJEN PERKERETAAPIAN	16	18	35	35	10	19	6	10			68	82	0,453
		Jumlah PKW/PKN/PKSN/SIMPUL Berdasarkan RIPNAS 2030										150		

Jakarta, Maret 2026
PLT. DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

CATUR WICAKSONO, ATD, MT
NIP 197004191995031001

REKAP DATA PANJANG JALUR
WILAYAH BALAI TEKNIK DAN BALAI PENGELOLA PERKERETAAPIAN SERTA BADAN USAHA PENYELENGGARA

NO	WILAYAH KERJA	LINTAS RAYA TERDATA			PANJANG LINTAS	LINTAS CABANG		PANJANG LINTAS	PANJANG TOTAL
		SINGLE	DOUBLE	DDT		SINGLE	DOUBLE		
1	BTP KELAS I JAKARTA	094+453	547+001	058+612	700+066	000+364	002+000	002+364	702+430
2	BTP KELAS I BANDUNG	287+087	758+392	000+000	1045+479	000+091	000+000	000+091	1045+570
3	BTP KELAS I SEMARANG	312+875	1273+058	000+000	1585+933	003+190	000+000	003+190	1589+123
4	BTP KELAS I SURABAYA	574+558	686+130	000+000	1260+688	007+209	000+000	007+209	1267+897
5	BTP KELAS I MEDAN	572+423	064+178	000+000	636+601	001+964	000+000	001+964	638+565
6	BTP KELAS II PADANG	107+221	003+866	000+000	111+087	000+000	000+000	000+000	111+087
7	BTP KELAS II PALEMBANG	350+510	589+594	000+000	940+104	007+602	000+000	007+602	947+706
8	BPKAR SUMSEL	001+051	044+698	000+000	045+749	003+000	000+000	003+000	048+749
9	BPKA SULSEL	090+132	000+000	000+000	090+132	000+000	000+000	000+000	090+132
10	MRT JAKARTA	000+000	031+400	000+000	031+400	000+687	000+000	000+687	032+087
11	LRT JAKARTA	000+000	011+600	000+000	011+600	000+814	000+000	000+814	012+414
12	LRT JABODEBEK	000+000	098+430	000+000	098+430	000+000	000+000	000+000	098+430
13	KCJB	000+000	304+930	000+000	304+930	000+000	000+000	000+000	304+930
14	FREEPORT	026+000	000+000	000+000	026+000	000+000	000+000	000+000	026+000
TOTAL		***2416+310***	***4413+277***	***058+612***	***6888+199***	***024+921***	***002+000***	***026+921***	***6915+120***

Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian

Catur Wicaksono, A.TD., M.T.
NIP 196507031991032001

I. Capaian Kinerja Tahun 2026

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi Program			Realisasi					
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,73%	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	100,82%	100,82%
	2	Februari	95,73%	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	99,83%	100,35%
	3	Maret	95,73%	90.740	264.757	85.946	6.303	92.249	266.881	101,66%	100,80%
TW 2	4	April	95,73%	88.872	353.629	-	-	-	-	-	-
	5	Mei	95,73%	90.366	443.995	-	-	-	-	-	-
	6	Juni	95,73%	88.738	532.733	-	-	-	-	-	-
TW 3	7	Juli	95,73%	92.122	624.855	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,73%	91.139	715.994	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,73%	89.271	805.265	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,73%	92.119	897.384	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,73%	88.912	986.296	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,73%	91.652	1.077.948	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	97,77%	92.190	92.190	5.445	84.565	90.010	90.010	5.014	83.550	88.564	88.564	89.287	89.287	96,85%	96,85%
	Februari	97,77%	82.442	174.632	4.846	76.542	81.390	171.400	4.221	75.683	79.904	168.468	80.647	169.934	97,82%	97,31%
	Maret	97,77%	92.249	266.881	5.990	85.196	91.186	262.586	5.421	84.099	89.520	257.988	90.353	260.287	97,94%	97,53%
TW 2	April	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Mei	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Juni	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 3	Juli	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	September	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	November	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2026

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	100,80%	Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya: a. KA Tambahan pada Masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dan Lebaran 2026; b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,53%	Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh: a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (85,70%), Sumatera Bagian Utara ((93,64%), Sumatera Bagian Selatan (89,29%); b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (97,41%), Sumatera Bagian Selatan (97,22%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (92,29%), dan Sulawesi Selatan (65,00%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. c. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.	a. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 27 Januari 2026 dengan Nomor: KA.407/1/1/DJKA/2026 dan tanggal 23 Februari 2026 dengan Nomor: KA.407/1/2/DJKA/2026; b. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur ka nasional Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 11 Januari 2026; c. Sedang dilakukan evaluasi rancangan Gapeka pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;	a. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud; b. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur ka nasional Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 11 Januari 2026.

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	100,80%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Jawa, Sumatera, Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,53%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

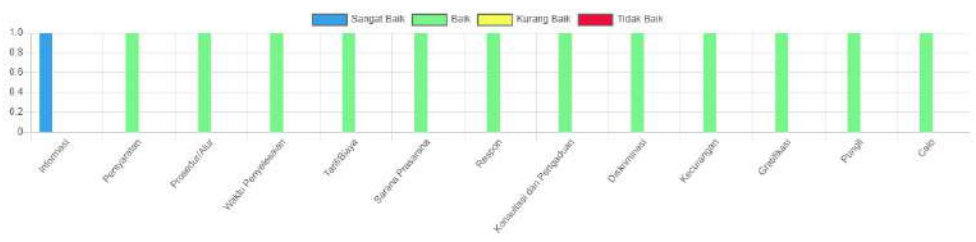
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
15.20/17.50
86.88/100 3.48/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
14.88/17.50
85/100 3.40/4

Responden
1

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

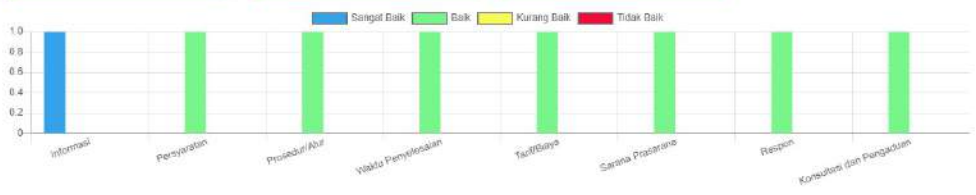
IKM/ IPK



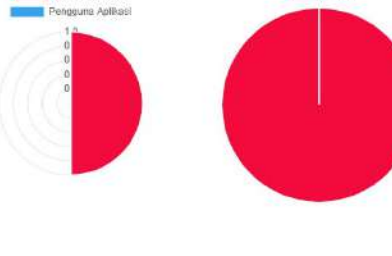
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.20/17.50
86.88/100
3.48/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	17.50	16.83	0.67	17.27	0.23	16.97	0.53	17.27	
Persyaratan	14.88	16.84	-1.96	16.83	-1.95	16.86	-1.98	16.83	
Prosedur/Alur	14.88	16.86	-1.98	16.87	-1.99	16.82	-1.94	16.87	
Waktu Penyelesaian	14.88	16.79	-1.91	16.83	-1.95	16.83	-1.95	16.83	
Tarif/Biaya	14.88	16.86	-1.98	16.84	-1.96	16.79	-1.91	16.84	
Sarana Prasarana	14.88	16.77	-1.89	16.81	-1.93	16.90	-2.02	16.81	
Respon	14.88	16.83	-1.95	16.84	-1.96	16.86	-1.98	16.84	
Konsultasi dan Pengaduan	14.88	16.83	-1.95	16.83	-1.95	16.75	-1.87	16.83	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

14.88/17.50
85/100
3.40/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

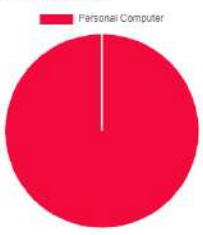


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	So
Diskriminasi	14.88	16.97	-2.09	16.89	-2.01	17.02	-2.14	16.89	
Kecurangan	14.88	16.94	-2.06	16.89	-2.01	17.02	-2.14	16.89	
Gratifikasi	14.88	16.96	-2.08	16.92	-2.04	17.07	-2.19	16.92	
Pungli	14.88	16.97	-2.09	16.91	-2.03	17.06	-2.18	16.91	
Calo	14.88	16.95	-2.07	16.89	-2.01	17.06	-2.18	16.89	

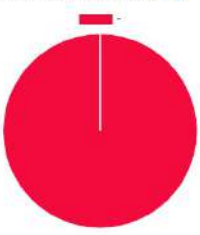
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

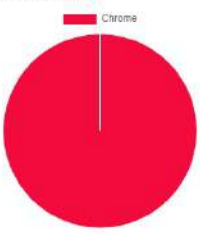
PERANGKAT



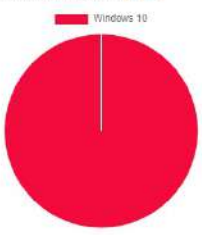
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

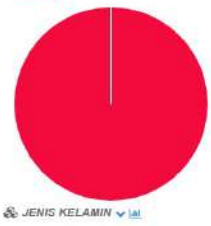


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

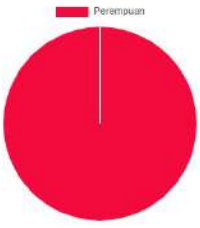
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

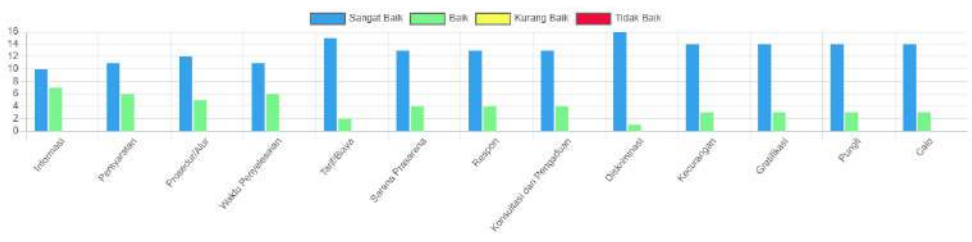
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.77/17.50
95.81/100 3.83/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.10/17.50
97.71/100 3.91/4

Responden
17

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



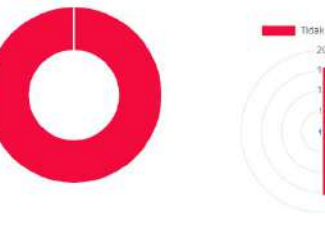
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.77/17.50 95.81/100 3.83/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

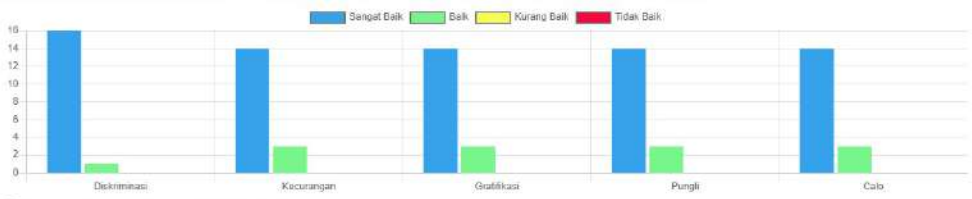


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provins Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	16.42	16.84	-0.42	16.77	-0.35	16.66	-0.24	16.77
Persyaratan	16.57	16.85	-0.28	16.88	-0.31	16.69	-0.12	16.88
Prosedur/Alur	16.73	16.89	-0.16	16.90	-0.17	16.69	0.04	16.90
Waktu Penyelesaian	16.57	16.79	-0.22	16.78	-0.21	16.16	0.41	16.78
Tarif/Biaya	17.19	16.86	0.33	16.96	0.23	16.68	0.51	16.96
Sarana Prasarana	16.88	16.77	0.11	16.79	0.09	16.64	0.24	16.79
Respon	16.88	16.83	0.05	16.93	-0.05	16.13	0.75	16.93
Konsultasi dan Pengaduan	16.88	16.85	0.03	16.90	-0.02	16.56	0.32	16.90

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.10/17.50 97.71/100 3.91/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

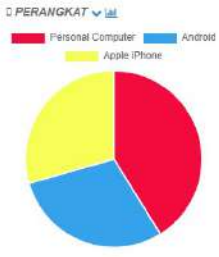


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks Se
Diskriminasi	17.35	16.96	0.39	17.03	0.32	16.76	0.59	17.03
Kecurangan	17.04	16.96	0.08	17.02	0.02	16.77	0.27	17.02
Gratifikasi	17.04	16.95	0.09	16.99	0.05	16.67	0.37	16.99
Pungli	17.04	16.97	0.07	16.99	0.05	16.75	0.29	16.99
Calo	17.04	16.97	0.07	16.99	0.05	16.74	0.30	16.99

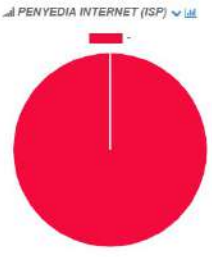
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

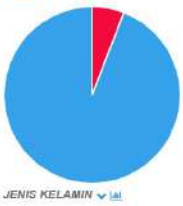


PROFIL RESPONDEN

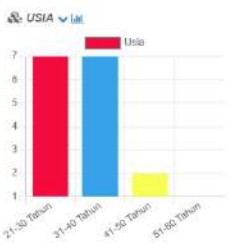
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

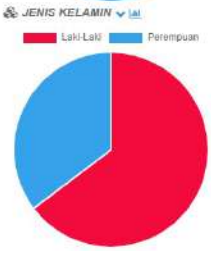
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

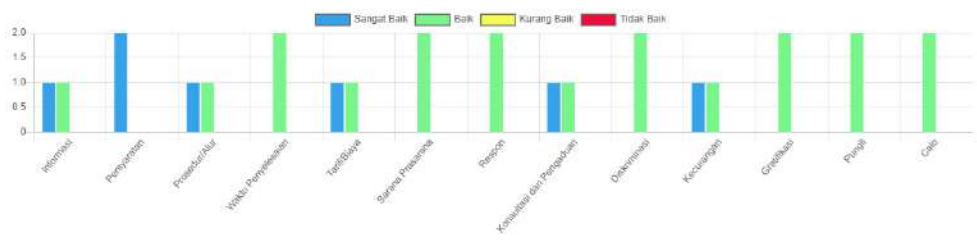
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
15.86/17.50
90.63/100 3.63/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
15.14/17.50
86.50/100 3.46/4

Responden
2

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

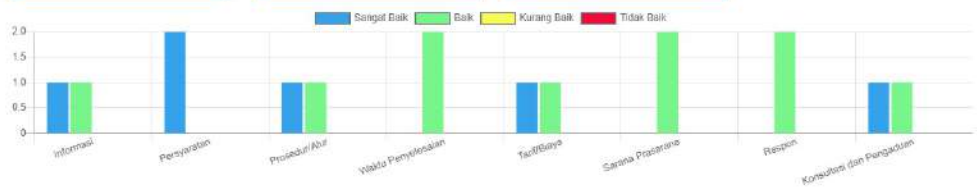
IKM/ IPK



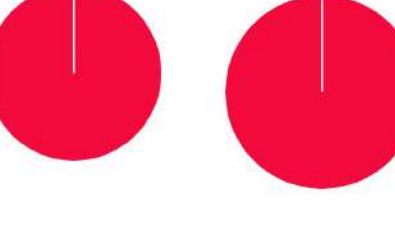
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.86/17.50 | 90.63/100 | 3.63/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	16.19	16.86	-0.67	17.14	-0.95	17.03	-0.84	17.14
Persyaratan	17.50	16.86	0.62	17.37	0.13	17.03	0.47	17.37
Prosedur/Alur	16.19	16.86	-0.67	17.15	-0.96	16.84	-0.65	17.15
Waktu Penyelesaian	14.88	16.81	-1.93	16.92	-2.04	16.89	-1.92	16.92
Tarif/Biaya	16.19	16.82	-0.63	16.94	-0.75	16.93	-0.74	16.94
Sarana Prasarana	14.88	16.78	-1.90	16.93	-2.05	16.89	-1.92	16.93
Respon	14.88	16.84	-1.96	16.95	-2.07	16.88	-2	16.95
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.82	-0.63	16.91	-0.72	16.97	-0.78	16.91

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

15.14/17.50 | 86.50/100 | 3.46/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

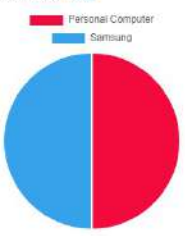


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Se
Diskriminasi	14.88	16.94	-2.06	16.94	-2.06	17.05	-2.17	16.94
Kecurangan	16.19	16.93	-0.74	17.16	-0.97	17.08	-0.89	17.16
Gratifikasi	14.88	16.92	-2.04	16.93	-2.05	17.05	-2.17	16.93
Pungli	14.88	16.92	-2.04	16.95	-2.07	16.96	-2.08	16.95
Calo	14.88	16.92	-2.04	16.95	-2.07	16.94	-2.06	16.95

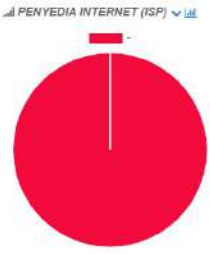
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

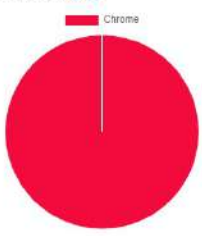
PERANGKAT



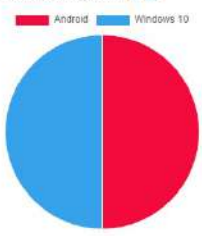
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

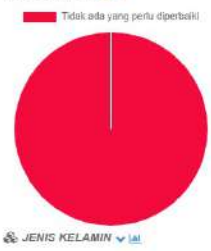


PROFIL RESPONDEN

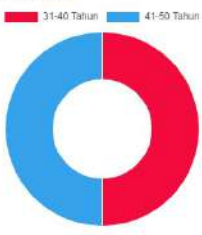
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

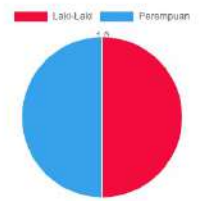
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

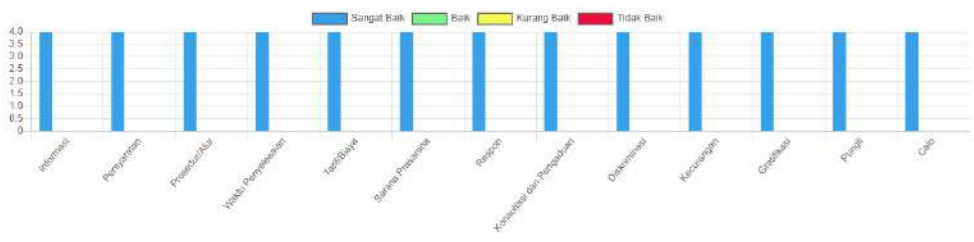
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
4

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

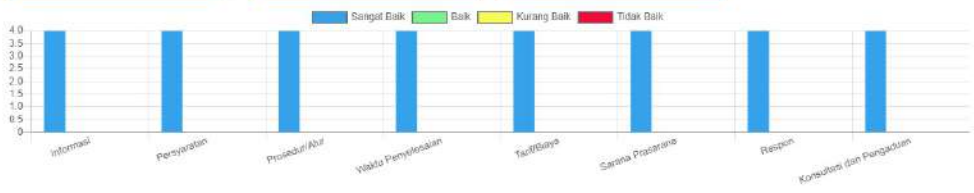
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 100/100 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

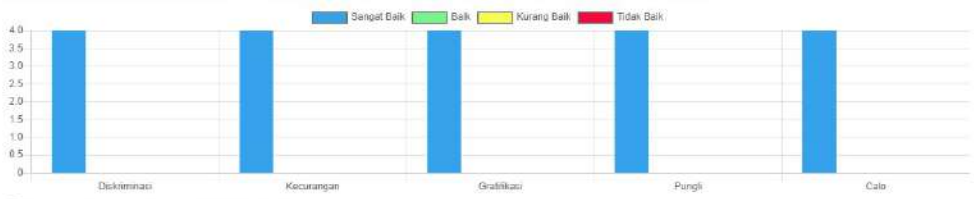


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provins Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.50	16.83	0.67	17.27	0.23	16.97	0.53	17.27
Persyaratan	17.50	16.84	0.66	16.83	0.67	16.86	0.64	16.83
Prosedur/Alur	17.50	16.86	0.64	16.87	0.63	16.82	0.68	16.87
Waktu Penyelesaian	17.50	16.79	0.71	16.83	0.67	16.83	0.67	16.83
Tarif/Biaya	17.50	16.86	0.64	16.84	0.66	16.79	0.71	16.84
Sarana Prasarana	17.50	16.77	0.73	16.81	0.69	16.90	0.60	16.81
Respon	17.50	16.83	0.67	16.84	0.66	16.86	0.64	16.84
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.83	0.67	16.83	0.67	16.75	0.75	16.83

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 100/100 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

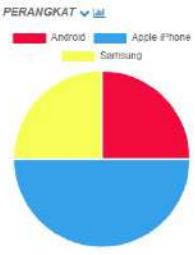


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Inde Se
Diskriminasi	17.50	16.97	0.53	16.89	0.61	17.02	0.48	16.89
Kecurangan	17.50	16.94	0.56	16.89	0.61	17.02	0.48	16.89
Gratifikasi	17.50	16.96	0.54	16.92	0.58	17.07	0.43	16.92
Pungli	17.50	16.97	0.53	16.91	0.59	17.06	0.44	16.91
Calo	17.50	16.95	0.55	16.89	0.61	17.06	0.44	16.89

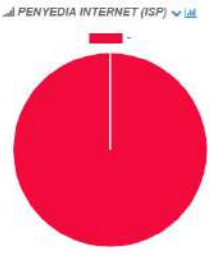
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

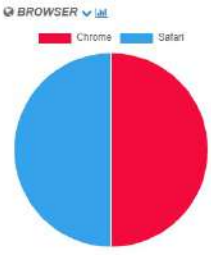
PERANGKAT



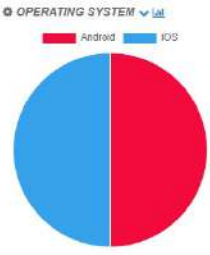
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

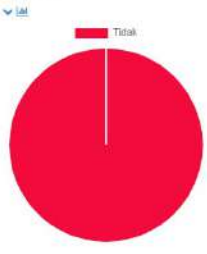


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



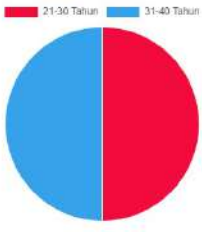
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



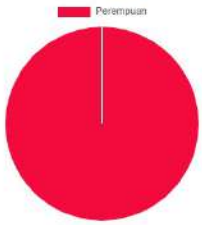
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

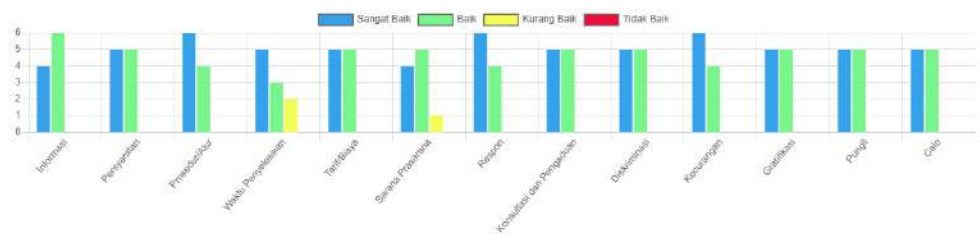
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.09/17.50
91.94/100 3.68/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.24/17.50
92.80/100 3.71/4

Responden
10

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

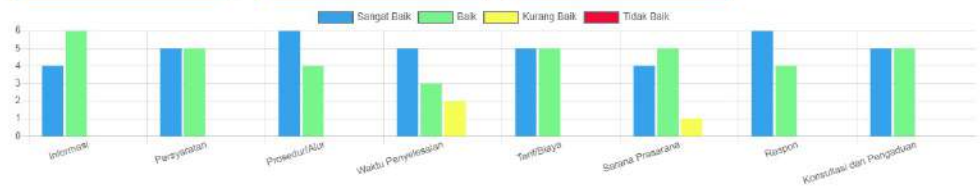
IKM/ IPK



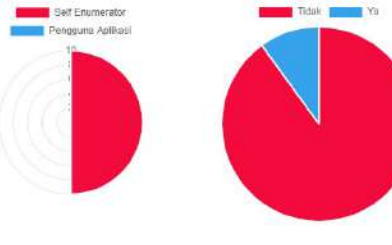
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.09/17.50 91.94/100 3.68/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

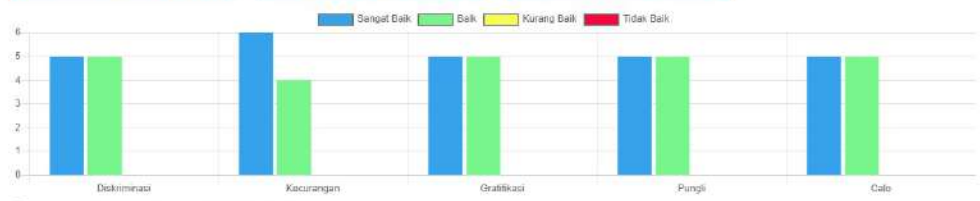


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	15.93	16.84	-0.91	16.77	-0.84	16.66	-0.73	16.77	
Persyaratan	16.19	16.85	-0.66	16.88	-0.69	16.69	-0.50	16.88	
Prosedur/Alur	16.45	16.89	-0.44	16.90	-0.45	16.69	-0.24	16.90	
Waktu Penyelesaian	15.66	16.79	-1.13	16.78	-1.12	16.16	-0.50	16.78	
Tarif/Biaya	16.19	16.86	-0.67	16.96	-0.77	16.68	-0.49	16.96	
Sarana Prasarana	15.66	16.77	-1.11	16.79	-1.13	16.64	-0.98	16.79	
Respon	16.45	16.83	-0.38	16.93	-0.48	16.13	0.32	16.93	
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.85	-0.66	16.90	-0.71	16.56	-0.37	16.90	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.24/17.50 92.80/100 3.71/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	16.19	16.96	-0.77	17.03	-0.84	16.76	-0.57	17.03	-
Kecurangan	16.45	16.96	-0.51	17.02	-0.57	16.77	-0.32	17.02	-
Gratifikasi	16.19	16.95	-0.76	16.99	-0.80	16.67	-0.48	16.99	-
Pungli	16.19	16.97	-0.78	16.99	-0.80	16.75	-0.56	16.99	-
Calo	16.19	16.97	-0.78	16.99	-0.80	16.74	-0.55	16.99	-

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER

OPERATING SYSTEM

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

PERBAIKAN

USIA

JENIS KELAMIN

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

< >
1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

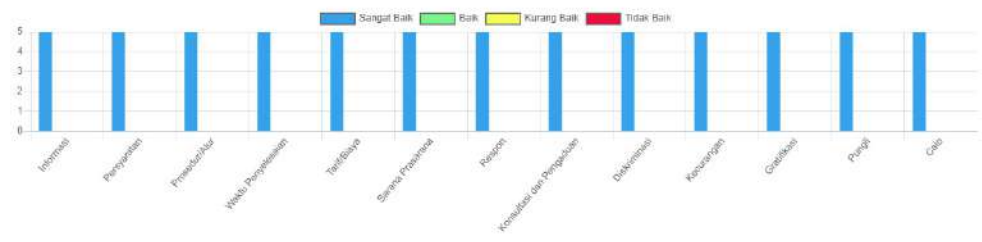
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
5

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

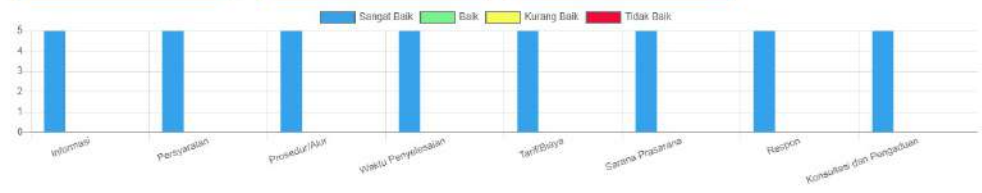
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50
100/100
4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

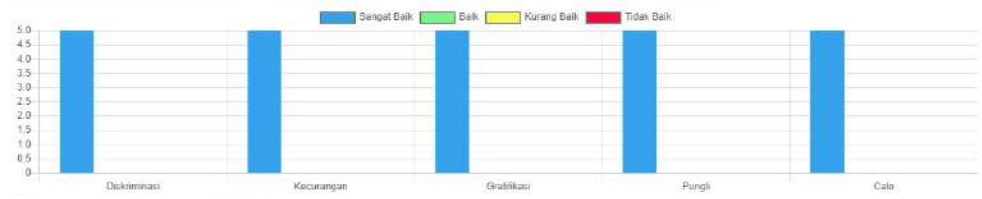


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provins Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.50	16.86	0.64	17.14	0.36	17.03	0.47	17.14
Persyaratan	17.50	16.88	0.62	17.37	0.13	17.03	0.47	17.37
Prosedur/Alur	17.50	16.86	0.64	17.15	0.35	16.84	0.66	17.15
Waktu Penyelesaian	17.50	16.81	0.69	16.92	0.58	16.80	0.70	16.92
Tarif/Biaya	17.50	16.82	0.68	16.94	0.56	16.93	0.57	16.94
Sarana Prasarana	17.50	16.78	0.72	16.93	0.57	16.80	0.70	16.93
Respon	17.50	16.84	0.66	16.95	0.55	16.88	0.62	16.95
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.82	0.68	16.91	0.59	16.97	0.53	16.91

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50
100/100
4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

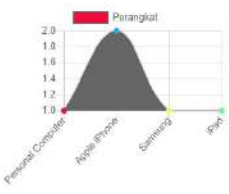


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Se
Diskriminasi	17.50	16.94	0.56	16.94	0.56	17.05	0.45	16.94
Kecurangan	17.50	16.93	0.57	17.16	0.34	17.08	0.42	17.16
Gratifikasi	17.50	16.92	0.58	16.93	0.57	17.05	0.45	16.93
Pungli	17.50	16.92	0.58	16.95	0.55	16.96	0.54	16.95
Calo	17.50	16.92	0.58	16.95	0.55	16.94	0.56	16.95

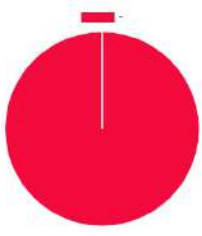
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

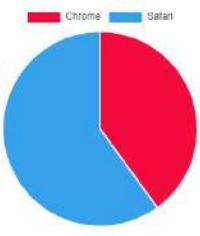
PERANGKAT



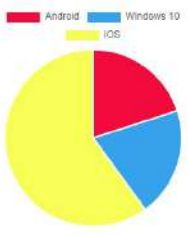
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

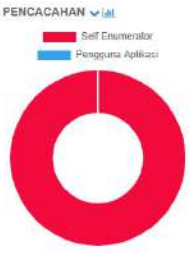


OPERATING SYSTEM

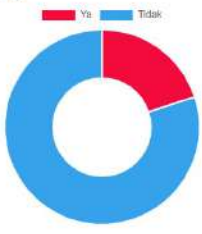


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



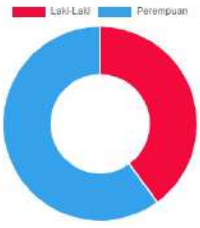
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

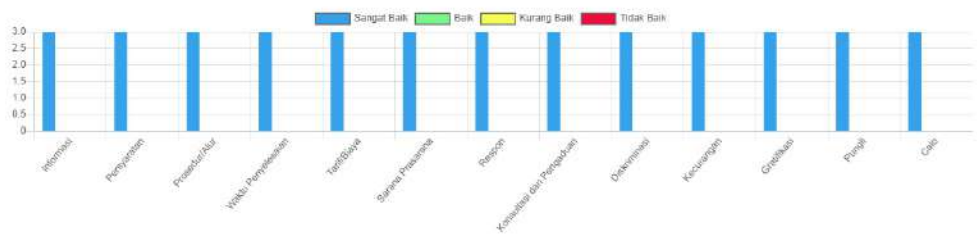
SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50	17.50/17.50
100/100 4/4	100/100 4/4

Responden: 3

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

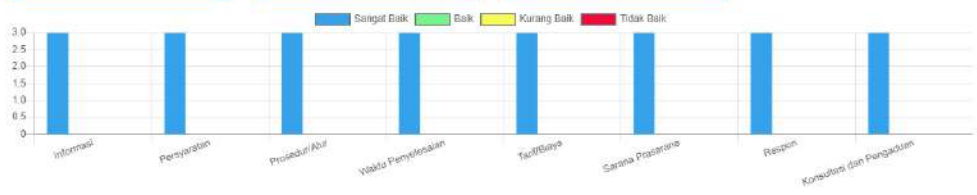
IKM/ IPK



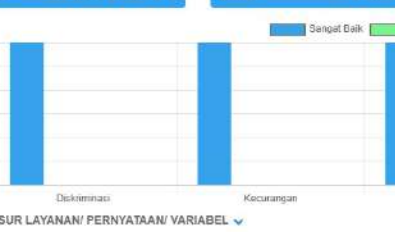
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



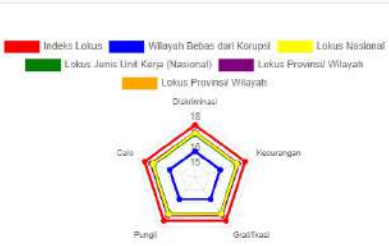
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.50	16.83	0.67	17.27	0.23	16.97	0.53	17.27
Persyaratan	17.50	16.84	0.66	16.83	0.67	16.86	0.64	16.83
Prosedur/Alur	17.50	16.86	0.64	16.87	0.63	16.82	0.68	16.87
Waktu Penyelesaian	17.50	16.79	0.71	16.83	0.67	16.83	0.67	16.83
Tarif/Biaya	17.50	16.86	0.64	16.84	0.66	16.79	0.71	16.84
Sarana Prasarana	17.50	16.77	0.73	16.81	0.69	16.90	0.60	16.81
Respon	17.50	16.83	0.67	16.84	0.66	16.86	0.64	16.84
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.83	0.67	16.83	0.67	16.75	0.75	16.83

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

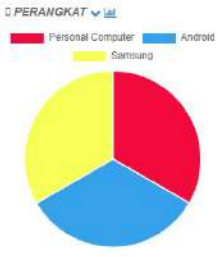


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Se
Diskriminasi	17.50	16.97	0.53	16.89	0.61	17.02	0.48	16.89
Kecurangan	17.50	16.94	0.56	16.89	0.61	17.02	0.48	16.89
Gratifikasi	17.50	16.96	0.54	16.92	0.58	17.07	0.43	16.92
Pungli	17.50	16.97	0.53	16.91	0.59	17.06	0.44	16.91
Calo	17.50	16.95	0.55	16.89	0.61	17.06	0.44	16.89

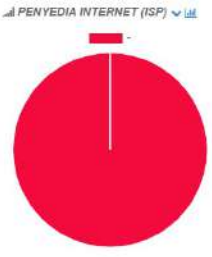
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

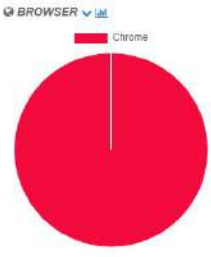
PERANGKAT



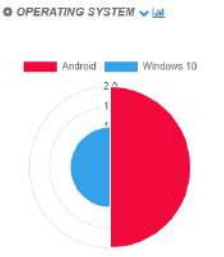
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

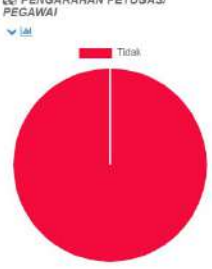


PROFIL RESPONDEN

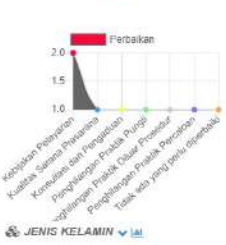
PENCACAHAN



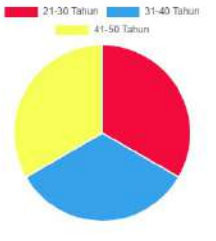
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



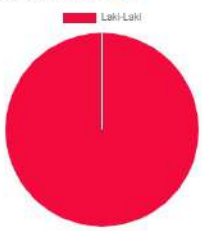
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

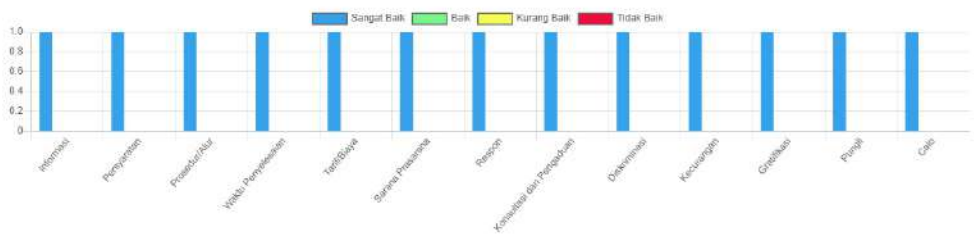
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
1

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

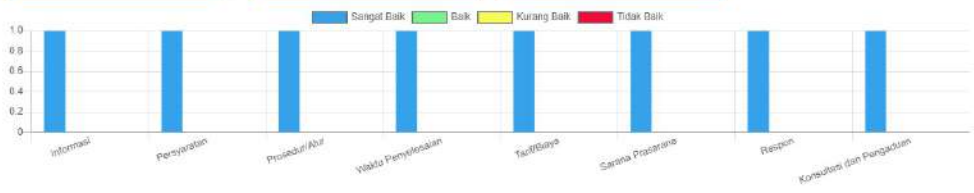
IKM/ IPK



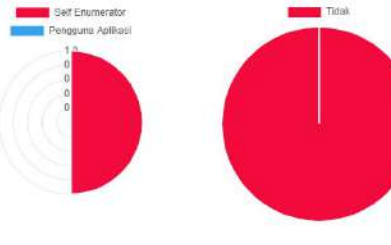
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 100/100 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

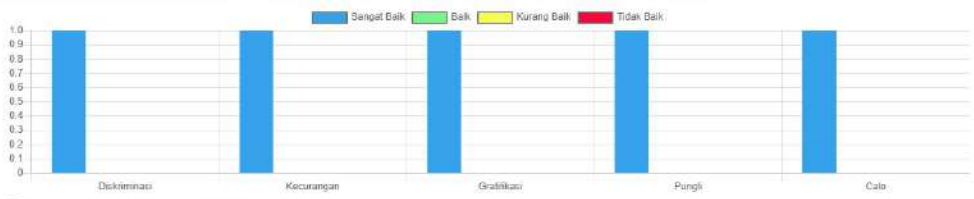


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provins Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.50	16.84	0.66	16.77	0.73	16.66	0.84	16.77
Persyaratan	17.50	16.85	0.65	16.88	0.62	16.69	0.81	16.88
Prosedur/Alur	17.50	16.89	0.61	16.90	0.60	16.69	0.81	16.90
Waktu Penyelesaian	17.50	16.79	0.71	16.78	0.72	16.16	1.34	16.78
Tarif/Biaya	17.50	16.86	0.64	16.96	0.54	16.68	0.82	16.96
Sarana Prasarana	17.50	16.77	0.73	16.79	0.71	16.64	0.86	16.79
Respon	17.50	16.83	0.67	16.93	0.57	16.13	1.37	16.93
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.85	0.65	16.90	0.60	16.56	0.94	16.90

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 100/100 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

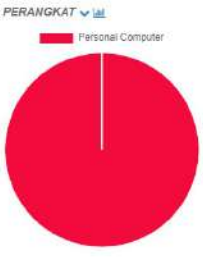


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks Se
Diskriminasi	17.50	16.96	0.54	17.03	0.47	16.76	0.74	17.03
Kecurangan	17.50	16.96	0.54	17.02	0.48	16.77	0.73	17.02
Gratifikasi	17.50	16.95	0.55	16.99	0.51	16.67	0.83	16.99
Pungli	17.50	16.97	0.53	16.99	0.51	16.75	0.75	16.99
Calo	17.50	16.97	0.53	16.99	0.51	16.74	0.76	16.99

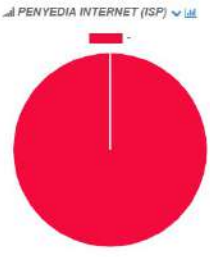
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

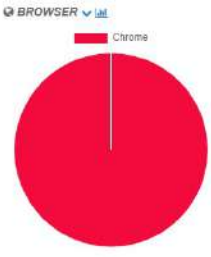
PERANGKAT



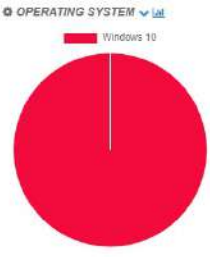
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

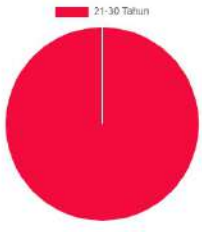
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

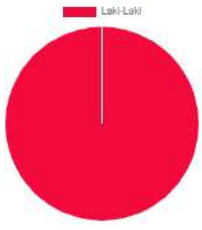
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

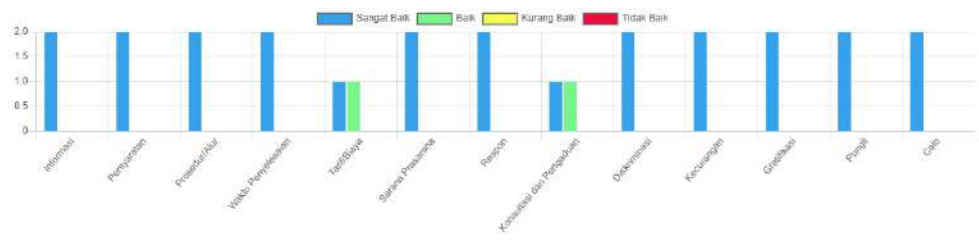
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.17/17.50
98.13/100 3.93/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
2

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

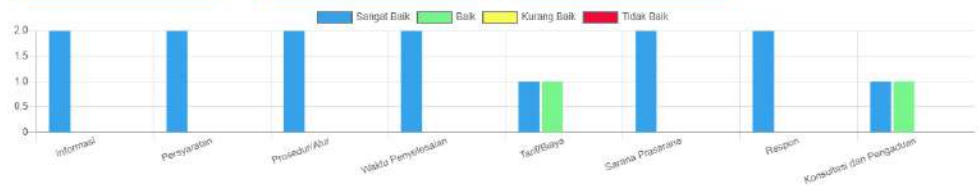
IKM/ IPK



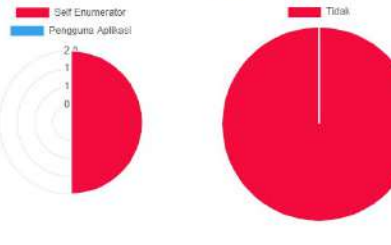
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.17/17.50
98.13/100
3.93/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

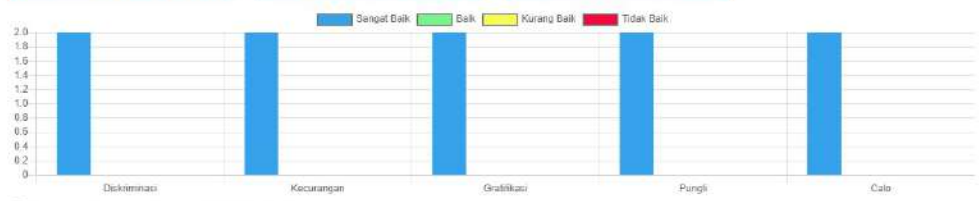


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.50	16.86	0.64	17.14	0.36	17.03	0.47	17.14
Persyaratan	17.50	16.88	0.62	17.37	0.13	17.03	0.47	17.37
Prosedur/Alur	17.50	16.86	0.64	17.15	0.35	16.84	0.66	17.15
Waktu Penyelesaian	17.50	16.81	0.69	16.92	0.58	16.80	0.70	16.92
Tarif/Biaya	16.19	16.82	-0.63	16.94	-0.75	16.93	-0.74	16.94
Sarana Prasarana	17.50	16.78	0.72	16.93	0.57	16.80	0.70	16.93
Respon	17.50	16.84	0.66	16.95	0.55	16.88	0.62	16.95
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.82	-0.63	16.91	-0.72	16.97	-0.78	16.91

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50
100/100
4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

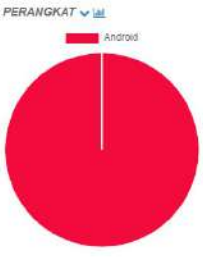


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks Se
Diskriminasi	17.50	16.94	0.56	16.94	0.56	17.05	0.45	16.94
Kecurangan	17.50	16.93	0.57	17.16	0.34	17.08	0.42	17.16
Gratifikasi	17.50	16.92	0.58	16.93	0.57	17.05	0.45	16.93
Pungli	17.50	16.92	0.58	16.95	0.55	16.96	0.54	16.95
Calo	17.50	16.92	0.58	16.95	0.55	16.94	0.56	16.95

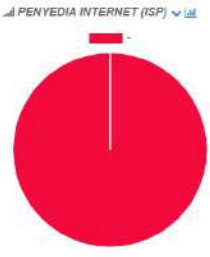
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

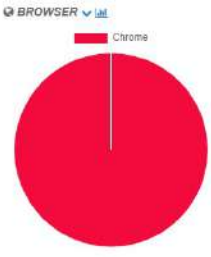
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

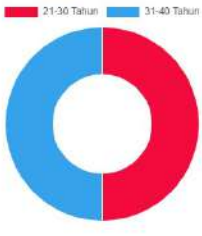
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

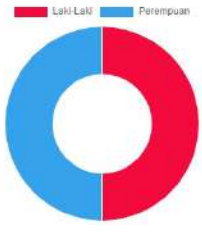
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

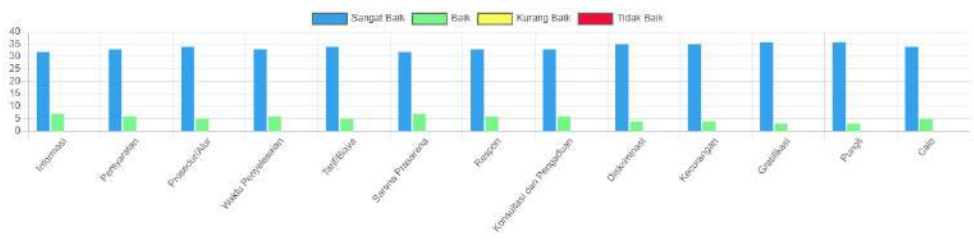
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.10/17.50
97.69/100 3.91/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.24/17.50
98.54/100 3.94/4

Responden
39

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

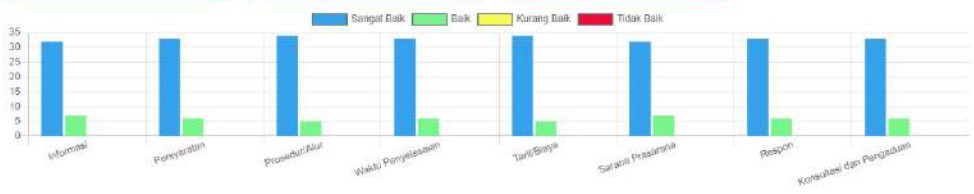
IKM/ IPK



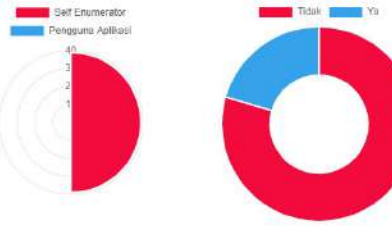
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.10/17.50 97.69/100 3.91/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

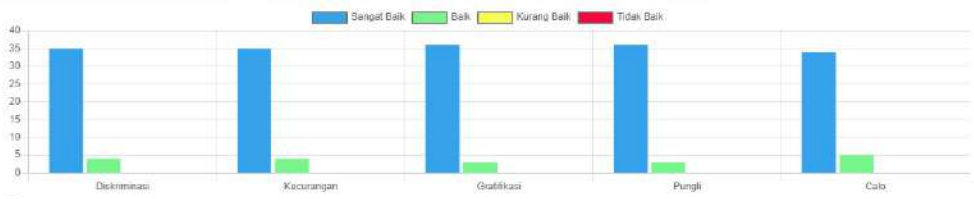


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.03	16.83	0.20	17.27	-0.24	16.97	0.06	17.27
Persyaratan	17.10	16.84	0.26	16.83	0.27	16.86	0.24	16.83
Prosedur/Alur	17.16	16.86	0.30	16.87	0.29	16.82	0.34	16.87
Waktu Penyelesaian	17.10	16.79	0.31	16.83	0.27	16.83	0.27	16.83
Tarif/Biaya	17.16	16.86	0.30	16.84	0.32	16.79	0.37	16.84
Sarana Prasarana	17.03	16.77	0.26	16.81	0.22	16.90	0.13	16.81
Respon	17.10	16.83	0.27	16.84	0.26	16.86	0.24	16.84
Konsultasi dan Pengaduan	17.10	16.83	0.27	16.83	0.27	16.75	0.35	16.83

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.24/17.50 98.54/100 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks Se
Diskriminasi	17.23	16.97	0.26	16.89	0.34	17.02	0.21	16.89
Kecurangan	17.23	16.94	0.29	16.89	0.34	17.02	0.21	16.89
Gratifikasi	17.30	16.96	0.34	16.92	0.38	17.07	0.23	16.92
Pungli	17.30	16.97	0.33	16.91	0.39	17.06	0.24	16.91
Calo	17.16	16.95	0.21	16.89	0.27	17.06	0.10	16.89

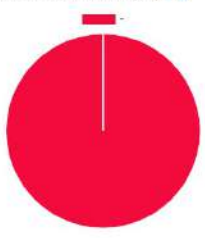
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

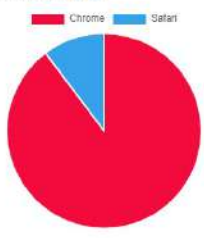
PERANGKAT



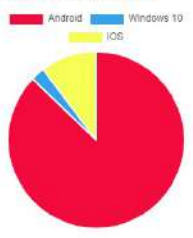
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

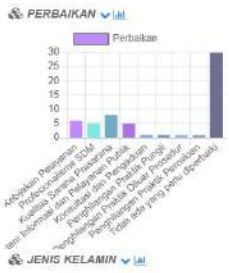


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

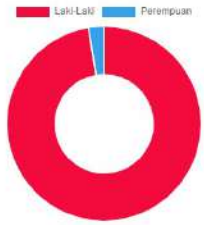
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- **IKM/ IPK** — IKM-IPK April 2026
- **IKM/ IPK** — IKM-IPK Maret 2026
- **IKM/ IPK** — IKM-IPK Februari 2026
- **IKM/ IPK** — IKM-IPK Januari 2026
- **IKM/ IPK** — IKM-IPK Desember 2025
- **IKM/ IPK** — IKM-IPK November 2025
- **IKM/ IPK** — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

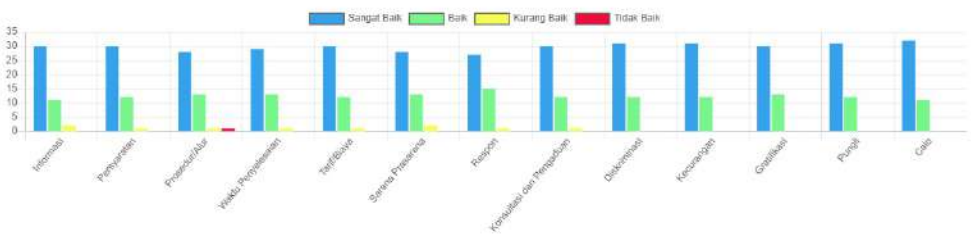
SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.55/17.50	16.77/17.50
94.59/100 · 3.78/4	95.81/100 · 3.83/4

Responden: 43

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

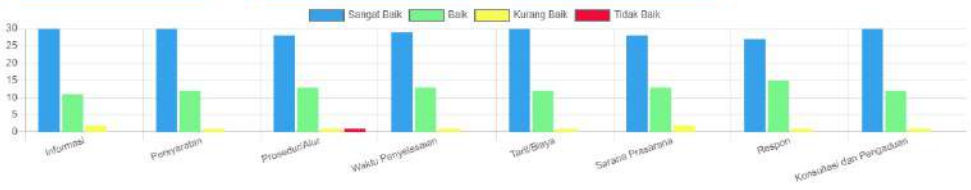
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.55/17.50 | 94.59/100 | 3.78/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.58	16.84	-0.26	16.77	-0.19	16.66	-0.08	16.77	-
Persyaratan	16.65	16.85	-0.20	16.88	-0.23	16.69	-0.04	16.88	-
Prosedur/Alur	16.40	16.89	-0.49	16.90	-0.50	16.69	-0.29	16.90	-
Waktu Penyelesaian	16.58	16.79	-0.21	16.78	-0.20	16.16	0.42	16.78	-
Tarif/Biaya	16.65	16.86	-0.21	16.96	-0.31	16.68	-0.03	16.96	-
Sarana Prasarana	16.46	16.77	-0.31	16.79	-0.33	16.64	-0.18	16.79	-
Respon	16.46	16.83	-0.37	16.93	-0.47	16.13	0.33	16.93	-
Konsultasi dan Pengaduan	16.65	16.85	-0.20	16.90	-0.25	16.56	0.09	16.90	-

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.77/17.50 | 95.81/100 | 3.83/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	16.77	16.96	-0.19	17.03	-0.26	16.76	0.01	17.03	-
Kecurangan	16.77	16.96	-0.19	17.02	-0.25	16.77	0	17.02	-
Gratifikasi	16.71	16.95	-0.24	16.99	-0.28	16.67	0.04	16.99	-
Pungli	16.77	16.97	-0.20	16.99	-0.22	16.75	0.02	16.99	-
Calo	16.83	16.97	-0.14	16.99	-0.16	16.74	0.09	16.99	-

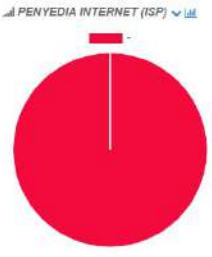
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



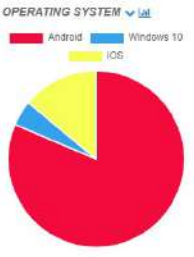
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

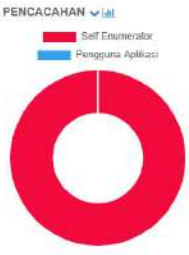


OPERATING SYSTEM

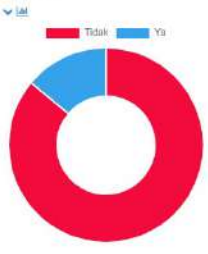


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



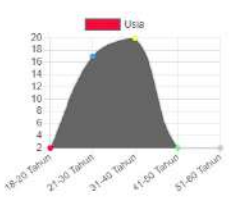
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



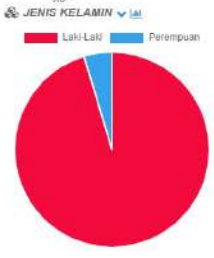
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

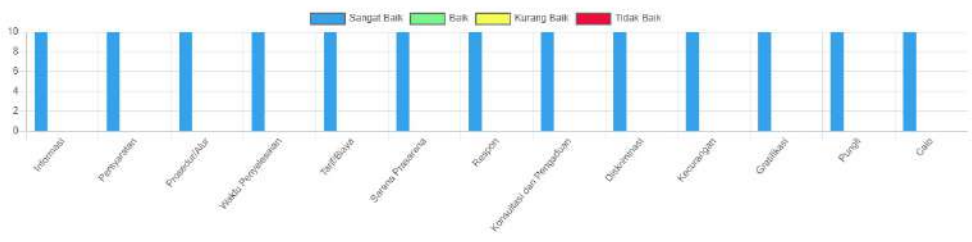
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
10

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

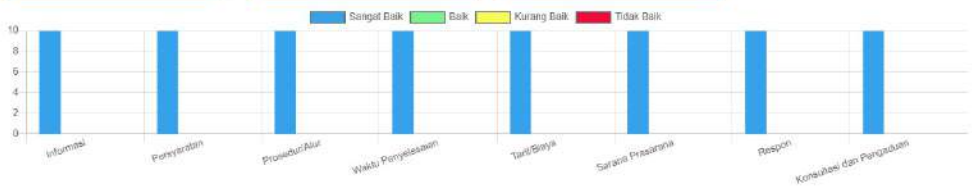
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 100/100 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.50	16.86	0.64	17.14	0.36	17.03	0.47	17.14
Persyaratan	17.50	16.88	0.62	17.37	0.13	17.03	0.47	17.37
Prosedur/Alur	17.50	16.86	0.64	17.15	0.35	16.84	0.66	17.15
Waktu Penyelesaian	17.50	16.81	0.69	16.92	0.58	16.80	0.70	16.92
Tarif/Biaya	17.50	16.82	0.68	16.94	0.56	16.93	0.57	16.94
Sarana Prasarana	17.50	16.78	0.72	16.93	0.57	16.80	0.70	16.93
Respon	17.50	16.84	0.66	16.95	0.55	16.88	0.62	16.95
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.82	0.68	16.91	0.59	16.97	0.53	16.91

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 100/100 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Se
Diskriminasi	17.50	16.94	0.56	16.94	0.56	17.05	0.45	16.94
Kecurangan	17.50	16.93	0.57	17.16	0.34	17.08	0.42	17.16
Gratifikasi	17.50	16.92	0.58	16.93	0.57	17.05	0.45	16.93
Pungli	17.50	16.92	0.58	16.95	0.55	16.96	0.54	16.95
Calo	17.50	16.92	0.58	16.95	0.55	16.94	0.56	16.95

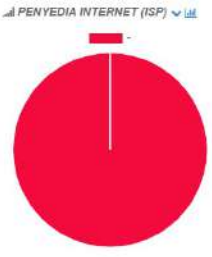
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

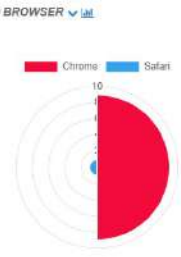
PERANGKAT



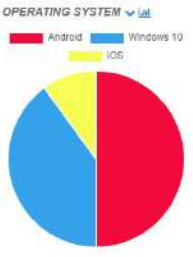
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

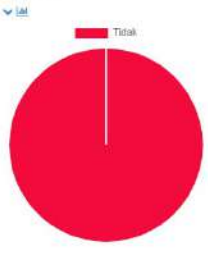


PROFIL RESPONDEN

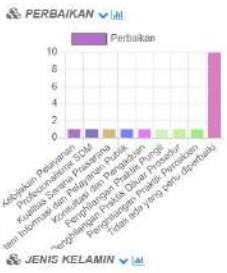
PENCACAHAN



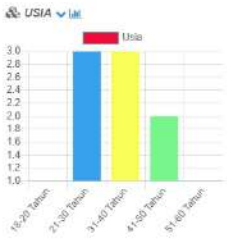
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



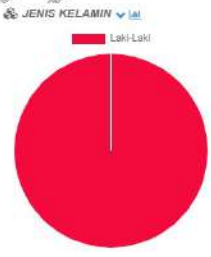
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

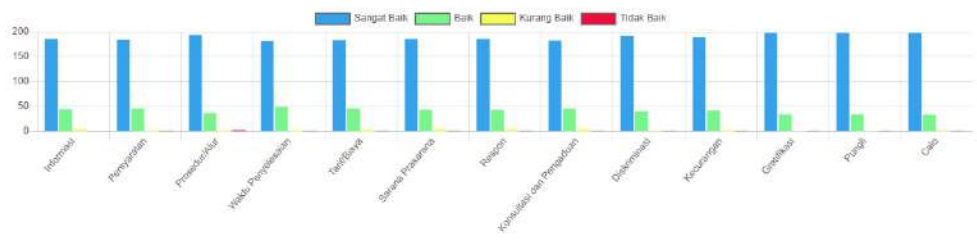
SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.90/17.50	17.03/17.50
96.57/100 · 3.86/4	97.29/100 · 3.89/4

Responden: 234

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

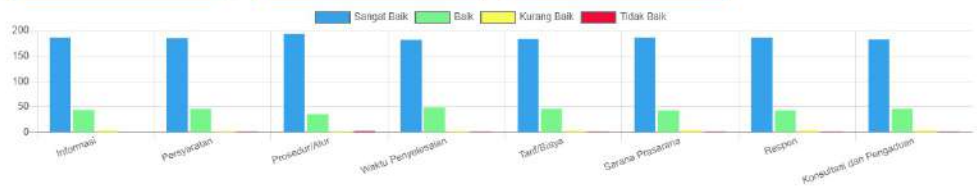
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.90/17.50 | 96.57/100 | 3.86/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



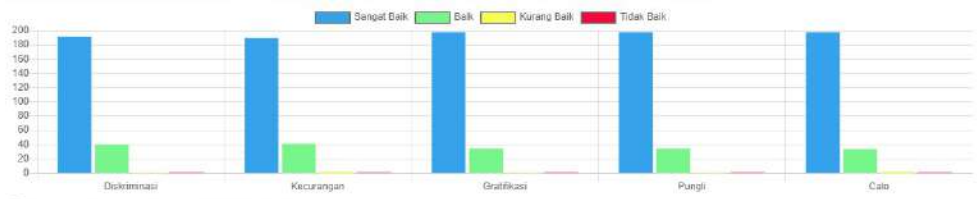
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	16.92	16.83	0.09	17.27	-0.35	16.97	-0.05	17.27	
Persyaratan	16.91	16.84	0.07	16.83	0.08	16.86	0.05	16.83	
Prosedur/Alur	16.97	16.86	0.11	16.87	0.10	16.82	0.15	16.87	
Waktu Penyelesaian	16.87	16.79	0.08	16.83	0.04	16.83	0.04	16.83	
Tarif/Biaya	16.88	16.86	0.02	16.84	0.04	16.79	0.09	16.84	
Sarana Prasarana	16.89	16.77	0.12	16.81	0.08	16.90	-0.01	16.81	
Respon	16.89	16.83	0.06	16.84	0.05	16.86	0.03	16.84	
Konsultasi dan Pengaduan	16.86	16.83	0.03	16.83	0.03	16.75	0.11	16.83	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.03/17.50 | 97.29/100 | 3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	17	16.97	0.03	16.89	0.11	17.02	-0.02	16.89	
Kecurangan	16.98	16.94	0.02	16.89	0.07	17.02	-0.06	16.89	
Gratifikasi	17.06	16.96	0.10	16.92	0.14	17.07	-0.01	16.92	
Pungli	17.06	16.97	0.09	16.91	0.15	17.06	0	16.91	
Calo	17.05	16.95	0.10	16.89	0.16	17.06	-0.01	16.89	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

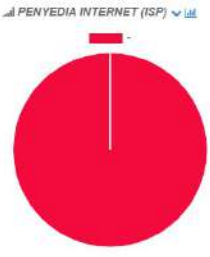
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

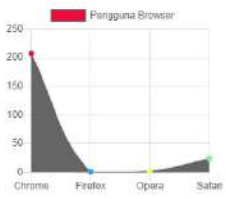
PERANGKAT



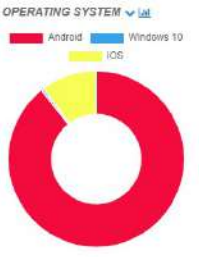
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

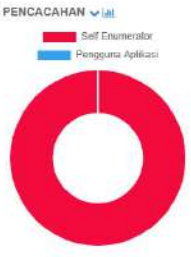


OPERATING SYSTEM

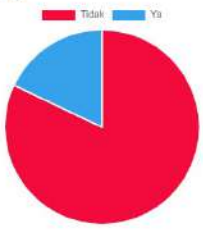


PROFIL RESPONDEN

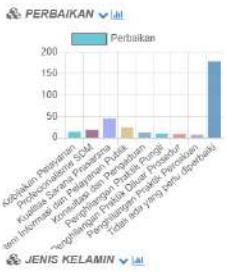
PENCACAHAN



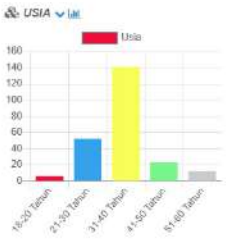
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



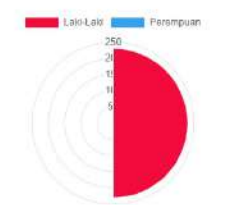
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

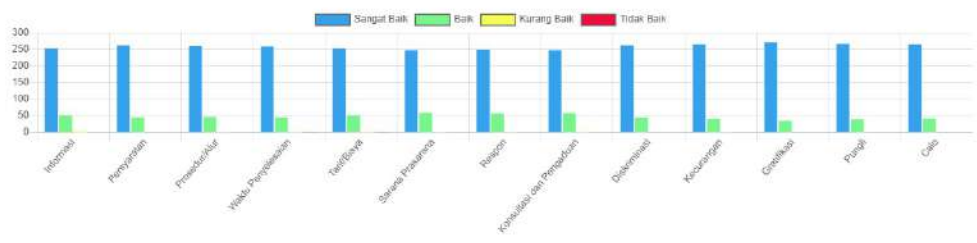
SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.03/17.50	17.15/17.50
97.31/100 | 3.89/4	98.03/100 | 3.92/4

Responden: 307

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

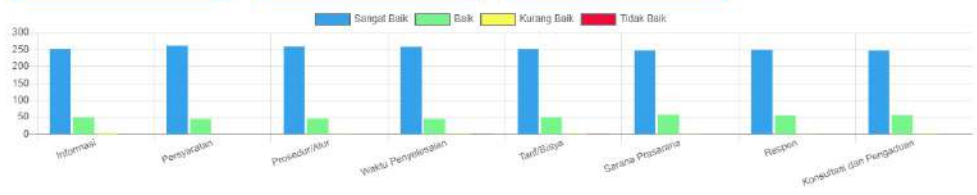
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.03/17.50 | 97.31/100 | 3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



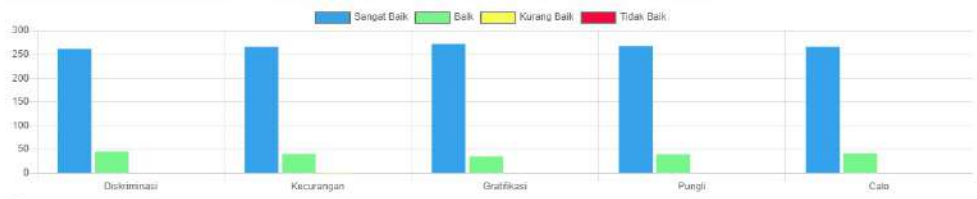
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.01	16.84	0.17	16.77	0.24	16.66	0.35	16.77	
Persyaratan	17.12	16.85	0.27	16.88	0.24	16.69	0.43	16.88	
Prosedur/Alur	17.09	16.89	0.20	16.90	0.19	16.69	0.40	16.90	
Waktu Penyelesaian	17.06	16.79	0.27	16.78	0.28	16.16	0.90	16.78	
Tarif/Biaya	16.99	16.86	0.13	16.96	0.03	16.68	0.31	16.96	
Sarana Prasarana	16.99	16.77	0.22	16.79	0.20	16.64	0.35	16.79	
Respon	17	16.83	0.17	16.93	0.07	16.13	0.87	16.93	
Konsultasi dan Pengaduan	16.98	16.85	0.13	16.90	0.08	16.56	0.42	16.90	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.15/17.50 | 98.03/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.12	16.96	0.16	17.03	0.09	16.76	0.36	17.03	
Kecurangan	17.14	16.96	0.18	17.02	0.12	16.77	0.37	17.02	
Gratifikasi	17.20	16.95	0.25	16.99	0.21	16.67	0.53	16.99	
Pungli	17.17	16.97	0.20	16.99	0.18	16.75	0.42	16.99	
Calo	17.15	16.97	0.18	16.99	0.16	16.74	0.41	16.99	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

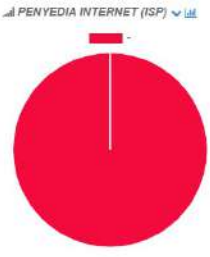
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

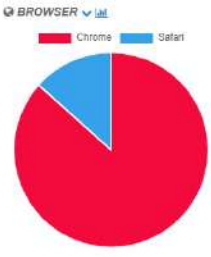
PERANGKAT



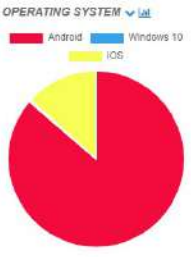
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

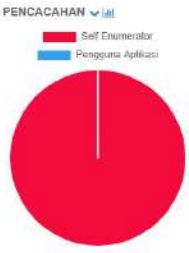


OPERATING SYSTEM

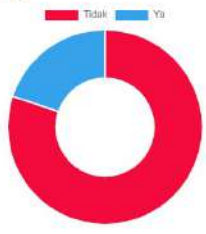


PROFIL RESPONDEN

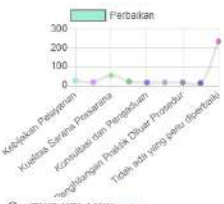
PENCACAHAN



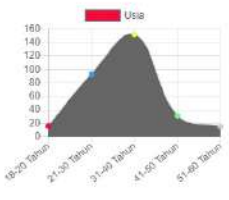
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

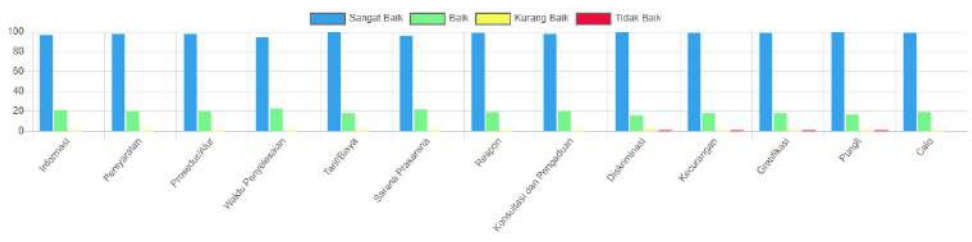
SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.01/17.50	16.99/17.50
97.18/100 3.89/4	97.10/100 3.88/4

Responden: 119

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

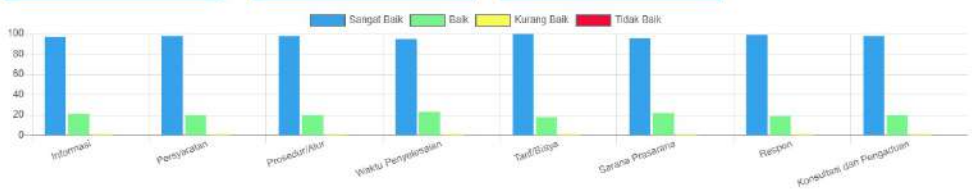
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.01/17.50 | 97.18/100 | 3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

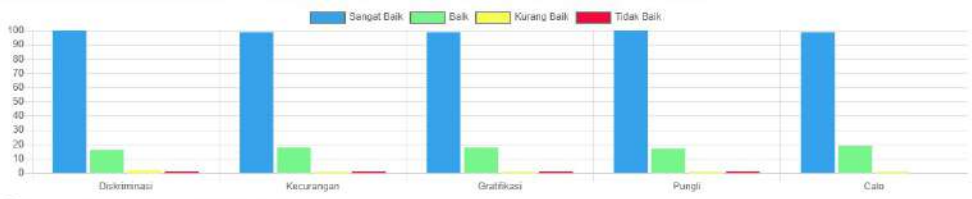


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.99	16.86	0.13	17.14	-0.15	17.03	-0.04	17.14	
Persyaratan	17.01	16.88	0.13	17.37	-0.36	17.03	-0.02	17.37	
Prosedur/Alur	17.01	16.86	0.15	17.15	-0.14	16.84	0.17	17.15	
Waktu Penyelesaian	16.95	16.81	0.14	16.92	0.03	16.80	0.15	16.92	
Tarif/Biaya	17.06	16.82	0.24	16.94	0.12	16.93	0.13	16.94	
Sarana Prasarana	16.97	16.78	0.19	16.93	0.04	16.80	0.17	16.93	
Respon	17.04	16.84	0.20	16.95	0.09	16.88	0.16	16.95	
Konsultasi dan Pengaduan	17.01	16.82	0.19	16.91	0.10	16.97	0.04	16.91	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.99/17.50 | 97.10/100 | 3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

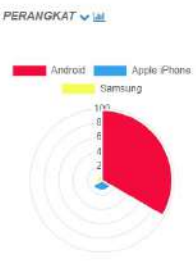


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	16.97	16.94	0.03	16.94	0.03	17.05	-0.08	16.94	
Kecurangan	16.97	16.93	0.04	17.16	-0.19	17.08	-0.11	17.16	-
Gratifikasi	16.97	16.92	0.05	16.93	0.04	17.05	-0.08	16.93	
Pungli	17.01	16.92	0.09	16.95	0.06	16.96	0.05	16.95	
Calo	17.04	16.92	0.12	16.95	0.09	16.94	0.10	16.95	

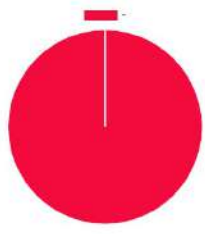
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



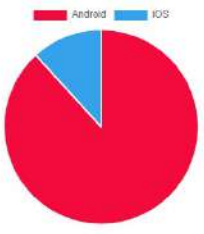
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

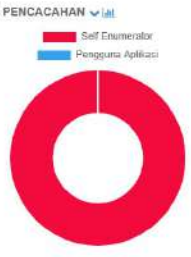


OPERATING SYSTEM

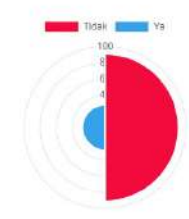


PROFIL RESPONDEN

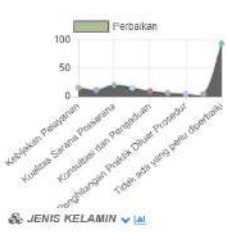
PENCACAHAN



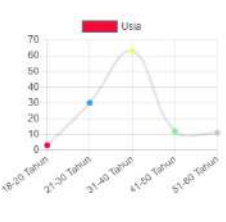
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



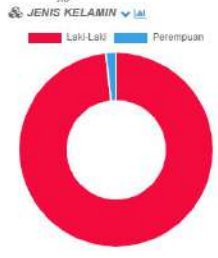
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

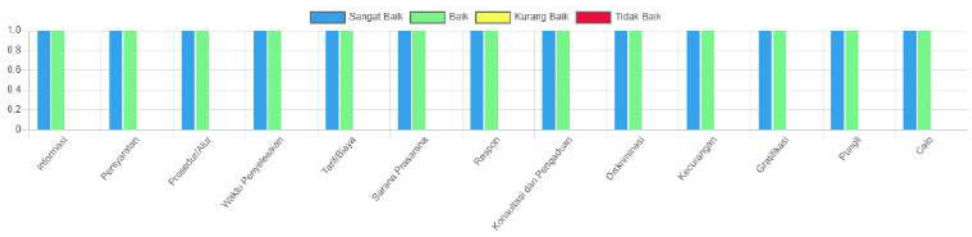
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.19/17.50
92.50/100 3.70/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.19/17.50
92.50/100 3.70/4

Responden
2

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

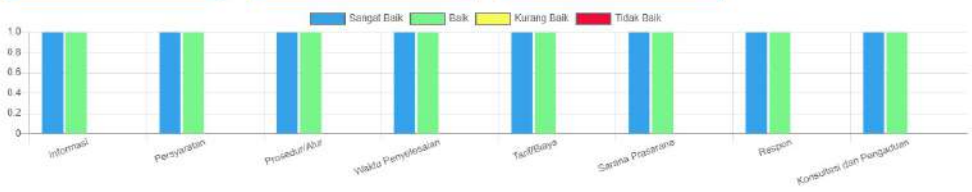
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.19/17.50 92.50/100 3.70/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.19	16.83	-0.64	16.84	-0.65
Persyaratan	16.19	16.84	-0.65	16.86	-0.67
Prosedur/Alur	16.19	16.86	-0.67	16.82	-0.63
Waktu Penyelesaian	16.19	16.79	-0.60	16.78	-0.59
Tarif/Biaya	16.19	16.86	-0.67	16.91	-0.72
Sarana Prasarana	16.19	16.77	-0.58	16.83	-0.64
Respon	16.19	16.83	-0.64	16.91	-0.72
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.83	-0.64	16.91	-0.72

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.19/17.50 92.50/100 3.70/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

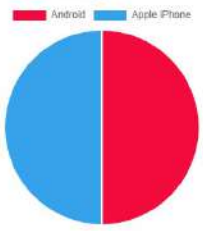


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.19	16.97	-0.78	16.94	-0.75
Kecurangan	16.19	16.94	-0.75	16.90	-0.71
Gratifikasi	16.19	16.96	-0.77	16.99	-0.80
Pungli	16.19	16.97	-0.78	17.03	-0.84
Calo	16.19	16.95	-0.76	16.94	-0.75

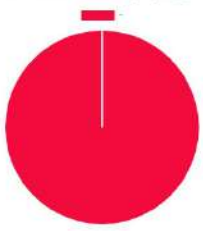
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

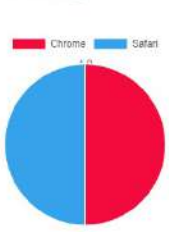
PERANGKAT



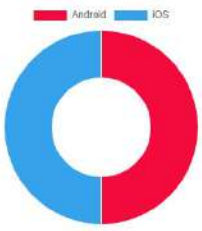
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

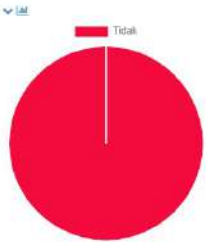


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



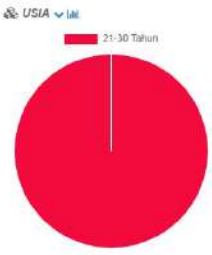
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



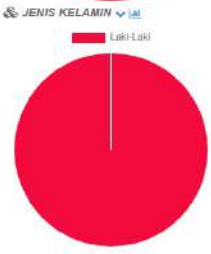
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

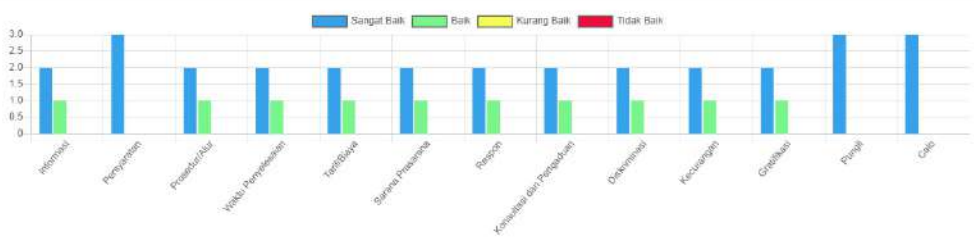
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.73/17.50
95.63/100 3.83/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.98/17.50
97/100 3.88/4

Responden
3

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

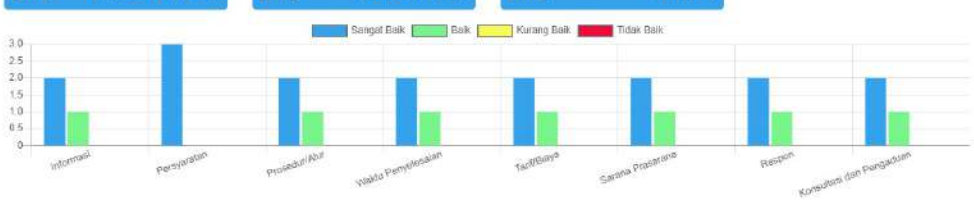
IKM/ IPK



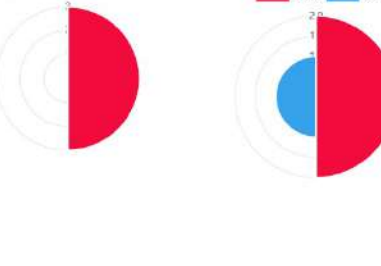
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.73/17.50
95.63/100
3.83/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

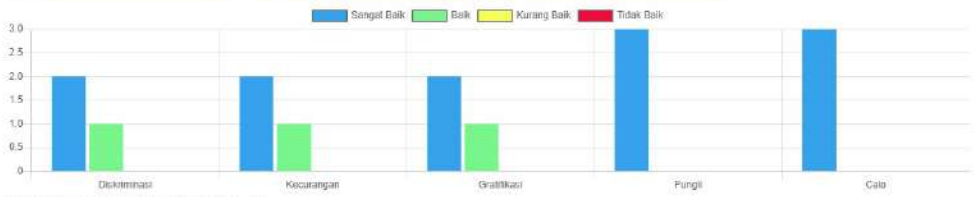


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.63	16.84	-0.21	16.89	-0.26
Persyaratan	17.50	16.85	0.65	16.92	0.58
Prosedur/Alur	16.63	16.89	-0.26	16.92	-0.29
Waktu Penyelesaian	16.63	16.79	-0.16	16.94	-0.31
Tarif/Biaya	16.63	16.86	-0.23	16.96	-0.33
Sarana Prasarana	16.63	16.77	-0.14	16.87	-0.24
Respon	16.63	16.83	-0.20	16.98	-0.35
Konsultasi dan Pengaduan	16.63	16.85	-0.22	16.93	-0.30

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.98/17.50
97/100
3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

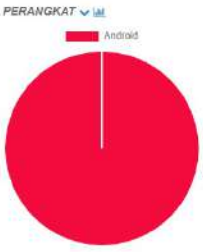


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.63	16.96	-0.33	16.98	-0.35
Kecurangan	16.63	16.96	-0.33	16.94	-0.31
Gratifikasi	16.63	16.95	-0.32	16.94	-0.31
Pungli	17.50	16.97	0.53	16.99	0.51
Calo	17.50	16.97	0.53	17.02	0.48

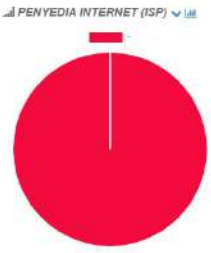
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

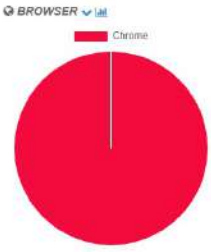
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

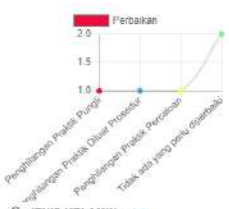


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

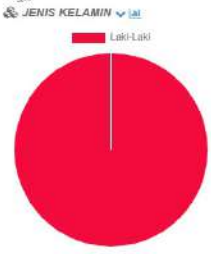
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

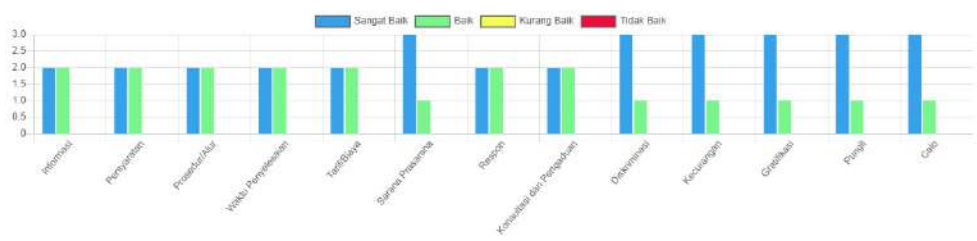
SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.27/17.50	16.84/17.50
92.97/100 · 3.72/4	96.25/100 · 3.85/4

Responden: 4

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

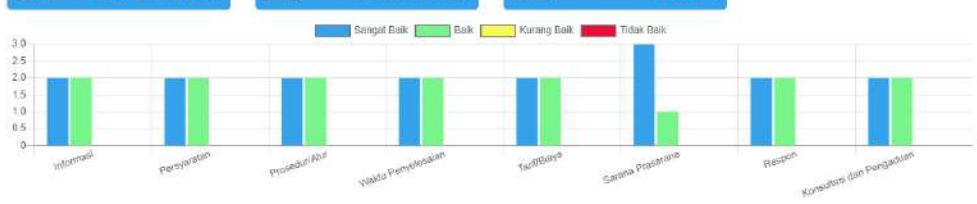
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.27/17.50 | 92.97/100 | 3.72/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

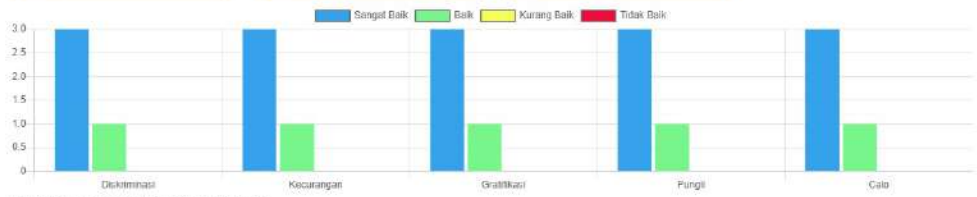


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.19	16.86	-0.67	16.89	-0.70
Persyaratan	16.19	16.88	-0.69	16.84	-0.65
Prosedur/Alur	16.19	16.86	-0.67	16.79	-0.60
Waktu Penyelesaian	16.19	16.81	-0.62	16.78	-0.59
Tarif/Biaya	16.19	16.82	-0.63	16.85	-0.66
Sarana Prasarana	16.84	16.78	0.06	16.82	0.02
Respon	16.19	16.84	-0.65	16.82	-0.63
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.82	-0.63	16.80	-0.61

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.84/17.50 | 96.25/100 | 3.85/4



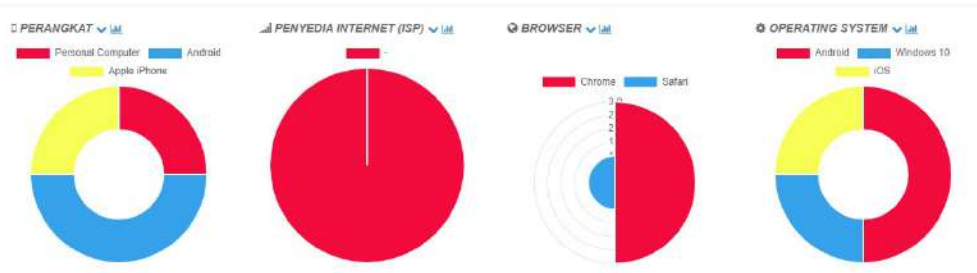
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.84	16.94	-0.10	16.98	-0.14
Kecurangan	16.84	16.93	-0.09	16.94	-0.10
Gratifikasi	16.84	16.92	-0.08	16.87	-0.03
Pungli	16.84	16.92	-0.08	16.90	-0.06
Calo	16.84	16.92	-0.08	16.90	-0.06

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT



PROFIL RESPONDEN

Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
Analis Organisasi dan Tata Laksana

Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

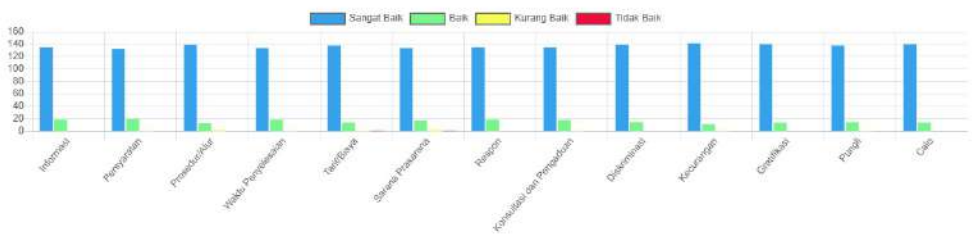
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.15/17.50
98.02/100 3.92/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.25/17.50
98.58/100 3.94/4

Responden
154

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

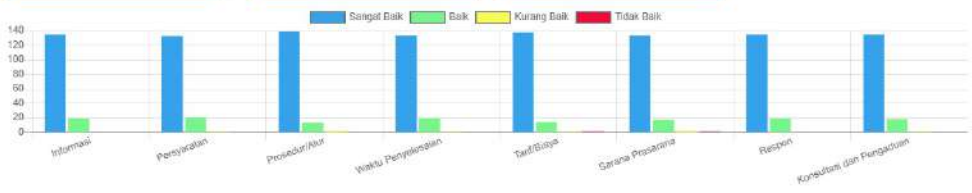
IKM/ IPK



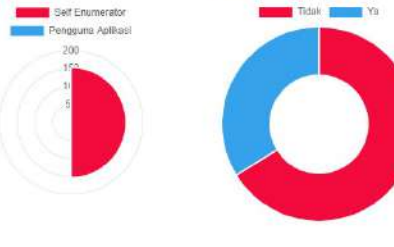
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.15/17.50 | 98.02/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

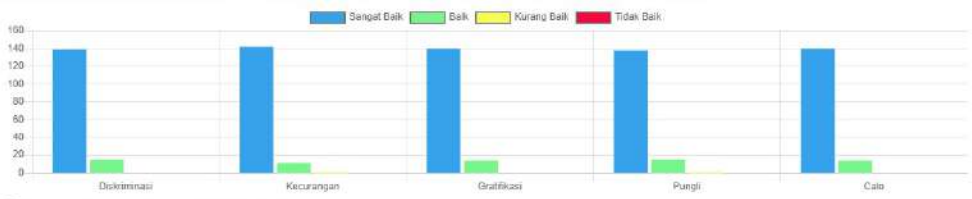


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.18	16.83	0.35	17.27	-0.09	16.97	0.21	17.27
Persyaratan	17.13	16.84	0.29	16.83	0.30	16.86	0.27	16.83
Prosedur/Alur	17.21	16.86	0.35	16.87	0.34	16.82	0.39	16.87
Waktu Penyelesaian	17.14	16.79	0.35	16.83	0.31	16.83	0.31	16.83
Tarif/Biaya	17.14	16.86	0.28	16.84	0.30	16.79	0.35	16.84
Sarana Prasarana	17.09	16.77	0.32	16.81	0.28	16.90	0.19	16.81
Respon	17.18	16.83	0.35	16.84	0.34	16.86	0.32	16.84
Konsultasi dan Pengaduan	17.16	16.83	0.33	16.83	0.33	16.75	0.41	16.83

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.25/17.50 | 98.58/100 | 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Se
Diskriminasi	17.24	16.97	0.27	16.89	0.35	17.02	0.22	16.89
Kecurangan	17.28	16.94	0.34	16.89	0.39	17.02	0.26	16.89
Gratifikasi	17.26	16.96	0.30	16.92	0.34	17.07	0.19	16.92
Pungli	17.21	16.97	0.24	16.91	0.30	17.06	0.15	16.91
Calo	17.26	16.95	0.31	16.89	0.37	17.06	0.20	16.89

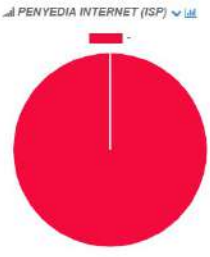
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

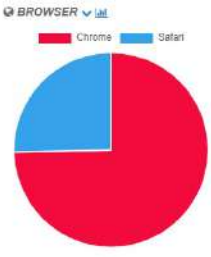
PERANGKAT



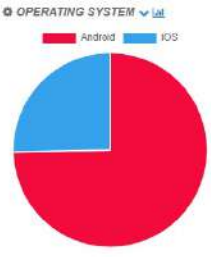
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

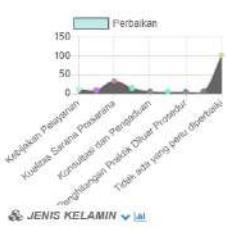


PROFIL RESPONDEN

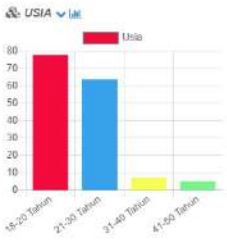
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

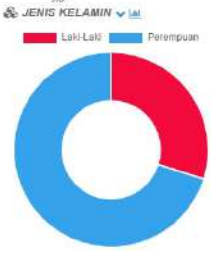
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

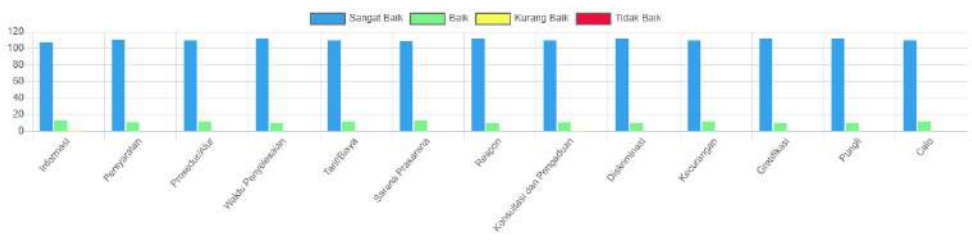
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.24/17.50
98.52/100 3.94/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.27/17.50
98.67/100 3.95/4

Responden
122

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

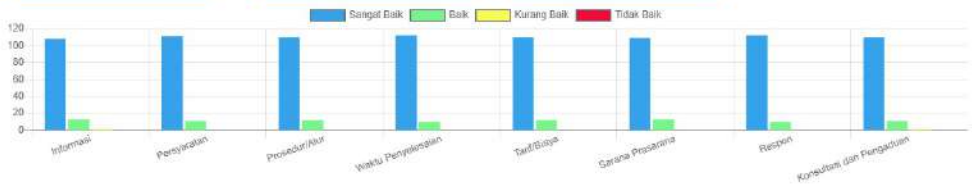
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.24/17.50
98.52/100
3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

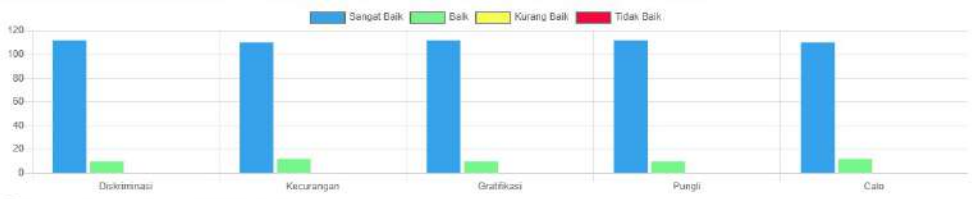


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.18	16.84	0.34	16.77	0.41	16.66	0.52	16.77
Persyaratan	17.26	16.85	0.41	16.88	0.38	16.69	0.57	16.88
Prosedur/Alur	17.24	16.89	0.35	16.90	0.34	16.69	0.55	16.90
Waktu Penyelesaian	17.28	16.79	0.49	16.78	0.50	16.16	1.12	16.78
Tarif/Biaya	17.24	16.86	0.38	16.96	0.28	16.68	0.56	16.96
Sarana Prasarana	17.22	16.77	0.45	16.79	0.43	16.64	0.58	16.79
Respon	17.28	16.83	0.45	16.93	0.35	16.13	1.15	16.93
Konsultasi dan Pengaduan	17.22	16.85	0.37	16.90	0.32	16.56	0.66	16.90

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.27/17.50
98.67/100
3.95/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

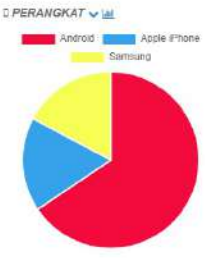


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jen Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Se
Diskriminasi	17.28	16.96	0.32	17.03	0.25	16.76	0.52	17.03
Kecurangan	17.24	16.96	0.28	17.02	0.22	16.77	0.47	17.02
Gratifikasi	17.28	16.95	0.33	16.99	0.29	16.67	0.61	16.99
Pungli	17.28	16.97	0.31	16.99	0.29	16.75	0.53	16.99
Calo	17.24	16.97	0.27	16.99	0.25	16.74	0.50	16.99

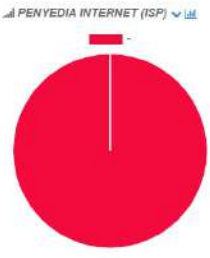
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

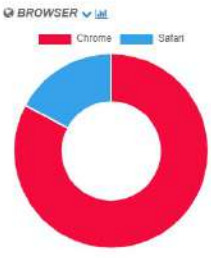
PERANGKAT



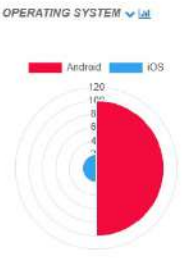
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



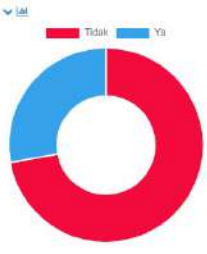
OPERATING SYSTEM



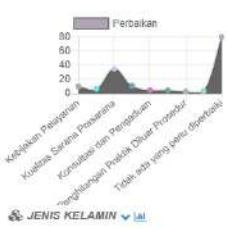
PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



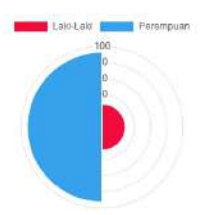
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

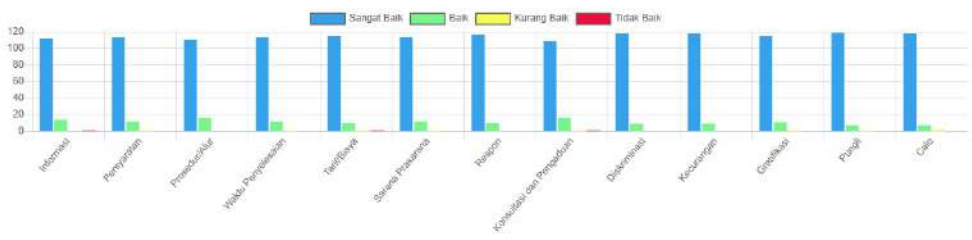
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.19/17.50
98.21/100 3.93/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.29/17.50
98.80/100 3.95/4

Responden
127

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

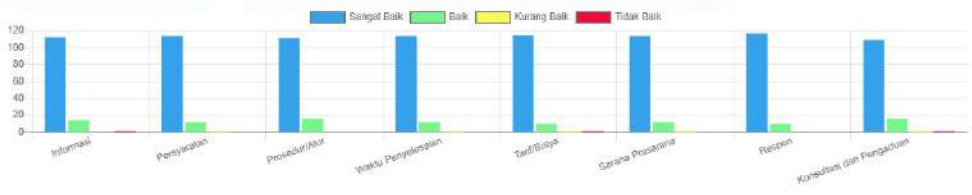
IKM/ IPK



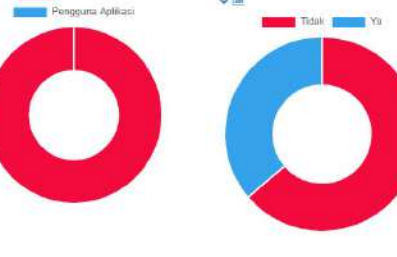
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.19/17.50
98.21/100
3.93/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

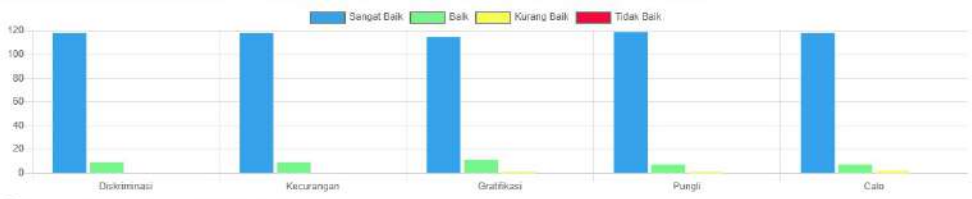


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Je Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks S
Informasi	17.15	16.86	0.29	17.14	0.01	17.03	0.12	17.14
Persyaratan	17.21	16.88	0.33	17.37	-0.16	17.03	0.18	17.37
Prosedur/Alur	17.17	16.86	0.31	17.15	0.02	16.84	0.33	17.15
Waktu Penyelesaian	17.21	16.81	0.40	16.92	0.29	16.80	0.41	16.92
Tarif/Biaya	17.19	16.82	0.37	16.94	0.25	16.93	0.26	16.94
Sarana Prasarana	17.21	16.78	0.43	16.93	0.28	16.80	0.41	16.93
Respon	17.29	16.84	0.45	16.95	0.34	16.88	0.41	16.95
Konsultasi dan Pengaduan	17.07	16.82	0.25	16.91	0.16	16.97	0.10	16.91

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.29/17.50
98.80/100
3.95/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

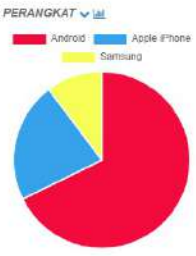


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks Se
Diskriminasi	17.31	16.94	0.37	16.94	0.37	17.05	0.26	16.94
Kecurangan	17.31	16.93	0.38	17.16	0.15	17.08	0.23	17.16
Gratifikasi	17.23	16.92	0.31	16.93	0.30	17.05	0.18	16.93
Pungli	17.31	16.92	0.39	16.95	0.36	16.96	0.35	16.95
Calo	17.27	16.92	0.35	16.95	0.32	16.94	0.33	16.95

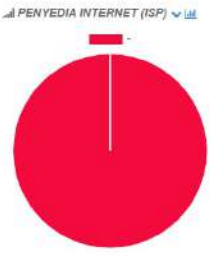
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

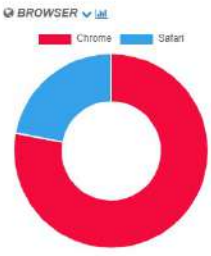
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

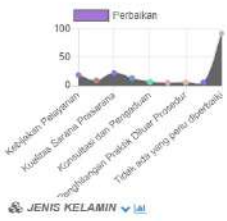


PROFIL RESPONDEN

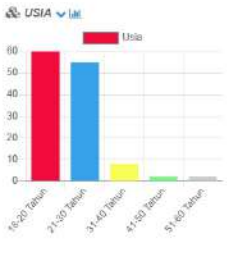
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

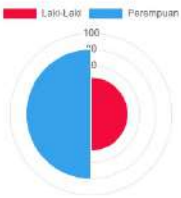
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

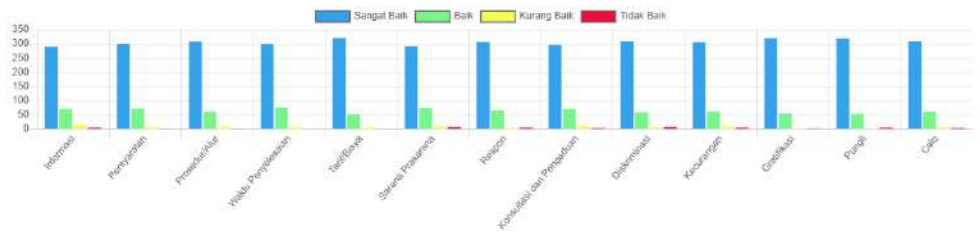
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.88/17.50
96.43/100 3.86/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.94/17.50
96.81/100 3.87/4

Responden
378

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

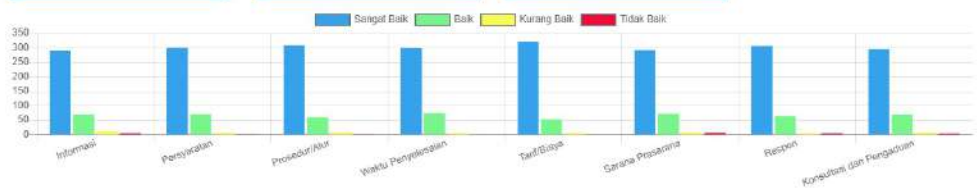
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.88/17.50 96.43/100 3.86/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

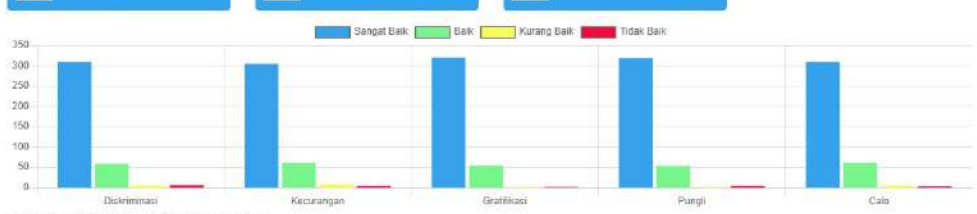


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.72	16.83	-0.11	16.81	-0.09	14	2.72
Persyaratan	16.90	16.84	0.06	16.78	0.12	14	2.90
Prosedur/Alur	16.93	16.86	0.07	16.85	0.08	14	2.93
Waktu Penyelesaian	16.92	16.79	0.13	16.82	0.10	14	2.92
Tarif/Biaya	17.07	16.86	0.21	16.84	0.23	14	3.07
Sarana Prasarana	16.75	16.77	-0.02	16.62	0.13	14	2.75
Respon	16.90	16.83	0.07	16.88	0.02	14	2.90
Konsultasi dan Pengaduan	16.82	16.83	-0.01	16.85	-0.03	14	2.82

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.94/17.50 96.81/100 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.89	16.97	-0.08	16.97	-0.08	15.75	1.14
Kecurangan	16.85	16.94	-0.09	16.96	-0.11	15.75	1.10
Gratifikasi	17.04	16.96	0.08	17.01	0.03	15.75	1.29
Pungli	16.99	16.97	0.02	17	-0.01	15.75	1.24
Calo	16.93	16.96	-0.02	16.88	0.05	15.75	1.18

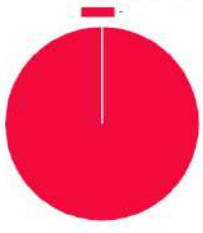
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

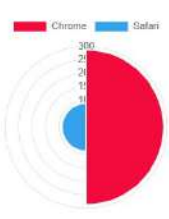
PERANGKAT



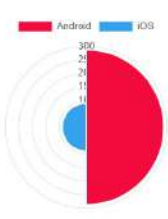
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

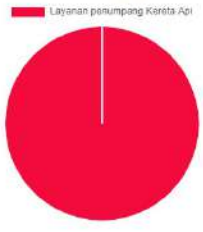


PROFIL RESPONDEN

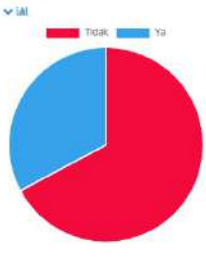
PENCACAHAN



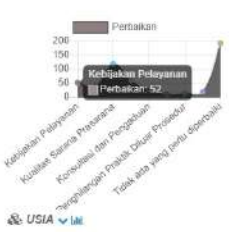
PRODUK LAYANAN



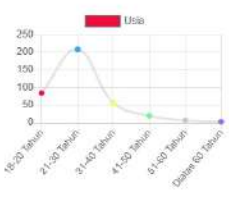
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



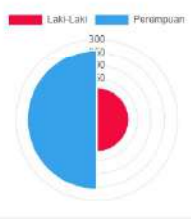
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

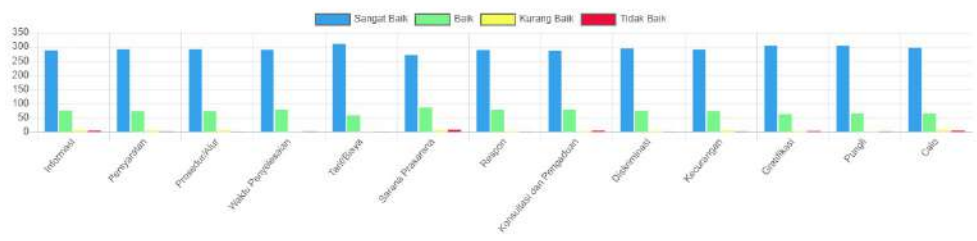
SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.85/17.50	16.91/17.50
96.29/100 · 3.85/4	96.62/100 · 3.86/4

Responden: 371

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

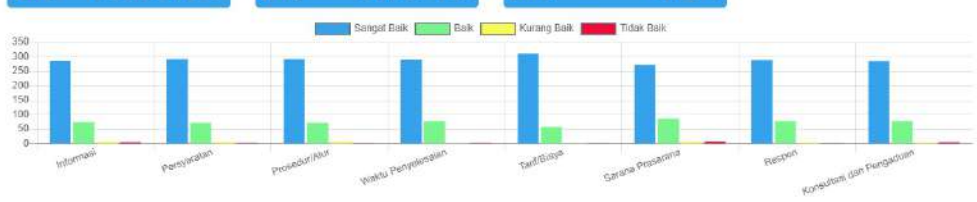
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.85/17.50 | 96.29/100 | 3.85/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.80	16.84	-0.04	16.96	-0.16	14	2.80
Persyaratan	16.86	16.85	0.01	16.91	-0.05	14	2.86
Prosedur/Alur	16.88	16.89	-0.01	16.98	-0.10	14	2.88
Waktu Penyelesaian	16.89	16.79	0.10	16.93	-0.04	14	2.89
Tarif/Biaya	17.05	16.86	0.19	16.99	0.06	14	3.05
Sarana Prasarana	16.61	16.77	-0.16	16.89	-0.28	14	2.61
Respon	16.88	16.83	0.05	17.01	-0.13	14	2.88
Konsultasi dan Pengaduan	16.81	16.85	-0.04	16.99	-0.18	14	2.81

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.91/17.50 | 96.62/100 | 3.86/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

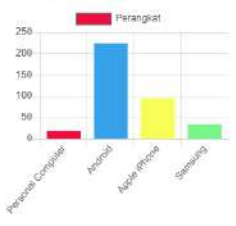


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.92	16.96	-0.04	17.06	-0.14	15.75	1.17
Kecurangan	16.86	16.96	-0.10	17.12	-0.26	15.75	1.11
Gratifikasi	16.94	16.95	-0.01	17.11	-0.17	15.75	1.19
Pungli	16.97	16.97	0	17.13	-0.16	15.75	1.22
Calo	16.86	16.97	-0.11	17.09	-0.23	15.75	1.11

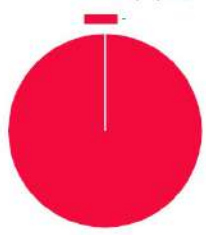
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

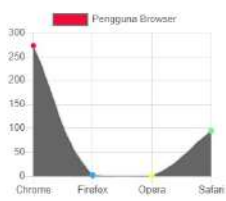
PERANGKAT



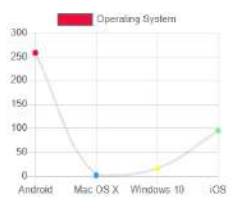
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

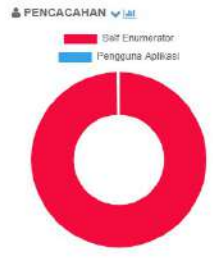


OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

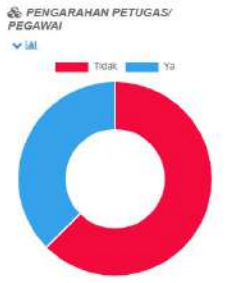
PENCACAHAN



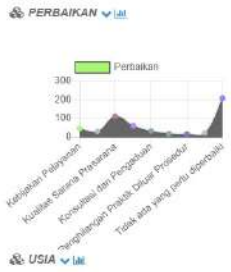
PRODUK LAYANAN



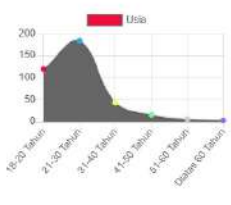
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MARET 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

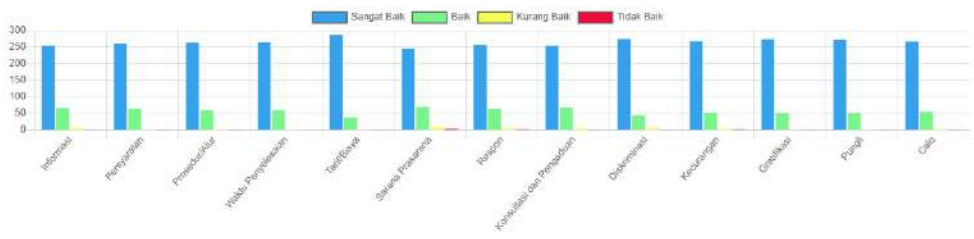
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.92/17.50
96.67/100 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.01/17.50
97.21/100 3.89/4

Responden
326

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

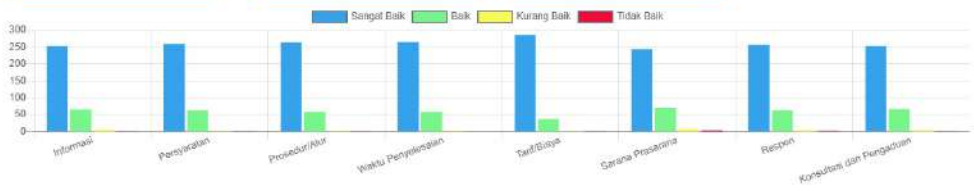
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.92/17.50 96.67/100 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.86	16.86	0	17	-0.14	14	2.86
Persyaratan	16.94	16.88	0.06	17.03	-0.09	14	2.94
Prosedur/Alur	16.97	16.86	0.11	16.97	0	14	2.97
Waktu Penyelesaian	16.99	16.81	0.18	16.97	0.02	14	2.99
Tarif/Biaya	17.16	16.82	0.34	16.99	0.17	14	3.16
Sarana Prasarana	16.72	16.78	-0.06	16.82	-0.10	14	2.72
Respon	16.85	16.84	0.01	17	-0.15	14	2.85
Konsultasi dan Pengaduan	16.86	16.82	0.04	16.82	0.04	14	2.86

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.01/17.50 97.21/100 3.89/4

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.01	16.94	0.07	17.08	-0.07	15.75	1.26
Kecurangan	16.97	16.93	0.04	16.80	0.17	15.75	1.22
Gratifikasi	17.06	16.92	0.14	17.07	-0.01	15.75	1.31
Pungli	17.05	16.92	0.13	17.07	-0.02	15.75	1.30
Calo	16.98	16.92	0.06	17.07	-0.09	15.75	1.23

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER

OPERATING SYSTEM

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PRODUK LAYANAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

PERBAIKAN

USIA

JENIS KELAMIN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

PERSENTASE *ON TIME PERFORMANCE (OTP)* TRANSPORTASI KERETA API

I. Capaian Kinerja Tahun 2026

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,73%	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	100,82%	100,82%
	2	Februari	95,73%	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	99,83%	100,35%
	3	Maret	95,73%	90.740	264.757	85.946	6.303	92.249	266.881	101,66%	100,80%
TW 2	4	April	95,73%	88.872	353.629	-	-	-	-	-	-
	5	Mei	95,73%	90.366	443.995	-	-	-	-	-	-
	6	Juni	95,73%	88.738	532.733	-	-	-	-	-	-
TW 3	7	Juli	95,73%	92.122	624.855	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,73%	91.139	715.994	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,73%	89.271	805.265	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,73%	92.119	897.384	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,73%	88.912	986.296	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,73%	91.652	1.077.948	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	97,77%	92.190	92.190	5.445	84.565	90.010	90.010	5.014	83.550	88.564	88.564	89.287	89.287	96,85%	96,85%
	Februari	97,77%	82.442	174.632	4.846	76.542	81.390	171.400	4.221	75.683	79.904	168.468	80.647	169.934	97,82%	97,31%
	Maret	97,77%	92.249	266.881	5.990	85.196	91.186	262.586	5.421	84.099	89.520	257.988	90.353	260.287	97,94%	97,53%
TW 2	April	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Mei	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Juni	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 3	Juli	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	September	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	November	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2026

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	100,80%	Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya: a. KA Tambahan pada Masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dan Lebaran 2026; b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,53%	Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh: a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (85,70%), Sumatera Bagian Utara ((93,64%), Sumatera Bagian Selatan (89,29%); b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (97,41%), Sumatera Bagian Selatan (97,22%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (92,29%), dan Sulawesi Selatan (65,00%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. c. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.	a. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 27 Januari 2026 dengan Nomor: KA.407/1/1/DJKA/2026 dan tanggal 23 Februari 2026 dengan Nomor: KA.407/1/2/DJKA/2026; b. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur ka nasional Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 11 Januari 2026; c. Sedang dilakukan evaluasi rancangan Gapeka pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;	a. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud; b. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur ka nasional Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 11 Januari 2026.

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	100,80%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Jawa, Sumatera, Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,53%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT TRIWULAN I TAHUN 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2026												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	366.669	317.405	470.889										1.154.963
KA Ekonomi Jarak Sedang	632.852	538.412	630.097										1.801.161
KA Ekonomi Jarak Dekat	466.949	392.270	465.815										1.325.034
KRD Ekonomi	131.531	106.842	138.758										379.131
KA Ekonomi Lebaran		-	-										-
TOTAL	1.597.801	1.356.929	1.705.559										4.660.289
	Triwulan I		4.660.289	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			-

2. KA Komersial

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	1.138.730	966.184	1.517.090										3.642.004
Bisnis	50.469	43.160	58.563										152.192
Ekonomi	1.836.969	1.434.352	2.277.440										5.548.761
Lokal Eksekutif	33.573	27.032	38.537										99.542
Lokal Bisnis	-	-	-										-
Lokal Ekonomi	369.192	319.412	358.348										1.046.952
Wisata Ambarawa	-	-	-										-
Priority	24.880	20.183	32.514										77.577
TOTAL	3.454.233	2.830.323	4.282.492										10.567.048
	Triwulan I		10.567.048	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			-

3. KA Perintis

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	378.663	294.518	410.860										1.084.242
Cut Meutia	-	-	-										-
Tanete Ritau - Palanro	28.314	22.923	24.935										76.172
Jumlah	407.177	317.442	435.795										1.160.414
	Triwulan I		1.160.414	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			-

Ket. KA Cut Meutia tidak dapat beroperasi dikarenakan kondisi prasarana yang rusak akibat banjir.

PT Kereta Commuter Indonesia

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2026												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	30.226.366	27.794.450	29.958.557										87.979.372
KRL Yogyakarta	756.375	662.025	802.316										2.222.716
KA Lokal Wilayah I	388.691	347.882	409.290										1.145.863
KA Lokal Wilayah II	1.756.179	1.454.571	1.839.247										5.049.997
KA Lokal Wilayah VI	94.567	79.235	106.604										280.406
KA Lokal Wilayah VII	1.418.231	1.246.219	1.403.936										4.067.386
TOTAL	32.004.229	30.892.003	30.350.589										100.745.740
	Triwulan I		100.745.740	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			-

2. KA Komersial

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara Soetta (SHIA)	221.087	190.858	228.565										640.510
Jumlah	221.087	190.858	228.565										640.510
	Triwulan I		640.510	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			-

PT Railink

1. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	162.093	138.646	168.876										469.615
KA Sriwijaya K3 Premium (MDN - BIJ - KBG)	197.329	179.927	205.015										582.271
KA Sriwijaya Woojin (MDN-BIJ)	23.515	21.033	24.262										68.810
KA Sriwijaya (MDN-ARB)	95.643	84.815	101.680										282.138
Jumlah	**478.580**	**424.421**	**499.833**										**1.402.834**
	Triwulan I		**1.402.834**	**Triwulan II**			**Triwulan III**			**Triwulan IV**			-

2. KA KOMERSIAL

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Yogyakarta Ekspres	77.236	62.771	87.646										227.653
Sriwijaya (MDN - ARB - KNM)	42.331	36.791	45.685										124.807
Jumlah	**119.567**	**99.562**	**133.331**										**352.460**
	Triwulan I		**352.460**	**Triwulan II**			**Triwulan III**			**Triwulan IV**			-

PT MRT Jakarta

MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT J	4.195.303	3.733.714	3.638.751										11.567.768
Jumlah	**4.195.303**	**3.733.714**	**3.638.751**										**11.567.768**
	Triwulan I		**11.567.768**	**Triwulan II**			**Triwulan III**			**Triwulan IV**			

PT LRT Jakarta

LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	127.470	108.845	122.208										358.523
Jumlah	**127.470**	**108.845**	**122.208**										**358.523**
	Triwulan I		**358.523**	**Triwulan II**			**Triwulan III**			**Triwulan IV**			

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi LRT Jabodebek

LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	2.714.594	2.530.000	2.510.352										7.754.946
Jumlah	**2.714.594**	**2.530.000**	**2.510.352**										**7.754.946**
	Triwulan I		**7.754.946**	**Triwulan II**			**Triwulan III**			**Triwulan IV**			

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Kereta Whoosh

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Whoosh	508.652	443.810	456.353										1.408.815
Jumlah	**508.652**	**443.810**	**456.353**										**1.408.815**
	Triwulan I		**1.408.815**	**Triwulan II**		**2.936.346**	**Triwulan III**		**4.524.091**	**Triwulan IV**		**6.202.393**	

Jumlah Penumpang terangkut Tahun Anggaran 2026

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	48.486.672	43.619.286	48.533.189									
Jumlah	**Triwulan I**		**140.619.347**	**Triwulan II**			**Triwulan III**			**Triwulan IV**		

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT TRIWULAN IV TAHUN 2026

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2026

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	154.320	136.769	171.385									
2	PUPUK	-	360	1.170									
3	SEMEN & KLINKER	89.440	78.280	53.080									
4	BATUBARA	-	-	-									
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	-	-	-									
6	PETIKEMAS	443.746	439.858	399.941									
7	KARET & KLINKER	-	-	-									
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	15.858	15.188	13.753									
9	B3 & LIMBAH B3	2.982	3.465	1.911									
10	LAINNYA	3.271	4.306	5.519									
TOTAL		709.617	678.226	646.759									
		Triwulan I		2.034.602	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2026

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	73.367	61.518	72.523									
2	PUPUK	-	-	-									
3	SEMEN & KLINKER	115.636	89.827	141.773									
4	BATUBARA	3.998.049	3.413.788	4.605.902									
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	47.689	46.362	53.285									
6	PETIKEMAS	36.280	42.700	57.220									
7	KARET	-	-	-									
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	365	346	326									
9	B3 & LIMBAH B3	-	-	-									
10	LAINNYA	950	5.233	1.700									
TOTAL		4.272.736	3.659.873	4.932.729									
		Triwulan I		12.865.338	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		

3. Jumlah Barang terangkut TA. 2026

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	227.707	198.386	243.908									
2	PUPUK	-	360	1,170									
3	SEMEN & KLINKER	205.276	166.107	194.853									
4	BATUBARA	3.996.049	3.413.788	4.605.902									
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	47.869	46.362	53.285									
6	PETIKEMAS	480.026	482.558	457.161									
7	KARET	-	-	-									
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	16.223	15.533	14,079									
9	B3 & LIMBAH B3	2.982	3.465	1,911									
10	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	4.221	9.539	7.219									
TOTAL		4.982.353	4.338.099	5.579.488									
		Triwulan I		14.899.940	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		

Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

Realisasi Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel pada Triwulan I Tahun 2026

Nama KA	Kapasitas	Realisasi Trip	Realisasi Cap
KCJB	601	57	34.257
KRL Jabodetabek	1,780	1.057	1.881.460
KRL Yogyakarta	1,424	28	39.872
LRT Sumatera Selatan	332	96	31.872
KA Bandara Kualanamu	206	24	4.944
KA Bandara Soekarno Hatta	272	69	18.768
KA Bandara YIA Komersial	200	26	5.200
KA Bandara YIA PSO	284	24	6.816
MRT Jakarta	1,534	261	400.374
LRT Jakarta	270	204	55.080
LRT Jabodebek	740	374	276.760
KA Merak	636	14	8.904
KA Bandung Raya	742	38	28.196
KA CL Garut	742	6	4.452
KA CL Walahar	742	10	7.420
KA CL Dhoho	848	8	6.784
KA CL Penataran	636	8	5.088
KA CL Jenggala	335	13	4.355
Total			**2,820,602**

Kasubdit Angkutan



Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

Kasubdit Lalu Lintas



Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 5

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : 0813 6001 3838
WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 15/K53/II/2026

Yth. : Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Dari : Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Hal : Penyampaian Kaporan Kejadian Anjlokan KA 3100 (Barapati) di KM 370+5/6

Tanggal : 23 Februari 2026

Menindaklanjuti kejadian Kecelakaan Anjlokan KA 3100 (Barapati) Di KM 370+5/6 petak jalan antara Stasiun Serdang – Stasiun Payakabung, Sumatera Selatan tanggal kejadian 7 FEBRUARI 2026. berikut kami sampaikan laporan kecelakaan dimaksud. Adapun beberapa hal yang dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kronologi Kejadian:
   a. Pada hari Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 22.40 KA 3100 (Barapati) mengalami anjlok dan terguling di Km 370+5/6. KA 3100 merupakan kereta api barang (angkutan batu bara) dengan lintas pelayanan dari Stasiun Tanjungenim Baru menuju Stasiun Kertapati;
   b. Pada pukul 22.34 WIB, KA 3100 berjalan langsung di Stasiun Serdang dengan kondisi rangkaian dinyatakan aman dan lengkap disertai Semboyan 21 akhir rangkaian pada GB 450017;
   c. Pada Pukul 22.43 WIB, Masinis KA 3100 melaporkan kepada PPKP bahwa rangkaian terasa berat sehingga dilakukan BLB (Berhenti Luar Biasa) di Km 371+570 untuk dilakukan pemeriksaan rangkaian. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa mulai dari rangkaian ke-16 KA 3100 terputus dari rangkaian di depannya dan dua gerbong anjlok (GB459941 anjlok 1 as dan GB450067 anjlok 3 as) serta 3 gerbong terguling (GB450064, GB450061, GB450047).

2. Lokasi Kejadian…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Lokasi Kejadian

Hari/Tanggal	:	Sabtu, 7 Februari 2026
KM	:	370+5/6
Petak Jalan	:	Stasiun Serdang (Sdn) – Stasiun Payakabung (Pyk)
Lintas	:	Kertapati - Lubuklinggau
Lokasi	:	Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi	:	Sumatera Selatan
Wilayah Operasional	:	Divre III Palembang
Koordinat	:	3° 12’ 32.4” S 104° 35’ 00.4” E

3. Dampak kejadian kecelakaan:
   a. Tidak terdapat korban luka dan korban jiwa;
   b. Kerusakan rel dengan tipe R.54 sepanjang 40 meter dari titik anjlok;
   c. Kerusakan bantalan beton R.54 lebar jalur 1067mm dan aksesoris sebanyak 548 batang;
   d. Kerusakan gerbong terbuka INKA GB 45 Ton sebanyak 3 gerbong;
   e. Gangguan Operasional Kereta Api:
      - KA 3102 (Barapati) di sinyal masuk Serdang pukul 01.36 s.d 01.52 WIB (16) dan berhenti di Serdang pukul 01.52 s.d 02.54 WIB (62);
      - Ka S2 (Sindangmarga) di sinyal masuk Serdang pukul 01.20 s.d 01.25 WIB (05) dan berhenti di Serdang pukul 01.25 s.d 01.34 WIB (09);
      - KA 3562 (Barapati) di sinyal masuk Serdang pukul 02.10 s.d 03.20 WIB (70) dan berhenti di Sdn pukul 03.20 s.d 03.50 WIB (62);
      - KA 3992 (Linggapati) berhenti di Serdang pukul 04.42 s.d 05.45 WIB (63);
      - KA 3108 (Barapati) di sinyal masuk Serdang pukul 05.48 s.d 06.55 WIB (67) berhenti di Serdang pukul 06.55 s.d 08.28 WIB (93);
      - KA 3100 (Barapati) di Km Muara Lawai pukul 22.40 sd 02.34 WIB (236"), di Pyk Mli 02.34 sd 11.22 WIB (528");
      - KA 3442 (Baramegang) di sinyal masuk Gelumbang pukul 06.20 s.d 07.15 WIB (55) dan berhenti di Gelumbang pukul 07.15 s.d 10.14 WIB (62), serta berhenti di Serdang pukul 10.30 s.d 14.12 WIB (222);
      - KA 3566 (Baramerapi) di Karangendah pukul 08.19 s/d 10.02 WIB (121 mnt), di Gelumbang pukul 10.22 s/d 14.15 WIB (233 mnt), serta di Serdang pukul

14.36 s/d 15.15 WIB…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14.36 s/d 15.15 WIB (39 mnt), di Payakabung pukul 15.37 s/d 15.40 WIB (3 mnt);

- KA S10 (Bukitserelo) di Serdang pukul 16.26 wib s/d 16.38 WIB, BK (12 mnt), di Payabung pukul 16.47 s/d 16.50 WIB (3 mnt).

4. Penyebab Kejadian Kecelakaan:
   a. Kejadian anjlokan KA 3100 (Barapati) disebabkan akibat patahnya rel di KM 370+570. Hal tersebut terjadi akibat kegagalan material bersifat brittle yang diawali oleh retak permukaan dan berkembang menjadi retak struktural, dengan lokasi patahan berada di atau dekat area pemopokan.
   b. Di segmen lintas yang sama ditemukan banyak bekas pemopokan yang mengindikasikan riwayat cacat rel berulang akibat Rolling Contact Fatigue (RCF) pada lintasan dengan frekuensi dan tonase tinggi. Riwayat perawatan menunjukkan bahwa penanganan dilakukan berulang pada titik yang sama melalui pemopokan dan grinding tanpa menghilangkan penyebab utama kerusakan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas material rel dan mempercepat propagasi retak.
   c. SOP pemopokan yang digunakan belum menetapkan kriteria teknis dan klasifikasi tingkat kerusakan rel secara jelas, sehingga pengambilan keputusan perawatan berpotensi bersifat subjektif. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kegagalan rel berulang dan menunjukkan bahwa penggantian rel merupakan opsi penanganan yang lebih tepat dibandingkan perbaikan sementara.

5. Rekomendasi:
   a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu menetapkan pemopokan rel sebagai penanganan sementara dan memasukkannya ke dalam Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR), karena tindakan tersebut tidak menghilangkan penyebab utama kerusakan rel. Diperlukan pengendalian lanjutan berupa pemantauan berkala, pembatasan kecepatan dan operasional, serta perencanaan penggantian rel permanen, khususnya pada lintas dengan beban dan frekuensi tinggi seperti Segmen Lahat–Kertapati melalui peningkatan spesifikasi rel dan perkerasan.

Selain itu…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, penanganan defect rel perlu dilakukan secara preventif dan komprehensif melalui rail grinding rutin, friction management, peningkatan material dan profil rel, serta monitoring kondisi rel dengan metode NDT (Non-Destructive Testing) untuk menekan potensi kerusakan berulang.

b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang perlu meningkatkan pengawasan kelaikan operasi prasarana, melakukan pemeriksaan dan inventarisasi rel patah dan rel cacat, serta melakukan pemutakhiran daerah rawan dengan memasukkan rel defect sebagai risiko keselamatan guna memperkuat pengendalian dan pencegahan kejadian serupa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis kecelakaan diatas, terlampir kami sampaikan laporan kejadian anjlokan KA 3100 (Barapati) di KM 370+5/6.

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Keselamatan Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Riovano
NIP 198509062010121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 6

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 5 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan implementasi penyelenggaraan SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1049);

11. Keputusan...

11. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:
   1) Memberikan arahan kepada Tim terkait pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam penyelenggaraan SAKIP untuk unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   2) Memeriksa usulan penetapan target dan capaian kinerja serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
   3) Menyetujui konsep dokumen penyelenggaraan SAKIP.

b. Tim Penyusun:
   1) Mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja diantaranya Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja untuk unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kinerja sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;

3) Menyusun...

3) Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja diantaranya Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4) Melakukan reviu/perubahan dokumen perencanaan kinerja secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tim Monitoring dan Evaluasi:
1) Mengkoordinasikan persiapan pengukuran kinerja secara berkala dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa serta mengevaluasi data/informasi kinerja sebagai bahan untuk pengukuran/monitoring kinerja berkala (per bulan dan triwulan) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3) Melaksanakan pengukuran/monitoring kinerja secara berkala serta pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal termasuk pengisian aplikasi kinerja (e-*performance*, e-SAKIP reviu, e-Monev Bappenas, Sistem Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan aplikasi kinerja lainnya);
4) Menginventarisasi dan memetakan kendala/permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penyelenggaraan SAKIP;
5) Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil pengukuran/monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas dokumen penyelenggaraan SAKIP periode selanjutnya;
6) Melaksanakan penilaian mandiri terhadap implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7) Melaksanakan evaluasi terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian apabila diperlukan.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR: KP-DJKA 5 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

NO	POSISI	URAIAN
I	PENANGGUNG JAWAB	
A	KETUA	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
B	WAKIL KETUA	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2. Direktur Prasarana Perkeretaapian 3. Direktur Sarana Perkeretaapian 4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian
C	SEKRETARIS	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II	TIM PENYUSUN	1. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		2. Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		3. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		4. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		5. Kepala Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		6. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		7. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		9. Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		10. Koordinator Kelompok Rencana, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		11. Koordinator Kelompok Program, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		12. Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		13. Koordinator Kelompok Sumber Daya Manusia, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		14. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Sarana Perkeretaapian

15. Koordinator...

NO	POSISI	URAIAN
		15. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
III	TIM MONITORING DAN EVALUASI	1. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		2. Kepala Subdirektorat Angkutan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		3. Kepala Subdirektorat Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Perkeretaapian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		4. Kepala Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		5. Kepala Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		6. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		7. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		9. Kepala Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		10. Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		11. Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		12. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		13. Koordinator Kelompok Data dan Informasi, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		14. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		15. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Prasarana Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Dua lembar

Hal : Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025

Jakarta, 20 Januari 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja Triwulan IV dan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 13 Januari 2026, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan *upload* dokumen terbaru ***secara berkala*** sesuai fitur pada aplikasi diantaranya pohon kinerja dan *cascading*, tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal, perencanaan kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja), laporan monitoring rencana aksi (laporan monitoring kinerja triwulan, monitoring rencana aksi), laporan kinerja tahunan, pedoman teknis, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan;
   b. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian *output*, status pelaksanaan, progres pelaksanaan, permasalahan, capaian indikator kinerja kegiatan, dan informasi/keterangan lainnya secara lengkap untuk periode Triwulan I-IV Tahun 2025 ***paling lambat tanggal 20 Januari 2026***;
   c. Pengisian aplikasi SAKTI (terkoneksi dengan aplikasi Monev Kemenkeu) meliputi partisipasi satuan kerja dan monitoring realisasi rincian *output* ***pada kesempatan pertama***;

d. Pengisian…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Pengisian aplikasi e-*Performance* secara lengkap dan tepat waktu setiap bulan ***paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya*** meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja, termasuk pengisian aplikasi e-*Performance* Tahun 2026 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan; dan

e. Pengisian fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi ***setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya*** termasuk *upload* dokumentasi pelaporan kinerja secara berkala.

2. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai *outline*, substansi, dan dokumen pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta hasil rapat pembahasan.

   Dalam penyusunan pelaporan kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:

   a. Menindaklanjuti hasil reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai Kertas Kerja Reviu masing-masing unit kerja yang dapat diakses pada tautan https://tinyurl.com/KertasKerjaReviuLKIN2025;

   b. Menyediakan dukungan sumber daya manusia/tim penyusun Laporan Kinerja dengan melibatkan seluruh komponen unit kerja dilengkapi mekanisme penyampaian data/informasi, penanggung jawab pengumpulan data/informasi, serta analisis/penjelasan yang diketahui oleh seluruh komponen unit kerja;

   c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja (Sekretariat/Direktorat/Balai), diantaranya data realisasi angkutan kereta api (penumpang, barang), realisasi perjalanan kereta api, *Track Quality Index* (TQI), fasilitas operasi handal (elektrik, mekanik), data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan), dan lainnya;

d. Mengecek…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Mengecek kembali penggunaan *manual* indikator kinerja (rumusan perhitungan, satuan, lainnya) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

e. Meningkatkan kualitas penulisan dan penyampaian substansi pada Laporan Kinerja mengacu pada kaidah bahasa yang benar sehingga memenuhi kriteria laporan yang baik; dan

f. Menyusun laporan kinerja dengan substansi yang lengkap, diantaranya:

1) Analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dengan lebih spesifik dan tidak normatif sesuai realisasi/progres kegiatan pendukung dilengkapi informasi *crosscutting* (keterhubungan sektor/unit kerja lain) dan realisasi penanganan risiko sesuai dukungan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, serta inovasi/upaya yang patut dihargai dalam pencapaian kinerja;

2) Analisa perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian Rencana Strategis serta perbandingan dengan capaian 3 tahun terakhir;

3) *Benchmarking* kinerja (minimal sejumlah 50% dari jumlah indikator kinerja) dengan perbandingan kinerja pada unit kerja tingkat di atasnya/tingkat nasional/internasional/sektor lainnya yang sejenis;

4) Rekomendasi/upaya peningkatan kinerja ke depan yang rinci dan dapat dilaksanakan dengan mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/jabatan/ pegawai;

5) Analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, sesuai formulasi yang telah disepakati termasuk interpretasi hasil analisa serta dapat juga ditambahkan analisa penggunaan sumber daya lainnya dalam pencapaian target kinerja (sarana dan prasarana);

6) Penyampaian dukungan agenda prioritas nasional seperti pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, program prioritas nasional, proyek strategis nasional, kegiatan padat karya, dan dukungan lainnya sesuai bidang tugas;

7) Informasi...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7) Informasi perubahan/peningkatan budaya kinerja dengan format semula-menjadi serta dilengkapi keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja;
8) Data dukung capaian kinerja yang valid dan dilengkapi persetujuan pejabat yang menjadi penanggung jawab; dan
9) Dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja termasuk dilengkapi dengan penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja secara berjenjang.

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 25 Januari 2026***, sedangkan Laporan Kinerja Tahun 2025 dilaporkan ***paling lambat tanggal 25 Januari 2026 untuk unit kerja Eselon III/Balai dan tanggal 30 Januari 2026 untuk unit kerja Eselon II***. Pelaporan kinerja tersebut agar juga diproses lanjut/unggah pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

Selain itu…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada tanggal 14 Januari 2026, masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu menyusun Perjanjian Kinerja Berjenjang sampai pada tingkat staf/pelaksana yang selaras dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat
Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

Outline Penyusunan Laporan Kinerja

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
1. 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. 3 Struktur Organisasi
1. 4 Sumber Daya Manusia
1. 5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Berisi penjelasan organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2. 1 Uraian Singkat Rencana Strategis
(Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Kinerja)
2. 2 Perjanjian Kinerja (termasuk penjelasan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja serta Analisis SMART Indikator Kinerja)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3. 1 Tahapan Pengukuran Kinerja
3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja
A. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target revisi PK dilengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan termasuk data *crosscutting,* perhitungan matematika realisasi kinerja, realisasi penanganan risiko periode triwulan, uraian inovasi dalam pencapaian kinerja
B. Upaya peningkatan kinerja/alternatif solusi yang perlu dilakukan dilengkapi uraian pengaruh terhadap penyesuaian Strategi/Kebijakan, Aktivitas/Anggaran, Organisasi/Jabatan/Pegawai
C. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
D. Perbandingan realisasi kinerja terhadap kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
E. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun bersangkutan dalam periode Renstra
F. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada);
3. 3 Dukungan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2025-2029
3. 4 Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran dan SDM)
3. 5 Capaian Keberhasilan Lainnya
3. 6 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja oganisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (unit kerja, per indikator kinerja)

Evaluasi dan analisis setiap sasaran strategis dan kondisi terakhir yang dicapai yang juga mencakup efisiensi sumber daya

BAB IV PENUTUP
4. 1 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Sebelumnya (termasuk upaya peningkatan budaya kinerja semula-menjadi)
4. 1 Kesimpulan (diantaranya simpulan pencapaian kinerja dan prestasi unit kerja)
4. 3 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah di masa akan datang untuk meningkatkan kinerja organisasi

LAMPIRAN
Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan
Lampiran II. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)
Lampiran III. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi
Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid
Lampiran VI. Dokumentasi Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja, termasuk nota dinas penyampaian data kinerja dari sub unit kerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020, KM 74/2024, sumber lainnya (diolah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/6/K1/DJKA/2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026

Jakarta, 10 Maret 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 6 Maret 2026, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (bagi unit kerja yang belum menyampaikan) mencakup rencana aksi, uraian progres tindak lanjut serta dilengkapi data dukung dengan format tindak lanjut menggunakan kertas kerja pemantauan sebagaimana pada tautan https://bit.ly/TLAKIPDJKA2025;
2. Melakukan *input* laporan yang telah disampaikan terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 melalui fitur Dukungan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Membentuk tim penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2026 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Mengusulkan pegawai yang kompeten untuk perwakilan masing-masing unit kerja sebagai tim evaluator tingkat Eselon I yang akan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (usulan perwakilan masing-masing unit kerja agar disampaikan melalui tautan https://bit.ly/TimEvaluasiSAKIPDJKA2025);

5. Melaksanakan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja serta pemenuhan data dukung yang diperlukan sesuai ketentuan melalui fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode Maret – April 2026, termasuk melakukan pengisian kuesioner untuk pimpinan (tautan https://bit.ly/KuesionerSAKIPPimpinan2026) dan pegawai unit kerja (tautan https://bit.ly/KuesionerSAKIPPegawai2026) sebagai salah satu pemenuhan data dukung. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan nilai akuntabilitas kinerja disampaikan sebagai berikut:

   a. Perencanaan Kinerja:

   1) Kualitas perencanaan harus berorientasi hasil dengan indikator kinerja memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Accountable, Relevant dan Time-bound* (SMART) dan menantang (minimal sama atau lebih tinggi dari capaian periode sebelumnya);
   2) Melakukan *upload* dokumen perencanaan kinerja tepat waktu pada aplikasi e-SAKIP Reviu serta publikasi pada media komunikasi/*website*;
   3) Perjanjian kinerja dilengkapi rencana aksi mendukung pencapaian kinerja yang merupakan penjabaran lebih rinci terkait cara mencapai target pada perjanjian kinerja; dan
   4) Ketersediaan pohon kinerja/*cascading* untuk menjabarkan kinerja strategis sampai operasional serta keterkaitan kinerja (*crosscutting*).

   b. Pengukuran Kinerja:

   1) Keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran kinerja (*decision maker*) agar terdokumentasi dengan baik;
   2) Pengukuran kinerja dilaksanakan periodik termasuk mengukur realisasi rencana aksi melalui dialog kinerja disertai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang memadai dan data dukung yang relevan;
   3) Mendorong inovasi atau upaya yang patut dihargai yang terdokumentasi dengan baik dan konsisten dimanfaatkan untuk mendukung capaian kinerja unit kerja serta merupakan hal baru/berbeda dari unit kerja lain dan diharapkan dapat menjadi percontohan nasional;

4) Hasil…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) Hasil pemanfaatan pengukuran kinerja selanjutnya menjadi dasar untuk pelaksanaan *reward* dan *punishment*.

c. Pelaporan Kinerja:

1) Pelaporan kinerja selaras dengan perjanjian kinerja dan memuat capaian kinerja periodik/realisasi rencana aksi, analisis capaian kinerja, analisis faktor penghambat/pendukung pencapaian kinerja, analisis perbandingan data capaian kinerja, tindak lanjut rekomendasi;

2) Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu, melakukan *benchmarking* kinerja, serta penyesuaian memperhatikan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

1) Pelaksanaan evaluasi internal wajib mengacu pada pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja serta dukungan kompetensi evaluator yang memadai dalam melakukan evaluasi internal;

2) Menjadikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar perbaikan implementasi SAKIP unit kerja.

6. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2026 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melampirkan rincian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana format yang diatur pada KM 74 Tahun 2024 ***paling lambat Minggu IV April 2026***.

Adapun jadwal/*timeline* pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 disampaikan sebagai berikut:

1. Koordinasi persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja: ***Maret 2026***;
2. Pembentukan tim penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja: ***Maret 2026***;
3. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja (termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya): ***Maret s.d. April 2026***;

4. Penyampaian…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Penyampaian hasil penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja kepada unit Eselon I cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian: ***April 2026***;
5. Evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja: ***Mei s.d. Juni 2026***;
6. Penyampaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan: ***Juni 2026***;
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja Tingkat Kementerian Perhubungan (penilaian unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja *sample*) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan: ***Juli – Agustus 2026***;
8. Evaluasi akuntabilitas kinerja lanjutan terhadap unit kerja *non sample*: ***September – Oktober 2026***;
9. Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk unit kerja *non sample*: ***November 2026***.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/2/6/K1/DJKA/2026
Tanggal : 17 Maret 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813 6001 3838
WEBSITE: http://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 41 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka dibutuhkan pembentukan Tim untuk melakukan evaluasi internal sebagaimana dimaksud;
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 5 Tahun 2025 tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. penanggung jawab...

a. *penanggung jawab:*

memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku.

b. ketua tim:

1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
2) melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Penanggung Jawab.

c. anggota tim evaluasi:

1) melakukan persiapan rencana kerja termasuk pengumpulan kebutuhan data/informasi serta penyamaan persepsi di internal Tim untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap isian Lembar Kerja Evaluasi serta dokumen pendukung sesuai variabel penilaian mencakup:
   a) komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   b) sub komponen, terdiri dari penilaian Keberadaan Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen; dan
   c) kriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
3) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja yang menjadi objek penilaian dan evaluasi; dan
4) melakukan kompilasi hasil evaluasi dan menyusun laporan termasuk rekomendasi untuk langkah lanjut peningkatan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan yang berlaku guna selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDE PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP. 198801182025211023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN
NOMOR: KP-DJKA TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INTERNAL TINGKAT DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

NO.	POSISI	URAIAN
I.	PENANGGUNG JAWAB	Direktur Jenderal Perkeretaapian
II.	KETUA	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III	ANGGOTA	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		3. Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		4. Koordinator Kelompok Organisasi, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		5. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		6. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		7. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		9. Viki Okissa Saifudin, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		10. Merinda Pangestikasari, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		11. Andre Budi Dharmawan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		12. Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		13. Tri Tunggal Dewi Aryanti, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		14. Angela Merici Yoshinta Rinawati, Direktorat Sarana Perkeretaapian

15. Amar...

NO.	POSISI	URAIAN
		15. Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		16. Pangad Dhearma Hasiholan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
		17. Ulyana Ramaini, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
		18. Annam Adam Prakoso, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
		19. Malik Fajar Adiyatma Syamsudin, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
		20. Harmita Morgan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
		21. Alfajri Prima Novel, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang
		22. Supandiansyah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
		23. Khoirun Nisa, Balai Pengujian Perkeretaapian
		24. Yayang Nirmala Putri, Balai Perawatan Perkeretaapian
		25. Herry Kurniawan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
		26. Siti Hasmida, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
IV	SEKRETARIAT	1. Darari Rahma Lalita, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2. Breanesa Resta Agnes Avila, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		3. M. Juliarachman, Bagian Perencanaan dan Keuangan

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

WhatsApp | Surat Keluar T-07092 Undangan | MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2026/kl/nkaunitgabungan/MDIy

MONEV

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Role Pilih TA (2026) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.01	Sekretariat Jenderal	1,47	91,15	46,31
2	022.02	Inspektorat Jenderal	0,00	75,00	37,50
3	022.03	Ditjen Perhubungan Darat	1,63	81,75	41,69
4	022.04	Ditjen Perhubungan Laut	0,83	82,01	41,42
5	022.05	Ditjen Perhubungan Udara	2,60	82,32	42,46
6	022.08	Ditjen Perkeretaapian	0,27	73,36	36,82
7	022.09	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	0,00	72,07	36,04
8	022.11	Badan Kebijakan Transportasi	0,94	90,08	45,51
9	022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3,07	80,26	41,67

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-04-22 10:30:39

30°C Cerah

Search

10:30 22/04/2026

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08.445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0,00	93,73	46,87
2	022.08.467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	0,00	64,29	32,15
3	022.08.467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	0,00	77,09	38,55
4	022.08.467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0,00	73,54	36,77
5	022.08.467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	0,00	76,80	38,40
6	022.08.467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	0,00	55,21	27,61
7	022.08.467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	57,11	28,56
8	022.08.467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	0,00	59,56	29,78
9	022.08.467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	0,00	65,20	32,60
10	022.08.467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	0,00	67,33	33,67
11	022.08.467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	0,00	100,00	50,00
12	022.08.467462	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0,00	95,51	47,76
13	022.08.467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	0,00	88,49	44,25
14	022.08.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	0,00	53,71	26,86
15	022.08.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,00	90,82	45,41
16	022.08.467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	0,00	54,30	27,15

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	4600 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	15.145.227.000	4.464.284.000	0	0	0	0	0	0	19.609.511.000
		REALISASI	0	2.593.363.550	2.250.993.184	0	0	0	0	0	0	4.844.356.734
			0%	17.12%	50.42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24.70%
		SISA	0	12.551.863.450	2.213.290.816	0	0	0	0	0	0	14.765.154.266
2	4601 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	206.957.690.000	290.765.703.000	15.216.292.000	0	0	0	0	0	0	512.939.685.000
		REALISASI	109.800.932.728	58.648.105.445	2.979.062.994	0	0	0	0	0	0	171.428.101.167
			53.05%	20.17%	19.58%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33.42%
		SISA	97.156.757.272	232.117.597.555	12.237.229.006	0	0	0	0	0	0	341.511.583.833
3	4602 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	15.352.576.000	1.800.620.000	0	0	0	0	0	0	17.153.196.000
		REALISASI	0	157.975.180	0	0	0	0	0	0	0	157.975.180
			0%	1.03%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.92%
		SISA	0	15.194.600.820	1.800.620.000	0	0	0	0	0	0	16.995.220.820
4	4603 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	8.893.157.000	0	0	0	0	0	0	0	8.893.157.000
		REALISASI	0	2.505.731.637	0	0	0	0	0	0	0	2.505.731.637
			0%	28.18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28.18%
		SISA	0	6.387.425.363	0	0	0	0	0	0	0	6.387.425.363
5	4604 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	708.198.000	0	0	0	0	0	0	0	708.198.000
		REALISASI	0	68.611.100	0	0	0	0	0	0	0	68.611.100
			0%	9.69%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9.69%
		SISA	0	639.586.900	0	0	0	0	0	0	0	639.586.900
6	4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	318.849.850.000	287.252.073.000	0	0	0	0	0	0	606.101.923.000
		REALISASI	0	38.655.529.690	774.914.513	0	0	0	0	0	0	39.430.444.203
			0%	12.12%	0.27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6.51%
		SISA	0	280.194.320.310	286.477.158.487	0	0	0	0	0	0	566.671.478.797
7	4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	2.067.639.444.000	194.646.386.000	0	0	0	0	0	0	2.262.285.830.000
		REALISASI	0	10.141.404.982	538.150.200	0	0	0	0	0	0	10.679.555.182
			0%	0.49%	0.28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.47%
		SISA	0	2.057.498.039.018	194.108.235.800	0	0	0	0	0	0	2.251.606.274.818
8	4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	306.996.996.000	1.042.671.160.000	0	0	0	0	0	0	1.349.668.156.000
		REALISASI	0	67.679.617.088	170.329.499	0	0	0	0	0	0	67.849.946.587
			0%	22.05%	0.02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5.03%
		SISA	0	239.317.378.912	1.042.500.830.501	0	0	0	0	0	0	1.281.818.209.413
9	4644 | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	37.950.953.000	1.445.239.000	0	0	0	0	0	0	39.396.192.000
		REALISASI	0	1.420.045.434	130.913.400	0	0	0	0	0	0	1.550.958.834
			0%	3.74%	9.06%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3.94%
		SISA	0	36.530.907.566	1.314.325.600	0	0	0	0	0	0	37.845.233.166

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
GRAND TOTAL		PAGU	206.957.690.000	3.062.302.104.000	1.547.496.054.000	0	0	0	0	0	0	4.816.755.848.000
		REALISASI	109.800.932.728	181.870.384.106	6.844.363.790	0	0	0	0	0	0	298.515.680.624
		%	53.05%	5.94%	0.44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6.20%
		SISA	97.156.757.272	2.880.431.719.894	1.540.651.690.210	0	0	0	0	0	0	4.518.240.167.376

tanggal cetak : 24-04-26 10:49:18

Laporan Target dan Realisasi PNBP Per Jenis Akun (Data s.d. H-1)

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1: Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : -
PERIODE PELAPORAN : Januari - Maret
TAHUN PELAPORAN : 2026

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	2.400.000.000	210.750.000	210.750.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	24.298.927.000	0	3.226.865.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.623.750.000	0	0
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	500.000.000	0	167.121.621
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0	0	42.816.534
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000	0	56.700.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.882
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.947.019.602
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.523.000.000	74.123.000	74.123.000
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	659.216.376
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.621.185	10.621.957
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	665.104.259	665.104.259
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.000.000.000	1.306.738.000	1.306.738.000
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	41.155.248.684
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	937.576.200
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.322.600	2.848.479
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	3.305.953.629
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	70.000.000	70.000.000
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	176.976.000	176.976.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	618.019.747
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.814.560.095
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	196
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.503.965.084
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.976.346.040	1.976.346.040
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	211.737.920	211.737.920
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.158.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	79.921.000	2.036.280.888
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	388

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	18.419.402.772
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	83.300.000.000	0	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.900.000.000	0	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	771.395.000	66.000.000	66.000.000
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6.538.237	6.538.237
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	250.000.000	250.000.000
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	61.151.790.000	0	11.576.487.986
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.354.750.000	0	165.360.000
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	600.000.000	0	225.238.987
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	0	340.000	340.000
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.087.623.104.000	88.319.893.840	88.319.893.840
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.230.500.000	105.000.000	105.000.000
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	25.432.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.349.000	0	0
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000	332.250.000	332.250.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	61.450.000	9.600.000	9.600.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	2.203.256.000	411.000.000	411.000.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	63.407.640
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000	286.954.132	286.954.132
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	148.884
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	512.223	512.223
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50.000.000	0	0
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	782
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	47.015.240.188
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	320.585.910	320.585.910
Total		**1.338.269.645.000**	**94.893.314.346**	**241.775.985.162**

REALISASI PENDAPATAN PER ESELON 1

NO	Uraian		pendapatan					detail	
	BA	BAES1	ESTIMASI	REALISASI	PENGEMBALIAN	NETTO	PERSENTASE	UNIT	AKUN
1	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	3.519.834.000,00	1.192.247.664,00	0,00	1.192.247.664,00	33,87%	unit	akun
2	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	0,00	10.400.970,00	0,00	10.400.970,00	0,00%	unit	akun
3	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.309.642.722.000,00	323.309.515.424,00	0,00	323.309.515.424,00	24,69%	unit	akun
4	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	5.632.393.145.000,00	1.768.247.866.545,00	26.172.975.901,00	1.742.074.890.644,00	30,93%	unit	akun
5	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	2.090.049.630.000,00	839.048.076.430,00	762.870,00	839.047.313.560,00	40,14%	unit	akun
6	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	1.338.269.645.000,00	241.775.985.162,00	0,00	241.775.985.162,00	18,07%	unit	akun
7	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0,00	49.764,00	0,00	49.764,00	0,00%	unit	akun
8	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	1.545.065.320.000,00	381.665.656.205,00	14.348.000,00	381.651.308.205,00	24,70%	unit	akun
GRAND TOTAL			11.918.940.296.000,00	3.555.249.798.164,00	26.188.086.771,00	3.529.061.711.393,00	29,61%		

tanggal cetak : 16-04-26 14:01:28

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER

NO	Uraian			pendapatan					detail
	BA	BAES1	SATKER	ESTIMASI	REALISASI	PENGEMBALIAN	NETTO	PERSENTASE	AKUN
1	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	2.400.000.000,00	210.750.000,00	0,00	210.750.000,00	8,78%	akun
2	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	33.548.051.000,00	5.440.524.639,00	0,00	5.440.524.639,00	16,22%	akun
3	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	1.523.000.000,00	1.409.065.592,00	0,00	1.409.065.592,00	92,52%	akun
4	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	8.000.000.000,00	42.461.986.684,00	0,00	42.461.986.684,00	530,77%	akun
5	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	0,00	4.493.354.308,00	0,00	4.493.354.308,00	0,00%	akun
6	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	0,00	13.432.579.842,00	0,00	13.432.579.842,00	0,00%	akun
7	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	4.692.049.240,00	0,00	4.692.049.240,00	0,00%	akun
8	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	3.182.000.000,00	2.036.280.888,00	0,00	2.036.280.888,00	63,99%	akun
9	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	0,00	18.419.403.160,00	0,00	18.419.403.160,00	0,00%	akun
10	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	112.971.395.000,00	322.538.237,00	0,00	322.538.237,00	0,29%	akun
11	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	64.106.540.000,00	11.967.426.973,00	0,00	11.967.426.973,00	18,67%	akun
12	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	1.088.853.604.000,00	88.450.325.840,00	0,00	88.450.325.840,00	8,12%	akun
13	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	1.430.349.000,00	332.250.000,00	0,00	332.250.000,00	23,23%	akun
14	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	2.264.706.000,00	484.007.640,00	0,00	484.007.640,00	21,37%	akun
15	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	19.940.000.000,00	287.615.239,00	0,00	287.615.239,00	1,44%	akun
16	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	50.000.000,00	47.335.826.880,00	0,00	47.335.826.880,00	94.671,65%	akun
GRAND TOTAL				1.338.269.645.000,00	241.775.985.162,00	0,00	241.775.985.162,00	18,07%	

tanggal cetak : 22-04-26 12:08:56

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. MARET**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	2.400.000.000,00	210.750.000,00	210.750.000,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	24.298.927.000,00	3.226.865.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.623.750.000,00	0,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	500.000.000,00	167.121.621,00	0,00
	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0,00	42.816.534,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000,00	56.700.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.882,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.947.019.602,00	0,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.523.000.000,00	74.123.000,00	74.123.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	659.216.376,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.621.957,00	10.621.185,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	665.104.259,00	665.104.259,00
Total		1.338.269.645.000,00	241.775.985.162,00	94.893.314.346,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.000.000.000,00	1.306.738.000,00	1.306.738.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	41.155.248.684,00	0,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	937.576.200,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.848.479,00	2.322.600,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.305.953.629,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	176.976.000,00	176.976.000,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	618.019.747,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.814.560.095,00	0,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	196,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.503.965.084,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.976.346.040,00	1.976.346.040,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	211.737.920,00	211.737.920,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.158.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.036.280.888,00	79.921.000,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	388,00	0,00
Total		1.338.269.645.000,00	241.775.985.162,00	94.893.314.346,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	18.419.402.772,00	0,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	83.300.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.900.000.000,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	771.395.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.538.237,00	6.538.237,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	61.151.790.000,00	11.576.487.986,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.354.750.000,00	165.360.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	600.000.000,00	225.238.987,00	0,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	0,00	340.000,00	340.000,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.087.623.104.000,00	88.319.893.840,00	88.319.893.840,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.230.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	25.432.000,00	0,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.349.000,00	0,00	0,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000,00	332.250.000,00	332.250.000,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan	61.450.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Total		1.338.269.645.000,00	241.775.985.162,00	94.893.314.346,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	Kalibrasi di Bidang Perhubungan			
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	2.203.256.000,00	411.000.000,00	411.000.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	63.407.640,00	0,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000,00	286.954.132,00	286.954.132,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	148.884,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	512.223,00	512.223,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	782,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	47.015.240.188,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	320.585.910,00	320.585.910,00
Total		1.338.269.645.000,00	241.775.985.162,00	94.893.314.346,00

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN I TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RERATA NILAI KUALITAS ASN
86,72
dari 100

RERATA KUALIFIKASI	RERATA KOMPETENSI	RERATA KINERJA	RERATA DISIPLIN
23,38	**32,41**	**25,96**	**4,97**
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5

Jakarta, April 2026

Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN I TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. NILAI KUALIFIKASI

JENIS JABATAN	PENDIDIKAN	BOBOT NILAI			JUMLAH
		10	20	25	
Pimpinan Tinggi Madya	**Jumlah --->>>**			**1**	**1**
	S-2			1	1
Pimpinan Tinggi Pratama	**Jumlah --->>>**			**3**	**3**
	S-3			1	1
	S-2			2	2
Administrator	**Jumlah --->>>**		**3**	**28**	**31**
	S-3			1	1
	S-2			27	27
	S-1		3		3
Pengawas	**Jumlah --->>>**			**37**	**37**
	S-3			1	1
	S-2			32	32
	S-1			3	3
	D-IV			1	1
Fungsional Keahlian (S-1 dan D-IV)	**Jumlah --->>>**		**357**	**20**	**377**
	S-2			20	20
	S-1		349		349
	D-IV		8		8
Fungsional Keahlian (S-2 dan S-3)	**Jumlah --->>>**	**55**	**108**		**163**
	S-2		108		108
	S-1	51			51
	D-IV	4			4
Fungsional Keterampilan (D-III)	**Jumlah --->>>**		**1**		**1**
	D-III		1		1
Fungsional Keterampilan (SLTA)	**Jumlah --->>>**			**63**	**63**
	S-1			5	5
	D-III			58	58
Pelaksana	**Jumlah --->>>**	**5**	**174**	**1678**	**1857**
	S-2			81	81
	S-1			496	496
	D-IV			156	156
	D-III			945	945
	D-I		10		10
	SLTA		143		143
	SLTA Kejuruan		22		22
	SLTP	4			4
Grand Total		**59**	**644**	**1830**	**2533**
(Bobot Nilai x Grand Total)/total pegawai = Rata-rata --->>>		**590**	**12880**	**45750**	**23,38**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN I TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II. NILAI KOMPETENSI

KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN	JUMLAH
ASN memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	2052
ASN belum Sertifikat Kompetensi/Keahlian	481
Jumlah Seluruh ASN	2533
Nilai Kompetensi	**32,41**

III. NILAI KINERJA

KATEGORI NILAI SKP	BOBOT NILAI	JUMLAH
Sangat Baik	30	583
Baik	25	1909
Cukup	15	33
Kurang	5	7
Buruk	1	1
Nilai Kinerja		**25,96**

IV. NILAI DISIPLIN

JENIS DISIPLIN	JUMLAH
ASN sedang menjalani Hukuman Disiplin	13
DISIPLIN RINGAN TEGURAN LISAN	1
DISIPLIN RINGAN TEGURAN TERTULIS	8
DISIPLIN SEDANG PENURUNAN KELAS JABATAN	1
DISIPLIN SEDANG PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA	2
DISIPLIN SEDANG PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA	1
ASN Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin	2520
Jumlah Seluruh ASN	2533
Nilai DIsiplin	**4,97**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN
KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 DAN
DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

No. ST : ST-K1 DJKA 281 Tahun 2026
Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA SERTA KONSEP LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
APRIL 2026

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA SERTA KONSEP LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Pelaksanaan kegiaatan Pembahasan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja dan Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dilakukan untuk memonitoring pengisian dan penggunaan aplikasi pelaporan dan persiapan penyusunan konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 masing-masing Unit Kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya kegiatan dalam rangka monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan yang ingin dicapai dari rapat ini diantaranya:

a. Membahas pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja seperti e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance, dan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian;
b. Mengevaluasi pemanfaatan e-Monev Bappenas Tahun 2025 dan melakukan persiapan serta pengisian untuk periode Triwulan I Tahun 2026;
c. Membahas capaian kinerja masing-masing unit kerja (Eselon I dan II);
d. Menyusun dan membahas konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 baik untuk tingkat unit kerja;
e. Membahas hasil evaluasi terhadap pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025.

3. RUANG LINGKUP

a. Pemantauan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja;
b. Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025;
c. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026;
d. Pembahasan Indikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

4. DASAR

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor ST-K1 DJKA 281 Tahun 2026 tanggal 7 April 2026 perihal Pembahasan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja dan Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Luminor Hotel Padjajaran Bogor
2. Tanggal : Rabu-Jumat, 8-10 April 2026
3. Peserta Rapat :
    a. Perwakilan Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Deputi Bidang Pengendalian dan Manajemen Risiko Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (narasumber)
    b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
    c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    f. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    m. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
    n. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
    o. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
    p. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
    q. Perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
    r. Perwakilan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Persiapan dan Registrasi Peserta;
2. Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2025 dan Persiapan Tahun 2026;
3. Pengisian e-Monev Bappenas Periode Triwulan I Tahun 2026;
4. Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Triwulan I Tahun 2026 masing-masing unit kerja;
5. Pembahasan progres pengisian aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Pembahasan hasil evaluasi terhadap pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 termasuk unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2026 Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Pemantauan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja posisi per 6 April 2026 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Data Kinerja									
		Renstra 2025-2029	RKT 2026	PK 2026 Awal	LKIP 2025	DIPA 2026	Pohon Kinerja & Cascading	TL LHE	Monitoring Renaksi Januari	Monitoring Renaksi Februari	Monitoring Renaksi Maret
1	Setditjen Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2	Direktorat LLAKA	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DJKA	-	✔	-	-
3	Direktorat Prasarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DJKA	-	-	-	-
4	Direktorat Sarana	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	-	-
5	Direktorat Keselamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
6	BTP Jakarta	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DJKA	✔	-	-	-
7	BTP Bandung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
8	BTP Semarang	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DJKA	✔	✔	✔	✔
9	BTP Surabaya	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
10	BTP Medan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
11	BTP Padang	✔	-	-	✔	✔	-	-	-	-	-
12	BTP Palembang	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DJKA	✔	-	-	✔
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔	-	-
15	BPKAR Sumatera Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DJKA	✔	✔	✔	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	-
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

b. Pemantauan Pengisian Aplikasi E-Performance Tahun 2026 posisi per 8 April sebagai berikut:



c. Pemantauan Pengisian Monitoring Rencana Aksi pada Aplikasi SILAKI posisi 8 April sebagai berikut:



d. Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

1) Saat ini telah dilakukan rapat koordinasi persiapan penilaian mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 termasuk pembentukan Tim Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Unit Kerja.
2) Posisi saat ini dalam tahap Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Unit Kerja



3) Adapun untuk link Kuesioner Implementasi SAKIP Tahun 2026 dapat diakses melalui tautan berikut ini:
   a) Link Kuesioner Pimpinan https://forms.gle/yB3h29gBKTqK2Qn2A
   b) Link Kuesioner Pegawai https://forms.gle/aBYqcnRU2b64AJM49
   c) Link Response Kuesioner Pimpinan dan Pegawai https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f0dOSwYjL1OyfXJ7VbAnWx6zL2gkd9Ivi1ROZh5LWcU/edit?usp=sharing
4) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Waktu Penyampaian Progres TL	Penyampaian Surat TL Unit Kerja				Pembahasan 5-6 Maret 2026				Hasil Evaluasi/Pemantauan			
			Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL	Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL	Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL
1	Setditjen Perkeretaapian	5 Februari 2026	6	4	2	-	6	4	2	-	6	4	2	-
2	Direktorat LLAKA	Belum menyampaikan					8	7	1	-	8	7	1	-
3	Direktorat Prasarana	16 Oktober 2025	4	4	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-
4	Direktorat Sarana	11 Maret 2026	10	10	-	-	10	9	1	-	10	8	2	-
5	Direktorat Keselamatan	9 Januari 2026	4	3	1	-	4	3	1	-	4	3	1	-
6	BTP Jakarta	6 Februari 2026	11	9	2	-	11	10	1	-	11	10	1	
7	BTP Bandung	29 Januari 2026	10	10	-	-	10	9	1	-	10	9	1	-
8	BTP Semarang	15 Oktober 2025	8	3	5	-	8	6	2	-	4	3	1	-
9	BTP Surabaya	15 Oktober 2025	4	4	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-

No	Unit Kerja	Waktu Penyampaian Progres TL	Penyampaian Surat TL Unit Kerja				Pembahasan 5-6 Maret 2026				Hasil Evaluasi/Pemantauan			
			Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL	Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL	Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL
10	BTP Medan	Belum menyampaikan					10	7	3	-	10	6	4	
11	BTP Padang	10 Maret 2026	11	10	1	-	11	10	1	-	11	8	3	
12	BTP Palembang	Belum menyampaikan					10	10	-	-	10	8	2	
13	Balai Pengujian	15 Oktober 2026	4	-	4	-	4	3	1	-	4	3	1	
14	Balai Perawatan	Belum menyampaikan					10	6	4	-	10	6	4	
15	BPKAR Sumsel	5 Februari 2026	11	9	2	-	11	9	2	-	11	9	2	-
16	BPKA Sulsel	Belum menyampaikan					10	6	4	-	10	6	4	

5) Pemanfaatan Fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:
   a) Pada Direktorat Sarana data dukung pada aplikasi SILAKI belum lengkap (baru diisi data dukung untuk rekomendasi 1);
   b) Pada BTP Kelas I Bandung belum dilengkapi data dukung;
   c) Pada BTP Kelas I Semarang data dukung pada aplikasi SILAKI belum lengkap (baru diisi data dukung untuk rekomendasi 1);
   d) Pada BTP Kelas II Padang belum melampirkan data dukung Rekomendasi 9 pada aplikasi SILAKI

e. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2025 (%)
1	Balai Pengujian Perkeretaapian	104,19
2	Direktorat Sarana Perkeretaapian	102,99
3	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	102,53
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	102,09
5	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,08
6	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	101,27

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2025 (%)
7	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	101,14
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	100,43
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100,40
10	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	100,38
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	100,19
12	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	98,47
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	97,94
14	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	95,01
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-*
16	Balai Perawatan Perkeretaapian	-*

1) Berdasarkan hasil evaluasi, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:
   a) Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan);
   b) Nilai kinerja anggaran (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan);
   c) Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian);
   d) Persentase penurunan kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan);
   e) Tingkat penerapan manajemen risiko (Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan).
2) Beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja:
   a) Koordinasi penanganan dampak bencana terhadap kerusakan prasarana perkeretaapian termasuk percepatan pemenuhan readiness criteria penanganan dampak bencana melalui penyusunan kajian/desain teknis untuk wilayah/segmen yang terdampak bencana;
   b) Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 serta penerapan standar biaya keluaran guna meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran;
   c) Percepatan penyelesaian status penggunaan barang milik negara guna

persetujuan sewa pemanfaatan asset, serta memastikan penetapan target PNBP yang realistis pada periode selanjutnya;

d) Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta evaluasi perlintasan sebidang berkala dengan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan khususnya pada jalur yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi

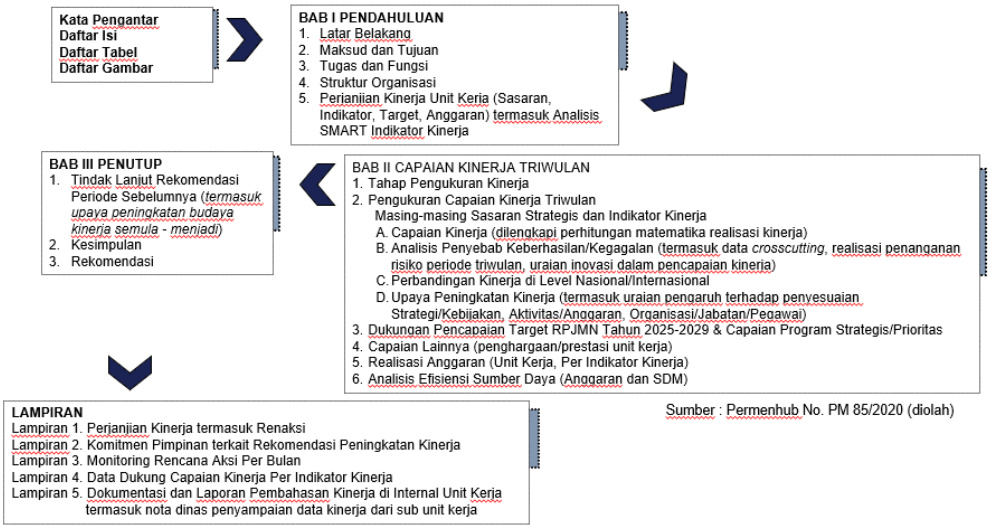
e) Melaksanakan in house training dan/atau sharing knowledge kepada pegawai secara rutin di masing-masing unit kerja guna meningkatkan pemahaman dan budaya risiko dalam penerapan manajemen risiko mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 dan petunjuk Teknik penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

f. Evaluasi Kepatuhan Laporan Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,50	98,00	98,25
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	100,00	88,00	94,00
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	95,63	92,00	93,81
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	92,63	90,00	91,31
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	81,75	100,00	90,88
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	89,00	91,33	90,17
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	93,00	84,00	88,50
8	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	98,50	75,33	86,92
9	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	74,75	94,00	84,38
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	82,13	82,00	82,06
11	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	74,00	87,33	80,67
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,38	50,67	65,52
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	69,63	57,33	63,48
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	-*	66,00	33,00
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-*	38,67	19,33

1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan substansi Laporan Kinerja serta evaluasi kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian).
2) Evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja tersebut dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Standard Operating Procedure (SOP) pemberian reward and punishment dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
   a) Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
   b) Penyajian Informasi Kinerja (30%);
   c) Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

g. *Outline* Laporan Monitoring Kinerja Triwulan



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

Pada Bab II terdapat tambahan perubahan *format outline* yaitu terkait realisasi penanganan risiko periode triwulan, uraian inovasi dan dukungan pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 dan Capaian Strategis/Prioritas.

h. Indikasi Capaian RPJMN Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (menggunakan data sementara) sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2026	Capaian Triwulan I 2026	% Capaian	Kegiatan Pendukung	Kendala/ Tantangan	Dukungan yang diharapkan dari Kemenkoinfra
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	538	92,086*		Penyelenggaraan angkutan KA PSO dan perintis	Tidak ada kendala	
Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	850* (460)**			Penyelenggaraan angkutan KA PSO dan perintis, peningkatan fasilitas stasiun KA (Tanah Abang 100%, Rangkasbitung 100%)	Tidak ada kendala	
Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,95	0,174*				
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.928	6.915,12	99,81	Capaian didukung dengan penyelesaian jalur ganda KA Kiaracondong – Cicalengka yang telah beroperasi pada awal Tahun 2025. Selain itu, kegiatan pembangunan jalur KA baru/jalur ganda lainnya yang masih berprogres diantaranya di lokasi Medan - Binjai (83,78%) dan Solo – Kalioso (100%).	• Medan – Binjai: Reviu dokumen teknis akibat perubahan/reviu desain di lapangan, kendala pada proses pengadaan lahan di stasiun helvetia dan stasiun sunggal • Solo – Kalioso: Diperlukan pekerjaan lanjutan untuk mendukung pengoperasian jalur secara ultimate, namun kegiatan di tahun 2026 tidak dapat dilanjutkan dikarenakan persetujuan kontrak tahun jamak di tolak	
Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	**%**	66	65,21*		• Beberapa kegiatan di wilayah Sumbagsel dengan pembiayaan badan usaha (proses perizinan)	Tidak ada kegiatan peningkatan fasilitas operasi/sistem persinyalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian di Tahun 2026	
Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	**%**	95	94,64*		• Kegiatan peningkatan (Jember – Kalisat 100%) dan perawatan prasarana perkeretaapian di seluruh wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi (proses kontrak)	Keterlambatan lelang/kontrak perawatan prasarana milik negara (IM)	
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Juta Penumpang/Hari	2,825	2,840*		Peningkatan kapasitas/keandalan fasilitas operasi diantaranya peningkatan	Tidak ada kendala	

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2026	Capaian Triwulan I 2026	% Capaian	Kegiatan Pendukung	Kendala/ Tantangan	Dukungan yang diharapkan dari Kemenkoinfra
Berbasis Rel					sistem elektrifikasi di wilayah Jabodetabek (100%)		

**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN*

***) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)*

2. Penyampaian Materi dari Narasumber Bappenas terkait Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi E-Monev Bappenas

a. Aplikasi e-Monev Bappenas saat ini masih dalam tahap registrasi akun Eselon I dan Eselon II. Pada 13 April 2026 akan dilakukan peluncuran aplikasi e-Monev Generasi 4 sekaligus Sosialisasi Teknis e-Monev 2026.

b. Pembahasan materi kali ini lebih berfokus pada evaluasi pengisian Tahun 2025 dan persiapan pengisian Tahun 2026.

c. Penyampaian Materi oleh Narasumber:

1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui e-Monev didasarkan pada beberapa regulasi utama:

a) UU SPPN No. 25/2004 mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional untuk menilai pencapaian sasaran kinerja (*inputs, outputs, results, benefits, impacts*);

b) PP No. 39/2006 mengatur tata cara pengendalian untuk mengetahui hasil, kemajuan, dan kendala pelaksanaan pembangunan;

c) Peraturan Pemerintah No. 17/2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;

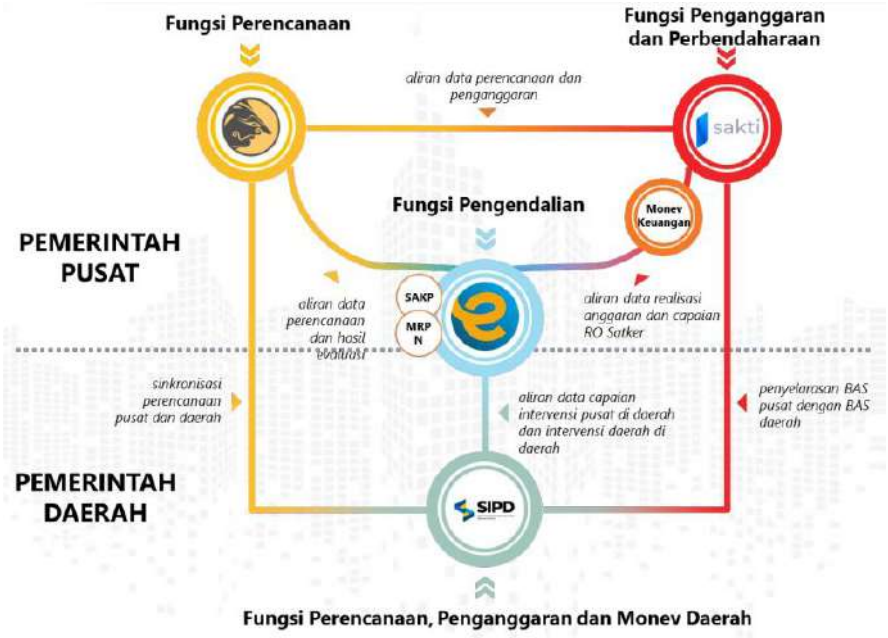
d) Permen PPN/Bappenas No. 1/2023 Tentang tata cara pemantauan yang dilaporkan oleh UKE/Satker kepada Menteri PPN sebagai bahan pengendalian.

e) Keputusan Menteri PAN-RB No. 356/2024 Tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana ditetapkanlah e-Monev sebagai Aplikasi Umum bidang perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan KRISNA.

2) Sistem informasi e-Monev dalam mendukung pengendalian dan evaluasi

a) Aplikasi E-Monev Bappenas menyinkronkan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di tingkat pusat, fungsi perencanaan bersinergi dengan fungsi penganggaran dan perbendaharaan melalui aliran data yang menghubungkan sistem perencanaan (KRISNA) dan SAKTI, di mana SAKTI menyuplai data realisasi anggaran serta capaian Rincian Output (RO) Satker kepada aplikasi e-Monev sebagai instrumen utama fungsi pengendalian.

Aplikasi e-Monev berperan sebagai pusat integrasi data yang mengelola aliran data perencanaan, hasil evaluasi, serta instrumen manajerial seperti SAKP dan MRPN, yang kemudian disinkronkan dengan Pemerintah Daerah melalui sistem SIPD untuk memantau capaian intervensi pusat di daerah maupun intervensi daerah itu sendiri. Melalui mekanisme sinkronisasi perencanaan pusat-daerah serta penyelarasan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh aliran data ini memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan terpantau secara transparan dan akuntabel di seluruh jenjang pemerintahan



b) Aplikasi e-Monev Bappenas mendukung fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional melalui lima pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar-pilar tersebut mencakup Renja KL yang berfokus pada pemantauan level komponen, Rincian Output (RO), dan indikator. Secara keseluruhan, sistem ini berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan melalui pengumpulan dan analisis data

kinerja yang sistematis dan terpusat.



c) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi e-Monev sebagai Aplikasi Umum SPBE Pengendalian Pembangunan dengan pengintegrasian dengan aplikasi lainnya:

- Interkoneksi dengan sistem K/L lain, diantaranya Kemenkes, KemenPANRB, Kemendag, Kemenpar, Kemendikdasmen, Kemenkomdigi;
- Akses khusus Dashboard untuk para Kementerian Koordinator;
- Dukungan interkoneksi data dalam pengembangan Dashboard Menteri PPN (bersama Pusdatin);
- Pengembangan interkoneksi dengan SIPD Kemendagri;
- Pengembangan sistem pelaporan Program Strategis Nasional sesuai SEB Menteri PPN dan Mendagri tentang Binwas Kepala Daerah.

3) Sumber data e-Monev sebagai berikut:



a) Pada gambar, Ikon Hijau berarti *entry data* dilakukan hanya ketika target

tercapai (tidak rutin setiap bulan), biasanya diterapkan pada indikator kinerja di level pusat;

b) P ada gambar, Ikon Biru berarti Entri data dilakukan setiap bulan untuk memantau perkembangan komponen dan rincian output di tingkat satker;
c) Struktur dan alur penginputan data ke dalam aplikasi e-Monev yang bersumber dari dua dokumen perencanaan utama, yaitu Renja K/L dan RKA K/L;
d) Pelaporan mengikuti struktur organisasi dan program yang dimulai dari tingkat Kementerian/Lembaga, Program, Kegiatan, hingga level teknis seperti Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen;
e) Sumber data pada Renja K/L berasal dari Unit Kerja Pusat yang mencakup penetapan Indikator Kinerja dan proses *Tagging*;
f) Sumber data pada RKA K/L berasal dari Satuan Kerja (Satker) di level Provinsi/Kabupaten/Kota (Kantor Daerah, Dekonsentrasi, atau Tugas Pembantuan) yang memuat informasi anggaran alokasi dan realisasi;
g) Di bawah level komponen, terdapat rincian lebih dalam yang mencakup Sub-Komponen, Akun, Detail, hingga Rincian.
h) Tujuan akhir dari integrasi data ini adalah untuk mendukung fungsi Monev Pengendalian pembangunan nasional secara akurat dan tepat waktu

4) Tujuan akhir dari integrasi data ini adalah untuk mendukung fungsi Monev Pengendalian pembangunan nasional secara akurat dan tepat waktu.
5) Kelompok Akun Pengguna e-Monev
   a) Akun K3 (Biro Perencanaan K/L) memegang level tertinggi yang bertugas menginput Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), melakukan verifikasi data setiap triwulan, serta memantau kinerja kementerian/lembaga secara menyeluruh;
   b) Akun K4 (Unit Kerja Eselon I) bertanggung jawab menginput Indikator Kinerja Program (jika ditugaskan sebagai penanggung jawab) dan memantau progres seluruh unit Eselon II serta satuan kerja di bawahnya secara berjenjang;
   c) Akun K5 (Unit Kerja Eselon II) bertugas menginput data komponen, Rincian Output (RO) Renja, dan Indikator Kinerja Kegiatan, sekaligus melakukan pemantauan terhadap satuan kerja yang berada di bawah koordinasinya.

d) Akun K8 (Satuan Kerja) berfokus pada level teknis yaitu melakukan entri data progres di tingkat komponen;
e) Aturan Penguncian Data yaitu jika Biro Perencanaan (K3) sudah melakukan verifikasi, data pelaporan pada triwulan tersebut otomatis terkunci dan tidak dapat diubah kembali.

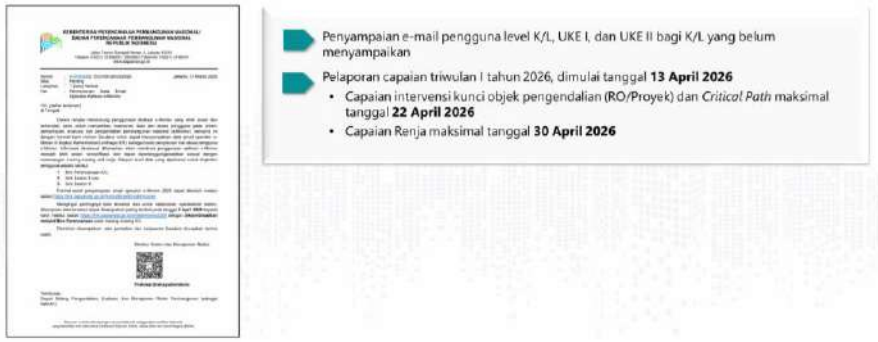
6) Perkembangan pemanfaatan e-Monev dalam pengendalian dan Evaluasi Pembangunan diantaranya:
a) Menjadi sumber data utama dalam menyusun perencanaan program kegiatan di masa mendatang;
b) Kedisiplinan pengisian data di e-Monev menjadi salah satu indikator dalam penilaian RB instansi;
c) Data capaian dari e-Monev digunakan secara langsung untuk menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan Laporan Kinerja Pemerintah Nasional (LKjPN);
d) Digunakan sebagai basis data pengembangan *dashboard* khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas oleh Pusdatin;
e) Menjadi acuan data dalam pelaksanaan forum pengendalian untuk merumuskan tindakan korektif pelaksanaan rencana;
f) Menjadi sumber data untuk memantau pencapaian Rencana Aksi Nasional (Renas PB);
g) Menyediakan akses khusus bagi Kementerian Koordinator untuk memantau hasil pelaporan seluruh kementerian di bawah koordinasinya;
h) Memfasilitasi seluruh Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga dalam melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan kegiatannya masing-masingelaporan seluruh kementerian di bawah koordinasinya.

d. Penguatan Pengendalian Tahun 2026
1) Memperluad kolaborasi dalam pengendalian dengan Bappenas, KSP, Kemenko, BPKP, Kemendagri, K/L terkait, Pemda, Setdukab, LKPP dan Stranas PK;
2) Memperkuat ekosistem substansi pengendalian diantaranya:
a) Sinergi pengendalian dengan pelaksanaan Stranas PK pada MBG dan KDKMP;
b) Percpatan dalam proses pengadaan bersama LKPP;
c) Mengawal regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan program presiden;

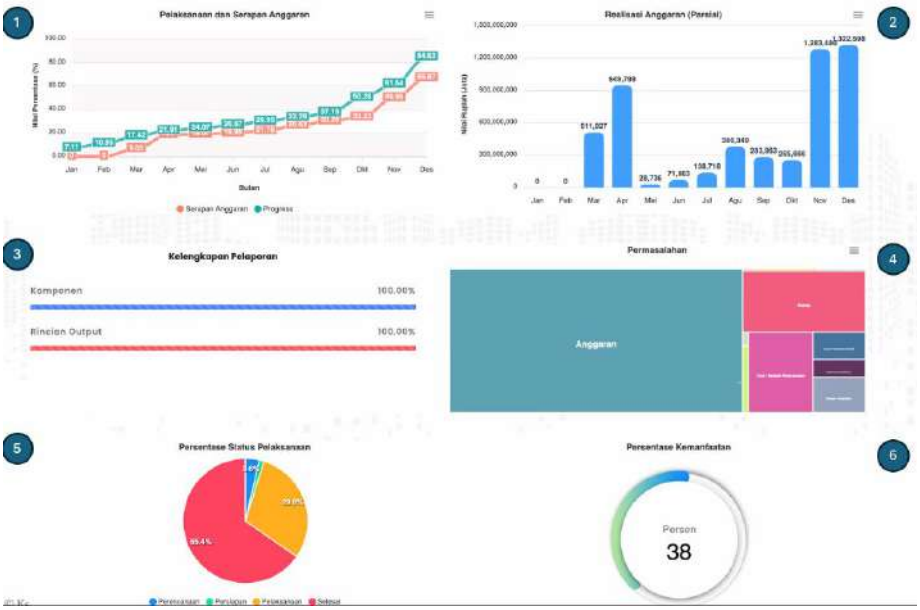
d) Mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) di daerah bersama Kemendagri;
e) Sinergi pengawalan arahan presiden dalam berbagai sidang kabinet bersama Setdukab;
f) Pelibatan pemerintah daerah dalam beberapa isu tertentu.

3) Beberapa perubahan terkait Sistem Pengendalian e-Monev Generasi 4 diantaranya:
a) Penggunaan environment sistem yang terkonsolidasi (tidak perlu pindah antar subsistem);
b) Hasil pelaporan e-Monev menjadi bagian dalam penyusunan Renja K/L dalam KRISNA;
c) Kemudahan melihat pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan percepatan melalui dashboard;
d) Pengembangan interkoneksi dengan SIPD Kemendagri;
e) Pelaporan Program Strategis Nasional sesuai SEB Menteri PPN dan Mendagri tentang Binwas Kepala Daerah (SEB Nomor 3/2025) oleh seluruh Provinsi/Kab/Kota;
f) Penggunaan Artifical Intelligent dalam memperkuat proses analisis data untuk Rincian Output;
g) Early warning system untuk mempermudah proses pengendalian dan evaluasi;
h) Keamanan yang lebih baik melalui penggunaan teknologi baru.

e. Saat ini sedang dalam tahapan permohonan data email operator aplikasi e-Monev. Untukk Pelaporan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dapat dimulai dari tanggal 13 April 2026. Untuk pengisian capaian intervensi kunci objek pengendalian (RO/Proyek) dan *Critical Path* tanggal 22 April 2026 dan pelaporan Capaian Renja maksimal 30 April 2026.



f. Rekap Hasil Pelaporan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025



1) Line persentase progress pelaksanaan dihasilkan dari nilai kumulatif rata-rata (*average*) keseluruhan komponen yang telah dilaporkan. Disandingkan dengan line serapan anggaran kumulatif bulanan.
2) Rekapitulasi serapan anggaran parsial bulanan.
3) Kelengkapan pelaporan di level komponen dan RO Renja.
4) Sebaran kategori masalah berdasarkan komponen yang telah dilaporkan. Semakin besar ukurannya, kategori masalah tersebut semakin mendominasi.
5) Persentase sebaran status pelaksanaan berdasarkan komponen yang telah dilaporkan.
6) Persentase status kemanfaatan mewakili keseluruhan komponen yang telah di klaim sudah dimanfaatkan pelaksanaannya.

g. Hasil Evaluasi Pemanfaatan aplikasi e-Monev Bappenas pada Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dimana periode rekap data ini periode Tahun 2025 sampai dengan 21 Januari 2026.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	dsatker	nmsatker	nmdekon	nmkab	progress %	jml_komp	jml_komp_lapor	alo_total	real_total	%
2	45572	Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Per	Kantor Pusat	Kota Jakarta F	100,0	5	5	10.835.086.000	9.651.527.679	89,1
3	67005	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Kantor Pusat	Kota Palemba	91,9	15	15	240.220.122.000	220.970.806.879	92,0
4	67006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Kantor Pusat	Kota Makassa	90,7	15	15	627.100.057.000	491.354.218.517	78,4
5	67309	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Kantor Pusat	Dki Jakarta	20,4	29	29	1.343.274.848.000	395.677.315.656	29,5
6	67321	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Kantor Pusat	Jawa Tengah	92,9	26	26	1.134.046.192.000	293.251.936.212	25,9
7	67337	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Kantor Pusat	Jawa Timur	91,2	18	18	300.467.236.000	278.708.089.873	92,8
8	67345	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Kantor Pusat	Sumatera Uta	87,5	21	21	637.440.215.000	276.724.749.211	43,4
9	67352	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Ii Padang	Kantor Pusat	Sumatera Bar	95,1	19	19	47.772.011.000	36.589.506.304	76,6
10	67364	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Ii Palembang	Kantor Pusat	Sumatera Sela	83,1	18	18	126.672.019.000	111.809.253.456	88,3
11	67373	Balai Perawatan Perkeretaapian	Kantor Pusat	Kab. Grobogai	99,5	12	12	43.842.963.000	42.270.744.556	96,4
12	67385	Balai Pengujian Perkeretaapian	Kantor Pusat	Kota Bekasi	86,9	19	19	74.015.781.000	35.604.876.000	48,1
13	67462	Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kere	Kantor Pusat	Kota Jakarta F	93,2	14	14	259.555.027.000	255.020.817.613	98,3
14	67478	Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	Kantor Pusat	Kota Jakarta F	100,0	6	6	24.387.687.000	22.475.838.658	92,2
15	67484	Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Pe	Kantor Pusat	Kota Jakarta F	81,4	14	14	2.552.579.217.000	2.394.278.302.419	93,8
16	67504	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kantor Pusat	Kota Jakarta F	100,0	19	19	132.604.220.000	128.449.498.284	96,9
17	67515	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Kantor Pusat	Jawa Barat	92,9	20	20	262.497.964.000	234.265.054.808	89,2
18		TOTAL			87,9	270	270	7.817.310.645.000	5.227.102.536.125	66,9
19										
20										

Capaian RO Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025

1	kddit	nmdit	Kode RO	Nomenklatur RO	Vol RO	Vol RO S	RL RO	RL RO Sa	satuan	pemanfa	progres	alo_total	real_total	%
136	022.08.04	Sekretariat I	4600.EBA.001	Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal.	-	2	-	2	Layanan	Belum Dima	99,7	691.781.000	689.382.088	99,7
137	022.08.04	Sekretariat I	4600.EBA.960	Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	6	7	6	7	Layanan	Belum Dima	99,9	2.608.003.000	2.599.140.531	99,7
138	022.08.04	Sekretariat I	4600.EBC.001	Layanan Sdm	2	1.284	2	1.284	Orang	Belum Dima	100,0	737.450.000	734.804.409	99,6
139	022.08.04	Sekretariat I	4601.ABF.001	Kebijakan Perencanaan	4	3	4	3	Rekomenda	Belum Dima	95,0	1.580.483.000	1.562.490.510	98,9
140	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBA.957	Layanan Hukum	3	2	1	2	Layanan	Belum Dima	100,0	494.400.000	490.366.268	99,2
141	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBA.960	Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	12	46	1	47	Layanan	Belum Dima	93,1	13.777.791.000	12.874.252.126	93,4
142	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	18	1	18	Layanan	Belum Dima	93,0	387.313.722.000	338.436.955.926	87,4
143	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3	24	1	24	Unit	Belum Dima	33,3	2.686.834.000	2.547.500.000	94,8
144	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	2	-	1	Unit	Belum Dima	50,0	1.923.805.000	1.921.173.937	99,9
145	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBD.952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	9	17	1	17	Dokumen	Belum Dima	91,7	1.782.465.000	1.743.077.453	97,8
146	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	12	32	-	32	Dokumen	Belum Dima	88,2	31.350.402.000	22.897.453.120	73,0
147	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10	22	-	22	Dokumen	Belum Dima	90,7	8.698.762.000	8.565.757.049	98,5
148	022.08.04	Sekretariat I	4601.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	10	11	10	11	Dokumen	Belum Dima	88,5	942.441.000	891.854.549	94,6
149	022.08.04	Sekretariat I	4602.BMA.001	Pengelolaan Data Dan Informasi	2	1	-	1	layanan	Belum Dima	-	60.000	-	-
150	022.08.04	Sekretariat I	4602.CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komun	5	40	5	40	Unit	Belum Dima	100,0	210.000.000	202.145.499	96,3
151	022.08.07	Ditjen Perke	4602.CDS.001	Dm Prasarana Bidang Teknologi Informasi Dan Kc	1	1	1	1	Titik/Lokasi	Sudah Dima	100,0	3.494.320.000	3.493.790.000	100,0
152	022.08.04	Sekretariat I	4602.EBA.963	Layanan Data Dan Informasi	2	1	-	1	Layanan	Belum Dima	100,0	187.293.000	181.262.895	96,8
153	022.08.07	Ditjen Perke	4602.FAB.001	Sistem Informasi	1	1	1	1	Layanan	Sudah Dima	100,0	2.637.000.000	2.447.938.500	92,8
154	022.08.04	Sekretariat I	4603.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi	2	4	-	4	Layanan	Belum Dima	100,0	1.762.986.000	1.757.227.218	99,7
155	022.08.04	Sekretariat I	4604.EBA.957	Layanan Hukum	1	1	1	1	Layanan	Belum Dima	100,0	650.650.000	650.064.196	99,9
276	022.08.02	Direktorat L	4641.ABF.001	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas Dan	13	3	-	3	Rekomenda	Belum Dima	100,0	1.048.004.000	1.040.964.325	99,3
277	022.08.07	Ditjen Perke	4641.ABF.008	Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek	-	1	-	1	Kajian	Belum Dima	39,0	250.000.000	97.957.500	39,2
278	022.08.02	Direktorat L	4641.BAH.001	Perintis Perkeretaapian	-	1	-	1	layanan	Belum Dima	100,0	229.639.776.000	228.538.609.365	99,5
279	022.08.02	Direktorat L	4641.BAH.002	Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api	-	1	-	1	layanan	Belum Dima	100,0	15.053.457.000	13.605.382.127	90,4
280	022.08.03	Direktorat P	4641.CBA.002	Jembatan Kereta Api	1	1	-	1	km	Belum Dima	100,0	14.641.526.000	14.636.436.005	100,0
281	022.08.03	Direktorat P	4641.CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	7	7	-	7	km	Belum Dima	60,2	15.435.354.000	5.462.594.147	35,4
282	022.08.02	Direktorat L	4641.QAH.001	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lint	1	3	1	3	layanan	Belum Dima	100,0	18.687.760.000	12.296.445.352	65,8
283	022.08.02	Direktorat L	4641.QAH.004	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lint	1	3	1	3	layanan	Belum Dima	100,0	12.168.740.000	11.764.775.000	96,7

h. Daftar evaluasi:
   1) Permasalahan utama pengisian e-monev bappenas ini t
   2) Permasalahan *tagging* untuk RO umum diperlukan cascading
   3) T

i. Sesi Diskusi:

j. Ketika Renja dan Sakti sudah tersinkronisasi,

k. Ketidaksesuaian antara volume RO dan RO Satker

l. Penempatan Eselon II yang tidak pas solusinya

m. Arahan Narasumber:
   1) Untuk panduan teknis
   2) Diharapkan unit kerja satker untuk menyiapkan email untuk pendaftaran akun satker.
   3)

3. Sesi Diskusi masing-masing Unit Kerja

a. Penyampaian Dit. LLAKA

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW I	KINERJA TW I	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
SK 1 Meningkatnya Kebijakan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	%	46,00	26,90	30,70	34,60	46,00	26,90	100,00	58,48
	IKK.2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	40,00	20,00	28,00	32,00	40,00	20,00	100,00	50,00
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	100,25	104,72	104,72
	IKK.4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	55,00	42,86	47,62	52,38	55,00	42,86	100,00	77,92
	IKK.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	91,10	96,40	96,40
	IKK.6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	38,95	24,17	28,96	34,02	38,95	*24,66	*102,04	63,27
	IKK.7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	38,68	23,83	28,63	33,59	38,68	*23,26	*98,02	60,26
	IKK.8	Ketersediaan Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta pnp/hari	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	*2.823	99,40	99,40
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.9	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	84,00	-	-	-	84,00	-	-	--
	IKK.10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	Nilai	13,70	-	-	-	13,70		-	-
	IKK.11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	Nilai	84,00	45,00	47,00	48,00	84,00	-	-	-
	IKK.12	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	%	100,00	63,26	63,26	81,63	100,00	8,11	12,84	8,11
	IKK.13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	Nilai	73,60	-	-	-	73,60	-	-	-

1) Pada IKK 1 sudah bertambah 1 kegiatan, terkait kebijakan efisiensi disarankan untuk Jasa Konsultasi di Dit. LLAKA agar dilakukan pendalaman lanjut guna mengetahui apa saja yang berdampak pada perubahan target;
2) Pada IKK 2 terkait Kerja Sama diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi dengan data yang terdapat dari Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
3) Pada IKK 3 diharapkan agar dapat diperbaharui inovasi yang telah dilakukan;
4) Pada IKK 4 terdapat 2 tambahan NSPK sehingga target akhir Tahun terdapat 23 NSPK;
5) Pada IKK 5 disarankan untuk survey survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan dari PPTB, apabila tidak ada pertanyaan yang terakomodir bisa diusulkan kepada pihak PPTB. Diharapkan penilaian yang dilakukan bisa optimal;
6) Pada IKK 6 masih menggunakan data sementara, data finalnya kemungkinan akan tersedia pada 16/17 April 2026;
7) Pada IKK 7 terdapat kendala data angkutan barang yang disampaikan Divre atau Daop ke Balai mengalami keterlambatan;
8) Pada IKK 8 data yang digunakan masih data bergerak;
9) Pada IKK 9 progress pemenuhan capaian kinerja triwulan harap dilaporkan;
10) Pada IKK 10 progress pemenuhan capaian kinerja triwulan harap dilaporkan;
11) Pada IKK 11 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output,

jika terdapat kendala perlu dilaporkan;

12) Pada IKK 12 terkait selisih realisasi dan target kinerja TW 1 yang tinggi, jika di mungkinkan ada revisi PK dan capaian bisa diusulkan;

13) Pada IKK 13 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.

14) Capaian RPJMN Dit. LLAKA sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target					Realisasi Triwulan I Tahun 2026
		2025	2026	2027	2028	2029	
PP1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	*138,33
PP2. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat	Juta penumpang	850 **KA : 460**	870 **KA : 476**	895 **KA : 493**	925 **KA : 511**	950 **KA : 529**	*79,83
PP.3 Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	*0,17
KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Juta pnp/hari	2.825	2.828	2.836	2.836	2.836	*2.823

a) PP1. Jumlah Penumpang, realisasi jumlah penumpang kereta api antarkota dan perkotaan sampai bulan Maret 2025 (data sementara) sebesar 138.331,788 orang;

b) PP2. Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan yang meliputi Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang dan Banjarmasin. Realisasi angkutan perkotaan berbasis rel yang terdiri dari 6 Kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Palembang, Semarang sampai bulan Februari 2026 sebesar 79.836.427 orang;

c) PP.3 Jumlah Perjalanan KA, realisasi jumlah perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang meliputi PT KAI, PT KCI, PT Railink, PT CRI, PT KCIC, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta sampai bulan Februari 2026 sebesar 174.812 KA.

d) KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan, merupakan jumlah kapasitas layanan harian dari angkutan umum massal perkotaan yang dituliskan dalam satuan penumpang/hari. Dihitung dari variable kapasitas sarana yang beroperasi dikalikan dengan total perjalanan harian kereta api. Realisasi sampai bulan Februari 2026 sebesar 2.823.077 pnp/hari.

b. Penyampaian Dit. Prasarana Perkeretaapian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASELINE	TARGET PK 2026	TARGET RENAKSI TW I	REALISASI	%CAPAIAN THD TW	%CAPAIAN THD TAHUNAN
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	24,14	24,14	100,00	100,00
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.915,12	6915,12	6915,12	6.915,12	100,00	100,00
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	33,90	35,59	33,9	33,9	100,00	95,25
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94,64	95,00	94,64	94,07	99,40	99,02
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	65,21	65,21	100,00	99,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,90	3,90	3,9	3,89	99,74	99,74
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,85	62,79	55,39	51,56	93,09	82,11
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	81,82	79,55	84,09	105,71	102,77
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	20,00	20,00	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,66	85,75	45	-	-	-
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100	20,62	21,37	103,64	21,37
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,02	85,02	-	-	-	-

1) Pada IKK 1 sampai saat ini belum ada penambahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas;
2) Pada IKK 2 pembangunan jalur KA pada lintas Kalioso – Kadipiro terdapat masalah lahan di Gudang Gilingan dan tidak disetujuinya MYC oleh Kemenkeu, BTP Semarang telah mengusulkan anggaran di pagu kebutuhan tahun 2027. Pada pembangunan JLKA Medan – Binjai diperkirakan target selesai Tahun 2028 dikarenakan harus melewati beberapa pengujian;
3) Pada IKK 3 terdapat penambahan dokumen tahun ini apakah akan nanti akan ada dampak dari penajaman atau efisiensi;
4) Pada IKK 4 terdapat kendala pengukuran TQI di Aceh dikarenakan dampak bencana alam dan kerusakan alat dan pada jalur Wonogiri – Solo Balapan sudah dilakukan pengukuran TQI namun hasil pengukuran tidak bisa digunakan dikarenakan jalur tergenang air;
5) Pada IKK 5 Pada Tahun 2026 ditargetkan terdapat realisasi peningkatan sinyal mekanik ke sinyal elektrik di Lahat dan Marapi;
6) Pada IKK 6 disarankan saat survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan PPTB, jika ada pertanyaan yang tidak terakomodir di aplikasi bisa diusulkan ke PPTB;
7) Pada IKK 7 terdapat kendala masih berproses di Sesditjen KA dan Ditpras KA, akan di koordinasikan ke Bagian Hukum;
8) Pada IKK 8 sudah melebihi target;
9) Pada IKK 9 diharapkan melakukan pemetaan sebelum melakukan penilaian;
10) Pada IKK 10 progress pemenuhan capaian kinerja triwulan harap dilaporkan;
11) Pada IKK 11 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika

terdapat kendala perlu dilaporkan;

12) Pada IKK 12 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;

13) Pada IKK 13 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.

c. Penyampaian Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	77,780	77,780	81,25	104,46
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,250	95,250	99,5	104,46
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,850	3,85	8,65	224,67
		IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,250	37,03	37,03	100
		IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	71,014	24,46	21,01	85,89
		IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94,600	94,60	97,79	103,37
		IKK 7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100	0	100	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,800	0	0	0
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	13,750	0	0	0
		IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,750	8,40	0	0
		IKK 11	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	25,00	22,15	88,6
		IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,000	0	0	0

1) Diharapkan mengecek hasil evaluasi LAKIP, menindaklanjuti rekomendasi ITJEN, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada eselon 1 pada kegiatan yang masuk RPJMN;
2) Diharapkan mengkaji capaian yang bersifat anomali yaitu rendah atau lebih besar dari 110% terkait perencanaanya justifikasi di detailkan dalam laporan; (terdapat 3 IKK dengan capaian yang anomali);
3) Pada IKK 2 disarankan saat survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan PPTB, jika ada pertanyaan yang tidak terakomodir di aplikasi bisa diusulkan ke PPTB;
4) Pada IKK 3 Diharapkan mengkaji capaian yang bersifat anomali yaitu rendah atau lebih besar dari 110% terkait perencanaanya justifikasi di detailkan dalam laporan;
5) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
6) Pada IKK 10 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika

terdapat kendala perlu dilaporkan;

7) Pada IKK 12 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.

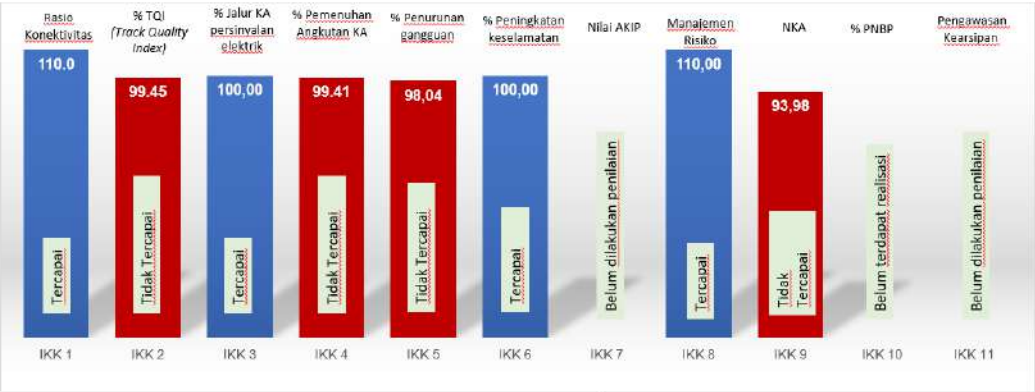
d. Penyampaian Dit. Keselamatan Perkeretaapian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. I	Realisasi Tw. I	Capaian Tw. I
1	2	3	4	5	6	6 : 5
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap keselamatan perkeretaapian	**IKK.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	**96,75**	96,75	97,42	100,69
	IKK.2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti	Nilai	**40,00**	20,00	20,00	100,00
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.3** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**33,33**	22,22	22,22	100,00
	IKK.4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang ditindaklanjuti	%	**36,84**	24,21	24,21	100,00
	IKK.5 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**30,00**	5,00	5,00	100,00
	IKK.6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**39,16**	24,00	25,34	105,58
	IKK.7 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**94,44**	90,74	90,74	100,00
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	-	-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**14,00**	-	16,00	114,00
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,70**	47,50	-	-
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	10,40	8,78	84,42
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**67,00**	-	-	-

1) Pada IKK 1 disarankan saat survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan PPTB, jika ada pertanyaan yang tidak terakomodir di aplikasi bisa diusulkan ke PPTB;
2) Pada IKK 2 sudah mencapai target;
3) Pada IKK 3 sudah mencapai target;
4) Pada IKK 4 terdapat penambahan target sebanyak 7 rekomendasi pengingkatan keselamatan di perlintasan sebidang dari yang sebelumnya sebanyak 16 menjadi 23.
5) Pada IKK 5 sudah mencapai target;
6) Pada IKK 6 disarankan mendetailkan realisasi sertifikat regulator dan operator di dalam laporan;
7) Pada IKK 7 disarankan untuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk pengaturan jadwal pengesahan RPM. Jika telah melaksanakan harmonisasi dengan Menhun maka itu sudah terhitung capaian;
8) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
9) Pada IKK 9 disarankan memasukan realisasinya pada triwulan 4 agar seragam dengan unit lain.

10) Pada IKK 10 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;
11) Pada IKK 11 diharapkan saat penentuan target harus mempertimbangkan berapa potensi di DIPA;
12) Pada IKK 12 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi;

e. Penyampaian BTP Kelas I Surabaya



Rata – rata capaian (%)	
Triwulan 1 Tahun 2026	101,36

1) Diharapkan untuk melakukan monitoring e-sakip reviu, mengecek pengisian renaksi, menyesuaikan format rekomendasi dan evaluasi, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, serta pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait kegiatan RPJMN;
2) Pada IKK 1 diharapkan mengecek perhitungan rasio konektivitas menggunakan perbandingan frekuensi KA per triwulan;
3) Pada IKK 2 belum mencapai mencapai target;
4) Pada IKK 3 sudah mencapai target;
5) Pada IKK 4 diharapkan berkoordinasi dengan Ditlalin terkait data angkutan;
6) Pada IKK 5 diharapkan mengecek perhitungan menggunakan baseline tahun 2020 – 2024;
7) Pada IKK 6 sudah mencapai target;
8) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
9) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan penanganan apa yang sudah dilaksanakan;

10) Pada IKK 9 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;
11) Pada IKK 10 diharapkan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
12) Pada IKK 11 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.;
13) Masukan dari Dit. Prasarana agar Balai menindaklnjuti hasil TQI sesuai dengan Surat Direktur Prasarana.

f. Penyampaian BTP Kelas I Jakarta

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TRIWULAN I		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	DED Persinyalan Telekomunikasi Lintas Rangkasbitung Labuan dan Penanganan Perlintasan Sebidang	1.900.000.000	0	0,64	0,65	**101,56%**
2	SK 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 2 Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,52	- Reviu DED DDT Lintas Bekasi - Cikarang - Penyusunan dokumen perencanaan - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	4.231.191.000	255.619.206	91	89,07	**97,88%**
		IKK 3 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	99,03	DED Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap 2	1.400.000.000	0	99,03	99,03	**100%**
3	SK 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	38,06	Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1.253.087.000	254.103.572	532.270.905 11,71% 3.899.737 11,84% **23,55%**	544.855.878 11,99% 3.536.488 11,32% *23,31%	*98,87%
		IKK 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang Kelas I Jakarta	%	20	- Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang 4 Lintas Pelayanan - Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	587.965.000	52.330.300	-	-	-
4	SK 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)) - Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi (Satpel) - Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	411.715.747.000	1.713.568.855	100	100	**100%**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TRIWULAN I		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	SK 5Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	81,30	- Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta - Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian - Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	95.604.000	3.537.000	-	-	-
		IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	14,20	Penyusunan SPIP dan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	224.435.000	31.882.354	-	-	-
		IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	92,35	- Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Tim SAK - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	38.132.524.000	11.914.990.905	23,09	-	-
		IKK 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Sertifikasi dan Pengamanan Aset Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta - Tim SABMN	1.060.525.000	11.898.090	25,00% 2.000.000.000	530,77% 42.461.986.684	**2123,08%**
		IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	87,50	Pengelola Arsip	255.391.000	52.043.200	-	-	-

1) Diharapkan untuk melakukan monitoring e-sakip reviu, mengecek pengisian renaksi, menyesuaikan format rekomendasi dan evaluasi, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, serta pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait kegiatan RPJMN;
2) Pada IKK 1 diharapkan mengecek data yang digunakan bersifat kumulatif;
3) Pada IKK 2 data TQI sama dengan Direktorat Prasarana;

4) Pada IKK 3 data Fasop sama dengan Direktorat Prasarana;
5) Pada IKK 4 diharapkan berkoordinasi dengan Ditlalin terkait data angkutan.
6) Pada IKK 5 diharapkan mengecek data gangguan operasional sama dengan data gangguan operasional pada Manajemen Resiko;
7) Pada IKK 6 sudah mencapai target;
8) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
9) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan penanganan apa yang sudah dilaksanakan;
10) Pada IKK 9 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;
11) Pada IKK 10 diharapkan mengkaji capaian yang bersifat anomali yaitu rendah atau lebih besar dari 110% terkait perencanaanya, bisa diusulkan revisi PK;
12) Pada IKK 11 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.

g. Penyampaian BTP Kelas I Bandung

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN IKK	TARGET PK 2026	TARGET KINERJA TRIWULAN				REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI KINERJA TRIWULAN				CAPAIAN THP TARGET PK
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
SK 1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 1**	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Rasio	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.53	-	-	-	98%	-	-	-	96%
SK 2. Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 2**	Kondisi Jalur KA sesuai standar TQI Kategori 1 dan 2 di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	88.38	86.70	87.00	88.38	88.38	86.51	-	-	-	100%	-	-	-	98%
	IKK 3	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	-	-	-	100%	-	-	-	100%
SK 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 4**	Presentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	37	24.19	29.09	33.99	37	23.20	-	-	-	96%	-	-	-	63%
	IKK 5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	17.86				17.86		-	-	-		-	-	-	
SK 4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 6**	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100%	-	-	-	100%
SK 5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 7**	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81.45				80.50						-	-	-	
	IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	13.85				13.85						-	-	-	
	IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	89.550	22.390				0	-	-	-	0	-	-	-	
	IKK 10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100	100	100	100	100	0								
	IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	76.90				76.90						-	-	-	

1) Diharapkan untuk melakukan monitoring e-sakip reviu, mengecek pengisian renaksi, menyesuaikan format rekomendasi dan evaluasi, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, serta pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait kegiatan RPJMN;
2) Pada IKK 1 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP;
3) Pada IKK 2 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP;

4) Pada IKK 3 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP;
5) Pada IKK 4 diharapkan berkoordinasi dengan Ditlalin terkait data angkutan;
6) Pada IKK 5 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP;
7) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
8) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan penanganan apa yang sudah dilaksanakan;
9) Pada IKK 9 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;
10) Pada IKK 10 diharapkan mengkaji capaian yang bersifat anomali yaitu rendah atau lebih besar dari 110% terkait perencanaanya, bisa diusulkan revisi PK;
11) Pada IKK 11 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi;
12) Masukan dari Dit. Keselamatan diharapkan mengecek data perhitungan TQI dan menindaklnjuti hasil TQI sesuai dengan Surat Direktur Prasarana;
13) Terkait data angkutan diharapkan Balai melaporkan data angkutan ke Dit. LLAKA.

h. Penyampaian BTP Kelas I Medan
1) Diharapkan segera melakukan pengisian input e-performance karena seluruh data Triwulan I 2026 belum terisi;
2) Selain itu diharapkan untuk mengecek renaksi, mengecek tindak lanjut evaluasi SAKIP dilengkapi dengan data dukung, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait kegiatan RPJMN.
3) Pada IKK 1 diharapkan dalam perhitungan rasio konektivitas mengurangi Lhoukeumawe menjadi 0,04
4) Pada IKK 2 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP
5) Pada IKK 3 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP.
6) Pada IKK 4 diharapkan berkoordinasi dengan Ditlalin terkait data angkutan.

7) Pada IKK 5 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP.
8) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
9) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan penanganan apa yang sudah dilaksanakan;
10) Pada IKK 9 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan.
11) Pada IKK 10 diharapkan mengkaji capaian yang bersifat anomali yaitu rendah atau lebih besar dari 110% terkait perencanaanya, bisa diusulkan revisi PK.
12) Pada IKK 11 diharapkan melaporkan terdapat realisasi PNBP;
13) Pada IKK 12 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi
14) Diharapkan mengecek data hasil TQI yang turun sebesar 3% apakah termasuk dampak bencana dan menindaklnjuti hasil TQI sesuai dengan Surat Direktur Prasarana.
15) Terkait Program Strategis Medan – Binjai agar dilaporkan.

i. Penyampaian BTP Kelas I Semarang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
					TW I	TW I	TW I
1	SKT1. Meningkatnya KONEKTIVITAS prasarana di wilayah BTP Semarang	IKK T1. Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	RASIO	0,750	0,188	0,148	78,72%
2	SKT2. Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T2. Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	99,00	98,995	99,195	100,20%
		IKK T3. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	87,50	87,50	87,50	100%
3	SK T3. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T4. Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja BTP Semarang	%	39,052	24,410	23,787	97,46%
		IKK T5. Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja BTP Semarang					
		IKK T6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di wilayah kerja BTP Semarang	%	20,588 (27x)	-	14x	-
4	SK T4.Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T7. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Semarang	%	100	100	100	100%
5	SK T5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T8. Nilai AKIP BTP Semarang	NILAI	82,150	-	-	-
		IKK T9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	NILAI	15	-	14	93,34%
		IKK T10. Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	NILAI	81	35	24,073	68,78%
		IKK T11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	95	185,46	195,22%
		Ikk T12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang	NILAI	74,04	-	-	-
							104,22%

1) Diharapkan segera input e-performance, mengecek renaksi, mengecek tindak lanjut evaluasi SAKIP dilengkapi dengan data dukung, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait RPJMN;
2) Pada IKK 1 diharapkan mengecek perhitungan rasio konektivitas menggunakan

pembanding target perka per triwulan;

3) Pada IKK 2 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP;
4) Pada IKK 3 diharapkan melakukan pengecekan perhitungan formulasi sesuai dengan KP;
5) Pada IKK 4 diharapkan melaporkan terkait kendala angkutan barang yang tidak jalan pada saat angkutan lebaran di laporan;
6) Pada IKK 5 BTP Semarang belum mentargetkan Nilai AKIP di triwulan I 2026. Hasil Penilaian AKIP 2025, BTP Semarang mendapatkan nilai 82.
7) Terdapat 4 rekomendasi dari penilaian AKIP dengan 2 sudah tuntas dan 2 masih proses tindaklanjut.
8) Dari evaluasi penilaian AKIP di 2025, ada komponen dapat ditingkatkan nilainya di tahun 2026, yaitu Poin 1.3 dapat dipenuhi 100%(BB) dikarenakan hasil capaian kinerja di tahun 2025 masuk kategori on the right track untuk seluruh IKK.
9) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun yang sudah dibuat;
10) Pada IKK 9 diharapkan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan;
11) Pada IKK 10 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan.
12) Pada IKK 11 Diharapkan mengkaji capaian yang bersifat anomali yaitu rendah atau lebih besar dari 110% terkait perencanaanya, bisa diusulkan revisi nominal pada PK;
13) Pada IKK 12 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.
14) Agar melaporkan kegiatan yang mendukung RPJMN pada Laporan Monitoring.

j. Penyampaian Balai Perawatan Perkeretaapian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK 2026				
			TARGET PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
SK 1. Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkerelaapian	IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	97,25	93,70	93,70	93,70	97,25
SK 2. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 2. Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	IKK 3. Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
SK 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	IKK 4. Nilai AKIP Balai Perawalan Perkeretaapian	Nilai	81,40	-	-	-	81,40
	IKK 5. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	-	-	-	15,00
	IKK 6. Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83	12,01	37,63	63,01	84,83
	IKK 7. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00	0,11	4,29	99,81	100,00
	IKK 8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23	-	-	-	78,23

1) Diharapkan segera input e-performance, mengecek renaksi, mengecek tindak lanjut evaluasi SAKIP dilengkapi dengan data dukung, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait RPJMN;
2) Pada IKK 1 disarankan saat survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan PPTB, jika ada pertanyaan yang tidak terakomodir di aplikasi bisa diusulkan ke PPTB;
3) Pada IKK 4 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
4) Pada IKK 5 diharapkan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan;
5) Pada IKK 6 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;
6) Pada IKK 7 diharapkan menguraikan sumber PNBP dalam laporan;
7) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi;

k. Penyampaian BPKA Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulsel	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2026	Target					Realisasi	Capaian Kinerja TW I	Capaian kinerja Tahunan
				2026	TW I	TW II	TW III	TW IV	Triwulan I		
SK 1 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api si Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK1 Kondisi Jalur KA yang Sesuai TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99	100,00	100,00%
	IKK 2 Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00%
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	3,30	3,31	3.31	3.31	3.31	3.31	3,86	116,62	116,62%
	IKK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	19,12	37,10	22,81	28,24	33,07	37,10	23,65	103,68	63,75%
	IKK5 Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	%	92,88	96,45	96.45	96.45	96.45	96,45	65,23	67,63	67,63%
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK6 Tingkat Keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00%
SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK7 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	80,50	80,60	-	-	-	80,60	-	-	-
	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	10,25	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
	KK9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	81,26	81,50	27,00	30,00	38,00	81,50	0	-	0,00%
	IKK10 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	17,34	44,24	70,95	100,00	35,03	202,02	35,03%
	IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	Nilai	69,90	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-

1) Diharapkan pengecekan upload data pada aplikasi e-sakip reviu, mengecek monitoring renaksi, mengecek tindak lanjut evaluasi SAKIP dilengkapi dengan data dukung, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 terkait kegiatan yang masuk RPJMN;
2) Pada IKK 1 diharapkan menguraikan dalam laporan terkait formulasi perhitungan TQI yang digunakan;
3) Pada IKK 2 terdapat peningkatan persinyalan tahun ini diharakan menganalisis keberhasilan dan kegagalan;
4) Pada IKK 3 disarankan saat survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan PPTB, jika ada pertanyaan yang tidak terakomodir di aplikasi bisa diusulkan ke PPTB;
5) Pada IKK 4 diharapkan menggunakan formulasi target pembaginya yang ditetapkan pada renstra yang telah sesuai dengan RPJMN;
6) Pada IKK 5 diharapkan menguraikan dalam laporan akibat tidak terpenuhinya OTP;
7) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi turun;
8) Pada IKK 8 diharapkan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan;
9) Pada IKK 9 diharapkan masing – masing satker segera input capaian output, jika terdapat kendala perlu dilaporkan;
10) Pada IKK 11 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi;

11) Diharapkan berkoordinasi lebih lanjut terkait data TQI dengan Direktorat Prasarana dikarenakan terdapaat perbedaan formulasi perhitungan TQI.

l. Penyampaian BTP Kelas II Padang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET		REALISASI TW I	CAPAIAN	
				TAHUN 2026	TW I		TAHUN 2026	TW I
1	Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0,36	0,36	0,39	107,47	107,47
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87,34	87,34	88,33	101,13	101,13
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	37,81	23,08	22,42	59,30	97,14
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	22,00	-	-	-	-
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	82,50	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	12,00	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	83,52	31,00	-	-	-
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100,00	100,00	63,99	63,99	63,99
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	73,00	-	-	-	-

1) Terkait tindak lanjut evaluasi AKIP ada koreksi dari tim Setditjen Perkeretaapian sehingga yang semula 10 Tuntas dan 1 Proses berubah menjadi 8 Tuntas dan 3 Proses. Agar dilakukan pengecekan ulang untuk
2) Capaian PNBP 60% padahal dari data yang
3) Penumpang sudah 100%, apakah ada upaya untuk mengeluarkan PSO apabila program tersebut tidak dilaksanakan? Progres terakhir sudah pembahasan bersama DIVRE
4) Agar disinkronkan analisis keberhasilan dan tindak lanjutnya
5) Angkutan penumpang agar disinkornkan dengan data Dit. LLAKA
6) Sampai Maret 2026 tidak ada gangguan perjalanan KA
7) Terkait Data Prasarana untuk Triwulan IV mengalami peningkatan data TQI sebesar 0,99%, namun masih terdapat 12,4km jalur yang *stuck* di kategori 3 dan 4, kemungkinan dikarenakan tumpahan dari semen angkutan barang. Diharapkan mengenai hal tersebut dapat disusun tindak lanjut penanganannya.
8) Terkait rasio wilayah sudah 0,5 mengapa
9) Diharapkan agar Balai/Direktorat agar melakukan pengecekan Nilai IKPA (Kualitas Pelaksanaan Anggaran) di aplikasi My Interest.
10) Terkait data angkutan seharusnya data pada H+15 seharusnya sudah final data angkutan dari Divre, diharapkan agar lebih intens kembali koordinasi dengan Divre.
11) Terkait Diharapkan untuk melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi

hasil evaluasi.

m. Penyampaian BPKAR Sumatera Selatan

NO	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN			
						I	II	III	IV
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKK.1	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	37,38	22,80	27,51	32,38	37,38
		IKK.2	Persentase Kedatangan Dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	%	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86
		IKK.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75
2	Meningkatnya Kehandalan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.4	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan BPKAR Sumatera Selatan	IKK.5	Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	81	0,00	0,00	0,00	81,00
		IKK.6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	16	0,00	0,00	0,00	16,00
		IKK.7	Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	90,7	18,14	36,28	54,42	90,70
		IKK.8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	%	100	20,17	39,20	60,47	100,00
		IKK.9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86

1) Diharapkan segera melakukan e-sakip reviu, mengecek monitoring renaksi, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada eselon 1 pada kegiatan yang masuk RPJMN;
2) Evaluasi TL LRT Sumsel sudah dimuat pada SILAKI, agar proses lanjut Berita Acaranya;
3) Untuk menjadi perhatian SK SAKIP agar dibuat pada awal Tahun;
4) Agar diperhatikan kembali perhitungan matematika untuk rumus capaian kerjanya;
5) *Benchmarking* agar dicek kembali data Nasionalnya agar sesuai;
6) Pada IKK 1 diharapkan mengecek kembali formulasi perhitungannya sesuai dengan KP;
7) Pada IKK 2 diharapkan mengecek kembali formulasi perhitungannya sesuai dengan KP;
8) Pada IKK 3 disarankan saat survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi yang baru sesuai arahan PPTB, jika ada pertanyaan yang tidak terakomodir di aplikasi bisa diusulkan ke PPTB
9) Pada IKK 4 diharapkan mengecek kembali formulasi perhitungannya sesuai dengan KP;
10) Pada IKK 5 diharapkan mengecek kembali formulasi perhitungannya sesuai dengan KP;
11) Pada IKK 6 diharapkan melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi nilai – nilai yang bisa ditingkatkan dan nilai yang berpotensi

turun;

12) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan hal – hal yang telah dilaksanakan;
13) Pada IKK 8 disarankan pembagian renaksi 40 di TW I dan TW II;
14) Pada IKK 9 mengupdate realisasi PNBP di sistem;
15) Pada IKK 10 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.

n. Penyampaian BTP Kelas II Palembang

No	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja Kegiatan 2026		Satuan	Target PK	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	0,71	0,71	100%
2	SK2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK 2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	97,11	97,11	94,80	97,62%
		IKK 3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	36,14	33,73	34,94	103,59%
3	SK3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	37,66	22,94	24,09	105,01%
		IKK 5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,00	-	-	-
4	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,00	100,00	90,91	90,91%
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,00	-	-	-
		IKK 8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,90	-	-	-
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	15,00	-	-	-
		IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	73,15	-	-	-

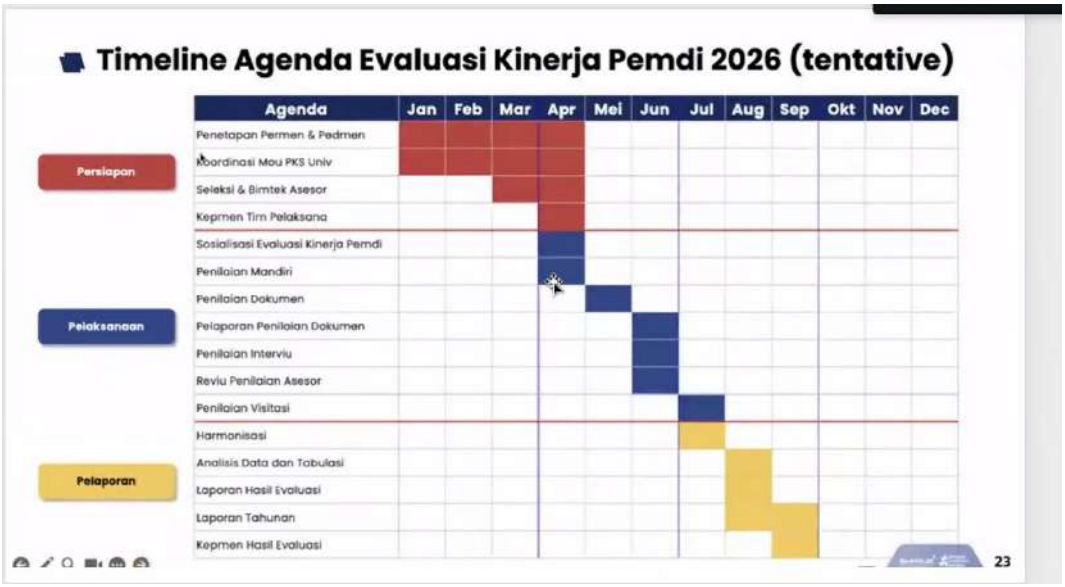
1) Pada IKK 1 disarankan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA terkait perjalanan KA di wilayah BTP Palembang yang tidak jalan;
2) Pada IKK 3 terdapat penmabahan 1 pekerjaan, diharapkan berkoordinasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3) Pada IKK 6 diharapkan melaporkan kejadian anjlokan yang telah terjadi pada Triwulan 1. Terkait data kecelakaan anjlokan sudah disebutkan penyebab kejadian kecelakaan dan sudah disampaikan kepada Balai.
4) Pada IKK 7 diharapkan melaporkan hal – hal yang telah dilaksanakan;
5) Pada IKK 8 disarankan pembagian renaksi 40 di TW I dan TW II;
6) Pada IKK 9 mengupdate realisasi PNBP di sistem;
7) Pada IKK 10 diharapkan melaporkan progress tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi.
8) Terkait SAKIP keterangannya agar diperluas tidak hanya seputar penilaian saja
9) Untuk perawatan terbatas di tanjung karang agar diperhatikan kembali *window time* nya, apakah perlu disesuaikan kembali atau tidak.
10) Untuk fasop yang dihitung adalah saham-saham yang memenuhi persyaratan, untuk Lahat dan Merapi masih ada dokumen yang tidak ada ihousenya
11) Untuk pengukuran TQI biasanya di Triwulan III mengalami peningkatan dan

biasanya di Triwulan IV

12) Diharapkan mengecek kembali pengisian e-sakip reviu, mengecek monitoring renaksi belum lengkap, mengecek tindak lanjut evaluasi, mengecek Berita Acara yang akan dikirimkan secara paralel, pada triwulan berikutnya fokus pada hasil capaian yang anomali dan memberikan dukungan kepada Eselon 1 pada kegiatan yang termasuk ke dalam RPJMN.

o. Pembahasan Setditjen Perkeretaapian

1) Pada IKK 1 Legislasi masih dalam progres.
2) Pada IKK 2 masih sesuai dengan *baseline* yaitu 1 dari 16 unit kerja. Untuk capaian akan dimuat pada Triwulan IV. Progres saat ini sudah diusulkan surat kepada 9 unit kerja terkait himbauan untuk pengisian LKE dan data dukung. Akan dilakukan rapat pembahasan terkait *best practice* sebagai referensi dan mengundang Narasumber dari KemenpanRB. Untuk rencana aksi RB masih berproses. Untuk evaluasi akan dilakukan pada April 2026.
3) Pada IKK 3 untuk kualitas ASN masih sama dengan *baseline* sebesar 86,09. Untuk Penilaian akan terealisasi pada Triwulan IV 2026. Progres saat ini sedang menghimpun data-data terkait 4 komponen Nilai Kualitas ASN. Pegawai yang telah mengikuti kompetensi tertentu akan dihitung. Terkait DEK menggunakan data tahun lalu. Penilaian Tahun 2026 ini menggunakan penilaian Tahun 2025. Untuk komponen tugas belajar disarankan sebaiknya penilaian dilakukan setiap Semester. Selain itu agar menjadi perhatian untuk pegawai yang belum penilaian untuk ditindaklanjut, namun diinformasikan hal ini dikarenakan SIK pegawai.
4) Pada IKK 4 ditargetkan hasil pada Triwulan IV dengan nilai 1,70. Saat ini Pusdatin masih dalam tahap persiapan untuk Penilaian Internal, saat ini sudah didapatkan rancangan kertas kerja sejumlah 20 Indikator. *Timeline* Agenda Evaluasi Kinerja Pemdi 2026 sebagai berikut:



5) Pada IKK 5 Presentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja sama dan Bantuan Hukum belum ada tanggapan dari tim terkait.
6) Pada IKK 10 NIKA saat ini 65,82 karena belum ada nilai capaian *outputnya.* Untuk penyerapan anggaran terhadap RPD sudah 100%. Untuk NKA proses berjalan.

   Untuk realisasi anggaran pada aplikasi MyInterest dan SAKTI terdapat perbedaan data, Tim Pelaksana Anggaran menyarankan untuk menggunakan data dari Myinterest.
7) Pada IKK 11 PNBP untuk realisasi satker kantor pusat sebesar 170,1 juta atau 1,44%.
8) Pada IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian

   Saat ini baru 11 pegawai yang mengisi survey. Beberapa akun belanja ada yang diblokir sehingga tim Rumah Tangga belum melakukan kegiatan lainnya. Tersisa anggaran 1M terkait Sewa Photocopy dan akan segera dilaksanakan.
9) Pada IKK Peraturan Perundang-undangan

   Dari baseline 7 bertambah 1 menjadi 8. Saat ini belum ada KM yang terbit di Triwulan I 2026. Sedang dilakukan followup terhadap regulasi yang masih diajukan pada Tahun sebelumnya (Tahun 2025)
10) Pada IKK Keterbukaan Informasi Publik

    Kondisi saat ini SK PPID sudah terbit untuk selanjutnya disusun kembali turunannya pada tingkat Eselon I Ditjen Perkeretaapian. Selain itu sudah disusun juga Laporan Tahunan PPID. Akan dilakukan *roadshow* dan persiapan penilaian AKIP.

D. KESIMPULAN

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan upload dokumen terbaru secara berkala sesuai fitur pada aplikasi diantaranya pohon kinerja dan cascading, tindak lanjut evaluasi AKIP internal, Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja), Laporan Monitoring Rencana Aksi (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan, Monitoring Rencana Aksi), Laporan Kinerja, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan;
   b. Pengisian aplikasi SAKTI (terkoneksi dengan aplikasi Monev Kemenkeu) meliputi partisipasi satuan kerja dan monitoring capaian output serta update rencana penarikan dana pada kesempatan pertama;
   c. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas mulai tanggal 13 April 2026 meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian output, status pelaksanaan, progress pelaksanaan, permasalahan dan isian lainnya untuk periode Triwulan I Tahun 2026 paling lambat tanggal 30 April 2026;
   d. Pengisian aplikasi e-Performance secara lengkap dan tepat waktu setiap bulan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja; dan
   e. Pengisian fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya termasuk upload dokumentasi laporan kinerja triwulan/tahunan.
2. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 sesuai outline, substansi, dan dokumen pendukung, dengan mengacu pada:
   a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
   c. Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
   d. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
   e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
   f. Tindak lanjut catatan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja unit kerja

periode sebelumnya; dan

g. Tindak lanjut hasil rapat pembahasan, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pelaporan kinerja, diantaranya:
    1) Mengecek kembali penggunaan manual indikator kinerja (rumusan perhitungan, satuan, lainnya) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja (Sekretariat/Direktorat/Balai), diantaranya data realisasi angkutan kereta api (penumpang, barang), realisasi perjalanan kereta api, *Track Quality Index (TQI*), fasilitas operasi handal (elektrik, mekanik), data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan guna rekomendasi periode berikutnya), data gangguan keamanan operasional kereta api pada perlintasan sebidang, data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya;
    3) Menyusun analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dengan lebih spesifik dan tidak normatif sesuai realisasi kegiatan pendukung dilengkapi informasi crosscutting (keterhubungan sektor/unit kerja lain), dan realisasi penanganan risiko sesuai dukungan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, serta inovasi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja;
    4) Menyusun rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya yang mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/jabatan/ pegawai;
    5) Menyampaikan dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, progres program prioritas nasional/proyek strategis nasional, dan dukungan lainnya sesuai bidang tugas;
    6) Melengkapi dan menyesuaikan format informasi perubahan budaya kinerja (semula-menjadi, keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja);
    7) Melengkapi uraian perhitungan matematis masing-masing indikator kinerja untuk mengukur nilai realisasi kinerja;
    8) Melengkapi dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja serta dilengkapi dengan penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja secara berjenjang; dan

9) Melengkapi data dukung capaian kinerja yang valid dengan persetujuan pejabat yang menjadi penanggung jawab.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian serta diupload pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian paling lambat tanggal 25 April 2026.

3. Memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 berupa data dukung, analisa lengkap dan rekomendasi periode berikutnya sesuai bidang tugas;
4. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bogor,
Pada tanggal 10 April 2026

Notulen

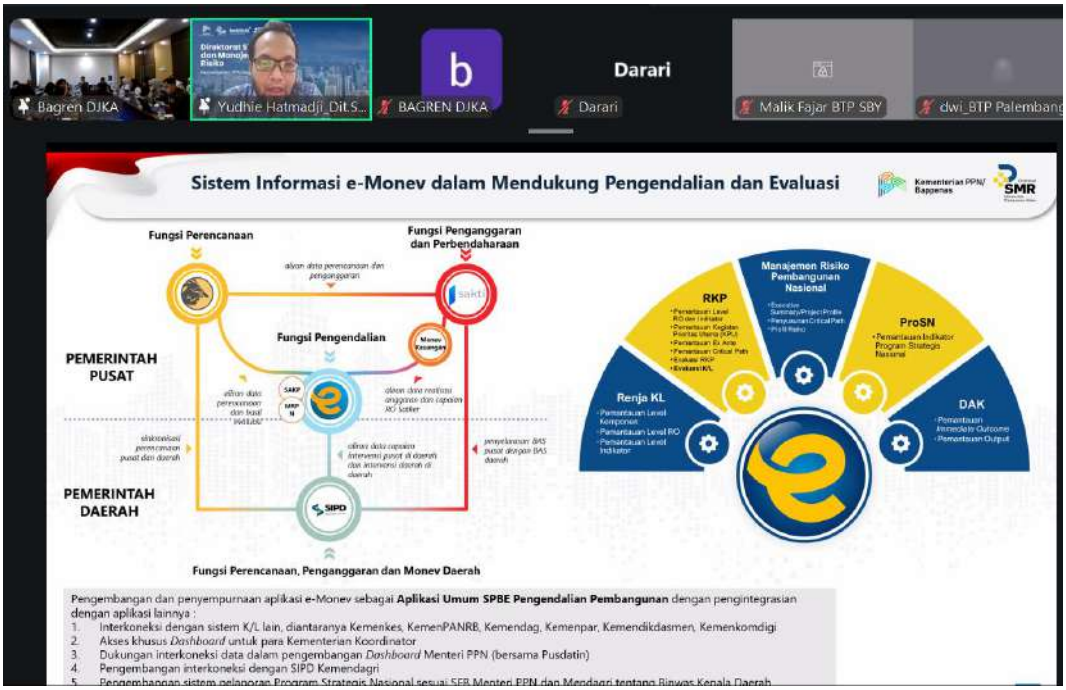
Tim Evaluasi dan Pelaporan

DOKUMENTASI









Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi e-Monev sebagai **Aplikasi Umum SPBE Pengendalian Pembangunan** dengan pengintegrasian dengan aplikasi lainnya :

1. Interkoneksi dengan sistem K/L lain, diantaranya Kemenkes, KemenPANRB, Kemendag, Kemenpar, Kemendikdasmen, Kemenkomdigi
2. Akses khusus *Dashboard* untuk para Kementerian Koordinator
3. Dukungan interkoneksi data dalam pengembangan *Dashboard* Menteri PPN (bersama Pusdatin)
4. Pengembangan interkoneksi dengan SIPD Kemendagri
5. Pengembangan sistem pelaporan Program Strategis Nasional sesuai SEB Menteri PPN dan Mendagri tentang Binwas Kepala Daerah

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 0331 / KI / IV / 2026

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal : Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 24 April 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa diperlukan monitoring capaian kinerja secara berkala terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dilaporkan hasil monitoring capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,11% mencakup 7 Sasaran Kegiatan serta 13 Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan rencana aksi periode Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I (%)
SK1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	21,21	100,00
SK2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IKK2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	100,00
	IKK3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	86,09	86,72	100,73

SK3 Tersedianya...

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I (%)
SK3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	IKK4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	- (Target di Triwulan IV)
SK4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IKK5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	90,91	94,74	104,21
	IKK6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	- (Target di Triwulan IV)
SK5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	IKK7 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	- (Target di Triwulan IV)
	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	- (Target di Triwulan IV)
	IKK9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03	95,02	104,38
SK6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	IKK10 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	50,00	45,41	90,82
	IKK11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	1,00	1,44	144,00* (Maks capaian 110%)
SK7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	- (Target di Triwulan IV)
	IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,84	98,71
Rata-Rata Capaian Kinerja					**101,11**

Berdasarkan...

Berdasarkan Tabel diperoleh bahwa indikator kinerja yang ditargetkan pada periode Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan rencana aksi Perjanjian Kinerja sejumlah pada 8 dari 13 indikator kinerja kegiatan, dimana 5 indikator kinerja lainnya ditargetkan pencapaiannya pada periode Triwulan IV Tahun 2026 (sehubungan dengan waktu penyelesaian penilaian). Hal lain diperoleh juga bahwa 7 dari 8 indikator kinerja kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2026 memperoleh capaian kinerja yang memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90-110%), sedangkan 1 indikator kinerja kegiatan capaiannya anomali (capaian di atas 110%) sehingga perlu dipertimbangkan dalam penetapan target pada periode selanjutnya.

Selain itu dilaporkan pula terkait realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebesar Rp34.772.701.552,00 atau 20,02% dari pagu Rp173.727.572.000,00, dimana nilai tersebut masih di atas rata-rata realisasi anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sedangkan untuk perolehan PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp287.615.239,00 dimana masih sangat rendah dibandingkan target yang ditetapkan pada DIPA Tahun 2026 sebesar Rp19.940.000.000,00 (persentase 1,44%). Untuk itu diperlukan upaya percepatan perolehan PNBP untuk dapat mencapai target pada akhir Tahun 2026.

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2026. Mohon perkenan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 0155/K2/IV/2026

Yth	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Hal	:	Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal	:	24 April 2026

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/2/13/K1/DJKA tanggal 15 April 2026 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dengan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Capaian rata-rata kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 92,09%.
2. Alokasi anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026 yang dapat dikelola adalah sebesar Rp95.764.534.000 dengan realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp10.511.666.219 dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 10,98%.

Atas perkenan dan arahan lanjut dari Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian, diucapkan terima kasih.

Arif Anwar
NIP. 197602222006041001

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor :154/K3/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian
Hal : Dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 24 April 2026

Sebagai implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/2/13/K1/DJKA/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2026 serta tindaklanjut pembahasan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode triwulan I tahun 2026, bersama ini disampaikan, capaian kinerja periode triwulan I tahun 2026 dengan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja di Triwulan I (Januari s.d. Maret 2026), terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja tercapai dengan baik *On the Right* capaian kinerja (90% s.d 110%) dengan rata-rata capaian kinerja 100,13%;
2. 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran dengan realisasi kinerja dibawah target triwulan I (tidak *on the right track*) dengan capaian kinerja 87,44%.
3. 3 (tiga) indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 belum bisa dilakukan pengukuran kinerja, dikarenakan masih dalam tahap penilaian mandiri/*self asessment*;
4. Sebagai upaya untuk peningkatan kinerja telah ditetapkan rekomendasi peningkatan kinerja pada Monitoring Capaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode Triwulan I tahun 2026, yang memuat penjelasan secara detail capaian kinerja Direktorat Prasarana Perekeretaapian.

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian, diucapkan terima kasih.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 62/K4/IV/2026

Yth	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian
Hal	:	Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian
Tanggal	:	25 April 2026

Merujuk Surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/2/13/K1/DJKA/2026 tanggal 15 April 2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja periode Triwulan I Tahun 2026, terlampir disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Batara
NIP. 198108102005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 72/K5/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 24 April 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor: PR.205/2/8/K1/DJKA/2026 tanggal 1 April 2026 perihal undangan rapat Pembahasan capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian perlu menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut terlampir disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Jumardi
NIP. 196903061998031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).